

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014***

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

Daftar Isi

**Halaman/
Page**

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statements

**Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014**

For the Years Ended

December 31, 2016, 2015 and 2014

Laporan Posisi Keuangan

**Consolidated Statements
of Financial Position**

Konsolidasian.....

1

Laporan Laba Rugi Komprehensif

**Consolidated Statements of
Comprehensive Income**

Konsolidasian

4

Laporan Perubahan Ekuitas

**Consolidated Statements of
Changes in Equity**

Konsolidasian

5

Laporan Arus Kas

**Consolidated Statements
of Cash Flows**

Konsolidasian.....

6

Catatan atas Laporan Keuangan

**Notes to Consolidated Financial
Statements**

Konsolidasian.....

7



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("GRUP")
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("GROUP")
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Alamat Kantor	Orias Petrus Moedak Jl. Tanjung Perak Timur No. 610 Surabaya	We the undersigned: Name Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas Nomor Telepon Jabatan	Jl. Merapi B 2/3RT 01 RW 11 Cibubur Ciracas +62-31-3298631 Direktur Utama / President Director	Domicile as stated in ID Card Phone Number Position
2. Nama Alamat Kantor	U Saefudin Noer Jl Tanjung Perak Timur No. 610 Surabaya	Name Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas Nomor Telepon Jabatan	Puri Sriwedari Blok S No1-2 Kelurahan Harjamukti - Depok +62-31-3298631 Direktur Keuangan / Director of Finance	Domicile as stated in ID Card Phone Number Position

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup.
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

State that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements.
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements are complete and correct.
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts.
4. We are responsible for the Group's internal control system.

This Statement letter is made truthfully.



Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya,
28 Februari / February 28, 2017



Orias Petrus Moedak
Direktur Utama / President Director

U Saefudin Noer
Direktur Keuangan / Director of Finance



KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya - 60165
Jawa Timur - INDONESIA

P : +62 31 3298631 - 37

F : +62 31 3295204

e : kantorpusat@pelindo.co.id

w : www.pelindo.co.id

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Nomor/Number: R/033.AGA/epw.2/2017

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Jl. Mayjen Sungkono
Komplek Darmo Park I Blok III B 17-19
Surabaya 60256 Indonesia

T +62 31568 0695 +62 31568 0696
F +62 31567 7039

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti diungkapkan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anak telah melakukan reklasifikasi beberapa akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015 dan 2014 untuk disesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 2016. Kami telah mengaudit reklasifikasi tersebut dan opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internalnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 54 to the consolidated financial statements, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries have reclassified certain accounts in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2015 and 2014 to be conforming with the 2016 financial statements. We have audited these reclassifications and our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matters

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and its internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No.R/031.AAT/epw.2/2017 dan No.R/032.AAT/epw.2/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Public Accountants Professional Standards by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The reports of compliance to laws and regulations and internal controls are submitted separately to the management in our reports No. R/031.AAT/epw.2/2017 and No. R/032.AAT/epw.2/2017 on February 28, 2017, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 28 Februari 2017/ February 28, 2017

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4,48	1,820,904,461	2,618,040,351	4,247,026,898	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5,48	33,213,107	42,244,106	20,523,000	<i>Restricted Cash</i>
Piutang Usaha					<i>Trade Receivables</i>
Pihak Berelasi	6,7,48	24,671,000	47,745,236	46,268,899	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	6,48	411,540,871	341,808,878	341,885,809	<i>Third Parties</i>
Piutang Lain-lain					<i>Other Receivables</i>
Pihak Berelasi	7,8,48	191,968,284	19,732,086	290,323,241	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga	8,48	34,396,494	19,360,685	8,668,976	<i>Third Parties</i>
Persediaan	9	25,152,456	24,934,487	15,598,999	<i>Inventories</i>
Uang Muka Kontraktor	10	1,176,361,747	1,160,713,389	1,290,772,339	<i>Contractor Advances</i>
Biaya Dibayar di Muka	11	71,536,742	68,797,859	35,367,609	<i>Prepaid Expenses</i>
Pajak Dibayar di Muka	20a	130,469,123	102,895,964	112,917,147	<i>Prepaid Taxes</i>
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	12	91,097,663	73,235,154	89,515,997	<i>Accrued Revenues</i>
Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual		955,584	1,382,834	108,981	<i>Fixed Assets held for Sale</i>
Total Aset Lancar		4,012,267,532	4,520,891,029	6,498,977,894	<i>Total Current Assets</i>
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	1,101,729,177	1,025,955,568	584,633,681	<i>Investments in Associates</i>
Properti Investasi	14	55,178,190	58,967,386	55,050,608	<i>Investment Properties</i>
Aset Tetap	15	9,770,759,518	7,436,153,760	5,630,820,724	<i>Fixed Assets</i>
Piutang Lain-lain	16,48	7,000,000	10,500,000	14,000,000	<i>Other Receivables</i>
Aset Takberwujud	17	6,487,110,116	5,378,941,272	3,682,654,638	<i>Intangible Assets</i>
Estimasi Tagihan Pajak	20b	622,146,461	471,449,499	126,169,112	<i>Estimated Claims for Tax Refund</i>
Aset Pajak Tangguhan	20d	115,098,327	58,910,201	20,558,825	<i>Deferred Tax Asset</i>
Goodwill	17	1,143,301	1,143,301	1,143,301	<i>Goodwill</i>
Aset Tidak Lancar Lainnya	18	9,119,642	7,695,421	7,499,577	<i>Other Non Current Assets</i>
Total Aset Tidak Lancar		18,169,284,732	14,449,716,408	10,122,530,466	<i>Total Non Current Assets</i>
TOTAL ASET		22,181,552,264	18,970,607,437	16,621,508,360	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	7,19,48	213,063,833	147,805,339	156,044,104	Trade Payables
Pihak Ketiga	19,48	670,225,860	919,621,509	518,250,098	Related Parties
Utang Pajak	20c	118,924,652	187,094,417	196,230,888	Third Parties
Utang Bank	21,48	671,800,000	689,750,000	497,600,000	Tax Payables
Uang Persekutuan/Panjar	24,48	48,180,532	33,236,816	29,586,964	Bank Loans
Uang Titipan	25,48	80,309,518	92,227,491	70,214,140	Advances from Customer
Utang Dana Pensiun	26	3,891,187	3,155,865	2,710,584	Fund Retained
Pendapatan Diterima di Muka	27	76,663,034	72,402,677	60,345,738	Pension Fund Payable
Beban Akrual	28,48	833,461,821	713,178,003	626,948,452	Unearned Revenue
Utang Lancar Lain-lain	29,48	2,265,071	4,267,956	10,092,878	Accrued Expenses
Bagian Lancar Atas					Other Current Payable
Liabilitas Jangka Panjang :					Current Maturity of Long - Term Liabilities :
Utang Bank	22	325,801,155	254,042,959	156,529,915	Bank Loans
Imbalan Kerja	32	36,242,044	44,883,597	52,007,912	Employee Benefits
Total Liabilitas Jangka Pendek		3,080,828,707	3,161,666,629	2,376,561,673	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas Pajak Tangguhan	20d	57,019,106	120,578,897	108,139,854	NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang					Deferred Tax Liabilities
Utang Bank	22	2,177,131,455	714,356,404	450,979,589	Long - Term Liabilities
Surat Berharga Yang Diterbitkan	23	6,645,931,711	6,829,569,938	6,144,306,480	Bank Loans
Pendapatan Diterima di Muka					Securities Issued
Jangka Panjang	30	321,733,688	239,238,758	187,279,090	Long Term
Uang Jaminan	31	5,581,612	2,511,075	1,851,341	Unearned Revenue
Provisi Jangka Panjang	50	-	209,799	842,000	Guaranteed Deposit Received
Liabilitas Imbalan Kerja	32	247,846,386	197,105,853	215,189,320	Long - Term Provisions
Total Liabilitas Jangka Panjang		9,455,243,958	8,103,570,724	7,108,587,675	Employee Benefits Liabilities
TOTAL LIABILITAS		12,536,072,665	11,265,237,353	9,485,149,348	Total Non Current Liabilities
					TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION(Continued)
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	EQUITY
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				<i>Equity Attributable to Owners of the Parent</i>
Modal Saham - Nilai Nominal				<i>Share Capital, Rp 1,000,000 par</i>
Rp 1.000.000 per Saham (dalam Rupiah Penuh)				<i>Value per Share (Full Amount)</i>
Modal Dasar - 3.200.000 lembar				<i>Authorized Capital - 3,200,000 Shares</i>
Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar				<i>Subscribed and Paid Up</i>
1.018.953 saham				<i>Capital amounted to 1,018,953</i>
tahun 2016, 2015 dan 2014	33	1,018,953,000	1,018,953,000	<i>shares in 2016, 2015 and 2014</i>
Tambahan Modal Disetor	34	22,500,000	22,500,000	<i>Additional Paid in Capital</i>
Saldo Laba :				<i>Retained Earnings:</i>
Dicadangkan		6,425,012,654	4,814,894,108	<i>Appropriated</i>
Belum Dicadangkan		1,037,329,721	702,533,323	<i>Unappropriated</i>
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				<i>Total Equity Attributable to Owners of the Parent</i>
Kepentingan Non Pengendali	37a	8,503,795,375	6,558,880,431	<i>Non Controlling Interest</i>
Total Ekuitas		1,141,684,224	1,146,489,654	<i>Total Equity</i>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,181,552,264	18,970,607,437	16,621,508,360	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pendapatan Operasi	38	7,587,363,395	6,498,048,981	5,958,494,022	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan	38	(101,895,402)	(18,605,022)	(11,579,765)	Revenue Reduction
Pendapatan Bersih		7,485,467,993	6,479,443,959	5,946,914,257	Net Revenue
Pendapatan Konstruksi	39	1,299,565,577	1,785,768,720	2,028,177,779	Construction revenues
Beban Operasi	40	(5,401,060,891)	(4,250,116,985)	(3,694,029,833)	Operating Expenses
Beban Konstruksi	39	(1,299,565,577)	(1,785,768,720)	(2,028,177,779)	Construction expenses
Laba Usaha		2,084,407,102	2,229,326,974	2,252,884,424	Operating Income
Laba Penjualan Aset Tetap	15	786,889	10,401,176	7,927,717	Gains on Fixed Assets Disposal
Penghasilan Bunga	42	99,448,711	100,504,696	124,748,859	Interest Income
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	13	44,608,948	18,189,505	(14,108,051)	Equity In Net Gain (Loss) of Associates
Pendapatan (Beban) lainnya - Bersih	36,41	(184,358,102)	35,305,041	18,130,603	Other Income (Expenses) - Net
Beban Bunga Pinjaman	43	(476,983,708)	(398,335,367)	(145,717,611)	Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih		215,318,439	(452,555,242)	(125,543,034)	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,783,228,279	1,542,836,783	2,118,322,907	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK	20	(270,911,349)	(379,968,918)	(533,050,711)	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		1,512,316,930	1,162,867,865	1,585,272,196	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan Revaluasi					Items that will not be reclassified to profit or loss: Fixed Asset
Aset Tetap	15	1,189,749,498	-	-	Revaluation Gains
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasti	32	(35,210,475)	1,672,326	(98,580,151)	Remeasurements of Defined Benefit Obligation
Pajak Penghasilan Terkait	20	(14,345,975)	(417,847)	24,645,037	Income Taxes Related
Total penghasilan komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak		1,140,193,048	1,254,479	(73,935,114)	Total other comprehensive income for the period - net of tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,652,509,978	1,164,122,344	1,511,337,082	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1,037,329,721	702,533,323	1,192,041,611	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali		474,987,209	460,334,542	393,230,585	Non - Controlling Interests
Total		1,512,316,930	1,162,867,865	1,585,272,196	Total
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :
Pemilik Entitas Induk		2,169,725,608	702,240,142	1,121,795,545	Owners of the Parent
Kepentingan Non Pengendali	37a	482,784,370	461,882,202	389,541,537	Non - Controlling Interests
Total		2,652,509,978	1,164,122,344	1,511,337,082	Total
LABA PER SAHAM DASAR	47	1,018	689	1,170	BASIC EARNING PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of the Parent						
	Saldo Laba/Retained Earnings				Total/ Total Rp	Kepentingan Non Pengendali/ Non Controlling Interest Rp	Total Ekuitas/ Total Equity Rp
	Modal Saham / Share Capital Rp	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital Rp	Dicadangkan/ Appropriated Rp	Belum Dicadangkan Unappropriated Rp			
Saldo Per 31 Desember 2014	1,018,953,000	22,500,000	3,885,829,146	1,192,041,611	6,119,323,757	1,017,035,255	7,136,359,013
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	(293,181)	702,533,323	702,240,142	461,882,202	1,164,122,344
Entitas Anak baru	-	-	-	-	-	5,483,500	5,483,500
Penyesuaian Sehubungan dengan Penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013)	-	-	(1,974,156)	1,974,156	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	955,212,614	(955,212,614)	-	-	-
Dividen	35b	-	-	(238,803,153)	(238,803,153)	(337,911,303)	(576,714,457)
Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan	35e	-	(23,880,315)	-	(23,880,315)	-	(23,880,315)
Saldo Per 31 Desember 2015	1,018,953,000	22,500,000	4,814,894,108	702,533,323	6,558,880,431	1,146,489,654	7,705,370,085
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	1,132,395,887	1,037,329,721	2,169,725,608	482,784,370	2,652,509,978
Entitas Anak baru	-	-	-	-	-	29,630,000	29,630,000
Pembentukan Cadangan	-	-	505,823,993	(505,823,993)	-	-	-
Dividen	35a.1	-	-	(196,709,330)	(196,709,330)	(517,219,800)	(713,929,130)
Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan	35a.2	-	(28,101,333)	-	(28,101,333)	-	(28,101,333)
Saldo Per 31 Desember 2016	1,018,953,000	22,500,000	6,425,012,654	1,037,329,721	8,503,795,375	1,141,684,224	9,645,479,599

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		7,533,956,365	9,016,334,339	6,542,724,533	<i>Cash Received from Customers</i>
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(4,564,884,151)	(4,696,236,000)	(3,677,824,844)	<i>Cash Paid to Suppliers,</i>
Karyawan dan Lainnya					<i>Employees and Others</i>
Kas yang Dihasilkan dari Operasi		2,969,072,214	4,320,098,339	2,864,899,689	<i>Cash Generated from Operations</i>
Pembayaran Pajak Penghasilan		(716,095,687)	(911,862,105)	(857,304,271)	<i>Payment For Corporate Income Tax</i>
Penempatan Kas yang dibatasi Penggunaannya		11,662,487	(22,374,106)	(23,504,600)	<i>Placement of Restricted Cash</i>
Penerimaan Bunga Deposito	42	83,011,977	95,065,328	82,481,266	<i>Interest on Deposit Received</i>
Penerimaan Restitusi Pajak		81,349,835	1,769,440	-	<i>Receipts Tax Restitution</i>
Pembayaran Bunga Pinjaman	43	(475,081,906)	(234,308,396)	(104,502,081)	<i>Payment for Interest</i>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1,953,918,920	3,248,388,500	1,962,070,003	<i>Net Cash Provided by Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Investasi Saham	13,17	(34,800,000)	(430,000,000)	(1,927,842)	<i>Cash Paid for Investment in Stocks</i>
Pemberian Pinjaman ke Pihak Berelasi		(120,000,000)	-	-	<i>Loan to Related Parties</i>
Hasil Penjualan Aset Tetap	15	1,300,371	13,020,309	8,167,163	<i>Proceeds From Sale of Fixed Assets</i>
Perolehan Aset Tetap					<i>Acquisition of Fixed Assets</i>
Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud	14, 15, 17	(2,397,087,987)	(2,650,610,026)	(2,725,824,225)	<i>Investment Properties and Investment Properties</i>
Pembayaran Uang Muka Kontraktor		(574,374,722)	(799,051,672)	(720,552,856)	<i>Advanced Payment for Contractor</i>
Penerimaan Dividen	13	3,629,354	6,867,618	1,137,878	<i>Cash Dividend Received</i>
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(3,121,332,984)	(3,859,773,771)	(3,438,999,883)	<i>Net Cash Used In Investing Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Tambahan Setoran Modal dari Kepentingan non Pengendali		29,630,000	4,473,500	279,966,420	<i>Proceed from Paid -up Capital by Non-Controlling Interest</i>
Penerimaan Pinjaman	22, 23	2,171,000,000	683,650,000	4,297,820,204	<i>Proceeds from Borrowings</i>
Penerimaan Surat Berharga Yang Diterbitkan		-	-	5,945,500,000	<i>Proceeds Securities Issued</i>
Pembayaran Pinjaman	21, 22	(907,900,738)	(678,691,182)	(5,621,448,264)	<i>Payment of Loan</i>
Pembayaran Dividen	36	(703,998,912)	(576,714,455)	(806,986,883)	<i>Cash Dividend Paid</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		588,730,350	(567,282,137)	4,094,851,477	<i>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(578,683,714)	(1,178,667,408)	2,617,921,598	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN		2,618,040,351	4,247,026,898	1,759,522,597	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Pengaruh Selisih Kurs - Bersih		(218,452,176)	(450,319,139)	(130,417,297)	<i>Effect of Foreign Exchange - Net CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN		1,820,904,461	2,618,040,351	4,247,026,898	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan (PERSERO) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan diubah berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 128 tanggal 25 Juni 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 tanggal 29 September 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No.SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, terkait dengan mencabut seluruh isi akta pernyataan keputusan rapat No. 4 tanggal 14 Desember 2011 dan Menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, sehingga modal dasar Perusahaan ditetapkan menjadi sebesar 3.200.000 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.200.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar 1.018.953 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.018.953.000.

Akta perubahan ini sudah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

PT Pelabuhan Indonesia III secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada PT Pelindo III untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

1. General

a. Establishment

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("the Company") was officially established based on Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 58 year 1991 regarding change from State Company (Perusahaan Umum / Perum) to Limited Company (Perseroan Terbatas / Persero) as stated in Notarial Deed of Imas Fatimah, SH., No.5 dated December 1, 1992.

The Company's statutes have been amended based on Annual General Shareholder Meeting dated January 14, 1998 as put forth in Notarial Deed No. 128 by Notary Rahmat Santoso, SH., dated June 25, 1998. The amendment was approved by Minister of Law with a Decree No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 dated September 29, 1998.

The Company's statutes have been amended several times, most recently by the General Shareholder Meeting Resolution No. 08 dated August 13, 2012 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the change in the statutes based on the copy of the decision of the Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises as authorized by the Ministry of State-Owned Enterprises during the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelindo III No.SK-226/MBU/S/2012 III dated July 16, 2012, related to the revocation of the entire contents of deed No. 4 dated December 14, 2011 and the establishment of the amendment of Article 4, paragraph 2 and 3 of the statutes regarding the change of basic capital, issued and paid capital and the capital of the company was settled at 3,200,000 (Full Amount) shares with nominal value of Rp3,200,000,000 and issued and paid up capital of 1,018,953 (Full Amount) shares with value amounting to Rp1,018,953,000.

This amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No.AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

PT Pelabuhan Indonesia III officially became a Port Business Entity (BUP) based on Ministry of Transportation Decree No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 on the issuance of license to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as a Port Business Entity (BUP). The BUP license authorizes the PT Pelindo III to manage sea ports and its facilities.

1. Umum (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan baik berupa pelabuhan tradisional (barang dan penumpang) maupun peti kemas untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta pemeliharaan peralatan pelabuhan dan jasa kesehatan, termasuk pengusahaan:

1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.
2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal.
3. Dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang.
4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut.
6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan.
7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasian dan distribusi barang termasuk hewan.
8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
9. Jasa pelayanan kesehatan.
10. Jasa transportasi laut.
11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan.
12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan.
14. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan.
15. Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan.
16. Depo petikemas.
17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan.
18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan.
19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

1. General (Continued)

b. The Purpose and Objective

The Company and subsidiaries (collectively referred as "the Group") provide sea port services and undertake both traditional (for goods and passengers) and container port to support sea transportation of goods for the implementation of national development and to maintain sea port equipments, and health care services including undertaking:

1. Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring.
2. Services related to pilotage and delay of the ship.
3. Docking and other facilities for the tethering, loading and unloading of goods including animals and facilities for the flow of passengers.
4. Warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment.
5. Land for various buildings and grounds, industrial and buildings buildings associated to the sea freight streamlined.
6. Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation.
7. Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals.
8. Education and training services related to port business.
9. Health care services.
10. Sea transportation services.
11. Rental of facilities and various port equipments.
12. Repair services of port's facility and equipment.
13. Property services surrounding the port area.
14. Industrial estate in port area.
15. Tourism area in port area.
16. Container depot.
17. Consulting services in the field of port.
18. Port communication and information services.
19. Construction services in the field of port.

1. Umum (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan)

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 17 (tujuh belas) cabang pelabuhan dan 1 (satu) unit pengusahaan yaitu Terminal Petikemas Semarang serta 1 (satu) Unit Pelaksanaan Kantor Pusat. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Cabang Kelas Utama : Tanjung Perak
2. Cabang Kelas Satu A (IA) : Banjarmasin
3. Cabang Kelas Satu B (IB) : Tanjung Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS)
4. Cabang Kelas Dua A (IIA) : Gresik, Kotabaru dan Tanjung Intan
5. Cabang Kelas Dua B (IIB) : Tenau / Kupang, Benoa dan Sampit
6. Cabang Kelas Tiga A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar dan Kumai
7. Cabang Kelas Tiga B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga
8. Unit Pelaksanaan Kantor Pusat di Surabaya

c. Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

	2016	2015	2014	Boards of Commissioners:
Dewan Komisaris :				President Commissioner
Komisaris Utama	Hari Bowo	Hari Bowo	Hari Bowo	Commissioner
Komisaris	Soritaon Siregar	Soritaon Siregar	Soritaon Siregar	Commissioner
Komisaris	Heddy Lugito	Machfud Sidik	Machfud Sidik	Commissioner
Komisaris	Wahju Satrio Utomo	L. Denny Siahaan	L. Denny Siahaan	Commissioner
Komisaris	Rr. Dewi Ariyani	Fadjar Judisiawan	Fadjar Judisiawan	Commissioner

1. General (Continued)

b. The Purpose and Objective (Continued)

In providing its services, the Company has 17 (seventeen) branches of port container and 1 (one) port services unit, Terminal Petikemas Semarang, and 1 (one) executive head office. Work areas of operational branches of port are as follows :

1. Prime Class of Branch : Tanjung Perak
2. First Class of Branch A (IA) : Banjarmasin
3. First Class of Branch B (IB) : Tanjung Emas and Terminal Petikemas Semarang (TPKS)
4. Second Class of Branch A (IIA) : Gresik, Kotabaru and Tanjung Intan
5. Second Class of Branch B (IIB) : Tenau / Kupang, Benoa and Sampit
6. Third Class of Branch A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar and Kumai
7. Third Class of Branch B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga
8. Executive head office unit is in Surabaya

c. Management

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows :

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

c. Manajemen (Lanjutan)

c. Management (Continued)

	2016	2015	2014	<i>Board of Directors :</i>
Dewan Direksi :				
Direktur Utama	Orias Petrus Moedak	Djarwo Surjanto	Djarwo Surjanto	President Director
Direktur	Muhammad Iqbal	Rahmat Satria	Rahmat Satria	Director
Direktur	Husein Latief	Husein Latief	Husein Latief	Director
Direktur	Toto Heliyanto	Toto Heliyanto	Toto Heliyanto	Director
Direktur	U. Saefudin Noer	U. Saefudin Noer	-	Director

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No.SK-28/MBU/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menetapkan pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Sdr. Saefudin Noer sebagai Direktur Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri BUMN No:SK30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, memberhentikan dengan hormat Sdr. L. Denny Siahaan dan mengangkat Sdr. Wahju Satrio Utomo sebagai anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri BUMN No:SK39/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, memberhentikan dengan hormat Sdr. Fadjar Judisiawan dan mengangkat Sdr. Rr. Dewi Ariyani sebagai anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III nomor : SK.102/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang memutuskan sebagai berikut :

Based on the copy of the Decree of the Minister for State Owned Enterprises in a General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No.SK-28 / MBU / 03/2015 dated March 16, 2015 on the Appointment of Members of the Board of Directors of the Company, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) set the appointment of Directors of the Company Mr. Saefudin Noer as the Company's Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Based on the copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No: SK-30 / MBU / 02/2016 dated February 9, 2016 regarding the resignation and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, to honorably discharged Mr. L. Denny Siahaan and appointed Mr. Wahju Satrio Utomo as a member of the Board of Commissioners.

Based on the copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No: SK-39 / MBU / 03/2016 dated March 1, 2016 regarding the resignation and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, to honorably discharged Mr. Fadjar Judisiawan and appointed Mrs. Rr. Dewi Ariyani as members of the Board of Commissioners.

Based on the copy of the Decree of the Minister for State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III number: SK.102 / MBU / 05/2016 dated May 16,2016 regarding the resignation and appointment of the President Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) it was decided as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

c. Manajemen (Lanjutan)

1. Kesatu : Memberhentikan dengan hormat sdr. Djarwo Surjanto sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III yang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. Kedua : Mengangkat sdr. Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
3. Ketiga : Bagi Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundangundangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan diri sebagai jabatan tersebut.
4. Keempat : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
5. Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya diadakan pembetulan seperlunya.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III nomor : SK -241 /MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pemberhentian Sdr. Machfud Sidik dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Sdr. Hedy Lugito sebagai anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK248/MBU/11/2016 tanggal 2 November 2016 tentang pemberhentian Sdr. Rahmat Satria sebagai direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Mengangkat Saudara Muhammad Iqbal sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

1. General (Continued)

c. Management (Continued)

1. First : Honorably discharge Mr. Djarwo Surjanto as a President Director of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III who was appointed by the Minister of State Owned Enterprises No. SK-103/MBU/2014 dated May 12, 2014, with expression of gratitude for his contribution of energy and his idea during his service
2. Second: Appoint Mr. Orias Petrus Moedak as a President Director of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
3. Third: For the President Director who was appointed as referred to in the dictum of this decision and is still serving in other positions, which is prohibited by legislation to be handled at the same time concurrently with the post of executive director of State – Owned Enterprises, he/she must resign or be dismissed himself from the post.
4. Fourth: To authorize the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with the right of substitution to declare that what was stated in this decree was in authentic form before a not or an authorized executive.
5. Fifth: The Decree is effective on the date specified with the provision that if in the future there is a mistake in it, necessary rectification will be held.

Based on the copy of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III number: SK - 241 / MBU / 10/2016 dated October 19, 2016 regarding the resignation of Mr. Machfud Sidik and appointment of members of the Board of Commissioners Mr. Hedy Lugito as a member of the Board of Commissioners.

Decree of the Minister for State Owned Enterprises No.SK-248 / MBU / 11/2016 dated 2 November 2016 regarding the resignation of Mr. Satria Rahmat as Director of Operations and Business Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Mr. M. Iqbal Appointed as Director of Operations and Business Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

c. Manajemen (Lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama		Position
	2016	2015	
Ketua Komite Audit	Soritaon Siregar	Machfud Sidik	<i>Chairman of Audit Committee</i>
Anggota	Syukri	Syukri	<i>Members</i>
Anggota	Amilin	Amilin	<i>Members</i>
Ketua Komite GCG dan Manajemen Resiko	Wahju Satrio Utomo	L. Denny Siahaan	<i>Chairman of GCG Committee and Risk Management</i>
Anggota	Nono Sukarna	Nono Sukarna	<i>Members</i>
Anggota	Petrus Sampe	Petrus Sampe	<i>Members</i>

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp41.137.643 (31 Desember 2015: Rp31.796.575). Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Surabaya. Keseluruhan karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing berjumlah 1.850 orang, dan 2.094 orang. Total karyawan Grup tahun pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing berjumlah 4.137 orang dan 5.863 orang (Tidak diaudit).

d. Penawaran Efek Perusahaan

Pada tanggal 24 September 2014 Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan Senior Note sejumlah USD500,000,000 (angka penuh) jatuh tempo 2024 pada bursa efek di Singapura (Catatan 23).

e. Struktur Entitas Anak

Berikut ini adalah rincian entitas anak yang terkonsolidasi dalam Laporan Konsolidasian:

1. General (Continued)

c. Management (Continued)

The composition of the Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management on December 31, 2016 and 2015 was as follows:

Jabatan	Nama		Position
	2016	2015	
Ketua Komite Audit	Soritaon Siregar	Machfud Sidik	<i>Chairman of Audit Committee</i>
Anggota	Syukri	Syukri	<i>Members</i>
Anggota	Amilin	Amilin	<i>Members</i>
Ketua Komite GCG dan Manajemen Resiko	Wahju Satrio Utomo	L. Denny Siahaan	<i>Chairman of GCG Committee and Risk Management</i>
Anggota	Nono Sukarna	Nono Sukarna	<i>Members</i>
Anggota	Petrus Sampe	Petrus Sampe	<i>Members</i>

Key management personnel are the Company's Boards of Commissioners and Directors. Short term compensation paid to the key management personnel of the Company for the period ended December 31, 2016 amounted to Rp41,137,643 (December 31, 2015 Rp31,796,575). There is no compensation of post-employment benefits, other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

The Company's head office is located in Surabaya and the total number of employees as of December 31, 2016 and 2015, respectively was 1.850 and 2,094. The total number of employees of the Group as of December 31, 2016 and 2015 was 4,137 and 5,863, respectively (Unaudited).

d. The Company's Securities Offering

On September 24, 2014, the Company Issued and listed USD500,000,000 (full amount) Senior Note due in 2024, at the Singapore Stock Exchange (SGX) (Note 23).

e. Subsidiaries' Structure

The details of subsidiaries consolidated in the Consolidated Financial Statements are as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

Entitas Anak / Subsidiary	Jenis Usaha/ Nature of Business	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ Total Assets and Percentage of Ownership			
		2016 %	2016 Rp	2015 %	2015 Rp
Penyertaan Langsung/ Direct Investments					
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)	Pelayanan pelabuhan petikemas/ Container terminal services	50.50	1,485,028,402	50.50	1,691,980,147
PT Primasatya Husada Citra (PHC)	Pelayanan kesehatan untuk karyawan Grup dan keluarganya dan umum/ <i>Health services and hospital for Group's employees and their family and as well as public</i>	98.73	241,076,661	98.73	238,750,892
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)	Jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang/ <i>Forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services</i>	96.84	2,958,080,826	96.84	2,857,056,568
PT Pelindo Marine Service (PMS)	pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun Internasional / <i>the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international</i>	97.89	829,037,006	97.89	559,222,669
PT Terminal Teluk Lamong (TTL)	Pelayanan pelabuhan petikemas/ Container terminal services	99.50	171,304,411	99.50	150,541,170
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Jasa kebersihan, jasa ekspedisi, jasa pengepakan dan pergudangan, jasa keamanan, jasa rekrutling dan penyaluran tenaga kerja/ <i>Cleaning services, Freight forwarding services, packing and warehousing, Security services, Recruiting services and manpower distribution</i>	90.00	68,574,248	90.00	39,930,424
					26,235,709

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

Entitas Anak / Subsidiary	Jenis Usaha/ Nature of Business	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ Total Assets and Percentage of Ownership				
		2016 %	2016 Rp	2015 %	2015 Rp	
Penyertaan Tidak Langsung/Indirect Investments						
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)						
- PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Peti Kemas/ Terminal Services Loading and Unloading of Goods and Container	60.00	839,741,894	60.00	896,155,344	
- PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)	Jasa Properti / Properties Services	99.00	84,457,637	99.00	58,478,912	
- PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)	Industri Alat Bongkar Muat Petikemas/ Industrial Tool Loading and Unloading of Containers	60.00	2,637,393	60.00	2,528,054	
- PT Berkah Multi Cargo (BMC)	Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal/ Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services	99.00	1,009,724	99.00	1,000,034	
- PT Berlian Manyar Stevedore (BMS)	Jasa Bongkar Muat Barang/ Loading and Unloading Of Goods	60.00	786,636	-	-	
- PT Terminal Curah Semarang (TCS)	Jasa Kepelabuhan/ Port Service	51.00	64,496,004	-	-	
PT Pelindo Marine Service (PMS)						
- PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)	Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel	60.00	317,292,865	60.00	243,201,194	
- PT Pelindo Energi Logistik (PEL)	Perdagangan Jasal/ Trading Service	90.00	174,878,651	90.00	42,864,310	
PT Terminal Teluk Lamong (TTL)						
- PT Lamong Energi Indonesia (LEI)	Supply Listrik dan Utilitas / Supply of Electricity and Utilities	51.00	9,264,841	51.00	10,030,298	
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)						
- PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)	Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut/ Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier	99.00	4,925,389	99.00	2,705,085	
PT Primasatya Husada Citra (PHC)						
- PT Prima Citra Nutrindo (PCN)	Jasa Boga/Catering Business	70.00	5,972,803	-	-	

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS didirikan dengan akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 1 tanggal 1 April 1999 di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

TPS bergerak dalam bidang pelayanan pelabuhan petikemas dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya.

Pemegang saham TPS adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (50,50%), P&O Dover (Holdings) Ltd. (49,00%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0,50%). Modal ditempatkan dan modal disetor TPS pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah Rp127.884.057.

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Sebelumnya bernama PT Rumah Sakit Primasatyta Hisada Citra (RSPHC))

PHC didirikan dengan Akta Notaris Syafran, SH., No. 1 tanggal 1 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-16306 HT.01.01 Th.99 tanggal 13 April 1999. Anggaran Dasar Rumah Sakit telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.14 tanggal 17 April 2012 oleh Lutfi Afandi, SH., notaris di Sidoarjo, mengenai perubahan Anggaran Dasar.

PHC bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk karyawan Perusahaan dan umum. PHC berkedudukan di Surabaya.

Anggaran dasar PHC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.84 tanggal 27 Januari 2014 oleh Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 284.000.000 (angka penuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp142.000.000 atau menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp32.000.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-0032670.AH-01.09. Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

In the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS was established by Notarial deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed was approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

TPS operates a business in container terminal services located in Port of Tanjung Perak Surabaya.

The shareholders of TPS are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (50.50%), P&O Dover (Holdings) Ltd. (49.00%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0.50%). The issued and paid capital of TPS as of December 31, 2016, 2015 and 2014 amounted to Rp127,884,057.

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Formerly PT Rumah Sakit Primasatyta Hisada Citra (RSPHC))

PHC was established under Notarial deed No. 1 dated September 1, 1999 by Syafran, SH., Notary in Surabaya. This deed has been approved by the Decree of Minister of Law and Regulation No.C-16306 HT.01.01 Th.99 dated April 13, 1999. The Hospital's Articles of Association have been amended several times, most recently by deed No. 14 dated April 17, 2012 by Lutfi Afandi, SH., Notary in Sidoarjo, regarding the changes in the Company's statute Amendment of Article of Association.

PHC operates in healthcare services for Company employees and their family and also public. PHC is located in Surabaya.

The PHC statutes have been amended several times, most recently by notarial deed No.84 dated January 27, 2014 by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya, regarding changes in subscribed and paid-up share capital to be 284,000,000 (full amount) shares amounting to Rp142,000,000 or approval on the addition of paid up capital amounting to Rp32,000,000. The deed has been approved by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia In his decision letter No.AHU-0032670.AH.01.09. Year 2014 dated May 9, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Atas tambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut komposisi kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengalami peningkatan dari Rp108.200.000 menjadi Rp140.200.000. Sedangkan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III tidak melakukan tambahan penyetoran tambahan modal, tetapi sebesar Rp1.800.000 selanjutnya prosentase, komposisi modal saham mengalami penurunan modal/dilusi menjadi 1,27%.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, pemegang saham RSPHC terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 280.400.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp140.200.000 atau (98,73%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 3.600.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.800.000 atau (1,27%).

Pada tahun 2015, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC) berganti nama menjadi PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan dengan akta No. 8 tanggal 5 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Keputusan No.AHU.0940619.AH.01.02. Tahun 2015, tanggal 14 Agustus 2015.

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN didirikan berdasarkan akta No. 35 tanggal 11 Januari 2016, dari Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.000.000 yang terdiri dari PT Pelindo Husada Citra sebesar Rp3.500.000 atau 70% dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp1.500.000 atau 30%.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI didirikan dengan Akta Notaris Moendjiati Soegito, S.H., No. 1 tanggal 9 Januari 2002 di Jakarta telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

These additional paid-up capital, the composition of ownership of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) increased from Rp108,200,000 into Rp140,200,000. While ownership of Koperasi Pelabuhan Pelabuhan Indonesia III which does not conduct depositing capital, amounting to Rp1,800,000 so in percentage, the composition of the share capital has been decreased capital/delusions in to 1.27%.

As of December 31, 2016 and 2015, The shareholders of RSPHC consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 280,400,000 (full amount) shares with a value of Rp140,200,000 or (98.36%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 3,600,000 (full amount) shares with a value of Rp1,800,000 or (1.27%).

In 2015, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC) was renamed as PT Pelindo Husada Citra based on last change by notarial deed No. 8 dated August 5, 2015 by Notary Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights, in his Decree No.AHU.0940619.AH.01.02 Year 2015, dated August 14, 2015.

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN was established under deed No. 35 dated January 11, 2016, by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was Legalization by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The issued and paid capital as of December 31, 2016 amounting to Rp5,000,000 consisting of PT Pelindo Husada Citra amounting to Rp3,500,000 or 70% and PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp1,500,000 or 30%.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI was established under the Notarial deed No. 1 dated January 9, 2002 by Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Anggaran Dasar BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 26 Juli 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar BJTI.

BJTI bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang. BJTI berkedudukan di Surabaya.

BJTI telah mereklasifikasi cadangan modal sebesar Rp140.000.000 ke tambahan modal disetor yang komposisinya terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp133.000.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp7.000.000 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Akta No. 1 tanggal 13 Januari 2014 di hadapan Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-04072.40.21.2014 tanggal 10 Juli 2014.

BJTI melakukan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 23 Juli 2014 oleh Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya, mengenai persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan pasal 4 ayat 2. Penambahan modal disetor sebesar Rp270.060.000 yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp266.965.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp3.095.000.

Perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perusahaan menjadi nilai modal disetor seluruhnya sebesar Rp937.810.000 terbagi atas 937.810 (angka penuh) lembar saham dan setiap saham nominal Rp1.000, yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp908.215.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp29.595.000.

Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-05306.40.21.2014 tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan persetujuan tersebut, seluruh tambahan modal disetor dicatat sebagai modal saham.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

The Statutes have been amended several times, most recently by the deed of Shareholders' Extraordinary General Meeting No. 15 dated July 26, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the changes in BJTI's statute-related to changes.

BJTI operates in forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak of Surabaya as well as trucking services. BJTI is located in Surabaya.

BJTI has reclassified the reserve capital of Rp140,000,000 to Additional paid-in capital and the composition consistd of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp133,000,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III Rp7,000,000 in which it was decided in Deed No. 1 dated January 13, 2014 by the Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH. The deed has been agreed by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04072.40.21.2014 dated July 10, 2014.

BJTI had most recently amended its statutes based on Extraordinary General Shareholders' Meeting No.11 dated July 23, 2014 by Yahya Abdullah Waber, SH., Notary in Surabaya, about approval of additional paid in capital and changes of article 4 paragraph 2. Additional paid in capital amounting to Rp270,060,000 consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp266,965,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp3,095,000.

The changes of article 4 paragraph 2 of statutes to be the authorized share capital amounting to Rp937,810,000 divided into 937,810 (full amount) share capital with nominal Rp1,000, consist of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp908,215,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp29,595,000.

The deed has been agreed by The Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05306.40.21.2014 dated August 20, 2014. According to the approval, all additional paid-up capital would be recorded as share capital.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, komposisi pemegang saham BJTI terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejumlah 908.215 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp908.215.000 atau (96,84%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 29.595 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp29.595.000 atau (3,16%).

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan dengan akta Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., No. 12 tanggal 12 Juni 2012 berkedudukan di Surabaya dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mochammad Ali Wahyudi, SH, No.555 tanggal 16 September 2013 berkedudukan di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-44866.

BMS bergerak dibidang Jasa Kepelabuhanan dan berkedudukan di Manyar Gresik. Pemegang Saham BMS adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp432.600.000 atau 60%, dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp288.400.000 atau 40%.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

PPI merupakan entitas anak BJTI yang didirikan dengan Akta No. 5 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 5 Desember 2014 Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-39434.40.10.2014 tanggal 12 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Anggaran dasar PPI telah mengalami perubahan melalui Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah diaktakan dengan akta No. 3 tanggal 7 April 2015 dari Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, perubahan modal dasar dan modal yang disetor, serta perubahan susunan pengurus PPI. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0933556.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

As of December 31, 2016 and 2015, the composition of the shareholders of BJTI consisted of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) of 908,215 (full amount) shares of a value of Rp908,215,000 or (96.84%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) of 29,595 (full amount) shares with a value of Rp29,595,000 or (3.16%).

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS, a subsidiary of BJTI, was established under notarial deed No. 12 dated June 12, 2012, by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya and has been amended with notarial deed No.555 dated September 16, 2013 by Mochammad Ali Wahyudi, SH., Notary in Surabaya, which has obtained authorization from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.10-44866.

BMS operates in port business and services located in Manyar Gresik. The Shareholders of BMS are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia with value of Rp432,600,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara with value of Rp288,400,000 or 40%.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

PPI, a subsidiary of BJTI, was established under notarial No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 notary in Surabaya, and has obtained approval from Minister of Law and Human Rights in its decree No.AHU-39434.40.10.2014 dated December 12, 2014 and has been registered in the register companies. No.AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The PPI's statutes have been amended on Extraordinary General Shareholders' Meeting as put forth in notarial deed No. 3 dated April 7, 2015 by Yahya Abdullah Waber, SH., Notary in Surabaya in connection with the amendment in intent and purpose business activities, changes in authorized capital and paid-up capital, and changes in composition of the PPI's board. The amendment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No AHU-0933556.AH.01.02.Year 2015 dated April 17, 2015.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

PPI bergerak dalam bidang usaha Pembangunan dan Jasa dan berkedudukan di Surabaya. Pemegang saham PPI adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp54.950.000 atau 99,9%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp50.000 atau 0,1%.

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA merupakan entitas anak BJTI didirikan berdasarkan Akta No. 6 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 11 November 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015. BIMA bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.500.000, yang terdiri dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp1.500.000 atau 60% dan PT Dinson Industries sebesar Rp1.000.000 atau 40%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC merupakan entitas anak PT BJT I, yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., tanggal 16 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015. BMC bergerak di bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.000.000, yang terdiri dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp990.000 atau 99% dan Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp10.000 atau 1%.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST didirikan berdasarkan Akta No. 241 oleh Notaris Mira Irani, S.H, M.K.n, tanggal 28 Januari 2016 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016. BMST bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp500.000.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp300.000.000 atau 60% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp200.000.000 atau 40%.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

PPI operates in development and services, and located in Surabaya. The Shareholders are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp54,950,000 or 99.9% and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total of Rp50,000 or 0.1%.

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA, a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.6 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated November 11, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015. BIMA is engaged in the industry, trade and services.

The issued and paid capital as of December 31, 2015 was Rp2,500,000, consisting of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp1,500,000 or 60% and PT Dinson Industries amounting to Rp1,000,000 or 40%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.17 by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., dated December 16, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015. BMC is engaged goods stevedoring services.

The issued and paid capital as of December 31, 2015 amounting to Rp1,000,000, consist of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp990,000 or 99% and Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp10,000 or 1%.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST was established according to Notarial Deed No.241 by the Notary Mira Irani, S.H, M.K.n, dated January 28, 2016 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter number AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016. BMST is operates in forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals.

The issued and paid capital as of December 31, 2016 was Rp500,000,000, consisting of the company's capital Rp300,000,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara's Rp200,000,000 or 40%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS didirikan berdasarkan Akta No. 189 oleh Notaris Mira Irani, S.H, M.K.n, tanggal 15 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mira Irani, SH.,MKn., No. 02 tanggal 01 Desember 2016 mengenai penambahan modal disetor dari Perusahaan dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebesar Rp28.050.000 dan Rp26.950.000, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0026062.AH.01.02 tanggal 30 Desember 2016. TCS bergerak di bidang curah cair dan gas.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp60.000.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp30.600.000 atau 51% dan PT Andahesa Abadi sebesar Rp29.400.000 atau 49%.

PT Pelindo Marine Service (PMS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelindo Marine Service No. 08 tanggal 31 Desember 2011, dari Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, dan Berdasarkan Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-632/MBU/2011 tanggal 22 Nopember 2011 perihal Persetujuan Pendirian Entitas Anak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta Surat Dewan Komisaris No. 61/VI/UM/DK.P.III/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal rekomendasi pendirian entitas anak, para pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta Anggaran Dasar sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas bernama PT Pelindo Marine Service berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya, dengan jangka waktu tidak terbatas.
2. Maksud tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun internasional diantaranya (adalah jasa angkutan di perairan, penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan atau jasa penundaan kapal, pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan atau perbaikan kapal dll).
3. PT Pelindo Marine Service merupakan pengembangan dari Unit Perkapalan PT Pelindo III (Persero).

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS was established , based on the notarial deed by Mira Irani, S.H. M.K.n, dated December 15, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter number AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016 and has been amended most recently according to Notarial Deed No. 02 dated December 01, 2016 by the Notary Mira Irani, SH.,MKn. have approved the additional paid up capital from Perusahaan and PT Andahesa Abadi amounted to Rp28,050,000 and Rp26,950,000, and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter number AHU-0026062.AH.01.02 dated December 30, 2016. TCS is engaged in liquid bulk and gas.

The issued and paid capital as of December 31, 2016 was Rp60,000,000, consisting of the company's capital Rp30,600,000 or 51% and PT Andahesa Abadi's Rp29,400,000 or 49%.

PT Pelindo Marine Service (PMS)

According to the Deed of Establishment of Limited Liability Company PT Pelindo Marine Service No. 08 dated on December 31, 2011, issued by Stephen Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya and based on Letter from State-Owned Minister No. S-632/MBU/2011 November 22, 2011 regarding Approval on the Establishment of Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and Letter Board of Commissioners No. 61/VI/UM/DK.P.III/2011 dated on June 13, 2011 regarding the recommendation for the establishment of subsidiaries, the competent authorities have agreed to set up a limited liability company jointly as stated in Articles of Association as follows:

1. Limited Liability Company named PT Pelindo Marine Service is domiciled and headquartered in Prapat Kurung Utara St., No. 58 Surabaya, for unlimited time.
2. The purpose of PMS is to conduct business in the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international (in the waters transportation services, provision of facilities and / or services or pilotage services and vessel delays, shipyard services for maintenance and or ship repairs, etc).
3. PT Pelindo Marine Service is an expansion of the Shipping Unit of PT Pelindo III (Persero).

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 18 Maret 2014 tentang perubahan modal disetor PMS dari Rp100.000.000 menjadi Rp148.000.000.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, PMS mengubah modal disetor yang semula berjumlah Rp148.000.000 menjadi Rp260.500.000, sehingga komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 255.000.000 (angka penuh) saham dengan nilai nominal Rp255.000.000 atau 97,89%.
- Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebanyak 5.500.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp5.500.000 atau 2,11%.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS merupakan entitas anak PMS yang didirikan dengan akta No 9 tanggal 21 April 2014, dari Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang akta pendirianya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014. APBS bergerak dibidang konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, pengurukan dan pemeliharaan kedalaman alur pelayaran dan jasa reklamasi, berkedudukan di Surabaya. Pemegang Saham APBS adalah PMS sebesar Rp112.500.000 atau 60%, dan Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV sebesar Rp75.000.000 atau 40%.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 18 September 2015 oleh Notaris R. Agus Purwanto, SH, notaris di Surabaya, tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL merupakan entitas anak PMS yang didirikan dengan akta No 2 tanggal 9 September 2014, dari Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang akta pendirianya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-29563.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. PEL bergerak dibidang Usaha perdagangan dan Jasa, berkedudukan di Surabaya. Pemegang Saham PEL adalah PMS sebesar Rp9.000.000 atau 90%, dan PT Jaya Samudra Karunia Gas sebesar Rp1.000.000 atau 10%.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

Based by General Shareholders' Meeting and declared on the deed No.14 dated March 18, 2014 about the changes of PMS paid up capital from Rp100,000,000 to Rp148,000,000.

According to the Deed dated No. 1, dated December 1, 2014, regarding the Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders Extraordinary with Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., PMS change its capital from Rp148,000,000 into Rp260,500,000 therefore the composition of shareholders is as follows:

- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with 255,000,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp255,000,000 or 97.89%.
- Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 5,500,000 (full amount) shares with a nominal value Rp5,500,000 or 2.11%.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS, is a subsidiary of PMS, which was established under deed No. 9 dated April 21, 2014 by Ivan Gelium Lantu, SH, M.Kn., notary in Depok, in which the deed of establishment had been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014. APBS is engaged in building construction in ports and harbors, dredging and maintenance of navigation channel depth and reclamation services, located in Surabaya. Shareholders of APBS are PMS with the total of Rp112,500,000 or 60%, and Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV with the total of Rp75,000,000 or 40%.

The last amandement of the company statutes was based on Notarial Deed No 7 dated September 18, 2015 of Notary R. Agus Purwanto, SH, notary in Surabaya, concerning The Extraordinary Meeting of Shareholders.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL, a subsidiary of PMS, was established under deed No. 2 dated September 9 2014, by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH, notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-29563.40.10.2014 dated October 14, 2014. PEL is engaged in tradings and services, located in Surabaya. Shareholders of PEL are PMS with the amount of Rp9,000,000 or 90%, and PT Jaya Samudra Karunia Gas with the amount of Rp1,000,000 or 10%.

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong didirikan berdasarkan akta No. 309 tanggal 30 Desember 2013, dari Yatiningsih, SH., Master Hukum, Notaris di Surabaya. Akta pendirian Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 311 tanggal 30 April 2015 dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0935117 tanggal 27 Mei 2015.

PT Terminal Teluk Lamong bergerak dalam bidang Usaha Jasa Kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan bertempat kedudukan di Surabaya. Pemegang Saham TTL adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp134.325.000 atau 99.5%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp675.000 atau 0,5%.

TTL menerima Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 749 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 5 September 2014.

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

LEI didirikan berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, SH., MH. No. 58 tanggal 8 Desember 2014, di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.100.000 yang terdiri dari PT Terminal Teluk Lamong sebesar Rp4.641.000 atau 51% dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4.459.000 atau 49%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan keseluruhan kepemilikannya saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di LEI sebesar 4.461 lembar saham atau 49% kepemilikannya kepada TTL.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong was established under deed No. 309 dated December 30, 2013, by Yatiningsih, SH., Master of Laws, Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The Company's statutes has been amended and the latest was based on notarial deed No. 311 dated April 30, 2015 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The amendment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0935117 dated May 27, 2015.

PT Terminal Teluk Lamong is engaged in the port services that promote the principles of Good Corporate Governance, located in Surabaya. Shareholders of TTL are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with the total of Rp134,325,000 or 99.5%, and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total amount of Rp675,000 or 0.5%.

TTL has received the Decree of Minister of Transportation No. KP 749 Year 2014 on the Granting License for the Company as a Port Business Entity of September 5, 2014.

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

LEI was established under deed No. 58 dated December 8, 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

The issued and paid of capital as of December 31, 2015 was Rp9,100,000 consisting of PT Terminal Teluk Lamong amounting to Rp4,641,000 or 51% and PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp4,459,000 or 49%.

Based on the Deed of Extraordinary Shareholders PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya, Shareholders decided on the approval of transfers of all shares at LEI from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,461 shares or 49% ownership to TTL.

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

TTL menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham LEI tersebut (Catatan 51).

Kombinasi Bisnis:

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

Pada tanggal 24 Februari 2014, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melakukan akuisisi atas 90% kepemilikan saham pada PT Persada Jasa Utama (PJU) dari pemilik saham lama, yaitu 89% dari Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), dan 1% dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSGB), dengan total imbalan pembelian yang dialihkan sebesar Rp3.231.000 (Lihat Catatan 17).

Anggaran Dasar PDS telah mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan Akta No. 183 tanggal 19 Maret 2014 oleh Yatiningsih, SH., MH, Notaris di Surabaya tentang perubahan nama dari PT Persada Jasa Utama (PJU) menjadi PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) dan peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebelumnya Rp2.000.000 menjadi Rp50.000.000. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-00482.40.20.2014 tanggal 15 April 2014.

Perubahan anggaran dasar PDS terakhir berdasarkan Akta No. 212 tanggal 28 Mei 2015 oleh Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya, atas pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penambahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0948723.AH.01.02.2015 tanggal 23 Desember 2015.

Komposisi Pemegang saham PDS, berdasarkan Anggaran Dasar adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp15.750.000 (90%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp1.750.000 (10%).

PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS) (Sebelumnya bernama PT Pelindo Daya Solusi)

TEDS merupakan entitas anak PDS yang didirikan dengan akta No. 360 tanggal 29 September 2014, dari Yatiningsih, S.H., MH., Notaris di Surabaya, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

TTL received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification behalf changes of LEI's shareholder (Note 51).

Business Combination:

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

On February 24, 2014, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) acquired 90% shares in PT Persada Jasa Utama (PJU) from the previous owner that is 89% of the Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), and 1% of the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSGB), with purchase consideration transferred of Rp3,231,000 (See Note 17).

The most recent changes of the Articles Association is on the deed No 183 dated on March 19, 2014 by Yatiningsih, SH, MH Notary in Surabaya regarding the change of name from PT Persada Jasa Utama (PJU) to PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) and changes in the authorized share capital from Rp2,000,000 to Rp50,000,000. The changes of the Articles Association were approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU-00482.40.20.2014 dated on April 15, 2014.

Amendment of statutes of PDS was recently based on Deed No. 212 dated May 28, 2015 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, concerning the statement of the meeting of the Extraordinary General Shareholders regarding the addition of objectives and purposes. This amendment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0948723.AH.01.02.2015 dated December 23, 2015.

The composition of the Shareholders of PDS based on the statutes are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to Rp15,750,000 (90%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) amounting Rp1,750,000 (10%).

PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS) (Formerly PT Pelindo Daya Solusi)

TEDS, a subsidiary of PDS, was established under deed No. 360 dated September 29 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

e. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Anggaran dasar PT Pelindo Daya Solusi mengalami perubahan sesuai Akta No. 7 tanggal 5 Januari 2015 dari notaris yang sama mengenai perubahan nama dari PT Pelindo Daya Solusi menjadi PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, tempat kedudukan, susunan dewan komisaris dan direksi. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 8 Januari 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera bergerak dibidang Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut, berkedudukan di Surabaya.

Pemegang Saham PT Tanjung Emas Daya Sejahtera adalah PDS sebesar Rp1.980.000 atau 99%, dan Koperasi pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp20.000 atau 1%.

1. General (Continued)

e. Subsidiaries' Structure (Continued)

The Articles of Association of PT Pelindo Daya Solusi has made changed on the Deed No. 7 dated January 5, 2015 from the same notary concerning the change in name from PT Pelindo Daya Solusi to PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, domicile, boards of commissioners and directors. This amendment of statutes has been accepted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 dated January 8, 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera is engaged in Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier, located in Surabaya.

The Shareholders of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera are PDS with the total of Rp1,980,000 or 99%, and Koperasi pegawai (employee cooperative) of PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the amount of Rp20,000 or 1%.

2. Ketentuan Kepelabuhan

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), lihat Catatan 1a.
- d. Surat Menteri Perhubungan No.HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

2. Port Regulations

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the Company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

- a. Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.
- b. Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015
- c. Decree of the Minister of Transportation No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as a Port Business Entity, see Note 1a.
- d. Minister of Transportation's Letter No.HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No.17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
- e. Government Regulation No. 11 Year 2015 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation

2. Ketentuan Kepelabuhan (Lanjutan)

- f. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2014.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan.
- h. Peraturan Menteri Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- j. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa kepelabuhan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 November 2015 (Lihat Catatan 45ff).
- k. Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan HK.0501/93/P.III-2015 tanggal 19 Mei 2015 (Lihat Catatan 45ee).
- l. Berita Acara pembahasan Ruang Lingkup Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No.UM.005/23/12/OP.TPr-15 tanggal 23 Desember 2015.
- m. Notulen Rumusan Bimbingan Teknis Terkait Konsesi oleh Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak tanggal 20-22 Januari 2016.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan di atas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhan yang berlaku untuk daerah pengusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

2. Port Regulations (Continued)

- f. Regulation of the Minister of Transportation Number: PM 6 Year 2013 on type, structure, and Group Rates Ports Services, as amended by Regulation of the Minister of Transportation No. 15 of 2014.
- g. Regulation of the Minister of Transportation Number 15 Year 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector
- h. Ministerial Regulation No. PM 51 Year 2015 on Implementation Seaport.
- i. Regulation of the Minister of Transportation No. PM 69 Year 2015 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.
- j. The Concession Agreement between the Main Port Authority Office of Tanjung Perak with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the activities in the Port Concession Ports Services that Arranged by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 and HK.0501/700/P.III-2015 November 9, 2015 (See Note 45ff).
- k. The concession Agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on Teluk Lamong Multipurpose Terminal Concession in Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and HK.0501/93/P.III-2015 dated May 19, 2015 (See Note 45ee).
- l. Minutes of meeting on the scope of Exploitation Services of Activities in the Ports area of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. UM.005/23/12/OP.TPr-15 dated December 23, 2015
- m. Minutes of meeting on Formulation Related Technical Assistance concessions by the Port Authority of Tanjung Perak on 20-22 January 2016.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company's Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors' Resolution.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang terlampir dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut ini adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, sebagai berikut:

3. Summary of Significant Accounting Policies

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding the presentation and disclosures of financial statements listed or public company, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 date June 25, 2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendment and adjustments of Standards and Interpretation of Standards which is effectively applied for the year or after January 1, 2016 are as follows :

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

**c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru
dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun
Berjalan (Lanjutan)**
Standar Baru

- PSAK No. 70: "Akuntasi untuk Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"
- ISAK No. 30: "Pungutan"

Amandemen

- PSAK No. 4: "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK No. 19: "Aset Takberwujud" tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
- PSAK No. 24: "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 65: "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66: "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67: "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

Penyesuaian

- PSAK No. 5: "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13: "Properti Investasi"
- PSAK No. 16: "Aset tetap"
- PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53: "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar"
- PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

**c. New and Revised Statements and Interpretation of
Financial Accounting Standards Effective in the
Current Year (Continued)**
New Standards

- PSAK No. 70: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liability"
- ISAK No. 30: "Levies"

Amendments

- PSAK No. 4: "Separate Financial Statements"
- PSAK No. 15: "Investment in Associates and Joint Arrangements"
- PSAK No. 16: "Property and Equipment" about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
- PSAK No. 19: "Intangible Asset" about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization
- PSAK No. 24: "Employee Benefits"
- PSAK No. 65: "Consolidation Financial Statements"
- PSAK No. 66: "Joint Arrangements"
- PSAK No. 67: "Disclosures of Interest in Other Entities"

Adjustments

- PSAK No. 5: "Operating Segments"
- PSAK No. 7: "Related Party Disclosures"
- PSAK No. 13: "Investments Property"
- PSAK No. 16: "Property and equipment"
- PSAK No. 22: "Business Combination"
- PSAK No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- PSAK No. 68: "Fair Value Measurement"
- PSAK 68: Fair Value Measurement
- PSAK No. 110: "Accounting for Sukuk"

The following is the impact of the amendments in accounting standards that are relevant and significant to the Financial statements of the Company:

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (Lanjutan)

- PSAK 7: Pengungkapan Pihak Berelasi

Dampak penyesuaian atas standar ini antara lain:

- a. Menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor,
- b. Mensyaratkan agar entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen dan mengklarifikasi bahwa entitas pelapor tidak disyaratkan untuk mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau Direktur entitas manajemen, dan
- c. Perubahan terminologi judul "tanggal efektif" menjadi "tanggal efektif dan ketentuan transisi".

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year (Continued)

- PSAK 7: Related Party Disclosure

Impact of adjustments on this standard include:

- a. *Adding requirements related parties that an entity related to the reporting entity when the entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, providing services to the key management personnel of the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity,*
- b. *Requiring that the reporting entity disclose the amount paid to upper management entity key management personnel services provided by the management entity and clarifies that the reporting entity is not required to disclose the compensation paid by the management entity to workers or the Director of the management entity, and*
- c. *Terminology changes the title of "the effective date" to be "effective date and transitional provisions".*

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until such control ceases.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatif dalam entitas anak.

Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

d. Principles of Consolidation (Continued)

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries.

Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- b) Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
- c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
- d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi.

Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi.

Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

d. Principles of Consolidation (Continued)

- e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
- f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

e. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method.

The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss.

When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akusisi, goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan.

Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

e. Business Combination (Continued)

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal.

Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan sebagian besar entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan Kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan pos moneter dalam mata uang asing dijadarkan ke Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu Kurs tengah Bank Indonesia, pada periode 31 Desember 2016 dan 2015, sebagai berikut:

	2016	2015	USD 1
USD 1	13,436	13,795	

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

f. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and most of the subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in Foreign Currencies are recorded in Rupiah by applying to the Foreign Currencies amount the spot exchange rate between Rupiah and Foreign Currencies at the date transactions. At the end of reporting year, Foreign Currencies monetary items are translated to Rupiah using the closing rate: i.e middle rate of Bank of Indonesia, as of December 31, 2016 and 2015, are as follows:

	2016	2015	USD 1
USD 1	13,436	13,795	

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)**
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank (rekening giro) serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai margin deposits atas fasilitas *letter of credit*, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

- g. Transactions with Related Parties (Continued)**
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
 - vii. A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted in use.

Cash and cash equivalents which are placed as marginal deposits over letter of credit and collateral for bank loan are classified as "restricted cash".

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

i. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito Berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminkan atas utang dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi terealisasi dalam satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

j. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa Grup tidak akan dapat menagihkan semua piutang sesuai dengan persyaratan piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 30 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang usaha telah turun nilainya.

Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

i. Restricted Cash

Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months that are realizable within one year from statements of financial position date are presented as restricted cash and are stated at their nominal value.

j. Receivable

At the time of initial recognition, trade receivables are measured at fair value and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment.

An allowance for impairment is established when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments (more than 30 days overdue) are considered indicators that the trade accounts receivable is impaired.

The amount of allowance is the difference between the assets' carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account, and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. When a trade accounts receivables is uncollectible, such receivable is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are credited to the consolidated statement of comprehensive income.

k. Inventories

Inventories are stated in the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

k. Persediaan (Lanjutan)

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihannya tersebut.

I. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1. Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- a. Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- b. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- c. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama
- d. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- e. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama

2. Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan metode ekuitas.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

k. Inventories (Continued)

Every decline in the amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

I. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as:

1. Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- a. *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- b. *Its liabilities including its share of any liabilities incurred jointly;*
- c. *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation*
- d. *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- e. *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly*

2. Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

m. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan.

Bagian atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

n. Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tetap yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset tetap yang dimiliki untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

m. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. (significant influence).

Investments in entity associates are recorded for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition.

The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) if the investment becomes a subsidiary.
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.
- (c) When the Group discontinue the use of the equity method, the Group recorded all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

n. Fixed Assets held for Sale

Fixed assets held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sale. Fixed assets held for sale are presented as current asset and separated from any other heading.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai asset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (10-50 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities. Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (10-50 years).

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

p. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, swasta dan pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasi langsung dengan aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan, berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan sebagai berikut :

Golongan	Tahun/Years	Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate		Classification
		2016	2015	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2-50	2%-10%	2%-10%	Port Facility
Jalan dan Bangunan	2-30	3.33%-10%	2%-3.33%	Buildings and roads
Kapal	10-20	5%-10%	5%-10%	Ships
Alat Fasilitas Pelabuhan	5-20	5%-20%	10%-20%	Port Facility Equipment
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	10-25	4%-10%	4%-10%	Port Facility Installing
Peralatan kantor dan rumah	4-8	12.5%-25%	12.5%-25%	Office equipment and home
Kendaraan	4-5	20%-25%	20%-25%	Vehicles

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada jumlah revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

p. Fixed Assets

Fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Fixed assets derived from government assistance, private sector and other parties assistance are stated at the amount of assistance plus all expenditures that can be identified directly with the fixed assets so that it is ready for use.

Fixed assets, except the right for the land, are depreciated using the straight line method in line with estimated economic useful life from the date the assets are ready for use, as follows:

Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate

2016

2015

Since July 1, 2016, Port Facility and Port Facility Equipment are stated at their revalued amount and not depreciated. Revaluations are performed with sufficient regulatory such that the carrying amount does not different materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such building and equipment in credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, expect to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase in credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the evaluation of such fixed asset in charged to profit or loss to the extent that in exceeds the balance, if any, held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

p. Aset Tetap (Lanjutan)

Manajemen Perusahaan menetapkan bahwa :

1. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat netto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.
2. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian/pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perusahaan menerapkan ISAK 25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomik tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasionalkan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat panyusutan aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan operasi Perusahaan diklasifikasikan sebagai "Aset Tetap Penugasan" dalam kelompok aset lain-lain.

Minimum pengadaan barang dicatat sebagai aset tetap sebagai berikut:

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

p. Fixed Assets (Continued)

The Company's management decided to :

1. *Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets .*
2. *The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination / disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earning is not made through profit or loss.*

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The Company adopted Interpretation of ISAK 25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The costs of repairs and restoration of container yard and port terminals operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs, which add useful life of the fixed assets, are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Fixed assets used by government agencies relating to the Company's operations are classified as "Assigned Fixed Assets" in the group of other assets.

Minimum procurement of goods recorded as fixed assets are as follows:

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

p. Aset Tetap (Lanjutan)

Instalasi fasilitas pelabuhan sebesar	Rp
Peralatan sebesar	Rp
Kendaraan sebesar	Rp
Emplasemen sebesar	Rp

Kriteria berikut digunakan untuk memanfaatkan pemeliharaan dan biaya perbaikan:

- i. Biaya pemeliharaan dikapitalisasi dalam aset tetap jika ini bisa menambah masa manfaat atau kapasitas fungsi.
- ii. Pengeluaran untuk pemeliharaan dikapitalisasi, jika memenuhi setidaknya salah satu dari:
 - a) Peningkatan kapasitas
 - b) Peningkatan masa manfaat
 - c) Penambahan fungsi
- iii. Penentuan usia penambahan aset tetap sebagai hasil dari pemeliharaan dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan.
- iv. Biaya pemeliharaan minimal yang dikapitalisasi sebagai aset tetap ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

Biaya Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tergantung pada sedimentasi atau endapan lumpur yang terakumulasi sehingga mengurangi kedalaman alur dan mengganggu olah gerak kapal baik dialur pelayaran maupun di dalam kolam pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan pengeringan sedimentasi / endapan lumpur tersebut agar kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tetap terjaga karena itu pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasi dan diamortisasi setelah pekerjaan pengeringan selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengeringan tersebut perlu dilakukan kembali.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

p. Fixed Assets (Continued)

30,000	Amount of Installing a Port Facility
20,000	Amount of Equipment
15,000	Amount of Vehicles
15,000	Amount of Emplacement

The following criteria are used to capitalize maintenance and repair costs:

- i. Maintenance cost is capitalized in fixed assets if it could increase the useful life or its capacity function.
- ii. Maintenance cost is capitalized, if it meets at least one of the following:
 - a) Increase in the capacity
 - b) Increase in the use life
 - c) Addition in the function
- iii. The determination of the increase in age of fixed assets as a result of the maintenance is performed by the Board of Directors of the Company.
- iv. Minimum maintenance costs to be capitalized as fixed assets are set out in the Accounting Policy.

Dredging Costs of Shipping Channels and Port Waters

The depth of shipping channels and port waters are exposed to accumulated siltation, which reduces the depth of water and jeopardize the movement of vessels on shipping channels and port waters. Therefore, dredging works are required to maintain proper depth of the shipping channels and port waters. Dredging and its associated costs are capitalized and amortized once the dredging work is concluded and such asset is ready for use.

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

p. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya Pemeliharaan Untuk Mempertahankan Kondisi Aset Tetap

Karena kondisi lapisan tanah di sejumlah lokasi pelabuhan mengalami penurunan struktur tanah, maka untuk memelihara dan meningkatkan aksesibilitas pelabuhan, dermaga dan lapangan penumpukan disejumlahkan lokasi pelabuhan tersebut harus dikembalikan pada ketinggian yang tepat, pengeluaran biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya untuk mengembalikan fungsi dermaga dan lapangan penumpukan sesuai struktur yang tepat dikapitalisasi dan akan diamortisasi setelah aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat untuk mempertahankan aktiva tersebut adalah selama 10 sampai 15 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus bila pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan lagi. Sementara pemeliharaan pengeluaran yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Aset Dalam Konstruksi

Aset tetap yang di konstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman dan biaya-biaya lain yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu asset tetap dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Aset tetap yang telah habis disusutkan tetapi masih dioperasikan dinilai Rp1 (satu Rupiah).

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

p. Fixed Assets (Continued)

Maintenance Costs to Maintain Assets Conditions

Since several locations of the harbor are experiencing degression of soil structure, to maintain and improve the accessibility of the port, the quayside and the container yard in those locations, maintenance works are done to restore the soil structure to a proper level. Maintenance costs and other associated costs which incurred to restore the function of the dock and container yard to meet a suitable level are capitalized and will be amortized when the assets ready for use.

The useful life of such asset is ranging from 10 to 15 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the maintenance works need to be done before that period. While maintenance cost that does not meet one of these criteria is expensed in the current period.

Asset In Construction

Fixed assets constructed itself is presented as part of the assets as "Asset in Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Fixed assets that are fully depreciated but still operated are valued at Rp1.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

q. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasi dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

r. Aset Takberwujud

Perpanjangan Hak atas Tanah

Grup menerapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Piranti Lunak Komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerjaan pengembangan piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang sudah memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset diamortisasi selama masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

q. Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets is substantially complete.

r. Intangible Assets

Renewal of Land Rights

The Group adopted ISAK No. 25, "Land Rights". The cost of the extension or renewal of legal land rights are recognized as an intangible asset and amortized over the period of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Computer Software

Costs associated with the maintenance of computer software program are recognized as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognized as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. Development costs previously recognized as expenses are not allowed recognized as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognized as assets are amortized over their estimated useful lives, which does not exceed five years.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

r. Aset Takberwujud (Lanjutan) *Goodwill*

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Perusahaan dan entitas anak terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari Entitas Anak secara berkala. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2014.

Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22). ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik.

Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

r. Intangible Assets (Continued) *Goodwill*

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Company and Subsidiaries ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, *goodwill* is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses is allocated first to reduce the carrying amount of any *goodwill* allocated to the unit and then to the other assets using prorate basis. An impairment loss of *goodwill* is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the subsidiary. Management believes there was no impairment of *goodwill* as of December 31, 2014.

Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22). ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator.

The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

r. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Grup membuka perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan penggerukan Alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi – Terminal Multi Purpose Teluk Lamong yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan,

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

r. Intangible Assets (Continued)

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. During the construction period, the accumulated Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Construction contract APBS is the cost directly attributable to the construction of incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (*Capital Dredging*), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset construction are capitalized until the construction is completed and operational.

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Multi Purpose Terminal Lamong Bay which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required,

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

r. Aset Takberwujud (Lanjutan)

ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan asset konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang ditentukan manajemen (jika ada).

Aset hak konsesi APBS dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus .

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan asset konsesi – Terminal Pelabuhan Manyar Gresik yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Biaya perolehan asset hak konsesi disusutkan pada saat aset tersebut telah selesai dibangun dan dioperasikan. Aset hak konsesi diamortisasi selama masa hak konsesi dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

Masa Manfaat/ Useful Lives Tahun / Years		
Jalan dan Bangunan	5 - 76	Roads and Buildings
Perlengkapan Kantor	5	Office Equipment
Peralatan Fasilitas Pelabuhan	5 - 25	Port Facility Equipments

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan asset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

r. Intangible Assets (Continued)

plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Concession assets are recorded at fair value, i.e construction cost of concession assets plus a profit margin determined by the management (if there are).

Concession asset will APBS and Terminal Multipurpose teluk Lamong amortized over the concession period using the straight – line method.

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Concession asset is the cost directly attributable to the construction of concession assets – Manyar Port Terminal Gresik which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The acquisition cost of concession assets is depreciated when the assets are completed and put into operation. These concession assets are intangible assets which are amortized over the concession period using the straight-line method as follows:

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

r. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasi (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbaruhari, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbaruhari, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. Tinjauan penurunan dilakukan ketika indikator penurunan yang hadir. Menentukan nilai pakai aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

r. Intangible Assets (Continued)

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical assets, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

s. Impairment of Non Financial Assets

At the statements of the financial position dates, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss. Impairment review is conducted when indicators of impairment are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and final disposition of such assets.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

t. Utang Usaha

Utang usaha adalah utang yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan. Utang usaha yang berhubungan dengan pemberong pekerjaan diakui dan dicatat berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara.

u. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan nerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu wajar empat kategori berikut:

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

t. Trade Payables

Trade payables are liabilities arising from purchasing of goods/services. Accounts payable are stated at the value of goods/services to be paid to vendors. Trade payables related to the work of a contractor is recognized and recorded based on physical percentage of work completed and stated in the Minutes of Meeting.

u. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognize a financial assets or a financial liabilities in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measure all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset of financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) **Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designating and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuan atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain – lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya termasuk dalam klasifikasi ini.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi HTM diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup tidak memiliki aset keuangan HTM.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed or predetermined payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Cash and cash equivalents, restricted cash, accounts receivables, other receivables, accrued revenue and other non – current assets are included in this classification.

(iii) Held to Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- Investments which at initial recognition, were designated as financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Investments that are designated as available-for-sale; and
- Investments that meet the definition of loans and receivables.

At initial recognition, HTM investments are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group does not have the HTM financial assets.

(iv) Available-for-Sale Financial Assets (AFS)

AFS Financial assets are non-derivative financial assets that are held during a certain period with the intention to sell in order to fulfill liquidity

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan AFS diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS).

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini.

Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada nilai wajarnya.

Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

needs, changes in interest rates or foreign exchange, or assets that are not classified as loans and receivables, HTM investments or financial assets at fair value through profit or loss.

At initial recognition, AFS financial assets are recognized at fair value plus transaction costs and are subsequently measured at fair value where any gain or loss is recognized at other comprehensive income, except for impairment loss and foreign exchange up to the financial assets are derecognized.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group does not have the financial assets available for sale (AFS).

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified into the categories of (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss are the financial liabilities that are designated as held for trading. Financial liabilities are classified as held for trading if acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near term and there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Derivatives are classified as liabilities for trading except that are designated and effective as hedging instruments.

At initial recognition, financial liabilities measured at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Transaction costs related to the issuance are recognized in the current period profit or loss. Subsequent increase or decrease in fair value is recognized in profit or loss.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup memiliki utang bank jangka pendek lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang tidak lancar lainnya, dan utang bank jangka panjang serta liabilitas jangka panjang lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Jumlah tercatat untuk kelompok aset dan liabilitas keuangan jangka pendek, instrument derivatif maupun yang tidak ditentukan jatuh temponya, telah mencerminkan nilai wajarnya.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrument keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dimasa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau,

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

(ii) Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured using amortized cost.

At initial recognition, financial liabilities at amortized cost are measured at fair value net of transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate method.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group have trade payables, short – term bank loans, other current payable, accrued expenses, other non current payable, financial lease and loan – term bank loan and other long – term liabilities, were classified as financial liabilities at amortized cost

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, the entity currently has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

The Fair Value of Financial Instruments

The carrying amount for group of short-term financial assets and liabilities, derivative instrument or with indefinite period, have reflected their fair value.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipt (including all fees and other a paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction cost and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or,

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

(i) Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif. Untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments measured at fair value through profit or loss.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

(i) *Financial assets carried at amortized cost.*

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, they include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment.

Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in the collective assessment of impairment.

(ii) *Loans and Receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:

a. Those that intend to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

b. Those that upon initial recognition designated as available for sale; or

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intesi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (iv) Aset Keuangan Tersedian Untuk Dijual (AFS)
Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrument ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

- c. Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets are derecognized. At that time, the cumulative gains and losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivative, kecuali derivative yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontakturnal untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) **Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

- (ii) **Other Financial Liabilities**

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial mesih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objek bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai,. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi sebagai pengakuan awal aset tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat distimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrument ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrument ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

If the Group neither transfer nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continued to recognize the financial asset.

The Group remove a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

For investment in equity instrument a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa dengan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini dikurangi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan salama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat juntuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasikan arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrument keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak – pihak dalam kotak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or helds-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivative dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivative tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrument keuangan dari diukur memali laba rugi jika pada pengakuan awal instrument keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur fapa nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrument keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan inensi atau keuangan Grup, instrument tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisanya investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah daku tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasikan untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than on insignificant amount of held-to-maturity investment, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input tehadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup se bisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajah diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

v. Surat berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan Perusahaan adalah Senior Notes.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 23).

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi yang dapat diatributkan secara langsung dengan penerbitan surat berharga adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan, diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

u. Financial Instruments (Continued)

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities either directly or indirectly (Level 2);
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or liability is determined using valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

v. Securities Issued

Securities issued by the Company are Senior Notes.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost (see Note 23).

Securities issued are presented at nominal value net of unamortized securities issuance cost. Costs incurred that are directly attributable to the securities issuance are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui :

1. Penjualan Barang

Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas pemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

2. Penjualan Jasa

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.

3. Pendapatan Kerjasama Mitra

Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".

4. Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

5. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

x. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Imbalan kerja sehubungan dengan imbalan pasca kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan imbalan yang lebih tinggi antara Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Peraturan Grup.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

w. Recognition of Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized :

1. Sales of Goods

Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

2. Sales of Services

Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.

3. Revenue of Partner Cooperation

The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (*invoices*) issued by the Company to third parties.

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".

4. Interest Income

Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.

5. Expenses

Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

x. Employee Benefits Liabilities

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Pension and Others Post-Employment Benefits

Employee benefits related to post retirement benefits of employees is in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the Group regulations, whichever benefit is higher.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup memiliki program imbalan pascakerja yang terdiri atas program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada faktor-faktor, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

1. Liabilitas Pasca kerja

a. Program imbalan pasti

Grup memberikan imbalan pasca-kerja manfaat pasti dalam bentuk:

- i) Program Pensiun Imbalan Pasti – Perusahaan dan TPS (entitas anak) menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Grup yang dihitung secara aktuaria.
- ii) Program imbalan pasti lainnya dalam bentuk manfaat pasca kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan lain-lain.
- iii) Grup telah melakukan pendanaan imbalan pasca kerja karyawan melalui program imbalan pasti (PIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

The Group has postemployment benefit programs which consist of defined benefit and defined contribution pension plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that will be received by the employee upon retirement, which generally depends on certain factors such as age, years of service and compensation.

Defined contribution plans are pension plans under which the Group pays fixed contributions into a separate entity and have no legal obligation or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the services rendered by the employees in the current and prior periods.

1. Post-employment Benefits

a. Defined Benefits Plans

The Group provides post-employment benefits in the form of:

- i) *Defined Benefit Pension Plans - the Company and TPS (a subsidiary) have defined benefit pension plans covering all of their permanent employees which are managed by a Pension Fund as stipulated in the Company's regulations. Total contributions consist of employee contributions of 5% of employees' basic pensionable salaries and the Company's and subsidiaries' contributions calculated by an actuary.*
- ii) *Other defined benefit plans in the form of benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 and others.*
- iii) *The Group has funding post-employment benefits to employees through a defined benefit plan (PIP) to the Financial Institution Pension Fund (DPLK).*

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

x. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

b. Program iuran pasti

Beban sehubungan dengan program iuran pasti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar pensiun atau gaji dasar asuransi dari setiap peserta program yang menjadi tanggungan Grup. Grup mengakui utang iuran atau utang premi asuransi dalam periode dimana karyawan memberikan jasanya.

c. Penghargaan Purna Bakti

2. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk uang duka, tunjangan cacat cuti panjang, dan penghargaan masa kerja. Prakiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini dinilai oleh aktuaria independen.

y. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

x. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The Group records not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

b. Defined Contribution Plans

The expenses related to defined contribution plans are determined based on certain percentages of the basic pensionable salaries or insurable salaries of respective participants which are borne by the Group. The Group recognizes contributions payable or insurance premiums payable when an employee has rendered service during the period.

c. Full Devotion Awards

2. Other long-term employee benefits

The Group provides other long-term employee benefits in the form of compassionate allowance, long service leave, disability allowance and loyalty awards. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to postemployment defined benefit plans. These obligations are assessed by an independent actuary.

y. Income Tax

Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Non-Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. pengakuan awal goodwill; atau
2. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

y. Income Tax (Continued)

If the income is already subjected to final income tax, the differences between the consolidated financial statements carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Non-Final Income tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

The amount of current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. the initial recognition of goodwill; or
2. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

1. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

y. Income Tax (Continued)

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

1. *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
2. *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. the same taxable entity; or*

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

- ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

z. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

y. Income Tax (Continued)

- ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- 1. has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- 2. intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

z. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

aa. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

Bila entitas yang menerima bisnis kemudian melepas entitas bisnis yang sebelumnya diperoleh, akun tambahan modal disetor yang dicatat sebelumnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

cc. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

aa. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

.if the entity received the business, subsequently dispose the business entity acquired previously, the additional paid in capital recorded before, can not be recognized as a realized gain or loss or reclassified to retain earnings.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

cc. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

cc. Informasi Segmen (Lanjutan)

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

3. Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

cc. Segment Information (Continued)

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments and making strategic decisions, has been identified as the Board of Directors.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Kas	5,427,189	6,985,695	6,898,039	<i>Cash on Hand</i>
Bank				<i>Cash in Banks</i>
<u>Pihak-pihak Berelasi</u>				<u>Related Parties</u>
Rupiah :				Rupiah :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	174,052,743	183,005,263	63,329,752	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	168,521,255	113,937,420	101,947,378	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	86,231,805	60,275,261	66,283,442	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	64,351,335	34,664,673	41,383,108	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	-	463	583	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
Sub Total (Dipindahkan)	493,157,138	391,883,080	272,944,263	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Sub Total (Pindahan)	493,157,138	391,883,080	272,944,263	<i>Sub Total (Transferred)</i>
Dolar Amerika Serikat :				<i>US Dollars :</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15,091,380	8,396,644	78,448,280	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,842,785	5,332,413	136,440,115	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	153,943	3,192,513	363,850,268	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	75,042	1,921,284	2,035,388	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
Euro :				<i>Euro :</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23,550	25,512	33,159	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
Dolar Singapura				<i>Singapore Dollars :</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	92,989	-	-	<i>Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
<u>Pihak Ketiga</u>				<i>Third Parties</i>
Rupiah :				<i>Rupiah :</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	86,497,878	31,300,474	16,002,876	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	41,038,787	26,039,513	74,553,436	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank DBS Indonesia	5,919,941	13,394,382	1,575,883	<i>PT Bank DBS Indonesia</i>
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	3,550,941	8,806,688	16,354,965	<i>PT Bank Internasional Indonesia Tbk</i>
Standard Chartered Bank	1,794,164	5,842,349	1,160,781	<i>Standard Chartered Bank</i>
PT Bank Mega	1,791,025	-	-	<i>PT Bank Mega</i>
PT Bank Bukopin Tbk	1,546,607	137,162	561,919	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
PT Bank QNB Kesawan Tbk	992,836	16,326	1,000,058	<i>PT Bank QNB Kesawan Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	926,399	553,235	778,570	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank OUB Buana	81,489	79,600	81,554	<i>PT Bank OUB Buana</i>
PT Bank ANZ Indonesia	52,589	57,406	310,347	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
Citibank N. A	-	-	999,988	<i>Citibank N. A</i>
Dolar Amerika Serikat :				<i>US Dollars :</i>
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	14,837,199	29,518,417	10,693,097	<i>PT Bank Internasional Indonesia Tbk</i>
Standard Chartered Bank	7,817,219	87,445,756	15,146,893	<i>Standard Chartered Bank</i>
PT Bank QNB Kesawan Tbk	1,764,603	5,857,415	4,855,486	<i>PT Bank QNB Kesawan Tbk</i>
PT Bank ANZ Indonesia	1,030,207	1,919,219	7,133,442	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
Deutsche Bank	699,872	718,812	1,146,973	<i>Deutsche Bank</i>
PT Bank Permata Tbk	347,170	3,463,012	6,969,197	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	169,040	2,654,844	76,120,892	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	161,239	-	-	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
Citibank N. A	-	-	11,029	<i>Citibank N. A</i>
Total Bank	682,456,032	628,556,056	1,089,208,859	<i>Total Banks</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	Time Depo Related Parti Rupiah
Deposito Berjangka Pihak-pihak Berelasi				
Rupiah :				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	136,167,631	266,330,600	150,900,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	122,369,409	5,000,000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	86,000,000	149,000,000	117,000,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	40,000,000	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	33,000,000	109,000,000	229,500,000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	22,000,000	80,000,000	130,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	5,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Dolar Amerika Serikat :				US Dollars
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	134,360,000	-	136,840,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67,180,000	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	47,026,000	413,850,000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Muamalat Tbk	-	206,925,000	-	PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Mandiri Syariah	-	68,975,000	-	PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	435,400,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak Ketiga				Third Parti
Rupiah :				Rupiah
PT Bank Muamalat, Tbk	122,000,000	-	-	PT Bank Muamalat, Tbk
PT QNB Kesawan, Tbk	120,000,000	-	-	PT QNB Kesawan, Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	61,000,000	101,000,000	116,000,000	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	53,671,800	182,000,000	5,000,000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Mayapada, Tbk	13,000,000	-	-	PT Mayapada, Tbk
PT Bank Permata Tbk	10,000,000	119,000,000	126,000,000	PT Bank Permata Tbk
PT ICBC, Tbk	3,000,000	-	-	PT ICBC, Tbk
Sub Total (Dipindahkan)	1,092,774,840	1,701,080,600	1,446,640,000	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Sub Total (Pindahan)	1,092,774,840	1,701,080,600	1,446,640,000	<i>Sub Total (Transferred)</i> <i>US Dollars :</i>
Dolar Amerika Serikat :				
PT Bank Tabungan				<i>PT Bank Tabungan</i>
Pensiunan Nasional Tbk	8,000,000	-	-	<i>Pensiunan Nasional Tbk</i>
Standard Chartered Bank	32,246,400	33,108,000	-	<i>Standard Chartered Bank</i>
PT Bank Permata Tbk	-	193,130,000	584,680,000	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank QNB Kesawan Tbk	-	55,180,000	933,000,000	<i>PT Bank QNB Kesawan Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	186,600,000	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Total Deposito	<u>1,133,021,240</u>	<u>1,982,498,600</u>	<u>3,150,920,000</u>	<i>Total Time Deposits</i>
Total	<u>1,820,904,461</u>	<u>2,618,040,351</u>	<u>4,247,026,898</u>	Total

Deposito berjangka merupakan
deposito berjangka waktu
1 - 3 bulan

Tingkat Bunga Kontraktual

Deposito Berjangka Per Tahun

Rupiah	3% - 10.75%	3% - 7%	3% - 7%	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	0.60% - 3.5%	2% - 3.5%	2% - 3.5%	US Dollar

5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Cash

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				The Company
Rupiah				<i>Rupiah</i>
<i>Pihak-pihak Berelasi</i>				<i>Related Parties</i>
PT Bank Pembangunan				<i>PT Bank Pembangunan</i>
Daerah Jawa Timur, Tbk	-	20,000,000	20,000,000	<i>Daerah Jawa Timur, Tbk</i>
<i>Pihak Ketiga</i>				<i>Third Parties</i>
Dolar Amerika Serikat :				<i>US Dollars:</i>
PT Bank ANZ Indonesia	<u>22,244,106</u>	<u>22,244,106</u>	<u>-</u>	<i>PT Bank ANZ Indonesia</i>
Sub Total	<u>22,244,106</u>	<u>42,244,106</u>	<u>20,000,000</u>	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak				Subsidiaries
<i>Pihak-pihak Berelasi</i>				<i>Related Parties</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk				<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
Rupiah	10,969,001	-	523,000	<i>Rupiah</i>
Sub Total	<u>10,969,001</u>	<u>-</u>	<u>523,000</u>	<i>Sub Total</i>
Total	<u>33,213,107</u>	<u>42,244,106</u>	<u>20,523,000</u>	Total
Tingkat Bunga Kontraktual				<i>Contractual Interest Rates of</i>
Deposito Berjangka Per Tahun				<i>Time Deposits Per Annum</i>
Rupiah	5.7% - 6%	3.5% - 8.5%	3.5% - 8.5%	<i>Rupiah</i>
Dollar Amerika Serikat	0.25% - 2%	2.60% - 2.65%	2.60% - 2.65%	<i>US Dollar</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya
(Lanjutan)**

Perusahaan

Perusahaan telah menjaminkan deposito dengan jangka waktu 1 bulan dengan *roll over* otomatis sebesar Rp20.000.000 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang digunakan sebagai jaminan Pengadaan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan deposito sebesar USD1,670,856 (angka penuh) pada Bank ANZ sebagai jaminan pembukaan LC untuk pekerjaan tambahan pengadaan 10 unit STS PT Teluk Lamong tahap II pada periode 2015.

Entitas Anak

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

Pada 31 Desember 2014 deposito berjangka yang ditempatkan TPS telah menjaminkan deposito dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp523.000, yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas bea dan cukai TPS.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia telah menjaminkan deposito dengan jangka waktu 5 bulan dan 3 bulan dengan *automatic roll over* PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang digunakan sebagai jaminan pekerjaan relokasi 2 unit CC dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Sampit, pekerjaan relokasi 8 unit RTG dari PT Terminal Petikemas Surabaya ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin, pemeliharaan 3 unit CC dan 8 unit RTG dan pemeliharaan alat 2 unit grab di PT Terminal Teluk Lamong dan 4 unit CC di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin, dengan nominal masing – masing sebesar Rp4.849.419, Rp4.072.580, Rp944.000, dan Rp1.103.002.

5. Restricted Cash (Continued)

The Company

The Company pledged deposits with maturities of 1 month with automatic roll over amounting to Rp20,000,000 from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk which are used as collateral for Procurement Enterprise Development and Management of West Surabaya Access Channel (APBS) Port of Tanjung Perak Surabaya and deposits of USD 1,670,856 (full amount) at Bank ANZ as collateral for opening LC for additional work procurement of 10 units of STS PT Teluk Lamong phase II in the period in 2015.

Subsidiaries

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

On December 31, 2014 deposits placed TPS has pledged its deposits from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with the amount of Rp523,000 respectively, which is used as collateral for the TPS customs liability.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia pledged deposits with maturities of 5 and 3 month with automatic roll over from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk which are used as collateral for a job relocation CC 2 unit from PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Sampit, job relocation 8 RTG unit from PT Terminal Petikemas Surabaya to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin, maintenance of 2 CC and 8 RTG and maintenance tool Grab 2 unit in PT Terminal Teluk Lamong and 4 CC unit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch Banjarmasin is each amounted to sebesar Rp4,849,419, Rp4,072,580, Rp944,000, and Rp1,103,002.

6. Piutang Usaha

6. Trade Receivables

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan :				
<u>Pihak Berelasi</u>				<u>a. By Customer Related Parties</u>
Badan Usaha				
Milik Negara	37,578,123	63,873,568	68,234,511	State-Owned Enterprises
Tentara Nasional	1,354,467	2,710,335	2,408,521	Indonesian National Army
Indonesia	246,105	335,019	545,333	Government Agencies
Instansi Pemerintah	39,178,695	66,918,922	71,188,365	Sub Total
Sub Total	(14,507,695)	(19,173,686)	(24,919,466)	Allowance for Impairment Loss
Cadangan Kerugian				
Penurunan Nilai	24,671,000	47,745,236	46,268,899	Sub Total

6. Piutang Usaha (Lanjutan)

6. Trade Receivables (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pihak Ketiga				Third Parties
Swasta	461,501,827	397,309,220	403,596,678	Private
Perorangan	3,801,285	2,102,340	2,134,517	Individual
Sub Total	465,303,112	399,411,560	405,731,195	Sub Total
Cadangan Kerugian				Allowance for Impairment Loss
Penurunan Nilai	(53,762,241)	(57,602,682)	(63,845,386)	
Sub Total	411,540,871	341,808,878	341,885,809	Sub Total
Total	436,211,871	389,554,114	388,154,708	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)				b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	167,170,834	226,287,163	149,003,445	Current
Jatuh Tempo :				Overdue :
1 - 30 Hari	162,042,525	106,825,545	161,261,677	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	77,202,629	38,786,143	62,849,576	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	9,287,548	9,870,012	11,360,574	91 - 180 Days
181 - 270 Hari	14,285,077	5,026,609	7,996,260	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	4,336,389	6,168,325	7,309,246	271 - 365 Days
> 365 Hari	70,156,805	73,366,685	77,138,782	> 365 Days
Sub Total	504,481,807	466,330,482	476,919,560	Sub Total
Cadangan Kerugian				Allowance for Impairment Loss
Penurunan Nilai	(68,269,936)	(76,776,368)	(88,764,852)	
Total	436,211,871	389,554,114	388,154,708	Total
c. Berdasarkan Mata Uang				c. By Original Currency
USD	17,617,515	24,942,138	164,885,186	USD
Rupiah	486,864,292	441,388,344	312,034,374	Rupiah
Sub Total	504,481,807	466,330,482	476,919,560	Sub Total
Cadangan Kerugian				Allowance for Impairment Loss
Penurunan Nilai	(68,269,936)	(76,776,368)	(88,764,852)	
Total	436,211,871	389,554,114	388,154,708	Total

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut :

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Saldo Awal	(76,776,368)	(88,764,852)	(88,446,988)	Beginning Balance
Penurunan	(27,059,801)	(13,276,589)	(2,999,961)	Impairment
Pemulihan	25,988,813	25,265,073	2,682,097	Recovery
Penghapusan	9,577,420	-	-	Write Off
Saldo Akhir	(68,269,936)	(76,776,368)	(88,764,852)	Ending Balance

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of customers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak teragihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. Piutang Usaha (Lanjutan)

Lihat Catatan 48 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

6. Trade Receivables (Continued)

See Note 48 on credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures credit quality of trade receivables that are neither past due nor impaired.

7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

Sifat Hubungan/ Relationship with the Company

Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties

a. Nature of Relationship and Transactions

Transaksi/Transactions

- Pemegang Saham/Shareholder	- Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Republic of Indonesia</i>	Hak Konsesi atas TTL, APBS dan BMS / Concession rights on TTL, APBS, and BMS Biaya Penyingkiran Kerangka Kapal KMP. Wihan Sejahtera/ The Cost of the Removal of the ship KMP. Fraimwork Wihan Sejahtera
- Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/	- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest income Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest income
Control trough the Government of the Republic of Indonesia	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income
	- PT Bank Tabungan Negara	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income

7. Nature of Relationship and Transactions With Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

a. Nature of Relationship and Transactions

Transaksi/Transactions

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Sifat Hubungan/ Relationship with the Company	Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties	Transaksi/Transactions
- Entitas Asosiasi / Associates	- PT Portek Indonesia	Biaya Pemeliharaan Alat fasilitas Pelabuhan / Port facilities Equipment Maintenance Costs
	- PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Investasi saham dan Pemberian Pinjaman dana /Investment in Stockand lending Funds
	- PT Ambang Barito Nusapersada	Pemberian Pinjaman Dana/ Lending Fund
	- PT Jasa Marga Bali Tol	Investasi saham/Investment in Stock
	- PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income
	- PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan , Sewa lahan dan Suply bahan bakar /Sales of harbor service, rental of land and fuel supply
	- PT Wijaya Karya (Persero)Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Virama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Hutama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Pengurukan Indonesia (Persero)	Pinjaman dana dan Biaya Pengurukan /Loan funds and Dredging Costs
	- PT Pembangunan Perumahan	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities
	- PT Pelayaran Indonesia (Persero)	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan/Sales of services Ports
	- TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan dan Biaya Penyapuan ranau/ Sales of services Ports and Clearane Costs of mines

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Sifat Hubungan/ Relationship with the Company	Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties	Transaksi/Transactions		
- Mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan entitas anak dan memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas anak/ Entities which have the same key management personnel as the subsidiaries and have significant influence over consolidated subsidiaries	<ul style="list-style-type: none"> - PT Lamin Aspalindo tiga - Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) - DP World Australia LTD - Koperasi Karyawan Pelindo III 	Investasi saham/Investment in Stock Penempatan Dana Imbalan kerja Karyawan/ Placement of employee Benefit Funds Jasa Teknik/Technics Services Jasa Keamanan/Security Services		
b. Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi Rincian penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:		b. Transactions with Related Parties The details of sales to and purchases from related parties are as follows:		
	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Penjualan Jasa				Sales of services
Entitas Sepengendali				Entity Controlled by
Pemerintah:				the Goverment:
PT Pertamina	174,592,368	65,835,564	88,343,008	PT Pertamina
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	36,795,218	33,145,390	24,460,947	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Djakarta Llypod (Persero)	11,471,009	16,729,571	11,924,918	PT Djakarta Llypod (Persero)
PT Semen Tonasa	9,232,949	3,905,555	3,470,149	PT Semen Tonasa
PT Dok dan Perkapalan Sby (Persero)	7,525,767	6,644,948	3,116,459	PT Dok dan Perkapalan Sby (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3,877,261	201,609	130,836	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Bahtera Adhiguna (Persero)	272,145	6,662,189	4,345,733	PT Bahtera Adhiguna (Persero)
PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	-	13,557,389	8,229,796	PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)
Lain - lain (Dibawah 3,5 Miliar)	21,497,406	18,846,106	39,886,107	Others (Below Than 3.5 Billion)
Total	265,264,123	165,528,321	183,907,953	Total
Sebagai persentase terhadap total pendapatan	3.54%	2.55%	3.09%	As a percentage of total revenue

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pembelian				
<u>Entitas Sepengendali</u>				Purchases
<u>Pemerintah:</u>				<u>Entity Controlled by the Goverment:</u>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	261,133,534	158,545,943	60,036,964	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	128,157,392	37,486,488	130,097,658	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	74,146,210	32,177,181	31,736,462	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	75,523,853	103,960,024	-	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	73,874,976	-	-	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	17,850,158	154,116,209	141,007,842	PT Hutama Karya (Persero)
PT Perusahaan Daerah Air Minum	4,467,660	4,729,126	5,261,831	PT Perusahaan Daerah Air Minum
PT Pertamina	1,971,951	4,969,531	6,271,491	PT Pertamina
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	-	-	4,219,418	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
PT Virama Karya (Persero)	-	-	3,741,698	PT Virama Karya (Persero)
<u>Entitas Asosiasi</u>				<u>Associate</u>
PT Portek Indonesia	43,310,514	22,001,508	14,075,849	PT Portek Indonesia
Lain - lain (Dibawah 3,5 Miliar)	7,726,339	13,149,179	7,570,919	Others (Below Than 3.5 Billion)
Total	688,162,587	531,135,189	404,020,132	Total
Kompensasi manajemen kunci				Compensation of key management
Imbalan Jangka Pendek	41,137,643	30,311,759	28,671,074	Short-term Employee Benefits
Imbalan Kerja Jangka Panjang	3,358,424	1,484,816	6,252,454	Long-term Employee Benefits
Total beban	44,496,067	31,796,575	34,923,528	Total expenses
Sebagai persentase terhadap total beban pegawai	4.90%	4.47%	5.77%	As a percentage of total Employees Cost

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	<i>Finance costs Entity Controlled by the Goverment:</i>
Beban keuangan				
Entitas Sepengendali				
Pemerintah:				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,682,757	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22,682,757	-	45,421,754	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,068,748	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	54,434,262	-	45,421,754	Total
Total beban keuangan	476,983,708	398,335,367	145,717,611	Total finance costs
Sebagai persentase terhadap total beban keuangan	11.41%	0.00%	31.17%	As a percentage of total finance costs

- **Transaksi entitas anak dengan pihak berelasi**

- a. TPS menandatangani perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. Dan Pelindo III pada tanggal 22 Juni 1999 yang berlaku untuk periode lima tahun.

Sesuai dengan perjanjian, TPS akan membayar jasa yang diterima dengan tarif harian sebesar US\$600 sampai US\$1,000 per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar US\$36,786 efektif 1 Juni 2014 dan sebesar US\$31,200 pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada DP World dan US\$470 sampai US\$750 per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar US\$24,524 efektif 1 Juni 2014 dan sebesar US\$20,800 pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada Pelindo III.

Mulai 1 Januari 2009, perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. dialihkan ke DP World Asia Holdings Ltd. Perjanjian jasa teknik tersebut telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir pada bulan April 2010, dengan Resolusi Tertulis Pemegang Saham, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Pada tanggal 5 Mei 2014, Perjanjian antara Perusahaan dengan DP World dan Pelindo III telah diubah dimana efektif tanggal 1 Juni 2014, biaya retainer per bulan yang harus dibayar kepada DP World dan Pelindo III masing-masing menjadi sebesar US\$36,786 dan US\$24,524.

- **Subsidiaries' transactions with the related parties**

- a. TPS entered into technical assistance agreements with DP World Australia Ltd. and Pelindo III on June 22, 1999, for an initial period of five years.

Under these agreements, TPS shall pay fees for services received at a daily rate of US\$600 to US\$1,000 per person (with monthly retainer fee of US\$36,786 effective on June 1, 2014 and US\$31,200 in 2013 up to May 31, 2014) to DP World and US\$470 to US\$750 per person (with monthly retainer fee of US\$24,524 effective on June 1, 2014 and US\$20,800 in 2013 up to May 31, 2014) to Pelindo III.

Starting January 1, 2009, the technical assistance agreements with DP World Australia Ltd was amended to become technical assistance agreements with DP World Asia Holdings Ltd. The technical assistance agreements have been extended several times, the latest of which was on April, 2010 with Written Resolution from Shareholders and this agreement has been renewed until further notice. On May 5, 2014, the agreement between the Company with DP World and Pelindo III has been amended, whereby effective June 1, 2014, the monthly retainer fee payable to DP World and Pelindo III would be US\$36,786 and US\$24,524, respectively.

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Biaya jasa ini akan dinaikkan 4% setiap tanggal 1 Januari mulai tahun 2015. Jumlah biaya jasa teknik dari DP World Asia Holdings Ltd., sebesar Rp6.368.187 pada tahun 2016 dan Rp6.180.260 pada tahun 2015, sedangkan jumlah biaya jasa teknik dari Pelindo III sebesar Rp4.290.843 pada tahun 2016 dan Rp4.107.115 pada tahun 2015. Tidak terdapat saldo liabilitas atas jasa teknik tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

- b. Pada tanggal 30 November 2007, TPS menandatangani surat perjanjian baru dengan PT Portek Indonesia (PI) mengenai pemeliharaan 11 unit container crane. Perjanjian pemeliharaan mencakup biaya personel sebesar Rp4.449.994 per tahun dan suku cadang sebesar Rp3.418.100 per tahun.

Biaya suku cadang tersebut tidak termasuk dalam consumable part dan akan dibebankan oleh PI secara terpisah berdasarkan harga pasar ditambah 9% dari nilai tagihan.

Perpanjangan atas Perjanjian ini mencakup biaya personel sebesar Rp5.850.000 per tahun dan biaya suku cadang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif hingga 30 Nopember 2013. Perjanjian dengan PI telah diperpanjang untuk periode dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah biaya pemeliharaan dan biaya suku cadang termasuk consumable part dari PT Portek Indonesia sebesar Rp24.073.025 pada tahun 2016 dan Rp16.131.344 dan US\$337.830 pada tahun 2015. Sedangkan biaya personel sebesar Rp11.590.594 pada tahun 2016 dan Rp9.453.537 dan US\$7.876 pada tahun 2015. Saldo liabilitas atas pemeliharaan sebesar Rp1.567.281 pada tahun 2016 dan Rp7.640.418 dan US\$22.340 pada tanggal 31 Desember 2015, disajikan sebagai bagian dari Pemeliharaan pada "Beban Akrual" (Catatan 28).

This service fee shall be increased by 4% on the first day of January every year starting 2015. Total technical service fees incurred from DP World Asia Holdings Ltd. amounted to Rp6,368,187 in 2016 and Rp6,180,260 in 2015 while total technical service fees incurred from Pelindo III amounting to Rp4,290,843 in 2016 and Rp4,107,115 in 2015. There was no outstanding liabilities for these technical service fees as of December 31, 2016 and 2015.

- b. On November 30, 2007, TPS entered into a new agreement with PT Portek Indonesia (PI) for the maintenance of 11 units of container cranes. The maintenance agreement covers annual personnel cost of Rp4,449,994 and annual spare parts cost of Rp3,418,100.*

The cost of spare parts is excluded from the consumable parts and will be charged by PI separately based on market price plus a premium of 9% from invoice value.

The renewal for agreement above includes personnel cost amounting to Rp5,850,000 per year and the cost of spare parts is determined as stated on the agreement. This agreement is effective until November 30, 2013. The agreement with PI has been extended for the period from January 1, 2014 to December 31, 2017.

Total maintenance and spare parts, including consumables parts, charges from PT Portek Indonesia amounted to Rp24,703,025 in 2016 and Rp16,131,344 and US\$337,830 in 2015. Personnel cost amounted to Rp11,590,594 in 2016 and Rp9,453,537 and US\$7,876 in 2015. The outstanding maintenance payable of Rp1,567,281 in 2016 and Rp7,640,418 and US\$22,340 as of December 31, 2015, respectively, were presented as part of Maintenance under "Accrued Expenses" (Note 28).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- c. TPS menandatangani perjanjian jasa keamanan dengan Koperasi Pegawai Pelindo III untuk periode satu tahun, yang diperbaharui secara otomatis per tahunnya maksimum sampai tiga tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang. Perpanjangan perjanjian terakhir yang dibuat adalah pada tanggal 1 September 2013, dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2014 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015. Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan diserahkan sepenuhnya ke PT Aperindo Prima Mandiri.

TPS juga memiliki perjanjian dengan Koperasi Pegawai Pelindo III terkait dengan jasa outsourcing dan rumah tangga. Jumlah biaya jasa outsourcing dan rumah tangga sebesar Rp1.914.964 pada tahun 2016 dan RpNihil pada tahun 2015. TPS juga memiliki perjanjian terkait dengan jasa pemeliharaan dengan Koperasi Pegawai Pelindo III. Jumlah biaya pemeliharaan sebesar Rp1.580.830 pada tahun 2016 dan RpNihil pada tahun 2015. Saldo liabilitas atas jasa outsourcing, rumah tangga dan pemeliharaan ini masing-masing sebesar Rp329.959 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, disajikan sebagai bagian dari Lain-lain pada "Beban Akrual" (Catatan 10).

TPS menandatangani perjanjian jasa rumah tangga dengan PT Prima Citra Nutrindo untuk periode satu tahun. Perjanjian berlaku mulai 14 November 2016. Jumlah biaya jasa rumah tangga sebesar Rp963.668 pada tahun 2016. Saldo liabilitas atas jasa rumah tangga ini adalah Rp12.880 pada tahun 2016.

- d. Sesuai Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya Nomer: HK.207/01/15/SYB. TOR-16 tanggal 4 Pebruari 2016 tentang penugasan penyingkirkan kerangka Kapal KM Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), untuk melaksanakan pengangkatan/penyingkirkan kerangka kapal.

- c. TPS entered into an annual security service agreement with Koperasi Pegawai Pelindo III, automatically renewable annually for a maximum period of three years subject to extension. The latest extension was made on September 1, 2013, with maturity date on August 31, 2014 and has been extended to December 31, 2015. This agreement is not renewed and fully transferred to PT Aperindo Prima Mandiri.

TPS also entered into an annual outsourcing and housekeeping service agreement with Koperasi Pegawai Pelindo III. The total outsourcing and housekeeping service fee amounted to Rp1,914,964 in 2016 and RpNil in 2015. TPS also entered into an annual maintenance service agreement with Koperasi Pegawai Pelindo III. The total maintenance service fee amounted to Rp1,580,830 in 2016 and RpNil in 2015. The outstanding liabilities on outsourcing, housekeeping and maintenance services of Rp329,959 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015, respectively, were presented as part of Others under "Accrued Expenses" (Note 10).

TPS entered into an annual housekeeping service agreement with PT Prima Citra Nutrindo for one year. This agreement begins from November 14, 2016. Total housekeeping service expenses amounted to Rp963,668 in 2016. The outstanding liabilities on housekeeping service was Rp12,880 as of Desember 31, 2016.

- d. According to Decisions Main Office head Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya Number: HK.207 / 01/15 / SYB. TOR-16 dated 4 February 2016 on the assignment of exclusion framework ship and its cargo KM Wihan Sejahtera to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), to carry out the removal / exclusion framework ship.

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- e. Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang pemindahan/penyingkiran Kerangka kapal Wihan Sejahtera Nomor: BA.3241/TR.0202/P.III-2016 tanggal 5 Februari 2016, Dewan Direksi memutuskan sebagai berikut :
- Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) secara prinsip menyetujui pengangkatan kapal atau penyingkiran kerangka kapal KM Wihan Sejahtera dan muatannya dari posisi koordinat 070-11°-06"S/1120-41°-21E menuju posisi dumping area pada koordinat 070-10'-32"S/1120-41'-53E dan dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (Entitas anak).
 - Dalam pelaksanaan pengangkatan atau penyingkiran kerangka KM Wihan Sejahtera dimadsud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Biaya yang timbul atas pengangkatan atau penyingkiran kapal tersebut (Cost Recovery) akan dibiayai terlebih dahulu oleh PT Pelindo III (Persero) dan akan dikomunikasikan dengan berbagai pihak dan akan berkonsultasi dengan kepala kantor Otoritas pelabuhan Tanjung Perak mengenai kemungkinan penambahan konsesi pada terminal teluk Lamongan atau APBS untuk penyingkiran kerangka kapal tersebut.
 - Surat direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PJ.01/12/P.III-2016 tanggal 31Maret 2016 Perihal Permohonan Ijin Kegiatan Penyingkiran Kapal KM. Wihan Sejahtera.
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:KL.303/3/3/DN-16 tanggal 12 Mei 2016, tentang Pemberian ijin kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP. Wihan Sejahtera.
- e. Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the removal / exclusion of Framework Wihan Sejahtera Ships Number: BA.3241 / TR.0202 / P.III-2016 dated February 5, 2016, the Board of Directors decided the following:
- Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in principle approved the appointment of the ship or exclusion of the ship framework KM Wihan Sejahtera and its cargo of position coordinates 070-11 °-06" S / 1120-41 °-21E into the positions dumping area at coordinates 070-10 '-32"S / 1120-41'-53E and implementation was assigned to PT Pelindo Marine Service.
 - In the implementation of removal or exclusion of framework KM Wihan Sejahtera dimadsud to pay attention to the following matters:
 - Costs arising from the removal or exclusion of the vessel (Cost Recovery) will be financed in advance by PT Pelindo III (Persero) and will be communicated to the parties and will consult with the head office of the Port Authority of Tanjung Perak regarding the possibility of adding a concession on terminal bay Lamongan or APB for the removal of the ship framework.
 - Letter of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PJ.01 / 12 / P.III-2016 dated March 31, 2016, concerning Application for approval Event Vessel Removal KM. Wihan Sejahtera
 - The Director General of Sea Transportation Number: KL.303/3/3DN-16 dated May12, 2016, on Permitting removal activities framework ship KMP. Wihan Sejahtera

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

f. Melalui Surat Nomor PJ.01/07/P.III-2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Penugasan Penyingkiran Kerangka Kapal KM Wihan Sejahtera dan muatannya, Direksi PT Pelindo III (Persero) menugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (Entitas anak) untuk melaksanakan pengangkatan atau penyingkiran kerangka kapal I KM Wihan Sejahtera dan muatannya. Pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan dasar Perjanjian Penugasan Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KM Wihan Sejahtera dan muatannya kontrak No. HK.0501/366.1/P.III-2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah diubah sesuai perjanjian perubahan No. HK.0502/626.1/P.III-2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Penyelesaian pekerjaan tertuang dalam Berita Acara Final Under water Survey Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KM. Wihan Sejahtera beserta muatannya Nomor : UM.003/37/01/DNG.SBY-2016 tanggal 15 September 2016 dari kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi kelas I Surabaya.

- Berita acara pembersihan lokasi kerangka kapal KMP. Wihan Sejahtera tanggal 29 September 2016.
- Berita acara Nomor BA.54/PJ.01/DIRPMS-2016 tentang pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP. Wihan Sejahtera beserta muatannya.

g. Melalui Surat Nomor PJ.01/01/P.III.2017 tanggal 24 Januari 2017 Direktur Komersial dan Operasional telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak perihal penyampaian Biaya penugasan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera (Lihat Catatan 52)

PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)

Ambapers merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang meliputi pengeringan sungai, muara sungai dan muara laut serta pembuatan bendungan sungai berikut pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan alur pelayaran.

f. Through Letter No. PJ.01 / 07 / P.III 2016 February 5, 2016, concerning the Assignment Removal of ship Framework KM Wihan Sejahtera and its cargo, the Board of Directors of PT Pelindo III (Persero) assigned to PT Pelindo Marine Service (subsidiaries) to carry out the removal of or exclusion framework I KM Wihan Sejahtera ship and its cargo. Such work has been done on the basis of the Assignment Agreement Framework Purge job KM Wihan Sejahtera ship and its cargo contract No.HK.0501/366.1/P.III-2016 dated June 1, 2016 and has been renewed by contract number HK.0502/626.1/P.III-2016, dated December 19, 2016, completion of the work in the Minutes Final Work Under water Survey vessel Removal Framework KM. Wihan Sejahtera along with its cargo Number: UM.003 / 37/01 / DNG.SBY 2016 dated September 15, 2016 from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Navigation District grade I Surabaya.

- The Minutes Cleanup locations vessel framework KMP Wihan Welfare dated 29 September 2016
- The Minutes No. BA.54 / PJ.01 / DIRPMS 2016 on the non-tax state revenue payments (non-tax) on the activities Purge framework ship KMP Wihan Sejahtera and its cargo.

g. Through Letter No. PJ.01 / 01 / P.III.2017 dated January 24, 2017 Director of Commercial and Operations has sent a letter to the Head Office of the Main Kesyahbandaran Tanjung Perak regarding the delivery of the assignment fee exclusion of frame KMP Wihan Sejahtera ship (Shee Note 52)

PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)

Ambapers is a company which carries on business in the areas of development which includes dredging of rivers, estuaries, marine estuaries and dams as well as the management and maintenance of the shipping line.

7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions With Related Parties (Continued)

Piutang Ambapers merupakan hasil kesepakatan antara Perusahaan dengan Ambapers sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 7 Januari 2010 antara Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Perusahaan, PD Bangun Banua dan Ambapers, yang isinya bahwa terhadap pinjaman Ambapers kepada Perusahaan akan diselesaikan melalui pola business to business.

Selanjutnya Perusahaan menindaklanjuti dengan Risalah Rapat Direksi Perusahaan tentang Penyelesaian Hukum dengan Pemerintah Propinsi Kalsel dengan Keputusan Rapat bahwa penyelesaian masalah hukum adalah upaya perdamaian melalui cara "Dading".

c. Saldo dengan pihak berelasi

Rincian item yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah sebagai berikut:

Aset	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	Assets
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalents
Entitas Sepengendali				Entity Controlled by the Goverment :
Pemerintah:				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	459,695,304	457,758,019	429,551,191	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	257,457,029	268,269,833	790,787,493	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	175,565,748	143,467,774	560,133,710	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	169,395,409	418,850,000	-	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	97,426,377	145,585,957	272,918,496	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	40,000,000	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	5,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3,000,000	-	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Sub Total (Dipindahkan)	1,215,539,867	1,433,931,583	2,053,390,890	Sub Total (To Transfer)

Long term receivables from Ambapers is the result of agreement between the Company and Ambapers in accordance with the minutes of meetings dated January 7, 2010 between the Governor of South Kalimantan, the Company, PD Bangun Banua and Ambapers, contains that the loan receivables from Ambapers will be resolved through business to business scheme.

The Company follow up with Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company regarding Legal Settlement with the Provincial Government of South Kalimantan that the resolution during the meeting is to settle legal matters peacefully through way of "Dading".

c. Balances with related parties

Details of items related to transactions with Related Parties joint controlled or significant influenced by the Government are as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Sub Total (Pindahan)	1,215,539,867	1,433,931,583	2,053,390,890	<i>Sub Total (Transferred)</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3,000,000	-	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	3,000,000	-	-	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	-	463	583	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	-	68,975,000	-	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
Total	1,221,539,867	1,502,907,046	2,053,391,473	Total
Sebagai persentase terhadap total aset	<u>5.51%</u>	<u>7.92%</u>	<u>12.35%</u>	As a percentage of total assets
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya				Restricted cash and cash equivalents
<u>Entitas Sepengendali</u>				<u>Entity Controlled by the Goverment :</u>
Pemerintah:				
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	10,969,001	-	523,000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
Total	10,969,001	-	523,000	Total
Sebagai persentase terhadap total aset	<u>0.05%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	As a percentage of total assets
Piutang usaha - bruto				Trade receivables - gross
<u>Entitas Sepengendali</u>				<u>Entity Controlled by the Goverment :</u>
Pemerintah:				
PT Pertamina	6,609,485	4,167,689	19,876,369	<i>PT Pertamina</i>
PT Bahtera Adhiguna (Persero)	5,001,635	5,003,001	5,348,927	<i>PT Bahtera Adhiguna (Persero)</i>
Lain - lain (Dibawah 3,5 Miliar)	27,567,575	57,748,232	45,963,069	<i>Others</i> <i>(Below Than 3.5 Billion)</i>
Total	39,178,695	66,918,922	71,188,365	Total
Sebagai persentase terhadap total aset	<u>0.18%</u>	<u>0.35%</u>	<u>0.43%</u>	As a percentage of total assets
Piutang lain-lain				Other receivables
<u>Entitas Sepengendali</u>				<u>Entity Controlled by the Goverment :</u>
Pemerintah:				
Kementerian Perhubungan				<i>Ministry of Transportation</i>
Direktorat Perhubungan Laut	52,267,802	-	-	<i>Directorate of Sea Transportation</i>
PT Pengerkuan Indonesia (Persero)	30,267,150	30,267,150	30,267,150	<i>PT Pengerkuan Indonesia (Persero)</i>
BUMN Lainnya	5,512,357	4,118,598	6,506,915	<i>Other SOE</i>
Instansi Pemerintah	3,210,066	2,984,162	3,655,569	<i>Government Institution</i>
Sub Total (Dipindahkan)	91,257,375	37,369,910	40,429,634	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**7. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan) 7. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Sub Total (Pindahan)	91,257,375	37,369,910	40,429,634	<i>Sub Total (Transferred)</i>
Entitas asosiasi:				<i>Associates:</i>
PT Berkah Kawasan				<i>PT Berkah Kawasan</i>
Manyar Sejahtera	123,789,729	-	261,448,212	<i>Manyar Sejahtera</i>
PT Ambang Barito				<i>PT Ambang Barito</i>
Nusapersada				<i>Nusapersada</i>
(Catatan 8 dan 16)	10,500,000	14,000,000	17,500,000	<i>(Note 8 and 16)</i>
Lain - lain				<i>Others</i>
(Dibawah 3,5 Miliar)	144,184	-	86,756	<i>(Below Than 3.5 Billion)</i>
Total	225,691,288	51,369,910	319,464,602	Total
Sebagai persentase terhadap total aset	1.02%	0.27%	1.92%	As a percentage of total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha				Trade payables
<u>Entitas Sepengendali</u>				<u>Entity Controlled by the Goverment :</u>
Pemerintah:				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	95,386,260	36,907,680	23,181,313	<i>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	16,069,864	35,985,080	1,871,704	<i>PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk</i>
PT Hutama Karya (Persero)	11,631,326	35,233,741	75,517,830	<i>PT Hutama Karya (Persero)</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52,244,974	13,352,144	32,527,092	<i>PT Adhi Karya (Persero) Tbk</i>
PT Nindya Karya (Persero)	18,194,585	5,491,134	12,584,057	<i>PT Nindya Karya (Persero)</i>
Lainnya	7,763,568	9,863,074	4,222,763	<i>Others</i>
<u>Entitas asosiasi:</u>				<u>Associates:</u>
PT Portek Indonesia	11,773,256	8,791,497	3,958,356	<i>PT Portek Indonesia</i>
Lain - lain				<i>Others</i>
(Dibawah 1 Miliar)	2,180,989	2,180,989	2,180,989	<i>(Below Than 1 Billion)</i>
Total	215,244,822	147,805,339	156,044,104	Total
Uang Persekut/Panjar	3,515,744	1,827,564	3,506,529	Advances from Customer
Uang Titipan	8,363,500	12,396,303	12,247,369	Fund Rented
Total	227,124,066	162,029,206	171,798,002	Total
Sebagai persentase terhadap total liabilitas	1.81%	1.44%	1.81%	As a percentage of total liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan Pihak Berelasi :				<i>a. By Customer Related Parties :</i>
Jangka Pendek :				<i>Current Maturities :</i>
PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Catatan 7)	6,267,150	6,267,150	6,267,150	<i>PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Note 7)</i>
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Catatan 7)	123,789,729	-	261,448,212	<i>PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Note 7)</i>
PT Portek Indonesia (Catatan 7)	144,184	-	86,756	<i>PT Portek Indonesia (Note 7)</i>
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun :				<i>Current Maturities:</i>
PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Catatan 7, 17)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	<i>PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Note 7, 17)</i>
PT Ambang Barito Nusapersada (Catatan 7, 16)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	<i>PT Ambang Barito Nusapersada (Note 7, 16)</i>
Sub Total	<u>157,701,063</u>	<u>33,767,150</u>	<u>295,302,118</u>	<i>Sub Total</i>
Entitas sepengendali pemerintah:				<i>Entity Controlled by the Goverment :</i>
BUMN Lainnya	5,512,357	4,118,598	6,506,915	<i>Other SOE</i>
Instansi Pemerintah (Catatan 7)	55,477,868	2,984,162	3,655,569	<i>Government Institutions (Note 7)</i>
Lain-Lain	-	-	630,085	<i>Other</i>
Sub Total	<u>60,990,225</u>	<u>7,102,760</u>	<u>10,792,569</u>	<i>Sub Total</i>
Total	218,691,288	40,869,910	306,094,687	<i>Total</i>
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	<u>(26,723,004)</u>	<u>(21,137,824)</u>	<u>(15,771,446)</u>	<i>Allowance for Impairment Loss</i>
Total	<u>191,968,284</u>	<u>19,732,086</u>	<u>290,323,241</u>	<i>Total</i>
Pihak Ketiga :				<i>Third Parties:</i>
Pegawai Aktif	1,723,749	1,688,023	1,917,575	<i>Active Employees</i>
Swasta	33,544,501	18,638,347	7,689,354	<i>Private Companies</i>
Pegawai Pensiunan	47,086	45,845	73,577	<i>Pension Employees</i>
Lainnya	92,688	-	-	<i>Others</i>
Sub Total	<u>35,408,024</u>	<u>20,372,215</u>	<u>9,680,506</u>	<i>Sub Total</i>
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	<u>(1,011,530)</u>	<u>(1,011,530)</u>	<u>(1,011,530)</u>	<i>Allowance for Impairment Loss</i>
Total	<u>34,396,494</u>	<u>19,360,685</u>	<u>8,668,976</u>	<i>Total</i>
Total	<u>226,364,778</u>	<u>39,092,771</u>	<u>298,992,217</u>	<i>Total</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

8. Other Receivables (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
b. Berdasarkan Umur (Hari)				<i>b. By Age (Days)</i>
Belum Jatuh Tempo	182,952,416	30,974,975	285,508,043	Current
Jatuh Tempo :				Overdue :
1 - 30 Hari	285,518	-	-	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	-	-	-	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	-	-	-	91 - 180 Days
181 - 270 Hari	3,460,441	-	-	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	37,133,787	-	-	271 - 365 Days
> 365 Hari	<u>30,267,150</u>	<u>30,267,150</u>	<u>30,267,150</u>	> 365 Days
Total	<u>254,099,312</u>	<u>61,242,125</u>	<u>315,775,193</u>	Total
Cadangan Penyisihan				Allowance for Impairment Loss
Penurunan Nilai	<u>(27,734,534)</u>	<u>(22,149,354)</u>	<u>(16,782,976)</u>	
Total	<u>226,364,778</u>	<u>39,092,771</u>	<u>298,992,217</u>	Total

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut :

Movements in the balance of allowance for impairment loss are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Saldo Awal	22,149,354	16,782,976	3,750,889	<i>Beginning Balance</i>
Penurunan selama Periode/Tahun	5,585,180	5,366,378	13,032,087	<i>Impairment during the Period/Year</i>
Pemulihan selama Periode/Tahun	-	-	-	<i>Recovery during the Period/Year</i>
Saldo Akhir	<u>27,734,534</u>	<u>22,149,354</u>	<u>16,782,976</u>	<i>Ending Balance</i>

Piutang lain-lain pada BUMN lainnya antara lain atas piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia atas klaim asuransi.

Other receivables in the Other state enterprises, among others consist of receivables to PT Asuransi Indonesia on Claim assuransi services.

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of customers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Lihat Catatan 48 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Grup mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 48 regarding credit risks of accounts receivables to understand how the Group manages and measures the credit quality of accounts receivables that are neither past due nor impaired.

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PI)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja dan Keperluan Lainnya Kepada PI No 22 tanggal 13 Agustus 2007, dari notaris Kartono, SH., di Jakarta, PT Pelindo I s/d IV (Persero) Sepakat untuk mengadakan perjanjian pembayaran pemberian pinjaman kepada PI (Persero) ("Perjanjian Pinjaman") dengan ketentuan sebagai berikut :

PT Pengerukan Indonesia (Persero) (PI)

Based on the Deed of Working Capital and Other Purposes Loan Agreement to PI No. 22 dated August 13, 2007, from notary Kartono, SH., in Jakarta PT Pelindo I s/d IV (Persero) agreed to provide a loan based on the loan agreement to PI ("Loan Agreement") with the following terms:

8. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

- a) Maksud perjanjian pinjaman ini adalah untuk memberikan Pinjaman kepada PI sehubungan dengan pelaksanaan program restrukturisasi untuk modal kerja, biaya operasional, pembayaran DP-4, perbaikan kapal dan pembayaran utang kepada suplier.
- b) Pinjaman yang diberikan sebesar Rp80.000.000 yang sumber dananya berasal dari :
 - a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar 20% atau Rp16.000.000.
 - b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 40% atau Rp32.000.000.
 - c. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar 30% atau Rp24.000.000.
 - d. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar 10% atau Rp8.000.000.
- c) Pinjaman dari PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) akan ditampung dalam rekening khusus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan No. 120-00-0555949-2.
- d) Pinjaman tersebut dijamin dengan :
 - i. Setiap pekerjaan pengurukan yang dilakukan oleh PI dan yang diperoleh dari PT Pelindo I s/d IV (Persero), maka pembayaran atas pekerjaan pengurukan tersebut akan diperhitungkan dengan angsuran pembayaran pinjaman PI.
 - ii. Tambahan jaminan berupa 3 unit kapal keruk milik pihak pertama.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (pihak berelasi) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.602-00/XII/BJTI-2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang dengan kompensasi bulanan sebesar JIBOR + 4,5% per tahun terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman.

Pemberian pinjaman tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. KU.04/39/P.III-2015 dan 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015. Realisasi pembayaran pinjaman telah dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016 melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sejumlah Rp80.000.000.

8. Other Receivables (Continued)

- a) The purpose of this loan agreement is to provide a loan to PI for implementing restructured program for working capital, operating expenses, payment of DP-4, repairs of ship and debt payments to the supplier.
- b) Loan funds provided amounting to Rp80,000,000 are contributed by:
 - a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by 20% or Rp16,000,000.
 - b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) by 40% or Rp32,000,000.
 - c. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) by 30% or Rp24,000,000.
 - d. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) by 10% or Rp8,000,000.
- c) Loan funds from PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) will be collected in a special account No. 120-00-0555949-2 on PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- d) The loan was guaranteed by:
 - i. Any dredging work carried out by PI and works obtained from PT Pelindo I s / d IV (Persero), then the payment for the dredging work will be taken into account by PI installment loan payouts.
 - ii. Additional collateral in the form of three units of dredgers owned by the first party of this agreement.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia agreed to provide a loan facility to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (related parties) in accordance with the Credit Facility agreement No.KKS.602-00/XII/ BJTI-2015 on December 30, 2015 amounted to Rp80,000,000 with a period of 12 months and can not be extended with monthly compensation amounting to JIBOR + 4.5% per year commencing from the date of drawdown.

The loan was approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. KU.04/39/P.III-2015 and 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 dated December 14, 2015. Realization of loan payment was conducted on January 4, 2016 through PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk amounted Rp80,000,000.

8. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia menyetujui untuk menambah fasilitas pinjaman tersebut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 pada tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp40.000.000 dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang.

Pada tanggal 3 Januari 2017, Perusahaan memperbaharui atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. KKS.01-02/I/BJTI-2017. (Catatan 52)

Berdasarkan Perjanjian pinjaman No 02-00/XI/BJTI/-2013 Tanggal 28 Nopember 2013, BJTI memberikan pinjaman pada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Entitas assosiasi) sebesar Rp230.000, dengan dibebani bunga pinjaman sebesar JIBOR (3 bulan) + 4,5% per tahun.

8. Other Receivables (Continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia agreed to increase the loan facility in accordance with the credit facility agreement No. KKS.012-01/III/BJTI-2016 on March 30, 2016 amounted to Rp40,000,000 with a period of one year and can be extended.

On January 3, 2017, the Company renewed on Credit Facility Agreement No. KKS.01-02/I/BJTI-2017. (Note 52)

Based on loan agreement No 02-00/XI/BJTI/-2013 dated November 28, 2013, BJTI provided a loan to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (associate) amounting to Rp230,000. The loan bears interest rate of JIBOR (3 month) + 4.5% per year.

9. Persediaan

9. Inventories

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Tiang Pancang	9,020,160	12,277,522	-	<i>Piles</i>
Obat Medis	5,985,538	4,650,246	4,302,196	<i>Medical Medicine</i>
Suku Cadang	7,200,547	4,254,409	6,085,299	<i>Spare Parts</i>
Bahan Pelumas	972,747	926,078	1,198,424	<i>Lubricating Oil</i>
Perlengkapan	100,733	102,227	61,034	<i>Supplies</i>
Bahan Bakar	39,038	86,566	42,403	<i>Fuel</i>
Lain-lain	2,844,075	3,706,022	4,797,855	<i>Others</i>
Sub Total	26,162,838	26,003,070	16,487,211	<i>Sub Total</i>
Penyisihan Penurunan				<i>Allowance for Decline in Value</i>
Nilai Persediaan	(1,010,382)	(1,068,583)	(888,212)	
Total	25,152,456	24,934,487	15,598,999	Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut :

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Saldo Awal Tahun	1,068,583	888,212	631,115	<i>Balance at Beginning of Year</i>
Penambahan (Pemulihan) pada Tahun Berjalan	(58,201)	180,371	257,097	<i>Addition (Reversal) During the Year</i>
Saldo Akhir Tahun	1,010,382	1,068,583	888,212	Balance at End of Year

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Company's management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

9. Persediaan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, persediaan obat dan alat medis telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing senilai Rp1.000.000 kepada pihak ketiga yaitu PT Jasaraharja Putera yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

9. Inventories (Continued)

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the medical supplies and devices have been insured against fire, natural disasters and other risks insured with coverable amount of Rp1,000,000 each to a third party, namely PT Jasaraharja Putera, on which management believes is adequate to cover possible losses that may arise.

10.Uang Muka Kontraktor

10. Contractor Advances

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	704,691,320	895,002,835	1,114,353,954	Port Facility Equipments
Kapal	391,957,890	143,609,647	67,686	Vessels
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	77,383,170	103,093,393	173,306,190	Port Facility Buildings
Jalan dan Bangunan	1,712,806	18,167,509	2,552,704	Road and Buildings
Emplasemen	616,561	563,620	385,005	Emplacement
Konsultan	-	276,385	106,800	Consultant
Total	1,176,361,747	1,160,713,389	1,290,772,339	Total

Uang muka kontraktor merupakan uang muka yang diberikan/dibayar kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Grup atas pekerjaan kontraktor yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan termin.

Contractor advances represent advances provided / paid to a third party to carry out its activities for the Group as contractors, which will periodically be taken into account by term bill.

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan uang muka kontraktor Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 lihat Catatan 45.

Other important information relating to the contractor advances of the Company as of December 31, 2016, 2015 and 2014 is disclosed in Note 45.

11.Biaya Dibayar di Muka

11. Prepaid Expenses

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Asuransi	23,372,959	21,036,547	7,844,829	Insurance
Sewa	17,099,859	26,275,073	3,741,223	Rent
Pegawai	16,751,297	19,532,730	16,637,507	Employees
Umum	11,728,137	971,933	6,624,163	General
Pemeliharaan	241,292	39,455	69,840	Maintenance
Lainnya (Dibawah Rp50.000)	2,343,198	942,121	450,047	Others (Below Rp50,000)
Total	71,536,742	68,797,859	35,367,609	Total

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan seperti biaya pegawai, biaya umum, dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.

Prepaid expenses are expenses incurred in connection with business activities such as staff costs, general expenses, and other business expenses and the cost of rent and insurance.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

12. Pendapatan yang Masih Akan Diterima

12. Accrued Revenues

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pelayanan Medis	24,991,784	13,454,010	1,830,770	Medical Services
Pelayanan Usaha				Loading and Unloading
Bongkar Muat	23,109,900	5,338,882	10,297,216	Services
Pelayanan Kapal	21,780,099	5,086,365	3,089,477	Ship Services
Pendapatan Bunga Deposito	5,940,428	2,029,616	2,434,396	Interest income on deposit
Pengusahaan Tanah,				Land, Buildings, Water
Bangunan, Air dan Listrik	5,938,934	34,849,809	66,653,680	and Electricity
Pengusahaan Alat-alat	3,894,395	701,444	211,767	Equipment Rentals
Rupa-rupa Usaha	2,678,057	6,338,775	1,241,913	Miscellaneous Services
Pelayanan Barang	2,481,162	3,222,513	884,032	Goods Services
Dermaga/tambatan Khusus	7,661	423,523	335,026	Private Ports
Denda Keterlambatan Proyek	-	-	978,660	Late Penalties Projects
Lain-lain	275,243	1,790,217	1,559,060	Others
Total	91,097,663	73,235,154	89,515,997	Total

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan tagihan atas pendapatan usaha kepada pihak ketiga, karena pada tanggal laporan posisi keuangan, belum dibuat nota penjualannya dan atau nota penjualan belum ditandatangani.

The accrued revenues are bill of business income to a third party, due on the statement of financial position date, has not made a memorandum of sale and or has not signed the memorandum of sale.

Perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan yang masih akan diterima tersebut dapat direalisasikan.

The Company believes that the accrued revenues can be realized.

13. Investasi pada Entitas Asosiasi

13. Investments in Associates

Penyertaan saham pada entitas asosiasi sebagai berikut:

Investments in shares in associated companies are as follows:

	Kepemilikan Saham/Share Ownership			Kepemilikan Saham/Share Ownership		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Metode Ekuitas/Equity Method						
PT Portek Indonesia	49.00%	49.00%	49.00%	20,816,856	18,173,984	14,838,481
PT Lamin Aspalindotiga	40.00%	40.00%	40.00%	-	-	-
PT Ambang Barito Nusapersada	40.00%	40.00%	40.00%	12,193,125	8,691,397	10,272,808
PT Terminal Petikemas Indonesia	25.00%	25.00%	25.00%	34,757,624	35,393,703	35,767,699
PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	17.58%	17.58%	17.58%	95,588,714	108,974,660	125,155,798
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	40.00%	40.00%	40.00%	868,012,550	819,763,191	394,806,088
PT Terminal Nilam Utara	40.00%	40.00%	40.00%	70,054,330	34,958,633	3,792,807
PT Energi Manyar Sejahtera	30.00%	0.00%	0.00%	305,978	-	-
Total				1,101,729,177	1,025,955,568	584,633,681

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

13. Investments in Associates (Continued)

Ringkasan mutasi penyertaan adalah sebagai berikut :

Summary of movements in Investments is as follows:

2016					
1 Januari 2016 January 1, 2016	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Current Portion of Profit/(Loss)	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2016 December 31, 2016
Metode Ekuitas/Equity Method					
PT Portek Indonesia	18,173,984	-	2,642,872	-	20,816,856
PT Jasamarga Bali Tol	108,974,660	-	(13,385,946)	-	95,588,714
PT Terminal Petikemas Indonesia	35,393,703	-	(636,079)	-	34,757,624
PT Lamin Aspalindotiga	-	-	-	-	-
PT Ambang Barito Nusapersada	8,691,397	-	7,131,082	-	(3,629,354) 12,193,125
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	819,763,191	-	48,249,359	-	868,012,550
PT Terminal Nilam Utara	34,958,633	34,500,000	595,697	-	70,054,330
PT Energi Manyar Sejahtera	-	300,000	5,978	-	305,978
Total	1,025,955,568	34,800,000	44,602,963	(3,629,354)	1,101,729,177
2015					
1 Januari 2015 January 1, 2015	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Current Portion of Profit/(Loss)	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2015 December 31, 2015
Metode Ekuitas/Equity Method					
PT Portek Indonesia	14,838,481	-	4,589,095	-	(1,253,592) 18,173,984
PT Jasamarga Bali Tol	125,155,798	-	(16,181,138)	-	108,974,660
PT Terminal Petikemas Indonesia	35,767,699	-	(373,996)	-	35,393,703
PT Lamin Aspalindotiga	-	-	-	-	-
PT Ambang Barito Nusapersada	10,272,808	-	4,032,615	-	(5,614,026) 8,691,397
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	394,806,088	400,000,000	24,957,103	-	819,763,191
PT Terminal Nilam Utara	3,792,807	30,000,000	1,165,826	-	34,958,633
Total	584,633,681	430,000,000	18,189,505	(6,867,618)	1,025,955,568
2014					
1 Januari 2014 January 1, 2014	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Current Portion of Profit/(Loss)	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2014 December 31, 2014
Metode Ekuitas/Equity Method					
PT Portek Indonesia	13,469,175	-	2,507,184	-	(1,137,878) 14,838,481
PT Jasamarga Bali Tol	144,949,004	-	(19,793,206)	-	125,155,798
PT Terminal Petikemas Indonesia	36,405,431	-	(637,732)	-	35,767,699
PT Lamin Aspalindotiga	-	-	-	-	-
PT Ambang Barito Nusapersada	2,465,889	-	7,806,919	-	10,272,808
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	398,550,673	-	(3,744,585)	-	394,806,088
PT Terminal Nilam Utara	4,039,438	-	(246,631)	-	3,792,807
Total	599,879,610	-	(14,108,051)	(1,137,878)	584,633,681

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

13. Investments in Associates (Continued)

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK didirikan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 175 tanggal 21 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang - undangan dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

PORTEK didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970.

PORTEK Bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan pelabuhan. PORTEK berkedudukan di Jakarta.

Pemegang saham PORTEK adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (49,00%) dan Mitsui Co and Ltd, sebuah perusahaan berbadan hukum Jepang, (51,00%). Modal dasar PORTEK adalah USD2,000,000 (angka penuh). Modal ditempatkan dan disetor PORTEK pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah USD500,000 (angka penuh) atau setara dengan Rp5.450.000.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN didirikan dengan Akta Notaris Nyoman Gede Yudara, SH., No. 14 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya dan telah diubah Akta Notaris Haji Zamri, SH., No. 36 tanggal 31 Oktober 2001. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No. C-13390 HT.01.01 TH 2001 tanggal 16 Nopember 2001.

LAMIN bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. LAMIN berkedudukan di Semarang.

Pemegang saham LAMIN adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) dan PT Lamindo Sakti (60%). Modal dasar LAMIN adalah Rp10.000.000. Modal ditempatkan dan disetor LAMIN pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah RpNihil.

LAMIN sudah tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers didirikan berdasarkan akta Notaris Grace Senda Sardjito, SH Jakarta No. 9 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Ambapers bergerak dalam bidang penyediaan layanan jalur pelayaran di aliran Sungai Barito. Ambapers berkedudukan di Banjarmasin.

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK was established by Notarial deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

PORTEK was established based on Foreign Investment Act No. 1 year 1967 as amended by Act No. 11 year 1970.

PORTEK is engaged in maintenance services of port equipments. PORTEK is located in Jakarta.

Shareholders of PORTEK are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (49.00%) and Mitsui Co and Ltd, a company established with Japan law (51.00%). The authorized share capital of PORTEK amounted to USD2,000,000 (full amount). Issued and paid share capital as of December 31, 2015 and 2014 amounted to USD500,000 (full amount) or equivalent to Rp5,450,000.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN was established by Notaries deed No. 14 dated January 31, 2001 by Notary Nyoman Gede Yudara, SH., at Surabaya. This deed has been amended by notary deed No. 36 dated October 31, 2001 of Notary Haji Zamri, SH. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-13390 HT.01.01 TH2001 dated November 16, 2001.

LAMIN is engaged in the business of trading, industry, and services. LAMIN is located at Semarang.

Shareholders of LAMIN are PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) and PT Lamindo Sakti (60%). Authorized share capital of LAMIN amounted to Rp10,000,000. The issued and paid up share capital of LAMIN as of December 31, 2015 and 2014 amounted to RpNill.

LAMIN is not operating commercially since 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers was established by Notaries deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, SH at Jakarta. This deed and its amendments have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Ambapers is engaged in the business of providing river channel services in Barito River. Ambapers is located at Banjarmasin.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

13. Investments in Associates (Continued)

Pemegang saham Ambapers adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan (60%).

Modal dasar Ambapers adalah Rp2.000.000. Modal ditempatkan dan disetor Ambapers pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp600.000.

Disamping penyertaan modal saham, Ambapers juga diberikan pinjaman untuk pendanaan pengeringan alur dengan saldo pinjaman masing masing Rp7.000.000 dan Rp10.500.000 pada 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-21873-AHA-0101 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

TPI bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan mutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT didirikan berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011. Anggaran Dasar JBT tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 17 Oktober 2012 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, notaris di Depok, mengenai peningkatan Modal dasar, Modal ditempatkan dan disetor serta mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012.

JBT berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Shareholders of Ambapers are PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (40%) and South of Borneo provincial Government through Local Company Bangun Banua south of Borneo (60%).

Authorized share capital of Ambapers amounted to Rp2,000,000. The issued and paid share capital of Ambapers as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp600,000.

In addition to the share capital contributions, Ambapers also provided loan to finance the river channel dredging with the balance of Rp7,000,000 and Rp10,500,00 respectively as of December 31, 2016 and 2015,

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI was established by Notaries deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn. in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No.AHU-21873-AHA-0101 Year 2013 dated April 24, 2013.

TPI is engaged in the provision and development of port facilities, as well as the optimization of the utilization of its resources to have high quality and strong competitiveness by applying the principles of a Limited Liability Company (PT).

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT was established by Notaries deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH.., This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-57740.AH.01.01. year 2011 dated November 25, 2011. JBT's Articles of Association have been amended, most recently by the Resolution of Extraordinary Shareholder General Meeting No. 1 dated October 17, 2012 by Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH, Notary in Depok, regarding the increase in authorized capital, issued capital and paid up capital as well as the change in Article 4 verse 1 and 2. The amendments obtained an approval from Minister of Law of Republic Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Year 2012 dated December 6, 2012.

JBT is engaged in toll road concession in the area of Nusa Dua, Benoa, Bali's Ngurah Rai, which includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of highways, as well as other efforts in accordance with the provisions and applicable laws.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

Persentase kepemilikan Perusahaan pada JBT kurang dari 17,58%, namun kepemilikan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas karena Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada JBT.

Entitas Asosiasi PT BJT

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS didirikan dengan akta Notaris Ardi Kristiar, No 56 tanggal 18 Mei 2012 berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mohammad Ali Wahyudi, SH., No. 554 tanggal 16 September 2013 berkedudukan di Surabaya dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-55097.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013. BKMS bergerak dibidang perdagangan umum, pembangunan dan jasa.

Pemegang Saham BKMS adalah PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp400.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp600.000.000 atau 60%. BKMS saat ini masih dalam masa konstruksi.

BJTIPort-Gama Joint Operation

Sesuai akta notaris no.1 tanggal 6 Juni 2016 oleh Yahya Abdullah Waber, S.H., notaris di Surabaya, Perusahaan dan PT Gama Intisamudera (Gama) sepakat untuk melakukan kerjasama operasi. Para pihak melakukan penyetoran modal sebesar Rp1.000.000 dengan komposisi masing-masing sebesar Rp550.000 atau 55% (Perusahaan) dan Rp450.000 atau 45% (Gama). Perusahaan telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 28 Juni 2016.

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

Sesuai dengan surat penawaran kepada perusahaan tanggal 19 Mei 2015, PT AKR Corporindo, Tbk melakukan penawaran saham EMS sebesar Rp300.000 atau 300 lembar saham yang semula merupakan milik PT Andahana Abadi (ADH). Berdasarkan Surat Keputusan sirkuler pemegang saham EMS, perusahaan setuju untuk melakukan pembelian saham milik ADH dengan setoran modal Rp300.000 untuk kepemilikan 30%. Perusahaan telah melakukan penyetoran modal pada tanggal 27 Juni 2016. Akta Penambahan modal ini masih dalam pengurusan secara legal.

13. Investments in Associates (Continued)

The percentage ownership of the Company in JBT is less than 17,58%, however, such ownership is classified as investments in associates using equity method as the Company has significant influence on JBT.

The Associates of PT BJT

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS was established under the notarial deed by Ardi Kristiar, No. 56 dated May 18, 2012, in Jakarta and was last amendment by notary, Mohammad Ali Wahyudi, SH., under notarial deed No. 554 dated September 16, 2013, in Surabaya and was approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-55097.AH.01.02. year 2013 dated October 30, 2013. BKMS is engaged in general tradings, constructions, and services.

The Shareholders of BKMS are PT Berlian Jasa Terminal Indonesia with the total of Rp400,000,000 or 40% and PT Usaha Era Pratama Nusantara with the total of Rp600,000,000 or 60%. As of date, BKMS is still under construction.

BJTIPort-Gama Joint Operation

According to notarial deed no.1 dated June 6, 2016 by Yahya Abdullah Waber, SH, notary in Surabaya, the Company and PT Gama Intisamudera (Gama) agreed to enter of joint operations. The parties make capital injection of Rp1,000,000 with the composition of each of Rp550,000 or 55% (the Company) and Rp450,000, or 45% (Gama). The company has to raise more capital on June 28, 2016

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

According to the offering letter to the company dated May 19, 2015, PT AKR, Tbk offering EMS shares amounting to Rp300,000 or 300 shares which originally was owned by PT Andahana Abadi (ADH). Based on the Decree circular EMS shareholders, the Company agreed to purchase the shares owned by ADH with capital injection of Rp300,000 for 30% ownership. The company has to raise more capital on June 27, 2016. The capital increase deed is still in the administration legally.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

BJTI PORT -MSW JO

Perusahaan melakukan joint operation dengan PT MSW Teknologi Baru atas pemeliharaan container crane dan Grap Ship Unloader dengan setoran modal awal sebesar Rp3.000.000, untuk PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp1.800.000 dan PT Gama Intisamudera sebesar Rp1.200.000, serta telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi No. 437 tanggal 30 September 2016.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

Pada tanggal 23 Agustus 2013, BJTI menandatangani perjanjian pemegang saham dengan PT Andahanesa Abadi dengan No. KKS.48-04/VIII/BJTI2013. Perjanjian ini mengatur pendirian entitas anak yang beroperasi di Terminal Nilam Utara dengan nama "PT Terminal Nilam Utara".

TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013, oleh Yulia, SH., notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-13479.AH.01.01.TH.2014 tanggal 14 April 2014.

Pemegang Saham TNU adalah BJTI sebesar Rp4.000.000 atau 40%, PT Andahanesa Abadi Rp6.000.000 atau 60%.

13. Investments in Associates (Continued)

BJTI PORT -MSW JO

The Company carries out a joint operation with PT MSW New Technologies for the maintenance of container cranes and Grap Ship Unloader with an initial capital injection Rp3.000.000, to PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounted Rp1,800,000 and PT Gama Intisamudera of Rp1.200.000, as well as set forth in the Deed of Joint Operation Agreement No. 437 of September 30, 2016.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

On August 23, 2013, a shareholder agreement No. KKS.48-04/VIII/BJTI2013 was signed by both parties, BJTI and PT Andahanesa Abadi. The agreement is aimed to manage the establishment of enterprise subsidiary, named PT Terminal Nilam Utara, that is going to run the operations in the North Terminal Nilam.

TNU was established under Notarial deed No. 89 dated August 23, 2013 by Yulia SH., a notary in Jakarta and have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-13479.AH.01.01.TH.2014 dated April 14, 2014.

The shareholders of TNU are BJTI amounting to Rp4,000,000 or 40% and PT Andahanesa Abadi amounting to Rp6,000,000 or 60%.

14. Properti Investasi

14. Investment Properties

2016					
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Harga Perolehan :					Cost :
Tanah	31,495,357	-	-	(10,593)	31,484,764
Bangunan	32,907,728	84,085	-	(2,571,891)	30,419,922
Sub Total	64,403,085	84,085	-	(2,582,484)	61,904,686
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
Bangunan	5,435,699	1,755,315	-	(464,519)	6,726,496
Sub Total	5,435,699	1,755,315	-	(464,519)	6,726,496
Nilai Buku	58,967,386				55,178,190
					Net Book Value
2015					
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Harga Perolehan :					Cost :
Tanah	32,253,404	-	-	(758,047)	31,495,357
Bangunan	25,644,485	2,143,383	-	5,119,860	32,907,728
Sub Total	57,897,889	2,143,383	-	4,361,813	64,403,085
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
Bangunan	2,847,281	1,979,992	-	608,426	5,435,699
Sub Total	2,847,281	1,979,992	-	608,426	5,435,699
Nilai Buku	55,050,608				58,967,386
					Net Book Value

14. Properti Investasi (Lanjutan)

14. Investment Properties (Continued)

	2014				
	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2014/ December 31, 2014
Harga Perolehan :					Cost :
Tanah	32,253,404	-	-	-	Land
Bangunan	11,160,177	1,394,398	-	13,089,910	Building
Sub Total	43,413,581	1,394,398	-	13,089,910	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :					Accumulated Depreciation :
Bangunan	1,510,745	1,245,107	-	91,429	Building
Sub Total	1,510,745	1,245,107	-	91,429	Sub Total
Nilai Buku	41,902,836			55,050,608	Net Book Value

Properti investasi terdiri dari unit space tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan PT Pelindo III (Persero) seluas 12.952.168 m² pada tahun 2016 dan seluas 14.784.464 m² pada tahun 2015 dan 2014, yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa. Properti investasi tersebut direklasifikasi dari akun aset tetap ke akun properti investasi oleh manajemen Perusahaan.

Pada tahun 2016, Grup melakukan reklasifikasi property investasi sebesar Rp2,585,446 atas lapangan penumpukan yang tidak disewakan lagi ke aset takberwujud (Catatan 17).

Nilai wajar properti investasi tanah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp46.720.509.837 berdasarkan penilaian oleh KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan (Penilai Independen) dalam laporannya bertanggal 10 Desember 2015, sedangkan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp9.322.761.906 berdasarkan penilaian internal Perusahaan berdasarkan Pendekatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perusahaan mencatat dan mengakui properti investasi tersebut berdasarkan nilai tercatat pada saat sebelum dipindahkan ke properti investasi. Perusahaan belum melakukan penilaian properti investasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan - perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Investment properties consist of land and building space unit in the port area of PT Pelindo III (Persero) covering 12,952,168 sqm in 2016 and 14.784.464 sqm in 2015 and 2014, which are leased to a third party under the lease agreements. The investment property reclassifications by the Company's Management are from fixed assets account to investment property account.

In 2016, the Group has reclassified the investment properties amounted to Rp2,585,446 consist of container yard that is not rented again to intangible assets (Note 17).

The fair value of land investment properties at December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp46.720.509.837 based on the appraisal by KJPP Immanuel, Jonny and Partners (Independent Appraiser) report dated December 10, 2015, while the fair value of investment properties as of December 31, 2014 amounting to 9. 322 761 906 Company based on internal ratings based approach taxable value (NJOP). The Company records and recognizes investment property is based on the value recorded at the time before being transferred to investment property. Pusahaan not make an assessment of an investment property.

Based on the review of the recoverable value of investment property, the Company's management believes that there are no events or changes that indicate a decline in value of assets as of December 31, 2016 and 2015.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

15. Aset Tetap

15. Fixed Assets

	2016						At Cost: Principal Fixed Assets: Port Facilities Ships Port Facility Equipments Port Facility Installations Dredging and Maintenance Costs Significantly
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Peningkatan (Penurunan) Atas Revaluasi Aset/ Increase (Decrease) on Revaluation of Fixed Assets	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Biaya Perolehan:							
Aset Tetap Pokok :							
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,773,454,890	4,847,832	1,466,666	(29,222,312)	537,034,989	3,284,648,733	Port Facilities
Kapal	546,184,737	3,822,285	-	-	26,639,628	576,646,650	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	3,205,156,372	100,359,169	4,879,439	(804,524,355)	756,797,678	3,252,909,425	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	383,031,758	23,692,239	-	-	270,141,387	676,865,384	Port Facility Installations
Biaya Pengurukan dan Pemeliharaan Signifikan	209,125,705	13,610,004	-	-	(144,565,196)	78,170,513	Dredging and Maintenance Costs Significantly
Aset Tetap Penunjang :							Supporting Fixed Assets:
Tanah	176,069,741	-	-	-	10,592	176,080,333	Land
Jalan dan Bangunan	757,431,090	11,734,479	-	-	299,351,658	1,068,517,227	Roads and Buildings
Peralatan	352,118,446	17,268,839	33,135	-	92,759,621	462,113,771	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :							Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	51,736,216	5,216,515	1,108,199	-	111,467	55,955,999	Vehicles
Emplasement	178,351,511	5,416,547	-	-	20,986,443	204,754,501	Emplacement
Aset dalam Penyelesaian :							Construction in Progress :
Bangunan Fasilitas							
Pelabuhan	426,533,294	378,742,704	522,000	-	(515,942,627)	288,811,371	Port Facility Buildings
Kapal	8,805,264	425,039,221	-	-	(26,639,628)	407,204,857	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya	210,431,936	920,584,757	-	-	(825,939,335)	305,077,358	Port Facility Equipment and Other Equipments
Jalan dan Bangunan	117,244,990	113,661,240	-	-	(206,899,461)	24,006,769	Roads and Buildingss
Tanah	561,313,171	32,834,502	690,422	-	(510,422,609)	83,034,642	Lands
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	66,151,901	203,484,949	-	-	(218,804,487)	50,832,363	Port Facility Installations
Peralatan	27,092,564	66,778,739	-	-	(91,782,700)	2,088,803	Equipments
Emplasemen	6,865,300	33,054,155	-	-	(26,588,774)	13,330,681	Emplacement
Total	10,057,098,886	2,360,148,176	8,699,861	(833,746,667)	(563,751,354)	11,011,049,180	Total
Akumulasi Penyusutan:							Accumulated Depreciation:
Aset Tetap Pokok :							Principal Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	639,820,219	125,992,766	1,466,666	(731,016,090)	35,847,174	69,177,403	Port Facilities
Kapal	154,928,989	25,383,697	-	-	-	180,312,686	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	1,082,918,699	236,058,388	4,879,439	(1,029,999,432)	(141,689,425)	142,408,791	Port Facility Equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	113,434,593	33,521,506	-	-	-	146,956,099	Port Facility Installations
Biaya Pengurukan dan Pemeliharaan Signifikan	76,701,085	6,998,955	-	-	(53,492,135)	30,207,905	Dredging and Maintenance Costs Significantly
Aset Tetap Penunjang :							Supporting Fixed Assets:
Jalan dan Bangunan	243,687,624	49,484,832	-	-	17,382,978	310,555,434	Roads and Buildings
Peralatan	223,326,573	43,189,695	27,780	-	-	266,488,488	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :							Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	27,840,397	5,290,543	1,005,030	-	89,173	32,215,083	Vehicles
Emplasement	46,363,837	7,556,111	-	-	-	53,919,948	Emplacement
Total	2,609,022,016	533,476,493	7,378,915	(1,761,015,522)	(141,862,235)	1,232,241,837	Total
Penurunan Nilai Aset							Impairment of Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	11,923,110	937,153	4,812,438	-	-	8,047,825	Port Facilities
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	Port Facility Equipments
Total	11,923,110	937,153	4,812,438	-	-	8,047,825	Total
Nilai Buku	7,436,153,760					9,770,759,518	Net Book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	2015				
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015
Biaya Perolehan:					
Aset Tetap Pokok :					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,508,780,898	2,132,833	5,265,113	267,806,272	2,773,454,890
Kapal	496,880,128	49,304,609	-	-	546,184,737
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	2,188,493,239	2,309,509	13,370,917	1,027,724,541	3,205,156,372
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	301,892,024	7,670,883	329,150	73,798,001	383,081,758
Biaya Pengeringan dan Pemeliharaan Signifikan	161,422,432	75,455	-	47,627,818	209,125,705
					Dredging and Maintenance Costs Significantly
Aset Tetap Penunjang :					
Tanah	158,036,986	-	-	18,032,755	176,069,741
Jalan dan Bangunan	639,296,310	5,901,084	1,258,794	113,492,490	757,431,090
Peralatan	329,796,840	14,667,760	9,223,563	16,877,409	352,118,446
Aset Tetap Pelengkap :					
Kendaraan	53,802,392	745,542	1,873,622	(938,096)	51,736,216
Emplasement	165,295,847	33,600	-	13,022,064	178,351,511
Aset dalam Penyelesaian :					
Bangunan Fasilitas					Construction in Progress :
Pelabuhan	363,275,397	378,489,338	8,961,283	(306,270,158)	426,533,294
Kapal	36,154	8,805,265	36,155	-	8,805,264
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan					Port Facility Buildings
dan Peralatan Lainnya	28,123,094	1,290,160,383	4,814,013	(1,103,037,528)	Ships
Jalan dan Bangunan	73,920,588	143,725,191	1,569,697	(98,831,092)	Port Facility Equipment and Other Equipments
Tanah	404,612,952	154,892,545	-	1,807,674	Roads and Buildingss
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	23,142,801	112,358,846	-	(69,349,746)	Lands
Peralatan	5,722,289	32,575,628	1,040,842	(10,164,511)	Port Facility Installations
Emplasemen	2,432,672	17,454,692	-	(13,022,064)	Equipments
Total	7,904,963,043	2,221,303,163	47,743,149	(21,424,171)	Emplacement
					Total
Akumulasi Penyusutan:					
Aset Tetap Pokok :					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	564,914,010	79,927,534	2,149,729	(2,871,596)	639,820,219
Kapal	132,047,865	22,881,124	-	-	154,928,989
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	957,280,295	156,520,857	13,046,120	(17,836,333)	1,082,918,699
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	93,274,102	20,581,191	325,622	(95,078)	113,434,593
Biaya Pengeringan dan Pemeliharaan Signifikan	41,242,152	35,458,933	-	-	Dredging and Maintenance Costs Significantly
Aset Tetap Penunjang :					
Jalan dan Bangunan	212,161,397	33,243,748	941,297	(776,224)	243,687,624
Peralatan	199,719,941	29,691,154	3,910,835	(2,173,687)	223,326,573
Aset Tetap Pelengkap :					
Kendaraan	28,214,520	4,949,908	1,499,455	(3,824,576)	Supplementary Fixed Assets: Vehicles
Emplasement	39,591,074	6,772,763	-	-	Emplacement
Total	2,268,445,356	390,027,212	21,873,058	(27,577,494)	Total
Penurunan Nilai Aset					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	5,550,921	6,372,189	-	-	Impairment of Assets: Port Facilities
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	146,042	-	146,042	-	Port Facility Equipments
Total	5,696,963	6,372,189	146,042	-	Total
Nilai Buku	5,630,820,724				Net Book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	2014				
	1 January 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2014/ December 31, 2014
Biaya Perolehan:					
Aset Tetap Pokok :					
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1,987,622,533	8,271,486	168,512	513,055,391	2,508,780,898
Kapal	437,027,713	38,930,731	-	20,921,684	496,880,128
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	1,875,476,667	9,527,835	-	303,488,737	2,188,493,239
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	215,822,496	9,655,869	-	76,413,659	301,892,024
Biaya Pengeringan dan Pemeliharaan Signifikan	156,481,154	96,846,626	91,905,348	-	161,422,432
	At Cost:				
	Principal Fixed Assets:				
	Port Facilities				
	Ships				
	Port Facility Equipments				
	Port Facility Installations				
	Dredging and Maintenance Costs Significantly				
Aset Tetap Penunjang :					
Tanah	153,006,106	-	-	5,030,880	158,036,986
Jalan dan Bangunan	566,617,801	2,425,034	24,884	70,278,359	639,296,310
Peralatan	268,596,020	28,763,402	-	32,437,418	329,796,840
	Supporting Fixed Assets:				
	Land				
	Roads and Buildings				
	Equipments				
Aset Tetap Pelengkap :					
Kendaraan	44,348,143	4,746,952	2,270,090	6,977,387	53,802,392
Emplasement	77,650,168	-	-	87,645,679	165,295,847
	Supplementary Fixed Assets:				
	Vehicles				
	Emplacement				
Aset dalam Penyelesaian :					
	Construction in Progress :				
Bangunan Fasilitas					
Pelabuhan	552,630,655	371,154,904	-	(560,510,162)	363,275,397
Kapal	7,773,360	6,090,909	-	(13,828,115)	36,154
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan					
dan Peralatan Lainnya	84,081,760	178,731,526	-	(234,690,192)	28,123,094
Jalan dan Bangunan	13,392,675	118,959,651	-	(58,431,738)	73,920,588
Tanah	5,095,172	400,386,482	-	(868,702)	404,612,952
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	10,281,335	85,860,788	-	(72,999,322)	23,142,801
Peralatan	685,825	26,038,838	-	(21,002,374)	5,722,289
Emplasemen	243,071	89,835,280	-	(87,645,679)	2,432,672
Total	6,456,832,654	1,476,226,313	94,368,834	66,272,910	7,904,963,043
	Total				
Akumulasi Penyusutan:					
	Accumulated Depreciation:				
Aset Tetap Pokok :					
	Principal Fixed Assets:				
	Port Facilities				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	499,691,235	65,232,261	9,486	-	564,914,010
Kapal	111,689,217	20,358,648	-	-	132,047,865
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	824,435,801	130,511,414	-	2,333,080	957,280,295
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	77,481,713	15,372,576	-	419,813	93,274,102
Biaya Pengeringan dan Pemeliharaan Signifikan	48,218,525	22,038,699	29,015,072	-	41,242,152
	Dredging and Maintenance Costs Significantly				
Aset Tetap Penunjang :					
Jalan dan Bangunan	183,388,177	28,774,657	1,437	-	212,161,397
Peralatan	174,433,972	24,967,533	-	318,436	199,719,941
	Supporting Fixed Assets:				
	Roads and Buildings				
	Equipments				
Aset Tetap Pelengkap :					
Kendaraan	25,021,019	5,111,850	1,918,349	-	28,214,520
Emplasement	34,268,579	5,322,495	-	-	39,591,074
Total	1,978,628,239	317,690,133	30,944,344	3,071,329	2,268,445,356
	Total				
Penurunan Nilai Aset					
	Impairment of Assets:				
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	-	5,550,921	-	-	5,550,921
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	-	146,042	-	-	146,042
Total	-	5,696,963	-	-	5,696,963
Nilai Buku	4,478,204,415				5,630,820,724
	Net Book value				

15. Aset Tetap (Lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Beban Operasi	533,476,493	390,027,212	317,690,133	Operating Expenses
Total	533,476,493	390,027,212	317,690,133	Total

Rincian Aset dalam Penyelesaian (Konstruksi) dan pemasangan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Aset Dalam Penyelesaian/ Construction in Progress	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/At Cost
2016			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ Building and Port Facilities	0% - 99,3%	February 2017 - December 2018/	288,811,371
Kapal/Ships	55% - 99,48 %	Februari 2017 - Desember 2018 April - Oktober/April - Oktober 2017	407,204,857
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/Port Facility Equipments and Other Equipments	15 - 90,73 %	June/Juni 2018	305,077,358
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	6,2 - 93,26 %	December/Desember 2017	24,006,769
Tanah/Lands	0%	December/Desember 2017	83,034,642
Instalasi fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	10% - 75 %	June /Juni 2017	50,832,363
Peralatan/Equipments	9% - 95%	June /Juni 2017	2,088,603
Emplasemen/Emplacement	4% - 55,2%	June /Juni 2017	13,330,681
Total			1,174,386,644

Aset Dalam Penyelesaian/ Construction in Progress	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/At Cost
2015			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ Building and Port Facilities	2.27%-97.78%	Januari - Mei 2016/ January - May 2016	426,533,294
Kapal/Ships	4%-26.8%	2017	8,805,264
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/Port Facility Equipments and Other Equipments	13.96%-88.57%	Januari - Februari 2016/ January - February 2016	210,431,936
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	3.47%-95%	Januari - Februari 2016/ January - February 2016	117,244,990
Tanah/Lands	100%	Januari 2016/January 2016	561,313,171
Instalasi fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	36.53%	Februari 2016/February 2016	66,151,901
Peralatan/Equipments	84.84%-91.61%	Januari 2016/January 2016	27,092,564
Emplasemen/Emplacement	20.386%-30%	Juli 2016/July 2016	6,865,300
Total			1,424,438,420

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

Aset Dalam Penyelesaian/ Construction in Progress	Percentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/At Cost
2014			
Bangunan dan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Building and Port Facilities</i>	1.43%-99.99%	Januari 2015- Agustus 2015/ <i>January 2015 - August 2015</i>	363,275,397
Kapal/Ships	99.99%	Desember/December 2015	36,154
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan dan Peralatan Lainnya/ <i>Port Facility Equipments and Other Equipments</i>	20.00%-99.99%	Januari 2015- April 2015/ <i>January 2015- April 2015</i>	28,123,094
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	7.00%-99.99%	Januari 2015 - Maret 2015 <i>January 2015-March 2015</i>	73,920,588
Tanah/Lands	99.99%	Januari/January 2015	404,612,952
Instalasi fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installations</i>	3.15%-99.99%	Januari 2015 - Maret 2015 <i>Janury 2015-March 2015</i>	23,142,801
Peralatan/Equipments	40.00%-99.99%	Januari 2015- April 2015/ <i>January 2015- April 2015</i>	5,722,289
Emplasemen/Emplacement	30.22%-99.99%	Januari 2015 - Juni 2015 <i>January 2015-June 2015</i>	2,432,672
Total			901,265,947

Hak atas tanah Grup berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"). SHGB memiliki masa berlaku antara tahun 2020 hingga 2045 Manajemen berpendapat bahwa SHGB tersebut dapat diperpanjang.

Hak atas tanah seluas 578.503 m² masih atas nama pemilik lama dan saat ini masih dalam proses balik nama menjadi nama Perusahaan dan hak atas tanah seluas 1.142.991 m² saat ini masih dalam proses perpanjangan hak.

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk kelompok aset tetap tertentu yaitu Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan (sesuai Surat Direksi PT Pelindo III (Persero) No.00036C/PA/JMM-XII/2016 tanggal 6 Desember 2016) dengan menggunakan nilai buku per 30 Juni 2016. Perusahaan menggunakan Jasa Penilai Independen yaitu KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Dasar Penilai Independen untuk mengestimasi nilai wajar aset tetap adalah dengan Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pasar. Berikut hasil penilaian estimasi nilai wajar yang berpengaruh dalam laporan keuangan.

The Group's land represents such as Rights Management Certificate ("HPL")freehold land ("SHM") and land-use rights ("SHGB"). The SHGB will expire between 2020 until 2045 Management believes that the SHGB are extendable.

Land rights measuring 578,503 sqm still in the name of the old owner and is currently still in the process of being transferred to the Company's name and rights to the land area of 1,142,991 sqm this time still in the process of renewal of property rights.

The Company revalued its fixed assets for the group of certain fixed assetsnamely port facility Bulidings and port facility Equipments (According Letter of Directors of PT Pelindo III (Persero) No.00036C/PA/JMM-XII/2016 dated December 6, 2016 by using the book value per June 30, 2016. The Company uses independent Appraisal Service, KJPP Immanuel, Johnny and Rekan Independent assessors basis for estimating the fair value of fixed assets is the cost approach and market approach. Here are the results of votes that affect the estimated fair value in the financial statements.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	Harga Perolehan/ At Cost	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai Buku 30 Juni 2016/June 30, 2016 Book Value	Nilai Wajar/ Fair value	Selisih Lebih (Kurang)/Excess (Less)	Keuntungan Revaluasi (Pendapatan Komprehensif Lain)/Revaluation Gains (Other Comprehensive Income)		Kerugian Revaluasi (Laba Rugi)/ Revaluation losses (Income)
						31 Desember 2016 / December 31, 2016		
Perusahaan/Company								
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facilities</i>	2,806,231,227	731,016,090	2,075,215,137	2,761,759,656	686,544,519	791,963,629	(105,419,110)	
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Equipment</i>	1,648,836,855	499,782,030	1,149,054,825	1,442,202,899	293,148,074	305,192,431	(12,044,357)	
Entitas Anak/Subsidiaries								
PT Terminal Petikemas								
Surabaya	1,076,545,497	515,519,853	561,025,644	572,574,258	11,548,614	11,548,614	-	
PT Pelindo Marine Service	13,776,537	1,466,666	12,309,871	28,269,000	15,959,129	15,959,129	-	
PT Berlian Jasa Terminal								
Indonesia	560,847,647	142,415,928	418,431,719	480,820,956	62,389,237	64,929,286	(2,540,049)	
PT Terminal Teluk Lamong	2,117,000	448,867	1,668,133	1,763,344	95,211	156,409	(61,198)	
Total	6,108,354,763	1,890,649,434	4,217,705,329	5,287,390,113	1,069,684,784	1,189,749,498	(120,064,714)	

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup telah mengasuransikan aset tetap yang dimiliki, kecuali tanah, terhadap, risiko kebakaran, property all risk, industrial all risk dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing - masing sebesar Rp6.432,038.851 dan USD450,000,000 (angka penuh) untuk tahun 2016, Rp6.614.259.187 dan USD350,000,000 (angka penuh) untuk tahun 2015 serta Rp8.713.504.184 dan USD726,837,582 (angka penuh) untuk tahun 2014, kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Wahana Tata, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. LR-118/PW13/2/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tinjauan dan Evaluasi atas Laporan Akhir Studi Konsesi Terminal Multipurpose Kalimireng Pelabuhan Gresik yang dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera, maka Grup melakukan reklassifikasi aset dalam penyelesaian aset tetap sebesar Rp566.472.412.815 atas aset konsesi Terminal Pelabuhan Manyar Gresik ke aset takberwujud. Laporan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk penetapan jangka waktu konsesi dan fee konsesi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik pada tanggal 30 Desember 2016 (Catatan 51).

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the Group insured its fixed assets, except land, against the risk of fire, all property risk, all industrial risks and any other risks with sum insured amount of Rp6,432,038,851 and USD450,000,000 (full amount) for 2016, Rp6,614,259,187 and USD350,000,000 (full amount) for 2015, and, Rp8,713,504,184 and USD726,837,582 (full amount) for 2014, respectively, to third parties, namely PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jasa Raharja Putera Muda, PT Zurich Insurance Indonesia and PT Wahana Tata, which, according to the management, is adequate to cover possible losses.

Based on the Report of Badan Pengawasan Keuangan and Pembangunan (BPKP) Representatives of East Java Province No. LR-118 / PW13 / 2/2016 dated March 17, 2016 on the Report of the Review and Evaluation of the Final Report of the Study of Multipurpose Terminal Kalimireng Gresik Port managed by PT Berlian Manyar Sejahtera, the Group has reclassified construction in progress of the fixed assets of Rp566,472,412,815 on assets concession Port Terminal Manyar Gresik to intangible assets. The report is also used as a basis for establishing term concession and concession fees as set forth in the Minutes of Discussion on Concession Agreement with Kesyahbandaran Office and Port Authority Class II Gresik on December 30, 2016 (Note 51).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 10 Desember 2015, nilai wajar aset tetap tanah Perusahaan pada tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp37.722.710.263.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 6 Desember 2016 , nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan perusahaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp210.655.800 dan Rp550.396.800.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen, nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp149.433.000 dan Rp157.675.400

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai wajar tersebut masih relevan karena tidak terdapat Perubahan kondisi aset tetap tanah secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2016.

Perhitungan (keuntungan)/kerugian penjualan aset tetap dan aset tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Harga Perolehan	24,824,515	23,151,520	17,502,153	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>(24,311,033)</u>	<u>(20,532,388)</u>	<u>(17,262,707)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku bersih	513,482	2,619,132	239,446	Net book value
Hasil Penjualan	1,300,371	13,020,309	8,167,163	Proceeds from Sales
Laba Penjualan aset tetap	786,889	10,401,176	7,927,717	Gain on sale of fixed assets

16. Piutang Lain-lain

a. Berdasarkan Pelanggan
Pihak Berelasi :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp
PT Ambang Barito			
Nusapersada			
(Lihat Catatan 7, 8)	10,500,000	14,000,000	17,500,000
Sub Total	10,500,000	14,000,000	17,500,000

Bagian Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp
PT Ambang Barito			
Nusapersada	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,500,000)
Sub Total	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,500,000)
PIUTANG LAIN-LAIN			
- Belum Jatuh Tempo	7,000,000	10,500,000	14,000,000

a. By Customer
Related Parties :

PT Ambang Barito
Nusapersada
(See Note 7, 8)

Sub Total

Current Maturities:
PT Ambang Barito
Nusapersada

Sub Total

Other Receivable
- Current

15. Fixed Assets (Continued)

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan in their report dated December 10, 2015, the fair value of fixed assets land of the Company as of December 7, 2015 amounted to Rp37.722.710.263.

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan in their report dated December 6, 2016, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the Company as of June 30, 2016 amounted to Rp210.655.800 and Rp550.396.800.

Based on the appraisal, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the subsidiaries as of June 30, 2016 amounted to Rp149.433.000 and Rp157.675.400

The Company's management believes that the fair value is still relevant because there is no change in the physical conditions of fixed assed significantly in December 2016.

The calculation of the (gain)/loss on disposal of fixed assets and fixed assets held for sale are as follow:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. Aset Takberwujud

17. Intangible Assets

	2016					
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Biaya Perolehan:						
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						At Cost:
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	3,916,252,053	-	-	554,909,350	4,471,161,402	<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Hak Konsesi - APBS	952,594,783	-	-	-	952,594,783	Concession right - APBS
Hak Konsesi - BMS	-	4,576,695	-	725,009,862	729,586,557	Concession rights - BMS
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contractions</u>
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	435,215,980	725,629,774	-	(554,909,350)	605,936,405	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - BMS	162,699,937	2,019,995	-	(158,537,449)	6,182,482	Construction - BMS
Piranti Lunak	25,328,847	-	-	(25,328,847)	-	Computer Software
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Merk Dagang	500,000	-	-	-	500,000	Trademark
Lisensi	1,572,052	1,205,000	-	-	2,777,052	Licenses - Net
Piranti Lunak	5,337,354	1,125,448	-	19,008,744	25,471,547	Computer Software
Sub Total	5,499,501,007	734,556,912	-	560,152,310	6,794,210,229	Sub Total
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	93,426,159	126,222,658	-	-	219,648,817	Concession right - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	23,262,170	47,608,824	-	-	70,870,994	Concession rights - APBS
Hak Konsesi - BMS	-	10,146,807	-	-	10,146,807	Concession rights - BMS
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	593,741	288,182	-	-	881,923	Licenses - Net
Piranti Lunak	3,277,665	2,273,907	-	-	5,551,572	Computer Software
Sub Total	120,559,735	186,540,378	-	-	307,100,113	Sub Total
Total	5,378,941,272				6,487,110,116	Total
	2015					
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Biaya Perolehan:						
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						At Cost:
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	-	-	-	3,916,252,053	3,916,252,053	<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Hak Konsesi - APBS	-	-	-	952,594,783	952,594,783	Concession right - APBS
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contractions</u>
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	2,978,035,197	1,373,432,836	-	(3,916,252,053)	435,215,980	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - APBS	558,259,327	394,335,457	-	(952,594,783)	-	Construction - APBS
Konstruksi - BMS	144,699,509	18,000,428	-	-	162,699,937	Construction - BMS
Piranti Lunak	-	25,328,847	-	-	25,328,847	Computer Software
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Merk Dagang	-	500,000	-	-	500,000	Trademark
Lisensi	680,095	891,957	-	-	1,572,052	Licenses - Net
Piranti Lunak	3,051,038	2,286,316	-	-	5,337,354	Computer Software
Sub Total	3,684,725,165	1,814,775,841	-	-	5,499,501,007	Sub Total
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	-	93,426,159	-	-	93,426,159	Concession right - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	-	23,262,170	-	-	23,262,170	Construction - APBS
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	460,512	133,229	-	-	593,741	Licenses - Net
Piranti Lunak	1,610,016	1,667,649	-	-	3,277,665	Computer Software
Sub Total	2,070,528	118,489,207	-	-	120,559,735	Sub Total
Total	3,682,654,638				5,378,941,272	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

17. Intangible Assets (Continued)

	2014				At Cost:
	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2014/ December 31, 2014
Biaya Perolehan:					
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>					<u>Intangible Assets - Construction</u>
Konstruksi - Teluk Lamong	1,652,816,254	1,325,218,943	-	-	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - APBS	2,565,507	555,693,820	-	-	Construction - APBS
Konstruksi - BMS	-	144,699,509	-	-	Construction - BMS
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>					<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	680,095	-	-	-	Licenses - Net
Piranti Lunak	2,233,004	818,034	-	-	Computer Software
Sub Total	1,658,294,859	2,026,430,306	-	-	Sub Total
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>					<u>Other Intangible Assets</u>
Lisensi	350,720	109,792	-	-	Licenses - Net
Piranti Lunak	714,799	895,217	-	-	Computer Software
Sub Total	1,065,519	1,005,009	-	-	Sub Total
Total	1,657,229,340				Total

Akumulasi kapitalisasi biaya pinjaman pada aset dalam penyelesaian (konstruksi) - bangunan fasilitas pelabuhan adalah sebagai berikut :

Accumulated capitalized borrowing costs in the construction in progress (construction) - building port facilities are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
PT Bank ANZ Indonesia	177,551,628	177,551,628	177,331,846	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank	22,618,183	22,618,183	16,210,972	Deutsche Bank
Obligasi	84,500,574	84,500,574	20,741,587	Bonds
Total	284,670,385	284,670,385	214,284,405	Total

Goodwill

Nilai wajar dari aset dan liabilitas teridentifikasi PDS (dahulu PJU/ PT Persada Jasa Utama) pada tanggal akuisisi 24 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Goodwill

The fair value of PDS (formerly PJU's/ PT Persada Jasa Utama) identifiable assets and liabilities at the date of acquisition February 24, 2014 were as follows:

	Nilai Wajar/ Fair Value	Assets
Aset		
Kas dan Setara Kas	1,303,158	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	2,179,276	Trade Receivables
Uang Muka	23,384	Advance
Beban Dibayar di Muka	81,425	Prepaid Expenses
Bank Garansi	28,835	Bank Guarantee
Aset Tetap - Bersih	85,046	Fixed Asset - Net
Sub Jumlah	3,701,124	Sub Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

17. Intangible Assets (Continued)

	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas		Liabilities
Utang Usaha	-	Trade Payables
Beban yang Masih Harus Dibayar	1,068,224	Accued Expenses
Utang Pajak	313,235	Tax Payable
Sub Jumlah	1,381,459	Sub Total
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi	2,319,665	Total Identifiable Net Assets at Fair Values
Pengambilalihan 90% Saham	2,087,699	90% Equity Takeover
Goodwill Atas Akuisisi	1,143,301	Goodwill Arising on Acquisition
Imbalan Pembelian yang Dialihkan	3,231,000	Purchase Consideration Transferred
Dikurangi Kas yang diperoleh dari Entitas		
Anak yang Diakuisisi	1,303,158	Net Cash of the Acquired Subsidiary
Akuisisi Entitas Anak, Setelah		Acquisition of a Subsidiary,
dikurangi Kas yang diperoleh	1,927,842	net of Cash Acquired

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan dan Perusahaan membentuk penyisihan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan.

Impairment of goodwill is assessed annually and a provision should be made when there is an indication where the carrying value may be impaired.

18. Aset Tidak Lancar Lainnya

18. Other Non Current Assets

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Uang Jaminan	7,995,430	6,520,505	6,264,854	Security Deposits
Piutang dalam Kepengurusan Negara	19,560,896	20,751,629	19,616,942	Receivables in the State Leadership Allowance of Long-Term Other Receivable in State Leadership
Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara	(19,560,896)	(20,751,629)	(19,616,942)	Obsolete Inventories
Persediaan Tidak Berfungsi	-	-	4	Assigned Fixed Assets
Aset Tetap Penugasan	2,418,438	2,418,438	2,418,438	Accumulated Depreciation of Assigned Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penugasan	(1,294,226)	(1,243,523)	(1,192,821)	Assigned Fixed Assets Obsolete Fixed Assets
Aset Tetap Tidak Berfungsi	-	1	9,102	
Total	9,119,642	7,695,421	7,499,577	Total

- Uang jaminan merupakan uang jaminan listrik kepada PLN, telepon dan PDAM.
- Piutang jangka panjang lainnya merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada PUPN untuk ditindaklanjuti.
- Persediaan tak berfungsi adalah nilai persediaan yang sudah tak berfungsi dan menunggu penghapusannya.
- Security deposits are deposits for electricity, telephone line and clean water line.
- Long-term receivables are doubtful accounts which have already been registered to Government Collector Agency for Collection or for follow up.
- Obsolete inventories are inventories no longer functioning and waiting to be written off.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

19.Utang Usaha

19. Trade Payables

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
a. Berdasarkan Pemasok :				a. By Supplier
Pihak Berelasi (Catatan 7)	213,063,833	147,805,339	156,044,104	Related parties (Note 7)
Pihak Ketiga	670,225,860	919,621,509	518,250,098	Third parties
Total	883,289,693	1,067,426,848	674,294,202	Total
b. Berdasarkan Mata Uang				b. By Original Currency
USD	12,151,993	422,420,014	14,132,680	USD
EUR	26,428,949	-	-	
Rupiah	844,708,751	645,006,834	660,161,522	Rupiah
Total	883,289,693	1,067,426,848	674,294,202	Total

Saldo utang usaha termasuk utang retensi. Penjelasan lebih terinci atas beberapa pemasok lihat Catatan 45.

The balance of trade payables includes retention payables. For more detailed explanation of some suppliers see Note 45.

20.Perpajakan

20. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
<u>Perusahaan :</u>				<u>The Company:</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	3,839,243	36,895,071	38,166,825	Value Added Tax (VAT) In
PPh Final	6,968,387	-	-	
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiaries:</u>
Pajak Pertambahan Nilai Masukan	119,661,493	66,000,893	74,750,322	Value Added Tax (VAT) In
Total	130,469,123	102,895,964	112,917,147	Total

b. Estimasi Tagihan Pajak

b. Estimated Claims for Tax Refund

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Pengasilan Badan				Corporate Income Tax
Tahun 2010	2,638,491	5,258,541	5,258,541	Year 2010
Tahun 2014	23,251,155	23,251,155	23,251,155	Year 2014
Tahun 2015	219,595,859	219,595,859	-	Year 2015
Tahun 2016	137,862,610	-	-	Year 2016
<u>Pajak Pertambahan Nilai</u>				<u>Vallue Added Tax</u>
Tahun 2007	-	-	5,365,288	Year 2007
Tahun 2010	8,681,587	8,681,587	9,258,975	Year 2010
Tahun 2014	-	80,805,362	80,805,362	Year 2014
Tahun 2015	117,136,338	108,919,649	-	Year 2015
Tahun 2016	48,192,674	-	-	Year 2016
Sub Total (Dipindahkan)	557,358,714	446,512,153	123,939,321	Sub Total (To Transfer)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Sub Total (Pindahan)	557,358,714	446,512,153	123,939,321	<i>Sub Total (Transferred)</i>
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiary</u>
PBB				Tax Building
PT Terminal Petikemas				PT Terminal Petikemas
Surabaya	1,314,961	1,314,961	1,314,961	Surabaya
Pajak Penghasilan Badan				Corporate Income Tax
PT Berlian Jasa Terminal				
Indonesia dan				
Entita Anak	57,297,606	22,856,126	914,830	PT Berlian Jasa Terminal
PT Pelindo Husada Citra	1,184,650	-	-	Indonesia and Subsidiaries
PT Pelindo Marine Service	192,407	-	-	PT Pelindo Husada Citra
PT Teminal Teluk Lamong	4,798,123	766,259	-	PT Pelindo Marine Service
Total	622,146,461	471,449,499	126,169,112	Total

Perusahaan:

Atas kelebihan pajak badan tahun 2010 sebesar Rp7.554.656, perusahaan sudah memperoleh putusan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2010 tersebut sebesar Rp2.627.479 dengan penghasilan neto sebesar Rp89.710.150.

Atas lebih bayar tersebut, Perusahaan telah mengajukan permintaan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melalui Surat No KU.05/02/P.III-2014 tanggal 7 Februari 2014 dan lebih bayar tersebut telah dikompensasikan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak dan Surat Tagihan Pajak, atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari-Desember 2010 sebesar Rp2.627.479.

Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut melalui suratnya No. KU.05/20/P.III-2014 tanggal 5 Maret 2014 sehubungan dengan koreksi fiskal atas penyusutan atas Aset Tetap Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya ("BPYBDS") dikoreksi dikarenakan aset BPYBDS tersebut menurut fiskus secara hukum belum dimiliki oleh wajib Pajak.

The Company:

Due to overpayment corporate income tax in 2010 amounting to Rp7,554,656, the Company obtained a decision based on the results of tax audits Tax Overpayment Corporate Income Tax (SKPLB) No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013 from the Head of the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, the Company declared an overpayment of corporate income tax for the year 2010 amounting to Rp2,627,479 with a net income of Rp89,710,150.

On the overpayment, the Company has filed a request for the refund of the excess income tax payments to the Tax Office for Taxpayers Besar Empat KU.05/02/P.III-2014 through letter No. dated February 7, 2014 and overpayment has been compensated through the assessment letters on tax underpayment and STPs, of Value Added Tax period January-December 2010 amounted Rp2,627,479.

The Company filed an objection to the assessment letter on tax overpayment (SKPLB) through letter No. KU.05 / 20 / P.III-2014 dated March 5, 2014 with respect to the fiscal correction on the depreciation of fixed assets Government Assistance The Undefined status ("BPYBDS") due to asset BPYBDS corrected according to the tax authorities are legally obliged not owned by Taxes

20. Perpajakan (Lanjutan)

Dengan Keputusan Nomor KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 permohonan tersebut dikabulkan sebagian dan menambah jumlah PPh yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp2.667.995 dengan penghasilan neto sebesar Rp89.669.635. Namun Perusahaan masih keberatan sehingga mengajukan banding dengan surat Nomor KU.05/50/P.III.2015 tanggal 27 Maret 2015.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.77827/PP/M.XIIIA/15/2016 tanggal 24 November 2016, Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-241/WPJ.19/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 No. 00003/406/10/093/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	348,316,354	Net Income
Kompensasi Kerugian	-	Compensation Lostes
Penghasilan Kena Pajak	348,316,354	Taxable Income
Pajak Penghasilan Terutang	87,079,088	Income Tax Payable
Kredit Pajak	92,337,629	Tax Credit
Total Pajak Penghasilan yang Lebih Bayar	(5,258,541)	Excess Amount of Income Tax Paid

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun 2010 tersebut sebesar Rp2.590.546 pada tanggal 12 Januari 2017 melalui Bank Negara Indonesia

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00019/407/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp81.349.835 dan telah diterima Perusahaan pada tanggal 17 Maret 2016 melalui Bank Negara Indonesia.

By Decree No. KEP-241 / WPJ.19 / 2015 dated 16 Februari 2015 petition was granted in part and increase the amount of income tax that is paid to the size of Rp2.667.995 with the net income amounted to Rp89.669.635. But the company still had reservations so appealed by letter No. KU.05 / 50 / P.III.2015 dated March 27, 2015

Based on the Tax Court Decisions No.Put.77827 / PP / M.XIIIA / 15/2016 dated November 24, 2016, the Tax Court declare the entire grant the Company's appeal against the decision of the Director General of Tax No. KEP-241 / WPJ.19 / 2015 dated February 16, 2015 of Objections to a tax assessment letter Pay Income Taxes Tax Year 2010 No. 00003/406/10/093/13 dated December 18, 2013, on behalf of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with the calculation as follows:

The Company has received the refund overpayment of income tax in 2010 amounted Rp2.590.546 on January 12, 2017 via Bank Negara Indonesia.

Based Pay Tax Assessments over the Value Added Tax on Goods and Services No.00019 / 407/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Directorate General of Taxation Tax Office for Large Taxpayers Four, the Company declared overpayment of Value Added Tax on Goods and Services period tax december 2014 at Rp81.349.835 and has been received by the Company on March 17, 2016 via Bank Negara Indonesia.

20. Perpajakan (Lanjutan)

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) untuk tahun 2000 - 2009 yang bertanggal 28 Juni 2010 untuk tahun 2000, dan 11 Juni 2010 untuk tahun 2001 - 2009 sebesar Rp6.956.958 dan telah dibayar seluruhnya oleh TPS pada tahun 2010. Atas ketetapan SKP PBB tahun 2000 - 2009 tersebut di atas, TPS melakukan pengajuan keberatan dengan surat keberatan No. 2.04/4/9/TPS - 2010 bertanggal 7 September 2010. Atas surat pengajuan keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bertanggal 31 Desember 2010 dengan menerima sebagian atas permohonan keberatan tersebut dan besarnya PBB kurang bayar menjadi sebesar Rp5.641.997.

Pada tahun 2011, TPS mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak sehubungan dengan surat keputusan Kantor Pajak. TPS telah mencadangkan kerugian sebesar Rp5.641.997 dan mencatat taksiran tagihan pajak sebesar Rp1.314.961 sesuai dengan keputusan kantor pajak.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Desember 2012 yang diterima oleh TPS pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding TPS atas sengketa pajak PBB tahun 2000-2009 termasuk jumlah Rp5.600.000 yang harus dikembalikan kepada perusahaan. Sampai dengan tanggal pelaporan auditor independen, TPS belum menerima pengembalian.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00013/406/14/606/16 tanggal 29 April 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp13.256.683. Kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp13.256.683, sedangkan sisanya sebesar Rp901.573.376 menjadi biaya PT Berlian Manyar Sejahtera.

20. Taxation (Continued)

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS also received several Tax Assessment on Land and Building Tax (SKP PBB) for the years 2000 - 2009 dated June 28, 2010 for the year 2000 and June 11, 2010 for the years 2001 - 2009 amounting to Rp6,956,958 and were paid by TPS in 2010. In response to the SKP PBB above, TPS objected and submitted objection letter No. 2.04/4/9/TPS - 2010 dated September 7, 2010. On the objection letter, the tax office issued tax decision letter for objection on Land and Building Tax dated December 31, 2010 accepting partial amount of objection and under payment of PBB amounting to Rp5,641,997.

In 2011, the TPS filed an appeal to the Indonesian Tax Court regarding the tax office decision letter. TPS has provided provision for losses amounting to Rp5,641,997 and reported estimated claim for tax refund amounting to Rp1,314,961 as agreed with tax decision letter.

Based on Tax Court Decision Letter on December 20, 2012, which was received by the TPS on January 15, 2013, the Tax Court agreed with the TPS appeal letters for tax PBB years 2000-2009 amounting to Rp5,600,000. Up to reporting date, TPS has not yet received the refund.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

Based on Tax Assessment Letter for Over Payment Corporate Income Tax No. 00013/406/14/606/16 dated on April 29, 2016 from the Head Tax Office Surabaya Gubeng, the Company was declared to have an overpayment of Corporate Income Tax for 2014 amounting to Rp13,256,683. The overpayment was refunded; hence forth, received by the Company dated on June 08, 2016 amounting to Rp13,256,683, whereas Rp901,573,376 being the cost of PT Berlian Manyar Sejahtera.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

c. Utang Pajak

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan :				The Company:
PPh Pasal 23/26	2,476,352	3,423,671	948,644	Income Tax Art 23/26 (Withholder)
PPh Pasal 21	9,035,912	8,906,950	5,153,430	Income Tax Article 21
PPh Pasal 15	790,166	248,513	411,398	Income Tax Article 15
PPh Pasal 4 (2)	7,571,375	11,300,641	16,638,821	Income Tax Article 4 (2)
PPN (Bersih)	1,310,039	35,330,770	37,085,483	VAT (net)
PPN Wajib Pungut	24,282,032	28,668,582	36,608,270	VAT Required to Pay
Pajak Lainnya/ Utang SKPKB	-	78,011	78,011	Others Tax/ Underpayment
Sub Total	45,465,876	87,957,138	96,924,057	Sub Total
Entitas Anak :				Subsidiaries:
PPh Pasal 29	41,644,064	54,910,231	63,743,607	Income Tax Article 29
PPh Pasal 25	5,162	21,643,980	187,216	Income Tax Article 25
PPh Pasal 23/26	14,708,640	12,005,572	6,078,442	Income Tax Article 23/26
PPh Pasal 21	4,049,834	3,877,375	3,605,343	Income Tax Article 21
PPh Pasal 15	958,292	109,124	226,252	Income Tax Article 15
PPN (Bersih)	9,095,028	6,073,986	25,199,865	VAT (net)
PPh Pasal 4 ayat 2	2,743,535	517,011	219,622	Income Tax Article 4 (2)
PBB	227,681	-	43,435	PBB
Utang Pajak Lainnya	26,540	-	-	Others tax
Sub Total	73,458,776	99,137,279	99,303,780	Sub Total
PPh Pasal 29 (Tahun 2013)	-	-	3,050	Income Tax Article 29 (Year 2013)
Total	118,924,652	187,094,417	196,230,888	Total

Pada tahun 2013, Perusahaan juga menerima Surat ketetapan Pajak kurang bayar dan Surat Tagihan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk Pajak Pertambahan Nilai masa pajak tahun 2007 yang terdiri sebagai berikut :

In the year 2013, the Company received a Tax Assesment Letter of underpayment and tax collection letter from the Head of the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, for the Value Added Tax for tax period 2007 as follows:

Bulan/ Month	Jenis Surat/ Types of Letter	Nomor Surat/ Number Of Letter	Tanggal Surat/ The Date of the Letter	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Pokok Pajak/ Principal of Tax	Kenaikan/ Increase	Bunga/ Interest	Total
						Pasal/ Article 13(3)	Pasal/ Article 13(5) Yg Hrs dibayar/ To be Paid	
JANUARY	SKPKB PPN	00095/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	257,257	111,119	25,759	394,135
FEBRUARY	SKPKB PPN	00096/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	887	-	14,465	15,352
MARCH	SKPKB PPN	00097/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	76,027	-	329,440	405,467
APRIL	SKPKB PPN	00098/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	7,489	-	88,871	96,360
MAY	SKPKB PPN	00099/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	45,754	17,433	9,436	72,622
JUNE	SKPKB PPN	00100/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	18,690	-	246,091	264,781
JULY	SKPKB PPN	00101/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	366,680	59,919	241,848	668,447
AUGUST	SKPKB PPN	00102/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	283,247	16,443	248,990	548,680
SEPTEMBER	SKPKB PPN	00103/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	67,948	-	147,877	215,825
OCTOBER	SKPKB PPN	00104/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	60,128	-	410,379	470,507
NOVEMBER	SKPKB PPN	00105/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	401,509	29,914	339,189	770,612
DECEMBER	SKPKB PPN	00106/207/07/093/13	17-Dec-13	16-Jan-14	894,805	320,409	227,286	1,442,500
TOTAL					2,480,420	555,237	2,329,631	5,365,288

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

Perusahaan akan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas masa Pajak Tahun 2007 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diatas disajikan sebagai bagian dari Estimasi Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (Catatan 21b).

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-422/WPJ.19/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor KU.05/21/P.III.2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 0016/207/07/093/13 tanggal 17 Desember 2013 Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp1.153.515. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp1.153.515, sedangkan sisanya dibebankan.

Pada tahun 2013, Perusahaan juga menerima Surat ketetapan Pajak kurang bayar dan Surat Tagihan Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk masa pajak tahun 2010 yang terdiri sebagai berikut :

No	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor/ Number SKPKB	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	PPN yang Kurang Bayar/ VAT underpayment	Sanksi Administrasi Bunga ps 13(2) KUP/ Interest administrative sanctions of article 13 (2) CTP	Sanksi Administrasi Kenaikan ps 13(3) KUPI/ Interest administrative sanctions of article 13 (3) CTP	SKPKB	Total yang disetujui berdasarkan hasil akhir pemeriksaan/ Total approved	Diajukan Proses Keberatan/ Objections filed Process
					(a)	(b)	(c)	(d) = (a)+(b)+c	(d)	(c) - (d)
1	Januari	00056/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	488,407	114,801	249,239	852,447	37,783	814,664
2	Februari	00057/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	656,534	128,085	389,690	1,174,309	37,783	1,136,526
3	Maret	00058/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	261,738	-	261,738	523,476	37,783	485,693
4	April	00059/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	457,850	75,544	300,467	833,861	37,783	796,078
5	Mei	00060/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	391,115	-	391,115	782,229	37,783	744,446
6	Juni	00061/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	396,618	-	396,618	793,237	37,783	755,454
7	Juli	00062/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	435,316	150,884	120,974	707,174	37,783	669,391
8	Agustus	00063/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	526,510	214,603	79,421	820,533	37,783	782,750
9	September	00064/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	302,214	-	302,214	604,427	37,783	566,644
10	Okttober	00065/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	630,826	215,587	181,687	1,028,099	37,783	990,316
11	November	00066/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	321,812	100,336	112,779	534,927	37,783	497,144
12	Desember	00067/207/10/093/13	12/18/2013	1/17/2014	2,261,385	949,043	284,212	3,494,641	2,474,771	1,019,869
					7,130,324	1,948,881	3,070,154	12,149,359	2,890,385	9,258,975

20. Taxation (Continued)

The Company is currently in the process of filing an objection to the assessment letter on tax underpayment (SKPKB) over the period of the above Tax Year 2007 to Tax Office for Taxpayers Besar Empat. Payment for Underpayment Assessment letter (underpayment) above is presented as part of Estimated Claims for Tax Refund (Note 21b).

Based on the letter the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Decision of the Director General of Taxation Number KEP-422 / WPJ.19 / 2015 dated March 4, 2015 on the objection of taxpayer on tax assessments for underpayment of Value Added Tax for goods and services, the Directorate General of Taxation granted part of the taxpayer objections in a letter number KU.05 / 21 / P.III.2014 dated March 5, 2014 and subtract the amount of taxes accrued in the assessment letters on tax underpayment of Value Added tax on Goods and Services No. 0016/207/07/093/13 dated December 17, 2013 Tax Period December 2007 amounted Rp1,153,515. Excess payment of Value Added Tax on Goods and Services has been received by the Company on the date of March 31, 2015 amounted to Rp1,153,515, while the rest is charged.

In the year 2013, the Company received a Tax Assesment Letter of underpayment and tax collection letter from the Tax Office for Taxpayers Besar Empat, for the Value Added Tax for tax period 2010 as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

Perusahaan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas masa Pajak Tahun 2010 diatas kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran atas surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diatas disajikan sebagai bagian Estimasi Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (Catatan 21b).

Pada bulan Desember 2014, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut diatas dengan mengabulkan sebagian keberatan tersebut dan mengurangi jumlah Kurang Bayar yang terinci sebagai berikut :

No	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor/ Number SKPKB	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	SKPKB	Total yang disetujui berdasarkan hasil akhir pemeriksaan/ Total approved based on the	Diajukan Proses Keberatan/ Objections filed Process	No. Keputusan Keberatan	Tanggal Keputusan Keberatan	Total yang di kabulkan	Total Pengembalian
1	Januari	00056/207/10/093/13	12/18/2013	852,447	37,783	814,664				
2	Februari	00057/207/10/093/13	12/18/2013	1,174,309	37,783	1,136,526				
3	Maret	00058/207/10/093/13	12/18/2013	523,476	37,783	485,693				
4	April	00059/207/10/093/13	12/18/2013	833,861	37,783	796,078				
5	Mei	00060/207/10/093/13	12/18/2013	782,229	37,783	744,446	KEP-2465/WPJ.19/2014	12/11/2014	744,126	38,103
6	Juni	00061/207/10/093/13	12/18/2013	793,237	37,783	755,454	KEP-2466/WPJ.19/2014	12/11/2014	712,814	80,423
7	Juli	00062/207/10/093/13	12/18/2013	707,174	37,783	669,391	KEP-2478/WPJ.19/2014	12/12/2014	448,217	258,957
8	Agustus	00063/207/10/093/13	12/18/2013	820,533	37,783	782,750	KEP-2479/WPJ.19/2014	12/12/2014	689,474	131,059
9	September	00064/207/10/093/13	12/18/2013	604,427	37,783	566,644	KEP-2467/WPJ.19/2014	12/11/2014	602,814	1,613
10	Okttober	00065/207/10/093/13	12/18/2013	1,028,099	37,783	990,316	KEP-2468/WPJ.19/2014	12/11/2014	1,008,587	19,512
11	November	00066/207/10/093/13	12/18/2013	534,927	37,783	497,144	KEP-2469/WPJ.19/2014	12/11/2014	531,352	3,575
12	Desember	00067/207/10/093/13	12/18/2013	3,494,641	2,474,771	1,019,869	KEP-2470/WPJ.19/2014	12/11/2014	3,493,654	987
				12,149,359	2,890,385	9,258,975	-		8,231,038	534,229

Jumlah pengembalian atas keberatan SKPKB sebesar Rp534.229 sudah diterima Perusahaan pada tanggal 12 Januari 2015.

Atas Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Januari – Desember 2010 diatas, Perusahaan melakukan pengajuan Banding melalui Suratnya tertanggal 29 Januari 2015 kepada Ketua pengadilan Pajak Kementerian Keuangan.

20. Taxation (Continued)

The Company is currently in the process of filing an appeal to the assessment letter on tax underpayment (SKPKB) over the period of the Tax Year 2010 mentioned above to the head of Wajib Pajak Besar Empat Tax Office. Payment for Underpayment Assessment letter (SKPKB) above is presented as part of Estimated Claims for Tax Refund (Note 21b).

In December 2014, the Company had received a reply from the General Director of Taxation of Ministry of Finance of Republic Indonesia regarding the appeal to the assessment letter of tax underpayment on VAT on Goods and Services of the above, where the Company objections were granted partially and thus subtracting the amount of the underpayment with the details as follows

The total refund over the assessment letter on tax underpayment with the amount of Rp534,229 and was received by the Company on Januari 12, 2015.

Based on the reply form the General Director of Taxation of Ministry of Finance of Republic Indonesia regarding the appeal to assesment letter of tax underpayment above for period January – December 2010, The Company is currently in the process of appeal (Note 50.b)

20. Perpajakan (Lanjutan)

Pada tahun 2016, Perusahaan juga menerima Surat ketetapan Pajak kurang bayar dari Direktorat Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk Pajak Pertambahan Nilai masa pajak tahun 2014 yang terdiri sebagai berikut :

Bulan/ Month	Jenis Surat/ Types of Letter	Nomor Surat/ Number Of Letter	Tanggal Surat/ The Date of the Letter	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Pokok Pajak/ Principal of Tax	Bungai/ Interest	Total
						Pasal/ Article 13 (3) and 13(5)	Yg Hrs dibayar/ To be Paid
JANUARY	SKPKB PPN	00007/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,151,247	786,964	1,938,211
FEBRUARY	SKPKB PPN	00008/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,146,744	762,430	1,909,174
MARCH	SKPKB PPN	00009/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,436,537	843,706	2,280,243
APRIL	SKPKB PPN	00010/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,120,973	988,440	2,109,413
MAY	SKPKB PPN	00011/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,143,219	1,143,219	2,286,438
JUNE	SKPKB PPN	00012/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,138,587	1,138,587	2,277,174
JULY	SKPKB PPN	00013/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,328,453	1,328,453	2,656,906
AUGUST	SKPKB PPN	00014/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,268,814	1,268,814	2,537,628
SEPTEMBER	SKPKB PPN	00015/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,161,180	1,161,180	2,322,360
OCTOBER	SKPKB PPN	00016/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	1,235,712	1,235,712	2,471,424
NOVEMBER	SKPKB PPN	00017/207/14/093/16	17-Feb-16	16-Mar-16	990,111	990,111	1,980,222
TOTAL					2,480,420	2,329,631	5,365,288

Perusahaan telah mengajukan keberatan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa Pajak Januari sampai November Tahun 2014 dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masa Desember Tahun 2014 tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pembayaran terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diatas disajikan sebagai bagian dari Estimasi Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (Catatan 21b).

In the year 2013, the Company received a Tax Assesment Letter of underpayment and tax collection letter from the Directorate General of Taxation the Head of the Tax Office for Large Taxpayers Four, for the Value Added Tax for tax period 2014 as follows:

The Company has filed an objection in a letter dated March 31, 2016 on tax assessment letters (SKPKB) Tax period January to November 2014 and the tax assessment letter for overpayment period of December 2014 to the head of the Tax Office Large Taxpayers Four. Payment for Assessment Letter for underpayment (underpayment) mentioned above are presented as part of the Value Added Tax Claims Estimate (Note 21b)

d. Beban Pajak

	d. Tax Expense		
	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp
Pajak Kini - Final	33,603,296	32,907,581	25,875,616
Pajak Penghasilan :			
Pajak Kini - Tidak Final	371,401,946	373,391,518	507,944,589
Pajak Tangguhan	(134,093,893)	(26,330,181)	(769,494)
Total Pajak Penghasilan	237,308,053	347,061,337	507,175,095
Total	270,911,349	379,968,918	533,050,711
			Total

*Current Tax - Final
Income Tax :*

*Current Tax - Non Final
Deferred Tax
Total Income Tax*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				<i>The Company</i>
Pajak Kini - Final	30,066,270	29,966,639	23,409,125	<i>Current Tax - Final</i>
Pajak Penghasilan :				<i>Income Tax :</i>
Pajak Kini - Tidak Final	-	-	164,277,308	<i>Current Tax - Non Final</i>
Pajak Tangguhan	(124,914,991)	6,042,501	7,950,131	<i>Deferred Tax</i>
Total Pajak Penghasilan	(124,914,991)	6,042,501	172,227,439	<i>Total Income Tax</i>
Sub Total	(94,848,721)	36,009,140	195,636,564	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak				<i>Subsidiaries</i>
Pajak Kini - Final	3,537,026	2,940,942	2,466,491	<i>Current Tax - Final</i>
Pajak Penghasilan :				<i>Income Tax :</i>
Pajak Kini - Tidak Final	371,401,946	373,391,518	343,667,281	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan	(9,178,902)	(32,372,682)	(8,719,625)	<i>Deferred Tax</i>
Total Pajak Penghasilan	362,223,044	341,018,836	334,947,656	<i>Total Income Tax</i>
Sub Total	365,760,070	343,959,778	337,414,147	<i>Sub Total</i>
Total	270,911,349	379,968,918	533,050,711	Total

Pajak Kini

Berikut adalah rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

Current Tax

A reconciliation between income before tax and taxable income, referred to the Statements of Comprehensive of Income, is as follows :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	1,783,228,279	1,542,836,783	2,118,322,907	<i>Consolidated income before income tax</i>
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(671,189,041)	(576,190,265)	(579,365,383)	<i>Subsidiaries' income before income tax</i>
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(44,608,948)	(18,189,505)	(14,108,051)	<i>Equity in net income of associated</i>
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi	(222,689,523)	(386,261,224)	(275,032,191)	<i>Adjusted for consolidated eliminations</i>
Total	844,740,767	562,195,789	1,249,817,282	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perbedaan Permanen :				<i>Permanent Differences :</i>
Biaya Bahan	1,046,825	2,125,530	1,890,733	<i>Raw Expense</i>
Biaya Pemeliharaan	722,249	2,891,680	1,695,442	<i>Maintenance Expense</i>
Biaya Asuransi	188,482	3,510,763	2,258,802	<i>Insurance Expense</i>
Biaya Administrasi				<i>Office Administration Expenses</i>
Kantor	81,714,101	80,478,968	101,114,337	
Biaya Diluar Usaha	112,263,745	14,998,681	18,274,361	<i>Other Expense</i>
Biaya Tunjangan				
Komunikasi	13,586	1,256,227	783,313	<i>Communication Allowance</i>
Biaya Penyusutan Aset				<i>Assets Depreciation Cost</i>
Penugasan	50,703	50,703	50,703	<i>Assignment Expense Related to Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Biaya Berkaitan				
Pendapatan Final	13,726,520	7,521,639	8,340,725	
Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak				<i>Revenue Not Subjected to Tax</i>
	(569,199,859)	(391,919,630)	(441,504,492)	
Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final	(279,000,755)	(258,940,344)	(253,811,453)	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Sub Total	(638,474,403)	(538,025,783)	(560,907,529)	Sub Total
Perbedaan Waktu :				<i>Timing Differences :</i>
Cadangan imbalan kerja	483,937	(28,520,612)	(51,430,836)	<i>Employment Benefits Allowance</i>
Cadangan penurunan nilai piutang	(18,382,141)	(7,313,230)	13,016,050	<i>Impairment Loss</i>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	(3,239,086)	404,780	(2,052,826)	<i>Accrued Deposits Interest</i>
Bonus dan tantiem	33,042,927	(13,106,900)	25,207,566	<i>Bonus and Tantiem</i>
Penyusutan Aset Tetap	(497,202,622)	(52,821,982)	(72,359,262)	<i>Fixed Assets Depreciation</i>
Bunga Obligasi	1,387,643	31,325,911	55,906,955	<i>Bonds Interest</i>
Tunjangan	(20,089,342)	22,327,386	(88,169)	<i>Allowance</i>
Sub Total	(503,998,684)	(47,704,646)	(31,800,522)	Sub Total
Total (Rugi) Penghasilan Kena Pajak	(297,732,320)	(23,534,640)	657,109,231	Total Current (Loss) Income Tax Expense

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Rincian Beban dan Utang				<i>The Details of the Income Tax Expenses and Taxes Payable are as follows:</i>
Pajak Kini adalah sebagai berikut :				<i>Current Tax Expense</i>
Beban Pajak Kini			164,277,308	<i>The Company Subsidiaries:</i>
Perusahaan	-	-		<i>PT Terminal Petikemas Surabaya</i>
Entitas anak				<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
PT Terminal Petikemas				<i>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia</i>
Surabaya	321,621,457	311,334,084	265,212,051	<i>PT Pelindo Marine Service</i>
PT Pelindo Husada Citra	1,719,443	2,762,671	2,786,321	<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
PT Berlian Jasa Terminal				<i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i>
Indonesia	34,105,437	57,480,707	74,386,716	<i>Sub Total</i>
PT Pelindo Marine				
Service	10,068,381	157,265	881,186	
PT Terminal Teluk				
Lamong	-	-	-	
PT Pelindo Daya				
Sejahtera	3,887,228	1,656,791	401,007	
Sub Total	<u>371,401,946</u>	<u>373,391,518</u>	<u>507,944,589</u>	
Dikurangi Pembayaran				<i>Less Prepaid Taxes :</i>
Pajak Dibayar di Muka :				<i>The Company Income Tax</i>
Perusahaan				<i>Article 22</i>
Pajak Penghasilan				<i>Article 23</i>
Pasal 22	31,221,267	36,427,543	28,835,903	<i>Article 25</i>
Pasal 23	104,470,569	69,144,645	47,296,369	<i>Subsidiaries:</i>
Pasal 25	2,170,774	114,023,671	111,396,191	<i>PT Terminal Petikemas Surabaya</i>
Entitas Anak				<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
PT Terminal Petikemas				<i>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia</i>
Surabaya	294,762,842	264,230,199	218,646,525	<i>PT Berlian Manyar Sejahtera</i>
PT Pelindo Husada Citra	2,681,730	2,472,439	2,262,967	<i>(Subsidiaries)</i>
PT Berlian Jasa Terminal				<i>PT Berkah Industri Mesin Angkat</i>
Indonesia	68,075,334	79,258,127	58,188,891	<i>(Entitas Anak BJTI)</i>
PT Berlian Manyar				<i>PT Pelindo Marine Service</i>
Sejahtera				<i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i>
(Entitas Anak BJTI)	394,104	-	-	<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
PT Berkah Industri				
Mesin Angkat				
(Entitas Anak BJTI)	79,669	-	1,556,688	
PT Pelindo Marine				
Service	1,091,993	95,326	121,445	
PT Pelindo Daya				
Sejahtera	966,382	427,240	61,989	
PT Terminal Teluk				
Lamong	4,031,864	766,259	-	
Total Pembayaran				<i>Total Prepaid Tax</i>
Pajak Dibayar di Muka	<u>509,946,528</u>	<u>566,845,449</u>	<u>468,366,968</u>	<i>Current Tax Payable</i>
Utang (Piutang)				<i>(Receivables) - Net</i>
Pajak - Bersih	<u>(138,544,583)</u>	<u>(193,453,932)</u>	<u>39,577,621</u>	

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Terinci sebagai berikut :				<i>The details :</i>
Utang/(Piutang) pajak				<i>Tax payable (Receivable)</i>
Perusahaan	(137,862,610)	(219,595,859)	(23,251,155)	<i>The Company</i>
Entitas anak				<i>Subsidiaries</i>
PT Terminal Petikemas				<i>PT Terminal Petikemas</i>
Surabaya	26,858,615	47,103,884	46,565,526	<i>Surabaya</i>
PT Pelindo Husada Citra	(962,287)	290,232	523,354	<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
PT Berlian Jasa Terminal				<i>PT Berlian Jasa Terminal</i>
Indonesia	(34,049,566)	(20,862,590)	15,555,967	<i>Indonesia</i>
PT Pelindo Marine				<i>PT Pelindo Marine</i>
Service	8,976,388	61,939	759,741	<i>Service</i>
PT Pelindo Daya				<i>PT Pelindo Daya</i>
Sejahtera	2,920,846	1,229,551	339,018	<i>Sejahtera</i>
PT Terminal Teluk				<i>PT Terminal Teluk</i>
Lamong	<u>(4,031,865)</u>	<u>(766,259)</u>	-	<i>Lamong</i>
Total Utang Pajak Kini				<i>Total Current Taxes Payables</i>
Entitas Anak	(287,869)	27,056,757	63,743,606	<i>of Subsidiaries</i>
Piutang pajak				<i>Tax Receivable</i>
PT Berlian Manyar				<i>PT Berlian Manyar</i>
Sejahtera				<i>Sejahtera</i>
(Entitas Anak BJT)	<u>(394,104)</u>	<u>(914,830)</u>	<u>(914,830)</u>	<i>(Subsidiaries)</i>
Utang (Piutang) Pajak				Total of Current Tax
Tahun Berjalan	<u>(138,544,583)</u>	<u>(193,453,932)</u>	<u>39,577,621</u>	Payable (Receivables)

Pajak Tangguhan

Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak dengan rincian sebagai berikut :

Deferred Tax

Deferred Tax Assets (Liabilities)

Deferred tax assets represent the net amount after the deduction of deferred tax liabilities of subsidiaries as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	Koreksi DPP *)/ Adjustment	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to to income for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehesive Income for the year	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Deferred Tax Liability Subsidiaries
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	for The Change of tax base *)	for the year	Income for the year	
Liabilitas Pajak tangguhan					
<u>Entitas anak</u>					
PT Terminal Petikemas Surabaya	(48,217,857)	-	1,370,646	(4,079,899)	(50,927,111)
PT Pelindo Husada Citra	(3,265,553)	-	(1,047,945)	661,049	(3,652,449)
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	12,236,597	-	2,534,811	(15,978,321)	(1,206,913)
PT Pelindo Marine Service	703,439	116,667	1,889,026	(3,941,764)	(1,232,633)
Total liabilitas pajak tangguhan	(38,543,374)	116,667	4,746,537	(23,338,936)	(57,019,106)
					Total Deferred Tax Liability
Aset Pajak Tangguhan :					Deferred Tax Assets :
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Cadangan penurunan nilai piutang	27,154,147	-	(4,615,667)	-	Allowance for impairment of receivables
Cadangan Tunjangan Pegawai	6,405,061	-	(5,022,336)	-	Employee Benefit Reserve
Cadangan Bonus dan Tantiem	46,723,276	-	8,260,732	-	Bonus reserve and tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	47,747,567	-	120,984	-	Post-employment benefit liability
Pendapatan bunga deposito	(507,404)	-	(809,771)	-	Interest income on deposit
Biaya Penerbitan Obligasi	21,808,217	-	346,911	-	Issuance Cost of Bond
Rugi Fiskal	5,883,660	47,109,221	74,453,212	-	Tax loss
Penyusutan	(222,747,783)	129,372,361	(124,300,655)	-	Depreciation
Cadangan Penurunan Nilai Aset tetap	(1,774,862)	-	-	(1,774,862)	Allowance for impairment of Fixed Assets
Sub Total	(69,308,121)	176,481,582	(51,566,591)	55,606,869	Sub Total
Kuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Imbakkan Keja Manfaat Pasti	212,634	-	-	9,054,414	Current Year Actuarial (Gain) Losses
Total	(69,095,487)	176,481,582	(51,566,591)	64,873,917	Total
<u>PT Pelindo Husada Citra dan Entitas anak:</u>					<u>PT Pelindo Husada Citra and Subsidiaries:</u>
PT Prima Citra Nutrindo	-	-	39,978	-	PT Prima Citra Nutrindo
Total	-	-	39,978	-	Total
<u>PT Berlian Jasa Terminal</u>					<u>PT Berlian Jasa Terminal</u>
<u>Indonesia dan Entitas anak:</u>					<u>Indonesia and Subsidiaries:</u>
PT Berlian Manyar Sejahtera	974,959	-	1,215,727	931	PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Pelindo Property Indonesia	665,968	-	(665,968)	-	PT Pelindo Property Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat	-	-	114,970	-	PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Terminal Curah Semarang	-	-	767,216	-	PT Terminal Curah Semarang
Total	1,640,927	-	1,431,946	931	Total
<u>PT Pelindo Marine Service dan Entitas anak:</u>					<u>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</u>
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	4,214,659	-	6,387,087	5,028	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Pelindo Energi Logistik	1,020,337	-	(546,446)	-	PT Pelindo Energi Logistik
Total	5,234,996	-	5,840,641	5,028	Total
<u>PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:</u>					<u>PT Terminal Teluk Lamong and Subsidiaries:</u>
PT Terminal Teluk Lamong	38,602,109	-	(6,629,880)	(39,102)	PT Terminal Teluk Lamong
PT Lamong Energi Indonesia	77,013	-	1,274,616	-	PT Lamong Energi Indonesia
Total	38,679,122	-	(5,355,265)	(39,102)	Total
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:</u>					<u>PT Pelindo Daya Sejahtera and Subsidiaries:</u>
PT Pelindo Daya Sejahtera	415,120	1,360,886	835,730	(28,310)	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	-	-	161,782	-	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
Total	415,120	1,360,886	997,511	(28,310)	Total
Total aset pajak tangguhan	(23,125,322)	177,842,468	(48,611,779)	8,992,961	Total Deferred Tax asset
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	(61,668,696)	177,959,135	(43,865,242)	(14,345,975)	Total Deferred Tax Liability - Net

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Koreksi DPP Adjustment for The Change of tax base	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to to income for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehesive Income for the year	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Liabilitas Pajak tangguhan						
Perusahaan						<i>Deferred Tax Liability</i>
Cadangan penurunan nilai piutang	28,982,454	-	(1,828,307)	-	27,154,147	<i>The Company</i>
Cadangan Tunjangan Pegawai	823,215	-	5,581,846	-	6,405,061	<i>Allowance for impairment of receivables</i>
Cadangan Bonus dan Tantiem	50,000,000	-	(3,276,724)	-	46,723,276	<i>Employee Benefit Reserve</i>
Liabilitas Imbalan Kerja	54,877,720	-	(7,130,153)	-	47,747,567	<i>Bonus reserve and tantiem</i>
Pendapatan bunga deposito	(608,599)	-	101,195	-	(507,404)	<i>Post-employment benefit liability</i>
Biaya Penerbitan Obligasi	13,976,739	-	7,831,478	-	21,808,217	<i>Interest income on deposit</i>
Rugi Fiskal	-	-	5,883,660	-	5,883,660	<i>Issuance Cost of Bond</i>
Penyusutan	(211,337,498)	-	(11,410,285)	-	(222,747,783)	<i>Tax loss</i>
Cadangan Penurunan						<i>Depreciation</i>
Nilai Aset tetap	20,349	-	(1,795,211)	-	(1,774,862)	<i>Allowance for impairment of Fixed Assets</i>
Sub Total	<u>(63,285,620)</u>	-	<u>(6,042,501)</u>	-	<u>(69,308,121)</u>	<i>Sub Total</i>
Kuntungan (Kerugian) Aktuaria dari Imbakan Keja Manfaat Pasti	(131,510)	-	-	344,144	212,634	<i>Current Year Actuarial (Gain) Losses</i>
Total	<u>(63,397,130)</u>	-	<u>(6,042,501)</u>	<u>344,144</u>	<u>(69,095,487)</u>	<i>Total</i>
PT Terminal Petikemas Surabaya	(41,636,191)	-	(5,532,450)	(1,049,216)	(48,217,857)	<i>PT Terminal Petikemas Surabaya</i>
PT Pelindo Husada Citra	(3,106,533)	-	(461,263)	302,243	(3,265,553)	<i>PT Pelindo Husada Citra</i>
Total liabilitas pajak tangguhan	<u>(108,139,854)</u>	-	<u>(12,036,214)</u>	<u>(402,829)</u>	<u>(120,578,897)</u>	<i>Total Deferred Tax Liability</i>
Aset Pajak Tangguhan :						
<u>PT Berlian Jasa Terminal</u>						<i>Deferred Tax Assets :</i>
<u>Indonesia dan Entitas anak:</u>						<u><i>PT Berlian Jasa Terminal</i></u>
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	9,862,874	-	2,356,325	17,398	12,236,597	<u><i>Indonesia and Subsidiaries:</i></u>
PT Berlian Manyar Sejahtera	(268,821)	-	1,243,780	-	974,959	<u><i>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia</i></u>
PT Pelindo Property Indonesia	-	-	665,968	-	665,968	<u><i>PT Berlian Manyar Sejahtera</i></u>
Total	<u>9,594,053</u>	-	<u>4,266,073</u>	<u>17,398</u>	<u>13,877,524</u>	<u><i>PT Pelindo Property Indonesia</i></u>
<u>PT Pelindo Marine Service dan Entitas anak:</u>						<u><i>Total</i></u>
PT Pelindo Marine Service	664,208	-	71,413	(32,182)	703,439	<u><i>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</i></u>
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	169,081	-	4,045,813	(234)	4,214,659	<u><i>PT Pelindo Marine Service</i></u>
PT Pelindo Energi Logistik	<u>127,736</u>	-	<u>892,601</u>	-	<u>1,020,337</u>	<u><i>PT Alur Pelayaran Barat Surabaya</i></u>
Total	<u>961,025</u>	-	<u>5,009,827</u>	<u>(32,416)</u>	<u>5,938,435</u>	<u><i>PT Pelindo Energi Logistik</i></u>
<u>PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:</u>						<u><i>Total</i></u>
PT Terminal Teluk Lamong	9,874,035	861,942	27,866,131	-	38,602,109	<u><i>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</i></u>
PT Lamong Energi Indonesia	-	-	77,013	-	77,013	<u><i>PT Terminal Teluk Lamong</i></u>
Total	<u>9,874,035</u>	<u>861,942</u>	<u>27,943,144</u>	-	<u>38,679,122</u>	<u><i>PT Lamong Energi Indonesia</i></u>
<u>PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:</u>						<u><i>Total</i></u>
PT Pelindo Daya Sejahtera	129,655	-	285,465	-	415,120	<u><i>PT Pelindo Daya Sejahtera and Subsidiaries:</i></u>
PT Pelindo Daya Solusi	56	-	(56)	-	-	<u><i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i></u>
Total	<u>129,711</u>	-	<u>285,409</u>	-	<u>415,120</u>	<u><i>PT Pelindo Daya Solusi</i></u>
Total aset pajak tangguhan	<u>20,558,824</u>	<u>861,942</u>	<u>37,504,453</u>	<u>(15,018)</u>	<u>58,910,201</u>	<i>Total Deferred Tax asset</i>
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	<u>(87,581,030)</u>	<u>861,942</u>	<u>25,468,239</u>	<u>(417,847)</u>	<u>(61,668,696)</u>	<i>Total Deferred Tax Liability - Net</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Koreksi DPP Adjustment for The Change of tax base	Dikreditkan (Dibebankan) ke laporan laba rugi / Credited (Charged) to to income for the year	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2014/ December 31, 2014	Deferred Tax Liability <i>The Company</i>
Liabilitas Pajak tangguhan						
Perusahaan						
Cadangan penurunan nilai piutang	25,728,442	-	3,254,012	-	28,982,454	Allowance for impairment of receivables
Cadangan Tunjangan Pegawai	845,257	-	(22,042)	-	823,215	Employee Benefit Reserve
Cadangan Bonus dan Tantiem	43,698,109	-	6,301,891	-	50,000,000	Bonus reserve and tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	67,735,429	1,123,081	(13,980,790)	-	54,877,720	Post-employment benefit liability
Pendapatan bunga deposito	(95,393)	-	(513,206)	-	(608,599)	Interest income on deposit
Biaya Penerbitan Obligasi	-	-	13,976,739	-	13,976,739	Issuance Cost of Bond
Rugi Fiskal	-	-	-	-	-	Tax loss
Penyusutan	(193,227,334)	-	(18,110,164)	-	(211,337,498)	Depreciation
Cadangan Penurunan						Allowance for impairment
Nilai Aset tetap	-	-	20,349	-	20,349	of Fixed Assets
Sub Total	(55,315,490)	1,123,081	(9,073,211)	-	(63,265,620)	Sub Total
Kuntungan (Kerugian) Aktuaria dari Imbakan Keja Manfaat Pasti	(22,017,067)	-	-	21,885,557	(131,510)	Current Year Actuarial (Gain) Losses
Total	(77,332,557)	1,123,081	(9,073,211)	21,885,557	(63,397,130)	Total
PT Terminal Petikemas Surabaya	(41,858,598)	-	(2,246,053)	2,468,460	(41,636,191)	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	(3,454,058)	243,996	81,597	21,932	(3,106,533)	PT Pelindo Husada Citra
Total liabilitas pajak tangguhan	(122,645,213)	1,367,077	(11,237,667)	24,375,949	(108,139,854)	Total Deferred Tax Liability
Aset Pajak Tangguhan :						
PT Berlian Jasa Terminal						Deferred Tax Assets :
Indonesia dan Entitas anak:						<i>PT Berlian Jasa Terminal</i>
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	9,242,388	-	444,721	175,765	9,862,874	<i>Indonesia and Subsidiaries:</i>
PT Berlian Manyar Sejahtera	-	(20,403)	(248,418)	-	(268,821)	<i>PT Berlian Jasa Terminal Indonesia</i>
PT Pelindo Property Indonesia	-	-	-	-	-	<i>PT Berlian Manyar Sejahtera</i>
Total	9,242,388	(20,403)	196,303	175,765	9,594,053	<i>PT Pelindo Property Indonesia</i>
PT Pelindo Marine Service dan Entitas anak:						Total
PT Pelindo Marine Service	407,263	184,001	(20,380)	93,324	664,208	<i>PT Pelindo Marine Service</i>
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	-	-	169,081	-	169,081	<i>PT Alur Pelayaran Barat Surabaya</i>
PT Pelindo Energi Logistik	-	-	127,736	-	127,736	<i>PT Pelindo Energi Logistik</i>
Total	407,263	184,001	276,437	93,324	961,025	Total
PT Terminal Teluk Lamong dan Entitas anak:						<i>PT Pelindo Marine Service and Subsidiaries:</i>
PT Terminal Teluk Lamong	-	-	9,874,035	-	9,874,035	<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
PT Lamong Energi Indonesia	-	-	-	-	-	<i>PT Lamong Energi Indonesia</i>
Total	-	-	9,874,035	-	9,874,035	Total
PT Pelindo Daya Sejahtera dan Entitas anak:						<i>PT Terminal Teluk Lamong and Subsidiaries:</i>
PT Pelindo Daya Sejahtera	-	-	129,655	-	129,655	<i>PT Pelindo Daya Sejahtera</i>
PT Pelindo Daya Solusi	-	-	56	-	56	<i>PT Pelindo Daya Solusi</i>
Total	-	-	129,711	-	129,711	Total
Total asset pajak tangguhan	9,649,651	163,597	10,476,487	269,089	20,558,825	Total Deferred Tax asset
Total Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	(112,995,562)	1,530,674	(761,180)	24,645,037	(87,581,029)	Total Deferred Tax Liability - Net

20. Perpajakan (Lanjutan)

*) Koreksi Dasar Pengenaan Pajak tersebut karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (*Corporate Income Tax*) tahun pajak 2015 sehubungan dengan diterimanya Surat dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar No: S-1179/WPJ.19/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Jawaban Surat Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : KU.0302/08.1/P.III-2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal permohonan Ijin Penetapan Umur Aktiva Tidak Berwujud sesuai masa perjanjian Konsesi. Dalam Surat Jawaban tersebut disampaikan bahwa untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat sebagaimana dicontohkan dalam penjelasan pasal 11.A ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	1,783,228,279	1,542,836,783	2,118,322,907	<i>Consolidated income before income tax</i>
Laba entitas anak sebelum beban pajak penghasilan	(671,189,041)	(576,190,265)	(579,365,383)	<i>Subsidiaries' income before income tax</i>
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(44,608,948)	(18,189,505)	(14,108,051)	<i>Equity in net income of associated</i>
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasi	(222,689,523)	(386,261,224)	(275,032,191)	<i>Adjustment for consolidated eliminations</i>
Laba Kena Pajak	844,740,767	562,195,789	1,249,817,282	<i>Total Taxable Income</i>
Tarif Pajak yang Berlaku				<i>Effective Tax Rate</i>
25% x Rp 844.740.767	(211,185,192)	-	-	25% x Rp 844,740,767
25% x Rp 562.195.789	-	(140,548,947)	-	25% x Rp 562,195,789
25% x Rp 1.249.817.282	-	-	(312,454,321)	25% x Rp 1,249,817,282
Total	(211,185,192)	(140,548,947)	(312,454,321)	Total

*) The correction Tax Base because the rectification of the Annual Tax Return (SPT) Corporate Income Tax (Corporate Income Tax) fiscal year 2015 in connection with the receipt of the letter from the finance ministry of the Republic of Indonesia, Directorate General of Taxation Regional Office DJP Large Taxpayer No: S-1179 / WPJ .19 / 2016 dated 29 April 2016 on the Answer Letter Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.0302 / 08.1 / P.III-2016 dated February 19, 2016, concerning the request Permit Age Determination of Intangible Assets corresponding period of concession agreement. In the Statement was submitted that to the intangible asset useful life are not listed on the useful life of existing groups, then the taxpayer uses the nearest future benefits as exemplified in the explanation of Article 11.a paragraph (2) of Law No. 36 Year 2008 concerning the fourth on Law No. 7 of 1983 on Income Tax.

20. Taxation (Continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pengaruh Pajak atas (Beban)				
Penghasilan Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal :				<i>Tax Effect of Nondeductible Expenses (Nontaxable Income):</i>
Biaya Bahan	(261,706)	(531,383)	(472,683)	<i>Raw Expense</i>
Biaya Pemeliharaan	(180,562)	(722,920)	(423,861)	<i>Maintenance Expense</i>
Biaya Asuransi	(47,120)	(877,691)	(564,701)	<i>Insurance Expense</i>
Biaya Administrasi				<i>Office Administrative Expenses</i>
Kantor	(20,428,525)	(20,119,742)	(25,278,584)	
Biaya Diluar Usaha	(28,065,936)	(3,749,670)	(4,568,590)	<i>Other Expense</i>
Biaya Tunjangan				
Komunikasi	(3,397)	(314,057)	(195,828)	<i>Communication Allowance</i>
Biaya Penyusutan				<i>Assets Depreciation</i>
Aset Penugasan	(12,676)	(12,676)	(12,676)	<i>Cost Assignment Expense related to Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Biaya Berkaitan				
Pendapatan Final	(3,431,630)	(1,880,410)	(2,085,182)	
Pendapatan yang Bukan Merupakan Obyek Pajak	142,299,965	97,979,907	110,376,124	<i>Interest not Subjected to Tax</i>
Pendapatan yang Telah Dikenakan PPh Final	<u>69,750,189</u>	<u>64,735,086</u>	<u>63,452,863</u>	<i>Interest Income Subjected to Final Tax</i>
Sub Total	<u>159,618,602</u>	<u>134,506,446</u>	<u>140,226,882</u>	<i>Sub Total</i>
Total Beban Pajak				<i>Total Tax Expenses of the Company:</i>
Perusahaan:				
Non - Final	124,914,991	(6,042,501)	(172,227,439)	<i>Non-Final</i>
Final	(30,066,270)	(29,966,639)	(23,409,125)	<i>Final</i>
Entitas anak:				<i>Subsidiaries:</i>
Beban Pajak Entitas Anak	<u>(365,760,070)</u>	<u>(343,959,778)</u>	<u>(337,414,147)</u>	<i>Subsidiaries Tax Expense</i>
Total Beban Pajak	<u>(270,911,349)</u>	<u>(379,968,918)</u>	<u>(533,050,711)</u>	<i>Total of Tax Expense</i>

21.Utang Bank

21. Bank Loans

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Kredit Modal Kerja				<i>Working Capital Loans</i>
PT Bank ANZ Indonesia	-	689,750,000	497,600,000	PT Bank ANZ Indonesia
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch	<u>671,800,000</u>	-	-	The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch
Total	<u>671,800,000</u>	<u>689,750,000</u>	<u>497,600,000</u>	<i>Total</i>

21. Utang Bank (Lanjutan)

Perusahaan

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor:15-0603LN tanggal 14 Januari 2016, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja tanpa komitmen dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. dalam mata uang US Dollar dengan maksimum kredit sebesar USD100.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu ketersediaan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga LIBOR ditambah dengan margin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Dollar Amerika Serikat. *Applicable Margin*, yakni 1,35% per tahun.

Sesuai perjanjian mengenai Transaksi-transaksi dalam mata uang asing tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan juga memperoleh fasilitas transaksi-transaksi Letter of Credit (Surat Kredit berdokumen) yaitu :

1. Pembukaan Letter of Credit dan Pembayaran kewajiban Penggantian dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengannya, dan;
2. Transaksi-transaksi lain sejenis serta transaksi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi letter of Credit (Surat Kredit Berdokumen) diantaranya adalah : Jaminan, Klaim Assuransi, Keaslian dari Import Documentary Bill dan Dokumen, dan lain sebagainya, Alokasi Risiko, Pembayaran Bunga, Biaya-Blaya Diskon, Ongkos-Ongkos dan Biaya-biaya, Pengurusan Import Documentary Bill, Kewajiban Penggantian, Nilai Tukar, Pembatalan atau Perubahan atas Letter of Credit, dan lain sebagainya

Sesuai dengan perjanjian tanggal 14 Januari 2016, Perusahaan juga memperoleh Fasilitas kontrak-kontrak berjangka mata Uang Asing (*Forward Foreign Exchange Contracts*) dengan atas maksimum Fasilitas sebesar US Dollar 10,000,000 (Angka penuh) untuk keperluan Lindung nilai dengan periode fasilitas 1 (satu) Tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu ketersediaan sampai dengan Tanggal Laporan fasilitas ini belum digunakan Perusahaan

Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan tertentu.

Hal – Hal yang tidak boleh dilakukan adalah:

1. Melakukan peleburan, merger, penggabungan, konsolidasi, atau pembentahan perusahaan yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material.
2. Mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan, atau secara lain melepaskan aset-aset debitur kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha debitur sehari-hari.

21. Bank Loans (Continued)

The Company

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

The Company signed a Loan Facility Agreement No. 15-0603LN dated January 14, 2016, whereby the Company obtained working capital credit facility without the commitment of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. denominated in US Dollar with maximum credit of USD100,000,000 (full amount) for a period of availability of 1 (one) year from the date of the agreement. The loan facility has a LIBOR interest rate plus the applicable margin for a loan in US Dollars. Applicable Margin, which is 1.35% per year.

According to the agreement regarding Transactions in foreign currencies dated January 14, 2016, the Company also obtained the transactions Letter of Credit (Letter of Credit undocumented), namely:

- 1. The opening of Letter of Credit and Payment Replacement liabilities and transactions related thereto, and;*
- 2. Other similar transactions as well as transactions relating to transactions Letter of Credit (Letter of Credit) are: Assurance, Claims assuransi, Authenticity of Import Documentary Bill and documents, and so forth, Allocation Risk, Interest Payments, Expenses - Blaya Discounts, costs and fees, Handling Import Documentary Bill, Replacement Obligations, Exchange Rates, Cancellation or Amendment to Letter of Credit, etc.*

In accordance with the agreement dated January 14, 2016, the Company also obtained Fasility futures contracts currency Foreign Currency (Forward Foreign Exchange Contracts) with a maximum upper Facility amounting to US Dollars 10,000,000 (Figures full) for the purpose of hedging the facility period of 1 (one) year since the date of expiry of the availability of up to date facilities report has not been used by the Company.

The loan is unsecured

Negative Covenant:

- 1. Do the consolidation, merger, merger, consolidation, or revamping the company that might reasonably be expected to have a material adverse impact.*
- 2. Make a single transaction or series of transactions to sell, lease, transfer, or otherwise release the assets of the debtor, except to run debtor everyday business activities.*

21. Utang Bank (Lanjutan)

3. Mengklaim kekebalan dari gugatan, eksekusi, penyitaan, atau proses hukum lain dalam proses hukum yang dilakukan di yurisdiksi tempat didirikannya debitur sehubungan dengan perjanjian ini.
4. Melakukan perubahan material atas bisnis dan operasional.
5. Bertindak sebagai penjamin atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas salah satu dari aset debitur kecuali tindakan tsb diadakan atau dibuat untuk kepentingan debitur dan tiap anak perusahaannya guna melaksanakan mengizinkan dan mengadakan hal-hal sbg berikut:
 - a. Setiap netting dan perjumpaan hutang yang dilakukan oleh anggota group debitur dalam rangka kegiatan sehari-hari debitur terkait pengaturan perbaikan.
 - b. Setiap hak gadai yang timbul karena keberlakuan hukum dan perdagangan sehari-hari debitur.
 - c. Setiap jaminan yang timbul dari retensi atau hak pengaturan penjualan bersyarat.
 - d. Setiap jaminan yang menimbulkan pengaruh terhadap aset perusahaan yang menjadi subsidiari debitur setelah tanggal penandatanganan perjanjian.
 - e. Setiap jaminan yang menimbulkan pengaruh terhadap aset yang diakuisisi oleh anggota group debitur setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini.
 - f. Setiap jaminan dengan keseluruhan jumlah tidak melebihi 2% dari keseluruhan jumlah aset debitur.

PT Bank ANZ Indonesia

Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 612/FA/ANZ/NEW/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen dari PT Bank ANZ Indonesia dalam mata uang US Dollar dengan nilai sebesar US\$50,000,000 (angka penuh).

Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga berupa London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per tahun, dengan periode bunga 1,2,3 atau 6 bulan. Jangka waktu pinjaman maksimum adalah sampai dengan 6 bulan.

Fasilitas pinjaman tersebut ditujukan agar digunakan oleh Peminjam untuk tujuan umum Perseroan, termasuk untuk menjembatani waktu investasi yang di keluarkan untuk pembiayaan awal proyek dan penyelesaian pembiayaan baru ("Fasilitas RC").

21. Bank Loans (Continued)

3. *Claiming immunity from suit, execution, seizure, or other legal process in legal proceedings yang performed in jurisdictions where the establishment of the debtor related with this Agreement*
4. *Make material change in the business and operational.*
5. *Act as a guarantor or provide any guarantee of interest on one of the assets of the debtor unless that action is held or created for the benefit of the debtor and each of its subsidiaries in order to carry out the permit and conduct matters as follows:*
 - a. *Each of netting and debt encounter carried out by members of the group by the debtor to the daily activities of the debtor terkait setting improvement.*
 - b. *Each of lien arising enacted law and daily trading debtors.*
 - c. *Any warranties arising from the retention or the right setting conditional sale.*
 - d. *Each of assurance impacting on the company's assets into a subsidiary debtor after the date of signing the agreement.*
 - e. *Every collateral impacting on the company's assets into a subsidiary debtor after the date of signing the agreement.*
 - f. *Every collateral to the overall amount does not exceed 2% of the total assets of the debtor*

PT Bank ANZ Indonesia

The Company entered into Credit Facility Agreement No. 612/FA/ANZ/NEW/V/2014 dated May 12, 2014, where the Company obtained uncommitted short-term loans from PT Bank ANZ Indonesia denominated in US dollars amounting to USD50,000,000 (full amount).

The loan facility bears interest rate of London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per annum, with interest periods of 1,2,3, or 6 months. Maximum period is up to 6 months.

The facility is to be used by the Borrower for general corporate purpose, including bridging the investment outlay timing and completion of new financing of the Borrower ("RC Facility").

21. Utang Bank (Lanjutan)

Fasilitas tersebut telah diperbarui dengan perubahan Perjanjian Fasilitas No. 641/FA/ANZ/AMN-1/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, untuk mengubah klausul perjanjian sebagai berikut :

- Tentang jumlah pemberian pinjaman berubah dari tidak lebih dari USD50,000,000 (angka penuh) menjadi tidak lebih dari USD200,000,000 (angka penuh) pada setiap waktu.
- Amandemen terhadap isi dari Skedul 3 dari perjanjian fasilitas tersebut, dimana jangka waktu maksimum berubah dari 6 bulan menjadi sampai dengan 9 bulan.

Perjanjian Fasilitas ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut dibebani suku bunga: *London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1,3% per tahun*, dengan periode bunga 1,2,3 atau 6 bulan.

Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- **Larangan Penjaminan**

- a. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Group yang akan menciptakan atau memperbolehkan jaminan atas aset-asetnya.
- b. Perusahaan tidak boleh dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain Grup yang akan:
 - i. Menjual, mengalihkan atau melepaskan asetnya berdasarkan ketentuan dimana aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh Perusahaan atau anggota lain group;
 - ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan tagihannya dengan ketentuan yang memberikan perlindungan pembayaran (*recourse*);
 - iii. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan dengan retensi hak milik;
 - iv. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan dimana uang atau keuntungan dari suatu bank atau rekening lainnya dapat digunakan, diperjumpakan dengan atau terkena kombinasi rekening; atau
 - v. Mengadakan atau memperbolehkan kesepakatan penerimaan lainnya yang memiliki akibat yang sama.

21. Bank Loans (Continued)

The facility was amended by facility agreement No. 641/FA/ANZ/AMN-1/VII/2014 dated July 1, 2014, to amend the following clauses:

- The facility amount is amended from not exceeding USD50,000,000 (full amount) to not exceeding USD200,000,000 (full amount) at any time.
- Amendment to content of Schedule 3 of the facility agreement, where maximum period is amended from 6 months to up to 9 months.

The Facility Agreement is integral and inseparable part of the other Facility Agreements. The facility bears interest rate of London Interbank Offered Rate (LIBOR) + 1.3% per annum, with interest periods 1,2,3, or 6 months.

The loan is unsecured.

Loan Facility Agreement sets several terms as follows:

- **Negative Pledge**

- a. The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit any collateral over any of its assets.
- b. The Company is not allowed and must ensure that no other member of the Group will:
 - i. Sell off, divert or release any of the assets pursuant to the provisions that these assets can be leased or reacquired by the Company or any other members of the group;
 - ii. Sell off, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;
 - iii. Enter a an agreement or allow retention of property rights;
 - iv. Conducting or allowing a deal / agreement where money or profit from bank or other account may be used, met or caused account combination; or
 - v. Conducting or allowing other deal / agreement which has the same impact.

21. Utang Bank (Lanjutan)

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Perusahaan telah mengajukan permohonan *waiver* kepada PT Bank ANZ Indonesia atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas ANZ 2014.

Selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya ("BRI") menandatangani perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul 5 klausula 7(e) dan Skedul 5 klausula 8(a) dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2014. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul 5 klausula 9(b) dari Perjanjian Fasilitas ANZ 2014.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut di atas dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada PT Bank ANZ Indonesia. Pada tanggal 5 September 2014, PT Bank ANZ Indonesia, dengan bergantung pada syarat dan ketentuan dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut, telah membenarkan, menyepakati, mempertegas, dan mengabulkan seluruh hal-hal yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas No.683/FA/ANZ/ AMN-2/VIII/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan dan PT Bank ANZ Indonesia menyepakati perubahan butir (c) Klausula 6 (Pernyataan dan Janji) lampiran 2 dari Perjanjian Fasilitas.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada PT Bank ANZ Indonesia.

21. Bank Loans (Continued)

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 25, 2014 the Company had requested waiver from PT Bank ANZ Indonesia for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

The Company had signed a number of other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement ANZ 2014.

In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch ("BRI") signed an extension agreement of secured loan whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

As a result of the Company's entry into the Other Facility Agreements, RSPHC's entry into loan agreement with BRI, and the creation of RSPHC Security, the Company I has violated Schedule 5 Clause 7(e) and Schedule 5 Clause 8(a) of the Facility Agreement ANZ 2014. The Company is aware that such breach/violation constitutes one or more events of Default under Schedule 5 clause 9(b) of the Facility Agreement ANZ 2014.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches in a Waiver Request Letter dated July 25, 2014 addressed to PT Bank ANZ Indonesia. On September 5, 2014, PT Bank ANZ Indonesia, subject to the terms and conditions of the Waiver Request Letter, had confirmed that it has acknowledged, agreed, confirmed and consented to all matters stated in the Waiver Request Letter.

As stated in the second amendment of the Facility Agreement No. 683/FA/ANZ/AMN-2/VIII/2014 dated August 27, 2014, The Company and PT Bank ANZ Indonesia agreed to amend point (c) Clause 6 (Representations and Undertakings) schedule 2 of the Facility Agreement.

The amendments to the facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to PT Bank ANZ Indonesia.

21. Utang Bank (Lanjutan)

Pada tahun 2015, Perusahaan telah melakukan pembaharuan atas fasilitas pinjaman kepada PT Bank ANZ Indonesia dengan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas No. 799/FA/ANZ/AMN-3/IV 2015 tanggal 22 April 2015, dimana para pihak dengan ini saling sepakat untuk merubah Perjanjian fasilitas dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- Fasilitas yang ditawarkan kepada Peminjam atas dasar tanpa komitmen, dengan jumlah fasilitas ditetapkan pada setiap saat keseluruhan penarikan berdasarkan fasilitas tidak akan melebihi USD100.000.000 (angka penuh).
- Fasilitas Kredit Bergulir Jangka Pendek yang akan digunakan untuk tujuan umum Perusahaan.
- Fasilitas dapat ditinjau kembali setiap saat, dan akan ditinjau kembali dalam setiap hal pada tanggal 31 Januari 2016.

Sejauh tidak diubah dalam perubahan ketiga atas perjanjian Fasilitas ini, semua syarat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas akan tetap tidak berubah dan berlaku secara penuh dan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas.

Perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap pokok pinjaman pada PT Bank ANZ Indonesia, pada 22 Juli 2016 sebesar USD 50,000,000 (angka Penuh) dan tanggal 31 Maret 2015 sebesar USD40,000,000 (angka penuh). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing adalah sebesar nihil, USD50,000,000 (angka penuh) dan USD40,000,000 (angka penuh).

22.Utang Bank Jangka Panjang

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	Investment Credit Facility
Kredit Investasi				Related Parties
<u>Pihak-pihak Berelasi</u>				<u>Rupiah :</u>
Rupiah :				Syndicated Bank Loans
Pinjaman Bank Sindikasi	1,500,000,000	-	-	<u>Third Parties</u>
<u>Pihak Ketiga</u>				Deutsche Bank AG, London Branch
Deutsche Bank AG, London Branch	1,002,932,610	968,399,363	607,509,504	Sub Total
Sub Total	2,502,932,610	968,399,363	607,509,504	
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo satu Tahun	325,801,155	254,042,959	156,529,915	Less Current Maturity Within one year
Bagian Jangka Panjang	2,177,131,455	714,356,404	450,979,589	The Long - Term

21. Bank Loans (Continued)

In 2015, the Company had made the renewal of the loan facility to PT Bank ANZ Indonesia with the Third Amendment Facility Agreement No: 799 / FA / ANZ / AMN-3 / IV 2015 dated 22 April 2015, which the parties hereby mutually agree to change facility agreement with the terms and conditions as follows:

- *The facilities offered to the Borrower on the basis of non-commitment, with total set at any time based on the total withdrawal of the facility will not exceed USD100,000,000 (full amount).*
- *Short-term Revolving Credit Facility, will be used for general corporate purposes.*
- *Facilities may be reviewed at any time, and will be reviewed in each case on January 31, 2016*

To the extent that it is not amended in this Third Amendment, all the other terms and conditions set forth in the Facility Agreement shall remain unchanged and in full force and this Third Amendment to Facility Agreement shall be and integral and inseparable part to the Facility Agreement.

The Company has made payments towards the loan principal at PT Bank ANZ Indonesia on July 22, 2016 amounted to USD 50,000,000 (full amount) and dated March 31, 2015 amounted to USD40,000,000 (full amount). The loan balance at December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively amounted to nil, USD50,000,000 (full amount) and USD40,000,000 (full amount).

22. Long Terms Bank Loans

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	Investment Credit Facility
Related Parties				Related Parties
<u>Rupiah :</u>				<u>Rupiah :</u>
Syndicated Bank Loans				Syndicated Bank Loans
<u>Third Parties</u>				<u>Third Parties</u>
Deutsche Bank AG, London Branch				Deutsche Bank AG, London Branch
Sub Total				Sub Total
Less Current Maturity Within one year				Less Current Maturity Within one year
The Long - Term				The Long - Term

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Perusahaan

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas kredit tanggal 30 Agustus 2013, perihal fasilitas pinjaman berjangka untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dikoordinasi oleh Credit Suisse AG dan Deutsche Bank AG, London Branch (secara bersama-sama disebut "Original Lenders" dan masing-masing disebut "Lender") dengan Deutsche Bank AG, London Branch bertindak sebagai Agen Fasilitas, Perusahaan diberikan fasilitas pinjaman untuk tujuan membiayai pembelian dan pengiriman peralatan tertentu kepada Perusahaan. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari Facility A Commitments dan Facility B Commitments, masing-masingnya sejumlah USD62,913,952.88 (angka penuh) dan USD58,327,918.03 (angka penuh), sehingga total fasilitas pinjaman tersebut adalah USD121,241,870.91 (angka penuh).

Finnvera, perusahaan milik negara yang beryurisdiksi dalam lingkup administratif Kementerian Tenagakerja dan Ekonomi Finlandia, bertindak sebagai penjamin bagi Agen Fasilitas dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Garansi mewakili pihak Pemberi pinjaman dalam perjanjian Finnvera Guarantee. Finnvera Guarantee adalah perjanjian garansi kredit pembeli yang menyertakan term umum Finnvera, dalam bentuk dan substansi yang mengakomodir Agen Fasilitas dalam hubungannya dengan jumlah pinjaman Perusahaan yang terutang dalam Facility Agreement.

Dengan tunduk pada ketentuan Klausus 22.1 dari Facility Agreement, Pemberi pinjaman dapat, tanpa meminta persetujuan Perusahaan: (a) memberikan hak-haknya; atau (b) mengalihkan melalui novasi, hak dan kewajibannya; dalam Facility Agreement dan dokumen keuangan yang mengikutinya, kepada Finnvera dan/atau FEC (Finnish Export Credit Ltd.,) entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Finnvera ataupun afiliasi Pemberi pinjaman lainnya, dengan syarat pemberian atau pengalihan tersebut tidak mengakibatkan dibatalkannya, dicabutnya, ataupun diberhentikannya Finnvera Guarantee.

Para pihak dalam Facility Agreement mengakui dan menyetujui bahwa begitu dapat terlaksana secara wajar setelah tanggal Facility Agreement dan sebelum tanggal Utilisasi pertama, setiap Pemberi pinjaman harus mengalihkan seluruh komitmennya kepada FEC sesuai dengan prosedur pengalihan dalam Klausus 22.6 dari Facility Agreement dan ketentuan dokumen transfer FEC.

The Company

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on Credit Facility Agreement dated August 30, 2013, regarding to the term loan facility to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which is coordinated by Credit Suisse AG Deutsche Bank AG, London Branch (collectively referred to as "Original Lenders" and individually referred to as "Lender") with Deutsche Bank AG, London Branch acting as Facility Agent, the Company is granted loan facilities for the purpose of financing the purchase and delivery of eligible equipment to the Company. The loan facility consists of Facility A Commitments and Facility B Commitments amounting to USD62,913,952.88 (full amount) and USD58,327,918.03 (full amount), respectively which makes up total amount of the loan facility of USD121,241,870.91 (full amount).

Finnvera, a state-owned company within the administrative scope of the Ministry of Employment and the Economy in Finland, is acting as guarantor in favour of the Facility Agent in its capacity as the Guarantee Holder on behalf of the Lenders under the Finnvera Guarantee. Finnvera Guarantee is the buyer credit guarantee agreement incorporating Finnvera general terms, in form and substance satisfactory to the Facility Agent in respect of the amounts owed by the Company under the Facility Agreement.

Subject to the other provisions of Clause 22.1 of the Facility Agreement, a Lender may without the consent of the Company: (a) assign any of its rights; or (b) transfer by novation, any of its rights and obligations; under the Facility Agreement and its Finance Documents, to Finnvera and/or FEC (Finnish Export Credit Ltd., Finnvera's wholly owned subsidiary) or an affiliate of a Lender, provided that any such assignment or transfer shall not result in the Finnvera Guarantee being cancelled, revoked, or terminated.

The Parties acknowledge and agree that as soon as reasonably practicable following the date of the Facility Agreement and in any event prior to the first Utilisation Date, each Original Lender shall transfer all of its Commitments to FEC in accordance with the procedure for transfer set out in Clause 22.6 of the Facility Agreement and the terms of FEC transfer documents.

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Facility A dari waktu ke waktu, menjadi USD62,913,952.88 (angka penuh) pada tanggal Facility Agreement. Facility A jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Facility A.

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Facility B dari waktu ke waktu, menjadi USD58,327,918.03 (angka penuh) pada tanggal Facility Agreement. Facility B jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Facility B.

Waktu mulainya pinjaman yaitu :

- Facility A, 29 Desember 2014, dan
- Facility B, yang lebih dulu antara:
 - i. Tanggal jatuh 20 Bulan dan 14 hari setelah tanggal:
 - (a) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor STS dan
 - (b) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor ASC; dan
 - ii. 12 Oktober 2016.

Fasilitas pinjaman ini dibebani biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya Komitmen

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas (untuk kepentingan masing-masing kreditur) biaya komitmen sebesar :

- i. 0,2% per tahun untuk rekening Finnvera Residual Risk Guarantee pada Fasilitas yang Tersedia (dihitung seolah-olah Finnvera Residual Risk Guarantor memiliki Komitmen Tersedia sama dengan Komitmen Tersedia FEC) diterapkan secara pro rata berdasarkan masing-masing komitmen semula dari Finnvera Residual Risk Guarantor pada tanggal Perjanjian Fasilitas (dalam kapasitasnya sebagai Kreditur semula);
- ii. 0,4% per tahun untuk rekening FEC, pada agregat Komitmen Tersedia FEC.

Biaya Arrangement

Perusahaan wajib membayar kepada setiap Arranger biaya arrangement berdasarkan perjanjian sebesar USD1,515,523.39 (angka penuh) yakni 1,25% dari total komitmen.

Biaya Agen Fasilitas

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas biaya agen berdasarkan perjanjian sebesar USD20,000 (angka penuh) per tahun dan harus dibayar per tahun dimuka.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Total amount of the Facility A Commitments derived from time to time amounted to USD62,913,952.88 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility A is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility A.

Total amount of the Facility B Commitments derived from time to time amounted to USD58,327,918.03 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility B is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility B.

Specified Time Starting Point of Credit are:

- Facility A, December 29, 2014; and
- Facility B, whichever previous:
 - i. The due date within 20 Months and 14 days after the date of (a) the notification letter issued for any revenues raised on the bases of STS Export Contract and (b) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of the ASC Export Contract; and
 - ii. October 12, 2016.

This loan facility bears the following fees:

Commitment fee

The Company shall pay to the Facility Agent (for the account of each Lender) a commitment fee of:

- i. 0.2% per annum for the account of the Finnvera Residual Risk Guarantee on the Available Facility (calculated as if the Finnvera Residual Risk Guarantors had Available Commitments equal to FEC's Available Commitments) applied on a pro rata basis based upon each Finnvera Residual Risk Guarantor's original Commitments at the date of this Agreement (in its capacity as an Original Lender);
- ii. 0.4% per annum for the account of FEC, on the aggregate Available Commitments of FEC.

Arrangement fee

The Company is obliged to pay to every Arranger an arrangement fee based on the amount stated in the agreement, USD1,515,523.39 (full amount), which is 1.25% of the total amount of commitments.

Facility Agent's fee

The Company is obliged to pay to the Cost Facility Agent based on the agreement, USD20,000 (full amount) per annum and payable annually in advance.

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Larangan Penjaminan

- a. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan) membuat atau mengijinkan untuk mengadakan *Security Interest* apapun atas asetnya.
- b. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan):
 - i. Menjual, mengalihkan atau melepas asetnya dengan ketentuan aset tersebut akan atau dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaan atau anggota lain dari Grup;
 - ii. Menjual, mengalihkan atau melepaskan salah satu piutang secara recourse;
 - iii. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap judul pengaturan retensi;
 - iv. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup suatu perjanjian dimana uang atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat diterapkan, Gugatan atau dibuat tunduk kombinasi rekening, atau
 - v. Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap pengaturan preferensial lain yang memiliki efek yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi yang dimasukkan ke dalam terutama sebagai metode meningkatkan Hutang Keuangan atau pembiayaan akuisisi aset.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 Perusahaan telah mengajukan permohonan waiver kepada Deutsche Bank AG atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian fasilitas lainnya, sedangkan Perusahaan tidak diperkenankan untuk memiliki kewajiban keuangan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas CS-DB.

Selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya ("BRI") menandatangani perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Negative Pledge

- a. *The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit to subsist any Security Interest over any of its assets.*
- b. *The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will):*
 - i. *sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or maybe leased to or re-acquired by the Company or any other member of the Group;*
 - ii. *sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;*
 - iii. *enter into or permit to subsist any title retention arrangement;*
 - iv. *Enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or*
 - v. *Enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Financial Indebtedness or of financing the acquisition of an asset.*

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 16, 2014 the Company had requested waiver to Deutsche Bank AG for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

The Company signed a number of other facility agreements while the Company is prohibited to incur other indebtedness as set out in the Facility Agreement CS-DB.

In addition, on 26 August 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch ("BRI") signed an extension agreement of secured loan whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Fasilitas Lainnya oleh Perusahaan, penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI, dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausula 17.4, 17.12, 17.20, 19.1(a), 20.5, 20.7 dan 20.11 dari Perjanjian Fasilitas CS-DB. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam klausula 21 dari Perjanjian Fasilitas CS-DB.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas CS-DB, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 16 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada Deutsche Bank AG, London Branch sebagai Agen Fasilitas. Pada tanggal 4 September 2014, Deutsche Bank AG, London Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 29 Agustus 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG London Branch tanggal 29 Agustus 2014 sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD121,241,890.91 (angka penuh) telah disetujui perubahan perjanjian diantaranya sebagai berikut :

- Klausula 19.1(a) dihapus dan persyaratan keuangan leverage ratio diubah menjadi tidak lebih dari 3.0:1
- Klausula 20.7(a) dihapus dan diganti dengan klausula baru dimana anggota Grup diperbolehkan untuk memiliki liabilitas keuangan sepanjang: (i) nilai agregat liabilitas keuangan Grup tidak melebihi rasio keuangan yang diatur dalam Klausula 19.1 atau menyebabkan pelanggaran terhadap persyaratan keuangan dalam Klausula 19.1 secara umum; (ii) ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman lainnya (termasuk rasio keuangan dan ketentuan larangan lainnya) secara substansial sama dengan ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut.
- Klausula 20.5(c) tentang Larangan Penjaminan ditambahkan untuk mengizinkan penjaminan yang terjadi sebelum Perusahaan memasuki perjanjian pinjaman ini

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

As a result from of the signing of other facility agreements, signing loan agreement between RSPHC and BRI, and also RSPHC's asset insurance, the Company has violated Clause 17.4, 17.12, 17.20, 19.1(a), 20.5, 20.7 of the facility CS-DB agreements. The Company realized that Those breach/violation led to the one or more neglected occurence as intended under clause 21 of the facility CS-DB agreements.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement CS-DB, in a Waiver Request Letter dated July 16, 2014 and subsequent correspondence addressed to Deutsche Bank AG, London Branch as the Facility Agent. As of the September 4, 2014, Deutsche Bank AG, London have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement CS-DB proposed by the Company as stated in the Amendment to Facility Letter dated August 29, 2014.

Based on the Amendment Letter of Facility Agreement from Deutsche Bank AG London Branch dated August 29, 2014 regarding the loan facility with the amount of USD121,241,890.91 (full amount) the following amendment has been made and agreed among others :

- *Clause 19.1(a) is deleted and the financial condition of leverage ratio is amended to not exceeding 3.0:1*
- *Clause 20.7(a) is deleted and replaced by a new clause whereby any member of the Group may incur or permit to be outstanding any financial indebtedness as long as: (i) the aggregate financial indebtedness of the Group does not exceed the financial ratios as provided in Clause 19.1 or result in a breach of Clause 19.1 in general; (ii) including prohibiton covenants and other restrictive covenants stated the other facility agreements (including financial ratio and other prohibiton covenants) are substantially similar to the prohibition or negative covenants provisions of the loan facility agreement.*
- *Clause 20.5(c) regarding Negative Pledge is inserted to allow securities which existed prior to the Company entered into the facility agreement.*

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG London Branch.

Deutsche Bank, Singapore Branch

Pada tanggal 22 Maret 2013, Perusahaan memperoleh Fasilitas Jangka Pendek dari Deutsche Bank Singapore Branch dalam bentuk *Non-revolving Letter of Credit ("LC")* dengan nilai pokok sampai dengan USD120,000,000 (angka penuh). Fasilitas ini diberikan dengan dasar yang tidak mengikat dalam kurun waktu hingga satu tahun sejak tanggal perjanjian. Setiap LC memiliki masa berlaku yang tidak melebihi 40 bulan dan dapat diberikan untuk pembayaran atas unjuk. LC tersebut dibebani bunga 0,125% per kuartal yang terutang atas nilai LC yang belum diselesaikan dan setiap perubahan ataupun penambahan dari nilai pinjaman atau perpanjangan jangka waktu pinjaman dikenakan tambahan biaya sebesar 0,125% per kuartal atau bagian dari kuartal. Pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 Perusahaan telah mengajukan permohonan waiver kepada Deutsche Bank AG atas kelalaian yang dilakukan Perusahaan terhadap beberapa klausul perjanjian tersebut.

Pada tanggal 26 Agustus 2013, entitas anak Perusahaan yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Tanjung Perak Surabaya ("BRI") menandatangani perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai Rp15.000.000.

Sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul G dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul I dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore.

Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas DB Singapore, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 16 Juli 2014 beserta surat-menyerat sesudahnya yang ditujukan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG London Branch.

Deutsche Bank, Singapore Branch

On 22 March 2013, the Company was granted Short Term Facilities, in form of Non-revolving Letter of Credit ("LC") up to an aggregate principal amount of USD120,000,000 (full amount), by Deutsche Bank AG Singapore Branch. The facility is granted on an uncommitted basis up to one year from the date of the facility agreement. Each of the LC has a validity period of not longer than 40 months and maybe issued for payment at sight. The LC bears an interest rate of 0.125% per quarter, payable on quarterly basis based on outstanding LC amount and any amendment or increase in the amount and/or tenor is subject to additional charge of 0.125% per quarter, or part thereof. The loan is unsecured.

In regards with certain representations and undertakings of the facility agreement, on July 16, 2014 the Company had requested waiver from Deutsche Bank AG for the consequences arisen from breaches of certain clauses of the facility agreement.

On August 26, 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya Tanjung Perak Branch ("BRI") entered into extension amendment of secured loan agreement whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").

As a result of RSPHC's entry into loan agreement with BRI and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Schedule G of the Facility Agreement DB Singapore. The Company is aware that such breach /violation constitutes one or more Events of Default under Schedule I of the Facility Agreement DB Singapore.

The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement DB Singapore, in a Waiver Request Letter dated July 16, 2014 and subsequent correspondence addressed to Deutsche Bank AG Singapore Branch.

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Pada tanggal 4 September 2014 Deutsche Bank AG Singapore Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 4 September 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG Singapore Branch tanggal 4 September 2014 No. SPGNB/NS Ref. SOL 3, telah disetujui perubahan perjanjian sebagai berikut :

- Sub clause No. 5 tentang "Schedule G Undertakings" telah dihapus sepenuhnya dan digantikan sebagai berikut:*
1. Tidak menyebabkan atau mengijinkan adanya penjaminan atas aset yang dimiliki untuk:
 - i) Penjaminan atau jaminan kuasi yang sudah ada.
 - ii) Kesepakatan saling hapus saldo baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun entitas anak dalam ketentuan perbankan yang wajar untuk tujuan saling hapus saldo debit dan kredit.
 - iii) Hak gadai akibat hukum yang berlaku dan dalam kegiatan perdagangan yang wajar.
 - iv) *Purchase Money Security Interest* yang nilai totalnya tidak melebihi 5% dari total aset (diukur secara konsolidasian).
 - v) Penjaminan atau jaminan kuasi yang timbul dari retensi hak milik atau kesepakatan penjualan bersyarat atau perjanjian yang sama pengaruhnya, dalam hal pembelian barang oleh Perusahaan atau entitas anak dalam kegiatan perdagangan wajar dan dalam ketentuan umum dari pemasok dalam kondisi normal, dan yang tidak timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun entitas anak.
 - vi) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset milik entitas yang merupakan entitas anak Perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, dimana penjaminan atau jaminan kuasi dibuat sebelum tanggal akuisisi, apabila :
 - a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat sehubungan dengan akuisisi entitas tersebut.
 - b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisisi entitas tersebut.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

As of September 4, 2014, Deutsche Bank AG, Singapore Branch have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement DB Singapore proposed by the Company as stated in the Amendment to Credit Facility Letter dated September 4, 2014.

Based on the Amendment to Credit Facility Letter No. SPGNB/NS Ref. SOL 3 dated September 4, 2014, by Deutsche Bank AG, Singapore Branch, the following amendment has been made :

- Sub clause under 5 "Schedule G Undertakings" of the Facility Letter was deleted entirely and substituted by the following :*
1. *Not create or allow to exist any encumbrance or security over the Company's assets for :*
 - i) *Any existing security or quasi-security interest;*
 - ii) *Any netting or set-off arrangement entered into by the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of its banking arrangements for the purpose of netting debit and credit balances.*
 - iii) *Any lien arising by operation of law and in the ordinary course of trading.*
 - iv) *Any purchase money security interest the total amount of which does not exceed 5% of the Company's total assets (measured on consolidated basis);*
 - v) *Any security or quasi-security interest arising from retention of title or conditional sale arrangements or arrangements having similar effect in respect of goods supplied to the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of trading and on the supplier's standard or usual terms and not arising as a result of any default or omission by the Company or any of its subsidiaries.*
 - vi) *Any security or quasi-security interest over or affecting any assets of any company which become one of the Company's subsidiaries after March 22, 2013, where the security or quasi-security is created prior to the date on which that company becomes one of the Company's subsidiaries if:*
 - a. *The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of that company.*
 - b. *The principal amount secured did not increase in contemplation of or since the acquisition of that company and.*

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

- c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perusahaan tersebut menjadi salah satu anak perusahaan.
- vii) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset yang diperoleh perusahaan atau salah satu anak perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, apabila:
 - a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat sehubungan dengan perolehan aset tersebut oleh Perusahaan atau entitas anak perusahaan.
 - b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisisi entitas tersebut oleh Perusahaan atau entitas anak perusahaan.
 - c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perolehan aset tersebut.
- viii) Pembayaran atau kesepakatan saling hapus atas transaksi tresuri atau transaksi valuta asing yang ditandatangani oleh Perusahaan atau Anak Perusahaan, tidak termasuk jaminan atau jaminan kuasi di bawah kesepakatan pinjaman pendukung, dan
- ix) Penjaminan atau jaminan kuasi yang totalnya tidak melebihi 2% dari total aset Perusahaan (diukur secara konsolidasian).

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch.

Pinjaman Sindikasi :

Perusahaan telah memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Syndikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Agen Fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Syndikasi No.27 tanggal 23 Juni 2016 dari Emi Susilowati, SH. Notaris di Jakarta, dengan jumlah pokok Fasilitas Kredit yang tersedia adalah dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 yang dibagi menjadi 2 (dua) trance, sebagai berikut:

1. Trance A maksimum sebesar Rp3.000.000.000
2. Trance B maksimum sebesar Rp1.500.000.000

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- c. *The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of that company becoming one of the Company's subsidiaries.*
- vii) *Any security or quasi-security interest over or affecting any assets acquired by the Company or any of its subsidiaries after March 22, 2013 if :*
 - a. *The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of that assets by the Company or any of its subsidiaries.*
 - b. *The principal amount secured has not increased in contemplation of or since the acquisition of that assets by the Company or any of its subsidiaries and.*
 - c. *The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of the date of acquisition of such assets.*
- viii) *Any payment or closeout netting or set-off arrangements pursuant to any treasure transaction or foreign exchange transaction entered into by the Company or any of its subsidiaries, excluding any security or quasi-security under a credit support arrangements and.*
- ix) *Any security or quasi-security interest the total amount of which does not exceed 2% of the Company's total assets (measured on consolidated basis).*

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG Singapore Branch.

Syndicated Loan:

The Company has obtained credit facilities from Bank Syndicate consisting of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as Facility Agent, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as stated in the Deed of Loan Syndication Agreement 27 dated June 23, 2016 of Emi Susilowati, SH. Notary in Jakarta, with a principal amount of available credit facilities are denominated in Rupiah with a maximum amount of Rp4.500.000.000 divided into 2 (two) trances, as follows:

1. *Trance A maximum credit of Rp3.000.000.000*
2. *Trance B maximum credit of Rp1.500.000.000*

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Masing-masing kreditur sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap penarikan kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi yaitu :

No	Kreditur /Creditor	Jumlah Komitmen Maksimum/ Maximum Commitment Amount	
		Trance A	Trance B
1	PT Bank negara Indonesia (Persero) Tbk.	1,250,000,000	750,000,000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,250,000,000	750,000,000
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.	500,000,000	-
Total Komitmen / Total Commitment		3,000,000,000	1,500,000,000

Jangka waktu kredit maksimal 8 (delapan) tahun sejak tanggal Penandatanganan Perjanjian sampai dengan 23 Juni 2024 (sudah termasuk masa tenggang 2 Tahun). Jadwal pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dan pembayaran angsuran pokok dilakukan secara triwulan (sesuai Jadwal terlampir).

Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar rata-rata JIBOR IDR 3 bulan + margin = 8,95% pertahun dan Fee agent fasilitas sebesar Rp250.000 per tahun termasuk PPN, commitment fee sebesar 0,25% dari jumlah kredit yang tidak ditarik diakhir masa penarikan serta biaya provisi sebesar 0,50% dari limit kredit.

Fasilitas Kredit ini hanya dapat dipakai untuk :

- Pembiayaan kebutuhan investasi baik yang telah lalu maupun dimasa datang, yang sumber pelunasannya berasal dari arus kas Perusahaan yaitu : Pembiayaan kembali (Refinancing) Capital Expenditure tahun 2015 dan pembiayaan Capital Expenditure tahun 2016 s/d 2017.
- Penerbitan Letter Of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penerbitan LC/SKBDN digunakan untuk pembelian barang modal sesuai RKAP tahun 2016 dan 2017.
 - Biaya atau fee yang terkait dengan penerbitan LC/SKBDN
 - Penarikan LC/SKBDN hanya dapat dilunasi dengan menggunakan kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian ini.
 - Dalam hal LC/SKBDN diterbitkan dalam mata uang selain Rupiah maka kurs yang akan digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat :
 - Tanggal penerbitan LC/SKBDN untuk keperluan perhitungan Limit Kredit yang tersisa dan;

Each syndicate of lenders will participate in any withdrawal of credit in an amount in proportion to the total commitment of all creditors Syndication namely:

Credit term maximum of 8 (eight) years from the date of signing of the Agreement until June 23, 2024 (including a grace period of 2 years). Schedule of interest payments made each month and the payment of principal installments on quarterly basis (as per the attached schedule).

This loan bears interest rate of average JIBOR IDR 3 months + margin = 8.95% per annum and facility agent fee of Rp250,000 per year including VAT, commitment fee of 0.25% of the loan amount not withdrawn at the end of the withdrawal period as well as the cost of provision of 0.50% of the credit limit.

This credit facility can only be used for:

- Financing investment needs both the past and the future, which is the source of repayment is derived from the Company's cash flows are: Refinancing (Refinancing) Capital Expenditure 2015 Capital Expenditure and financing of 2016 in 2017.
- Issuance of Letter of Credit (LC) / Letter of Credit Home Affairs (SKBDN) with the following conditions:
 - Issued LC / SKBDN is used for the purchase of capital goods in accordance RKAP 2016 and 2017.
 - Costs or fees associated with the issuance of LC / SKBDN
 - Withdrawal LC / SKBDN only be settled using a credit granted under this agreement.
- In the case of LC / SKBDN issued in currencies other than Rupiah the exchange rate to be used is a middle rate of Bank Indonesia at the time:
 - The date the LC/SKBDN for calculation purposes and the remaining Credit Limit;

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

- Tanggal pembayaran LC/SKBDN untuk keperluan pelunasan oleh Perusahaan kepada Kreditor.

Selama Perusahaan belum membayar lunas utang Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur Sindikasi.

- a. Mengubah secara substansial status kelembagaan, bentuk badan hukum, maksud, tujuan dan bidang usaha perusahaan;
- b. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan pembubaran;
- c. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- d. Memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Warranty*) kepada pihak lain, kecuali :
 - I. dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari:
 - II. Jaminan perusahaan yang telah berjalan; dan
 - III. Jaminan Perusahaan yang diberikan untuk pembiayaan dengan skema project Financing;
- e. Melakukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan); atau
- f. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau kreditur lain kecuali : (i) Pinjam meminjam dalam rangka transaksi usaha yang wajar atau pelaksanaan kegiatan usaha debitur, atau (ii) perjanjian kredit yang telah ada sebelum tanggal perjanjian ini atau yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan wajib mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

- a. Current Ratio (CR) ≥ 1 (satu) kali
- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) $\geq 125\%$
- c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 3 (tiga) kali

Jaminan :

Kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus. Seluruh harta kekayaan perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum perdata Indonesia. Hak kreditur Sindikasi adalah pari pasu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- The payment date LC / SKBDN for purposes of repayment by the Company to the creditors.

While the Company hasn't pay off debts Company is not allowed to do the following things below, without obtaining the prior written consent of the creditors of the Syndicate.

- a. Substantially alter a status of the institutional, legal forms, goals, objectives and corporate business sectors;
- b. Doing merging, consolidation, take over and dismissal;
- c. Diverting / handed over to another party. total or partial of rights and obligations relating to the credit facility;
- d. Providing Corporate Warranty to the other party, except:
 - I. in order to carry out their business activities daily:
 - II. Corporate warranty that has been running; and
 - III. Corporate Guarantee given to financing the project financing scheme; -
- e. Doing a bankruptcy petition or request for postponement of payments to the relevant authorities (the court); or
- f. Obtained a credit facility or loans from banks or other lenders unless: (i) Lending and borrowing in the context of the transaction reasonable business or business activities of the debtor, or (ii) credit agreements existing prior to the date hereof or disclosed in the financial statements of companies

The Company is required to maintain / improve the financial performance indicators of financial ratios as follows:

- a. Current Ratio (CR) ≥ 1 (one) time
- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) $\geq 125\%$
- c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 3 (three) times

Warranty:

This credit is not secured by specific collateral. The entire assets of both companies to moving goods or not moving goods, either existing or that will exist in the future will be guaranteed in accordance with the provisions of article 1131 and article 1132 Book of Civil Law Code Indonesia. Syndication creditors rights are pari pasu without preferen with the rights of other creditors in accordance with the legislation in force.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22.Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

Pembayaran angsuran Pinjaman Sindikasi 1 (pertama) akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2018 sebesar 4,17 % dari Jumlah Pokok kredit.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

Repayment of Syndicated Loan 1 (first) will mature on September 23, 2018 amounted to 4.17% of the Principal Amount of credit.

23.Surat Berharga Yang Diterbitkan

23. Securities Issued

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Senior Notes Penerbitan tahun 2014 USD500,000,000 (Angka Penuh)	6,718,000,000	6,897,500,000	6,220,000,000	Senior Notes Issued In 2014 USD500,000,000 (Full Amount)
Diskonto and Biaya Penerbitan	<u>(87,530,351)</u>	<u>(77,634,356)</u>	<u>(77,634,356)</u>	Discount and Issuance Cost
Sub Total	6,630,469,649	6,819,865,644	6,142,365,644	Sub-Total
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	15,462,062	9,704,294	1,940,836	Amortization of discount and Issuance cost
Total Utang Notes - Bersih	<u>6,645,931,711</u>	<u>6,829,569,938</u>	<u>6,144,306,480</u>	Notes Payable - Net

Berdasarkan Purchase Agreement tanggal 24 September 2014 dan addendum atas perjanjian tanggal 30 September 2014, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (Angka penuh) Senior Notes, yang akan jatuh Tempo pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,314%.

Based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, the Company issued USD500,000,000 (Full amount) Senior Notes, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%.

Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited dan Standard Chartered Bank. Senior Notes ini dikenakan bunga sebesar 4,875% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan *in arrear* setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan bunga terakumulasi sejak 1 Oktober 2014. Senior Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.875% per annum payable semi-annualy in arrears on April 1 and October 1, Starting October 1, 2015 with interests accumulated from October 1, 2014. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,570,000 (Angka penuh) diterima pada tanggal 1 Oktober 2014 dan digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa3, BB+, BBB-.

The net proceeds, which amounted to USD494,570,000 (Full amount) were received by the Company on October 1, 2014 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes. Based on Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P) and Fitch Rating, the bonds are rated at Baa3, BB+, BBB-, respectively.

Pada tahun 2016, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional yaitu Fitch Rating dengan Standard and Poors (S&P) dan oleh Moody's Investor Service peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BB+ dan Baa3.

In 2016, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S & P) and Moody's Investors Service rating of such bonds each BBB-, BB + and Baa3 respectively.

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan (Lanjutan) 23. Securities Issued (Continued)

Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*Sinking fund*) untuk pelunasan utang Senior Notes ini.

Dalam rangka penerbitan Senior Notes Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 tanggal 19 Desember 2013. Perusahaan juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No S-507/MBU/09/2014 tanggal 2 September 2014 dengan besaran nilai sampai dengan USD500,000,000 (Angka penuh) yang dananya akan digunakan untuk membiayai investasi peningkatan kapasitas produksi pelabuhan dan pengembangan terminal baru.

The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these Senior Notes.

In order to issue the Company's Senior Notes in the Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2014 No.KU.04/23.1/P.III-2013 dated December 19, 2013 The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in his letter No. S.507/MBU/09/2014 dated September 2, 2014 with total amount up to USD500,000,000 (Full amount) which will be used to finance the investment for increasing the seaport production capacity and development of the new terminal.

24. Uang Persekot/Panjar

Uang persekot/uang panjar merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang muka pemakaian jasa pelabuhan yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Swasta	44,227,997	30,623,250	25,480,694	Private Companies
Badan Usaha Milik Negara	3,508,788	1,814,844	3,492,481	State Owned Enterprise
Perorangan	436,791	786,002	599,741	Individuals
Instansi Pemerintah	6,035	9,068	9,193	Government Institution
Tentara Nasional Indonesia	921	3,652	4,855	Indonesian Nasional Army
Total	48,180,532	33,236,816	29,586,964	Total

Rincian menurut valutanya adalah sebagai berikut:

Advances from customer is a liabilities arising from receipts of cash advances from customers for the use of service ports which will be accounted with billing invoice to be released as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Rupiah	47,672,378	31,436,910	21,884,715	Rupiah
Dolar AS	508,154	1,799,906	7,702,249	US Dollars
Total	48,180,532	33,236,816	29,586,964	Total

Details according to original currencies are as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

25.Uang Titipan

Uang titipan merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Swasta Badan	45,185,338	51,330,883	33,253,971	Private Companies
Badan Usaha Milik Negara	8,115,540	10,358,694	11,064,045	State Owned Enterprise
Purna Bhakti	9,234,484	9,149,641	9,098,986	Purna Bhakti
Sewa Tanah	4,178,503	5,935,094	3,911,803	Land Lease
Klaim Asuransi	1,550,049	1,561,069	2,182,066	Insurance Claims
Jamsostek	515,894	561,370	49,842	Jamsostek
Perorangan	384,391	379,663	334,904	Individuals
Tentara Nasional Indonesia	183,037	63,433	1,677	Indonesian Nasional Army
Iuran Koperasi	154,961	421,441	5,247	Contribution of Cooperatives
Instansi Pemerintah	64,923	1,974,176	1,181,647	Government Institutions
Lainnya (Masing - masing Dibawah 150 Juta)	<u>10,742,398</u>	<u>10,492,027</u>	<u>9,129,952</u>	(Each Below Than 150 Million)
Total	<u>80,309,518</u>	<u>92,227,491</u>	<u>70,214,140</u>	Total

Uang titipan purna bhakti merupakan uang titipan pegawai dan calon pegawai yang berasal dari iuran wajib yang dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulan sebesar 5% dari penghasilan terakhir untuk keperluan iuran pemberian penghargaan purna bhakti yang disetorkan ke kas kantor pusat perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelindo III (Persero) No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 Tentang Peraturan Penghasilan Pegawai.

Fund retained is a deposit of funds from other parties to be accounted in accordance with its purpose as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Swasta Badan	45,185,338	51,330,883	33,253,971	Private Companies
Badan Usaha Milik Negara	8,115,540	10,358,694	11,064,045	State Owned Enterprise
Purna Bhakti	9,234,484	9,149,641	9,098,986	Purna Bhakti
Sewa Tanah	4,178,503	5,935,094	3,911,803	Land Lease
Klaim Asuransi	1,550,049	1,561,069	2,182,066	Insurance Claims
Jamsostek	515,894	561,370	49,842	Jamsostek
Perorangan	384,391	379,663	334,904	Individuals
Tentara Nasional Indonesia	183,037	63,433	1,677	Indonesian Nasional Army
Iuran Koperasi	154,961	421,441	5,247	Contribution of Cooperatives
Instansi Pemerintah	64,923	1,974,176	1,181,647	Government Institutions
Lainnya (Masing - masing Dibawah 150 Juta)	<u>10,742,398</u>	<u>10,492,027</u>	<u>9,129,952</u>	(Each Below Than 150 Million)
Total	<u>80,309,518</u>	<u>92,227,491</u>	<u>70,214,140</u>	Total

Purna bhakti deposit funds are deposited money of employees and prospective employees from mandatory dues deducted from employee income every month at 5% of last earnings for full-tuition award devotional service of cash deposited into the corporate headquarters as stipulated in Decree of the Board of Directors of PT Pelindo III (Persero) No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 About Employee's Income Regulations.

26.Utang Dana Pensiun

Utang dana pensiun merupakan saldo dana pensiun yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan dan kontribusi iuran pensiun pegawai perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Saldo Awal Tahun	3,155,865	2,710,584	2,660,271	Balance at Beginning of the Year
Potongan Gaji dan Kontribusi	<u>735,322</u>	<u>445,281</u>	<u>1,229,670</u>	Salary Deduction and Contributions
Dana Tersedia	<u>3,891,187</u>	<u>3,155,865</u>	<u>3,889,941</u>	Available Fund
Total yang dibayarkan ke DP4	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,179,357)</u>	Paid to Pension Fund (DP4)
Sub Total	<u>3,891,187</u>	<u>3,155,865</u>	<u>2,710,584</u>	Sub Total
Kekurangan Biaya Jasa Lalu	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Past Service Liability
Total	<u>3,891,187</u>	<u>3,155,865</u>	<u>2,710,584</u>	Total

26. Pension Fund Payables

Pension fund payable is a pension fund balance derived from monthly employee salary deduction and other contributions by the employee to the pension hold by the Company with the following details:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. Pendapatan Diterima di Muka

27. Unearned Revenue

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pendapatan Penguasaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	70,251,383	65,983,626	50,762,547	Revenue from Lands, Buildings, Waters and Electricity
Pendapatan Pelayanan Bongkar Muat				Conventional Container Loading and Unloading
Petikemas Konvensional	2,208,452	395,750	4,417,717	Services Revenue
Pendapatan Pelayanan Barang	1,693,600	1,693,600	-	Services Goods Revenue
Pendapatan Rupa-Rupa Usaha	1,156,604	152,182	20,000	Equipment Rentals
Pelayanan Barang	585,141	3,352,321	3,837,159	Goods Services
Pelayanan Medis	645,806	704,347	1,155,864	Medical Services
Pendapatan Diluar Usaha	122,048	120,851	152,451	Other Income
Total	76,663,034	72,402,677	60,345,738	Total

28. Beban Akrual

28. Accrued Expenses

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Bonus	260,506,950	226,643,781	232,548,985	Bonuses
Sumber Daya Pihak Ketiga	134,231,133	81,713,900	85,272,690	Third Parties Resources
Pemeliharaan	114,112,076	82,037,187	59,755,566	Maintenance
Bunga Pinjaman	88,620,508	87,232,866	79,599,564	Interest Loan
Pegawai	87,750,270	95,024,299	67,552,451	Employees
Umum	76,603,611	81,750,010	42,541,090	General
Bahan	32,604,698	32,435,265	37,906,564	Material
Administrasi Kantor	6,487,535	2,974,280	3,958,362	Office Administration
Asuransi	797,989	9,000	2,095,549	Insurance
Pengembangan Masyarakat	-	-	16,294	Social Development
Lain-lain	31,747,051	23,357,415	15,701,337	Others
Total	833,461,821	713,178,003	626,948,452	Total
Berdasarkan Mata Uang				By Original Currency
USD	86,796,700	87,573,257	84,854,159	USD
Rupiah	746,665,121	625,604,746	542,094,293	Rupiah
Total	833,461,821	713,178,003	626,948,452	Total

29. Utang Lancar Lain-lain

29. Other Current Payables

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Cadangan Program Pensiun Iuran Pasti	2,142,487	4,209,369	9,534,168	Defined Contribution Pension Plan Reserve
Utang Lancar Lainnya	122,584	58,587	558,710	Other Current Payables
Total	2,265,071	4,267,956	10,092,878	Total

Cadangan program pensiun iuran pasti merupakan cadangan dana program pensiun iuran pasti yang belum dilakukan pendanaan.

Defined contribution pension plan reserve represents unfunded defined contribution pension plans.

30.Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing – masing sebesar Rp321.733.688, Rp239.238.758 dan Rp187.279.090.

30. Long-Term Unearned Revenue

Long term unearned revenue represents revenue in advance from rental of areas and buildings around the port which will due in more than a year. Balance as of December 31, 2016, 2015 and 2014 amounting to Rp321,733,688, Rp239,238,758 and Rp187,279,090, respectively.

31.Uang Jaminan

Utang jaminan per 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 merupakan uang jaminan yang diterima pihak ketiga atas pemakaian jasa listrik, jasa telepon dan jaminan lainnya senilai Rp5.581.612, Rp2.511.075 dan Rp1.851.341.

31. Guaranteed Deposit Received

Guaranteed Deposit Received as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are money assurances received from the third party over the usage of electricity, telephone services, and any other assurances amounting to Rp5,581,612, Rp2,511,075 and Rp1,851,341, respectively.

32.Liabilitas Imbalan Kerja

Estimasi liabilitas aktuarial per tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

32. Employee Benefits Liabilities

The estimated actuarial liabilities as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	The Company
Perusahaan				
Liabilitas Imbalan Pensiun	218,768,918	185,011,249	213,625,242	Pension Benefits Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja Lainnya	8,232,651	6,829,557	5,359,599	Other Employee Benefits Obligations
Liabilitas Imbalan Pensiun Entitas Anak yang Diperhitungkan di Induk	1,540,830	-	-	Pension Benefits Obligation Subsidiaries Taken Into Account in Parent
Sub Total	228,542,399	191,840,806	218,984,841	Sub Total
Entitas Anak	55,546,030	50,148,643	48,212,392	Subsidiaries
Total	284,088,429	241,989,449	267,197,233	Total
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	(36,242,044)	(44,883,597)	(52,007,912)	Less Current Maturity Within One Year
Total Imbalan Kerja Jangka Panjang	247,846,386	197,105,853	215,189,320	Total Long Term Employee Benefits

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pengelompokan manfaat untuk laporan valuasi aktuaria untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sebagai berikut :

Pengelompokan Manfaat / Benefits grouping	31 Desember 2014 and 2013 / December 31, 2014 and 2013
Imbalan Pasca Kerja yang didanai / <i>Funded Post Retirement Benefits</i>	: UUk No.13/2003, Program Manfaat Pasti (PMP), Program Iuran Pasti (PIP) dan Purnabakti/ <i>Labor Law No.13/2003, Defined Benefit Program (PMP), Defined Contribution Program (PIP) and Retirement</i>
Imbalan Pasca Kerja yang tidak didanai / <i>Unfunded Post Retirement Benefits</i>	: Uang Duka dan Tunjangan cacat / <i>Money Grief and disability benefits</i>
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / <i>Other Long-Term Employee Benefits</i>	: Cuti Besar / <i>Long Service Leave</i>

Program Imbalan Pasti :

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan pengerukan ('DP-4") yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. KEP- 248/KM.6/2002 tanggal 12 November 2002. Pendiri Dana Pensiun ('DP-4") adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan Mitra pendiri terdiri PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (Penghasilan Merit (Merit) + Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP)) dan masa kerja karyawan.

Pendanaan Dana Pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun.

Program Iuran Pasti :

Perusahaan

Perusahaan juga melakukan Pendanaan melalui program pensiun iuran pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing-masing No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran porsi pemberi kerja sebesar 10% dari Merit dan TPP. Berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum No. KP.0604/53/P.III-2015 tanggal 3 Juni 2015 menyetujui Pengalihan Penyelenggaraan Program pensiun dan pengalihan Seluruh Dana dari DPLK BNI Simponi kepada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Grouping grouping on actuarial valuation report for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

Pengelompokan Manfaat / Benefits grouping	31 Desember 2014 and 2013 / December 31, 2014 and 2013
Imbalan Pasca Kerja yang didanai / <i>Funded Post Retirement Benefits</i>	: UUk No.13/2003, Program Manfaat Pasti (PMP), Program Iuran Pasti (PIP) dan Purnabakti/ <i>Labor Law No.13/2003, Defined Benefit Program (PMP), Defined Contribution Program (PIP) and Retirement</i>
Imbalan Pasca Kerja yang tidak didanai / <i>Unfunded Post Retirement Benefits</i>	: Uang Duka dan Tunjangan cacat / <i>Money Grief and disability benefits</i>
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / <i>Other Long-Term Employee Benefits</i>	: Cuti Besar / <i>Long Service Leave</i>

Defined Benefits Plans:

The Company maintains defined benefit pension plan program for all permanent employees as of January 1, 2014 which is managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan and Pengerukan ('DP-4") on which the deed establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-248/KM.6/2002 November 12, 2002. Pension Fund ("DP-4") founder was PT (Persero) Pelabuhan of Indonesia II with founding partners PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV and PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pension payable is calculated on the basis of pension income and the period of employment.

Funding of Pension Fund contributions from employers and employees is 5% of the pensionable earnings.

Defined Contribution Plans :

The Company

The Company also maintain a defined contribution pension plan ("PIP") for all permanent employees. This program is managed by Dana Pensiun lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Employees, after serving a qualifying period, are entitled to benefits on retirement, disability or death. The portion of the employer contribution is 10% of the Merit and TPP. The letter of the Director of Human Resources and General No.KP.0604 / 53 / P.III-2015 dated June 3, 2015 approved the Transfer of Program Implementation and transfer of entire pension fund of the Fund of Financial Institutions Pension Fund (DPLK) BNI Simponi to Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perusahaan mendirikan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-141/D.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang merupakan dana pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh pengurus yang terpisah, yang memberikan manfaat pasti bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 10% dari Penghasilan Dasar Pensiun karyawan dan menjadi beban Perseroan.

Jumlah beban sehubungan dengan Kontribusi Perusahaan atas program ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp18.746.957, Rp17.464.390 dan Rp14.994.227.

Kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dihitung oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen sebagaimana tertuang dalam Laporan aktuarial masing – masing No.219/RAC/PL3-UUK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, No.179/RAC/PL3-UUK/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dan No.123/RAC/PL3-UUK/I/2015 tanggal 12 Januari 2015. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari kewajiban, beban, dan mutasi saldo kewajiban imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya:

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.05/KP.0202/P.III-2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pola Pengaturan Kerjasama Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Individu, disebutkan bahwa selisih kurang pembayaran cadangan uang pesangon pegawai PDS yang bertugas di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ditanggung oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Perhitungan imbalan jangka panjang atas imbalan pasca kerja karyawan dilakukan oleh PT Binaputra Jaga Hikmah tahun 2016 dengan menggunakan Projected Unit Credit Method. Jumlah karyawan per tanggal 31 Desember 2016 yang dilakukan perhitungan adalah sebanyak 1.257 orang.

Entitas Anak :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI menghitung dan membukukan penyisihan untuk hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Berdasarkan Undang-undang tersebut Perseroan diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan pada undang-undang tersebut terpenuhi.

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The Company established the Dana Pensiun Purnakarya (Pension Fund of Purnakarya) and its deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No. KEP-141 / D.05 / 2014 dated October 20, 2014 which is a defined benefit pension fund managed by a separate board, which provides defined benefits for all employees who have met certain requirements on retirement, disability or death. Contribution to the pension plan is 10% of pension basic income of employees and it becomes the burden on the Company.

The total expense regarding Company's contribution over the program for the periods ended December 31, 2016, 2015 and 2014 was Rp18,746,957, Rp17,464,390 and Rp14,994,227, respectively.

The Company post-employment benefit liabilities as of December 31, 2016, 2015 and 2014 were calculated by PT RAS Actuarial Consulting, an independent actuary as stated in the actuarial reports No.219/RAC/PL3-UUK/I/2017, No.179/RAC/PL3-UUK/I/2016 tanggal January 11, 2016 and No.123/RAC/PL3-UUK/I/2015 on January 12, 2015. The following table is a summary of the liabilities, expenses, and transfer the balance of post-employment benefit obligations and other long-term benefits:

Based on the Regulation of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No.PER.05/ KP.0202/P.III 2016 dated February 1, 2016 on Cooperation agreement on the handover of partially accupation between PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and individual, stated that shortage of the payment of employee benefit of PDS employees who's assigned on PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) is covered by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Calculation of long-term benefits on post-retirement benefits of employees conducted by PT Binaputra Jaga Hikmah on 2016 using the Projected Unit Credit Method. The number of employees on December 31, 2016 the calculation is as much 1,257 employee.

Subsidiaries :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI calculates and records an allowance for the rights of employees in accordance with the Employment Act of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 dated March 25, 2003. Under the Act, the Company is required to pay severance pay, gratuity and compensation rights to employees when the requirements specified in the law are met.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

BJTI melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan pada Asuransi Dana Pesangon di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 1 Oktober 2007 dan BJTI juga mengikuti program Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") sejak 1 Januari 2015. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 313 dan 279 orang.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya, termasuk karyawan Pelindo III yang diperbantukan ke TPS. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang akta pendirianya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-1100/KM/17,1998 tanggal 23 November 1998.

Iuran pensiun yang ditanggung karyawan adalah 3% dari penghasilan, sedangkan yang ditanggung TPS adalah 10% dari penghasilan. Kontribusi Perusahaan adalah sebesar Rp3.694.420 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Rp3.908.883 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Rp3.816.165 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

TPS mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk karyawan Pelindo III yang diperbantukan ke TPS, berdasarkan perjanjian kerja sama, termasuk sebagai berikut :

- a) Pensiun normal - Uang Penghargaan Purna Bhakti (UPPB) dan Bantuan Biaya Pindah Pensiun (BBPP).
- b) Manfaat kematian dan cacat – UPPB.
- c) Pengunduran diri suka rela – nihil.

Masa kerja karyawan Pelindo III yang diperbantukan di TPS dihitung sejak karyawan tersebut diperbantukan di TPS.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 444 karyawan pada 31 Desember 2016, 465 karyawan pada 31 Desember 2015 dan 438 karyawan pada 31 Desember 2014.

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

BJTI carries funding post-retirement benefits by involving employees at Severance Funds Insurance PT Asuransi Jiwasraya (Persero) from October 1, 2007 and BJTI also follow the Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") program since January 1, 2015. Number of employees as of December 31, 2016 and 2015, amounting to 313 and 279 employees, respectively.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS provides defined contribution for pension scheme to all of its permanent employees including those seconded staff from Pelindo III. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, which was legalized by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decree No. KEP-1100/KM/17,1998 dated November 23, 1998.

Employees' contribution is computed at 3% of their basic income, while the contribution of the Company is 10% of the basic income of the employees. TPS contributed Rp3.694.420 for the period ended December 31, 2016, Rp3,908,883 for the year ended December 31, 2015 and Rp3,816,165 for the year ended December 31, 2014.

TPS provides benefits to its employees, who achieved the retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The calculation of post employment benefits for the TPS seconded staff from Pelindo III, which is based on the Collective Labor Agreement, includes the following :

- a) Retirement - Severance Pay and Gratuity (Uang Penghargaan Purna Bhakti - UPPB and Bantuan Biaya Pindah Pensiun - BBPP).
- b) Death and disable benefit – UPPB.
- c) Voluntary resignation – nil.

The employment period of the seconded staff to TPS is determined based on the start of the assignment to TPS.

The number of employees entitled to the post-employment compensation was 444 employees as of December 31, 2016, 465 employees as of December 31, 2015 and 438 employees as of December 31, 2014.

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC melakukan Pendanaan melalui program Pensiu luran Pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiu Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing - masing No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiu akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiu, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiu tersebut adalah sebesar 20% dari gaji pokok karyawan, dimana sebesar 12,5% ditanggung oleh karyawan sedangkan yang ditanggung oleh PHC sebesar 87,5%.

PHC, PMS, PDS dan TTL

Group melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan organik pada program iuran pasti pada Dana Pensiu Pelindo Purna Karya ("DP-III") sejak tanggal 7 Januari 2015. Jika saldo DP-III kurang dari imbalan pasca kerja sesuai dengan UUK No. 13/2003 dan peraturan PHC, PMS, PDS dan TTL, maka PHC, PMS, PDS dan TTL membayarkan kekurangannya.

Imbalan Pensiu

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian merupakan jumlah bersih dari:

	2016	2015	2014	
	Rp	Rp	Rp	<i>The Company</i>
Perusahaan				
Biaya Jasa Kini	24,007,793	18,895,445	20,428,462	<i>Current Service Cost</i>
Bunga Neto	15,588,651	15,424,930	13,520,871	<i>Net - Interest</i>
Biaya Jasa Lalu dan Keuntungan/ Kerugian atas Penyelesaian	-	-	-	<i>Past Service Costs and Gain / Loss on Settlement</i>
Sub Total	39,596,444	34,320,375	33,949,333	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak	11,118,984	9,580,978	12,282,374	<i>Subsidiaries</i>
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	50,715,428	43,901,353	46,231,707	<i>Expenses are Recognized in profit or loss</i>

Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC made funding to Pensiu luran Pasti ("PIP") for all permanent employees. The program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI Pension Fund) the deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23,1998. Pension benefits will be given on retirement, disability or death. Contributions to the pension plan is 20% of the employee's basic salary on which 12.5% is deferred by the employee while 87.5% is suspended by the PHC.

PHC, PMS, PDS and TTL

Group made funding post-employment benefits to employees include organics in a defined contribution plan in Dana Pensiu Pelindo Purna Karya ("DP-III") since January 7, 2015. If the of DP-III post-retirement benefits balance is less than the UUK No. 13/2003 and regulations of PHC, PMS, PDS and TTL, then PHC, PMS, PDS and TTL pays its shortcomings.

Pension Benefits

Employment benefits expense recognized in the consolidated statements of income consists of the net total of the following amounts:

The net liability for employee benefits recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32.Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				The Company
Nilai Kini dari Liabilitas	295,138,329	270,262,602	307,797,254	Present Value of Obligations
Nilai Wajar Aset Program	(76,369,411)	(85,251,353)	(94,172,012)	Fair Value of Plan Assets Program
Status Pendanaan	218,768,918	185,011,249	213,625,242	Funding Status Restrictions On Asset Securities
Efek Atas Pembatasan Aset	-	-	-	Sub Total
Sub Total	218,768,918	185,011,249	213,625,242	Sub Total
Entitas Anak	55,546,030	50,148,643	48,212,392	Subsidiaries
Liabilitas Bersih	274,314,948	235,159,892	261,837,634	Net Liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the movement of the net liability recognized in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				The Company
Liabilitas Bersih				Net Liability at
Pada Awal Tahun	185,011,249	213,625,242	177,551,907	Beginning of Years
Beban (Pendapatan)	39,596,444	34,320,375	33,949,333	Expense (Income) Payment Realization of Benefits
Realisasi Pembayaran Manfaat	(38,965,100)	(58,245,092)	(37,687,926)	Remeasurement in OCI Effects on Acquisition, Divestment or Transfer
Pengukuran Kembali dalam OCI	36,217,656	1,376,577	87,542,229	Company's Contributions
Efek atas Akuisisi, Divestasi atau Transfer	-	-	1,652,803	Sub Total
Iuran Perusahaan	(3,091,331)	(6,065,853)	(49,383,104)	Subsidiaries
Sub Total	218,768,918	185,011,249	213,625,242	Net Liabilities at End of the Years
Entitas Anak	55,546,030	50,148,643	48,212,392	
Liabilitas Bersih				
Pada Akhir Tahun	274,314,948	235,159,892	261,837,634	

Pengukuran kembali kewajiban (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain:

Measurement of liabilities (assets) net defined benefit in other comprehensive income:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				The Company
Keuntungan atau Kerugian Aktuaria karena Perubahan Asumsi Keuangan	15,174,672	(12,573,545)	-	Gain or Loss on Financial Actuarial Assumptions for Changes
Keuntungan atau Kerugian Aktuaria karena Perubahan Asumsi Demografi	-	-	-	Gain or Loss on Financial Actuarial Demographic for Changes
Penyesuaian Pengalaman atas Liabilitas	12,291,597	2,972,487	55,174,487	Experience Adjustment on Liabilities
Imbal Hasil atas Aset Program, Tidak Termasuk Bunga Neto	8,751,387	10,977,635	32,367,742	Yield on Assets Program, Excluding Net Interest
Perubahan atas Dampak Batas Aset, Tidak Termasuk Bunga Neto	-	-	-	Changes to Limit Impact Assets, Excluding Net Interest
Sub Total	<u>36,217,656</u>	<u>1,376,577</u>	<u>87,542,229</u>	Sub Total
Entitas Anak	<u>(1,007,181)</u>	<u>(3,048,903)</u>	<u>11,037,922</u>	Subsidiaries
Pengukuran Kembali dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>35,210,475</u>	<u>(1,672,326)</u>	<u>98,580,151</u>	Remeasurement in Other Comprehensive Income

Jumlah kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain:

Cumulative amount in other comprehensive income:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Total Kumulatif di OCI pada Awal Tahun	850,539	(526,038)	(88,068,267)	Cumulative number of OCI in Early Years
Pengukuran kembali di OCI	<u>36,217,656</u>	<u>1,376,577</u>	<u>87,542,229</u>	Remeasurement in OCI
Sub Total	<u>37,068,195</u>	<u>850,539</u>	<u>(526,038)</u>	Sub Total
Entitas Anak	<u>19,361,860</u>	<u>10,827,076</u>	<u>5,482,250</u>	Subsidiaries
Total Kumulatif di OCI pada Akhir Tahun	<u>56,430,055</u>	<u>11,677,615</u>	<u>4,956,212</u>	Cumulative amount in OCI at End of Years

Imbalan kerja lainnya

Beban imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian merupakan jumlah bersih dari:

Other employment benefits

Employement benefits expense recognized in the consolidated statements of comprehensive income consists of the net total amount of the following:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				The Company
Biaya Jasa Kini	2,392,062	2,158,336	1,566,873	Current Service Cost
Bunga Neto	487,397	401,309	378,687	Net - Interest
Biaya Jasa Lalu dan Keuntungan/ Kerugian atas Penyelesaian	-	-	-	Past Service Costs and Gain / Loss on Settlement
Keuntungan/ Kerugian Aktuarial yang Diakui	<u>1,351,710</u>	<u>186,947</u>	<u>(174,691)</u>	Recognized Actuarial Gains/Losses
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	<u>4,231,169</u>	<u>2,746,592</u>	<u>1,770,869</u>	Expenses are Recognized in Profit or Loss

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Liabilitas bersih imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Nilai Kini dari Liabilitas	8,232,651	6,829,557	5,359,599	Present Value of the Obligations
Nilai Wajar Aset Program	-	-	-	Fair Value of Plan Assets Program
Status Pendanaan	8,232,651	6,829,557	5,359,599	Funding Status Restrictions On Asset Securities
Efek atas Pembatasan Aset	-	-	-	
Liabilitas Bersih	8,232,651	6,829,557	5,359,599	Net Liability

Rekonsiliasi perubahan liabilitas bersih selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Liabilitas Bersih Pada Awal				Net Liability at Beginning
Tahun	6,829,557	5,359,599	5,321,542	of Years
Beban (Pendapatan)	4,231,169	2,746,592	1,770,869	Expense (Income)
Realisasi Pembayaran Manfaat	(2,828,075)	(1,276,634)	(1,732,812)	Payment Realization of Benefits
Efek atas Akuisisi, Divestasi atau Transfer				Effects on Acquisition, Divestment or Transfer
Iuran Perusahaan	-	-	-	Contributions Company
Liabilitas Bersih Pada				Net Liabilities at End
Akhir Tahun	8,232,651	6,829,557	5,359,599	of Years

Liabilitas Imbalan Pensiun Entitas Anak yang menjadi tanggungan di Induk Perusahaan sesuai Peraturan Direksi No : PER.05/KP.0202/P.III-2016 sebagai berikut :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Biaya Jasa Kini	1,540,830	-	-	Current Service Cost
Bunga Neto	-	-	-	Net - Interest
Biaya Jasa Lalu dan Keuntungan/ Kerugian atas Penyelesaian	-	-	-	Past Service Costs and Gain / Loss on Settlement
Keuntungan/ Kerugian Aktuarial yang Diakui	-	-	-	Recognized Actuarial Gains/Losses
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	1,540,830	-	-	Expenses are Recognized in Profit or Loss

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32.Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

32. Employee Benefits Liabilities (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Liabilitas Bersih Pada Awal				<i>Net Liability at Beginning</i>
Tahun	-	-	-	<i>of Years</i>
Beban (Pendapatan)				<i>Expense (Income)</i>
Tahun Berjalan	1,540,830	-	-	<i>For the Year</i>
Realisasi Pembayaran Manfaat				<i>Payment Realization</i>
Pengukuran Kembali dalam OCI	-	-	-	<i>Remeasurement in OCI</i>
Liabilitas Bersih Pada				<i>of Benefits</i>
Akhir Tahun	1,540,830	-	-	<i>Net Liabilities at End</i>
				<i>of Years</i>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menentukan estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan dalam program imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Program imbalan pasca kerja yang tidak didanai/
Unfunded post retirement benefit obligation

The principal actuarial assumptions used to estimate liabilities for employee benefits under defined benefits plans as of December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

	2016	2015	2014	
Tingkat Diskonto tahunan	8.5% /tahun/annum	9% /tahun/annum	8.5% /tahun/annum	Actuarial interest rate
Tingkat kenaikan gaji	6.50%/tahun/annum	6.50%/tahun/annum	6.50%/tahun/annum	Salary increase rate
Tablet tingkat mortalita	TMI III 2011	TMI III 2011	TMI III 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI III 2011	10% TMI III 2011	10% TMI III 2011	Disability rate
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal pension age
Metode perhitungan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Calculation method
Tingkat Pengunduran Diri	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	1% untuk umur di bawah 30 tahun dan menurun secara linear sampai 0% pada umur 52 tahun / 1% at less than 30 years of age and reducing linearly to 0% at 52 years of age	Voluntary resignation rate

Analisa jatuh tempo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of employee benefit liabilities are as follows:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan				<i>The Company</i>
Jatuh Tempo Manfaat :				Maturity Benefit :
Kurang dari 1 tahun	35,805,358	40,058,339	49,496,080	Less than a year
1 - 5 tahun	58,835,154	78,261,675	97,395,640	1 - 5 years
5 - 10 tahun	71,942,983	58,301,372	52,138,972	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	133,234,710	98,069,667	112,240,411	Over 10 years
Total	299,818,205	274,691,053	311,271,103	Total
Entitas Anak				<i>Subsidiaries</i>
Jatuh Tempo Manfaat :				Maturity Benefit :
Kurang dari 1 tahun	436,686	4,825,258	2,511,832	Less than a year
1 - 5 tahun	2,105,122	2,035,727	1,454,090	1 - 5 years
5 - 10 tahun	3,097,919	4,209,067	2,936,441	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	49,906,302	49,552,258	49,372,599	Over 10 years
Total	55,546,029	60,622,309	56,274,962	Total

32. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Analisis sensitivitas berdasarkan asumsi keuangan nilai kini kewajiban untuk Imbalan Pasca Kerja adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
a. Tingkat Diskonto				<i>a. Discount Rate</i>
Kenaikan sebesar 1%	344,568,270	303,420,342	331,583,610	<i>An increase of 1%</i>
Penurunan sebesar 1%	420,458,595	354,920,376	383,566,611	<i>An decrease of 1%</i>
b. Tingkat Kenaikan				<i>b. Increase of Future Salary Rate</i>
Gaji ke Depan				
Kenaikan sebesar 1%	419,943,430	354,447,134	332,014,893	<i>An increase of 1%</i>
Penurunan sebesar 1%	343,867,157	303,492,686	383,566,611	<i>An decrease of 1%</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku pada tanggal-tanggal pelaporan.

A sensitivity analysis based on the financial assumptions for the present value of Post-Employment Benefits are as follows:

Management believes that the above amounts are adequate to cover the requirements at reporting dates.

33. Modal Saham

33. Capital Stock

	Desember/December 31, 2016, 2015 dan/and 2014			<i>Authorized Unissued Issued and fully paid</i>
	Saham/ Shares	Nilai Nominal (Ribuan Rp) Par Value per Share (Thousands Rp)	Nilai (Ribuan Rp)/ Total Amount (Thousands Rp)	
Modal dasar	3,200,000	1,000	3,200,000,000	
Belum ditempatkan	(2,181,047)	1,000	(2,181,047,000)	
Ditempatkan dan disetor penuh	1,018,953		1,018,953,000	

Dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, seluruhnya atau 100% dimiliki Negara Republik Indonesia.

The above issued and fully paid share capital is (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012,

Based on the Deed of Shareholders' General Meeting No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, the change in the articles of association by a copy Ministry Secretary of State Owned Enterprises Resolution No. SK-226/MBU/S/2012 III on July 16, 2012,

tentang perubahan Modal dasar, Modal disetor dan Modal ditempatkan. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 lembar saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.018.953 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.018.953.000, dengan cara sebagai berikut :

regarding the changes in Authorized, Issued and paid up capital. Company's authorized capital is set at Rp3,200,000,000 consist of 3,200,000 shares, issued and taken part by the Republic of Indonesia for 1,018,953 shares or total amount of Rp1,018,953,000, as follows:

33. Modal Saham (Lanjutan)

Setoran Modal lama sesuai dengan Akta No 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.	809,222,000
Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari :	
• Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012	209,730,528
• Kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011	472
Total Peningkatan modal disetor tahun 2012	209,731,000
Total Modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2013 dan 2012	1,018,953,000

33. Capital Stock (Continued)

<i>Issued and paid share capital as of based on notary deed of Notaris No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.</i>
<i>Additions of paid share capital during 2012 came from :</i>
<i>Conversion from government contribution • (PMN) as decreed in government regulation (PP) No. 08 Year 2012</i>
<i>Capitalization of unappropriated • retained earnings up to 2011</i>
<i>Total addition of paid share capital during 2012</i>
<i>Total issued and paid share capital as of December 31, 2013 and 2012</i>

34.Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor merupakan selisih setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (Pemegang Saham PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, entitas anak PT PMS) diatas nilai nominal saham.

34. Additional Paid In Capital

Additional Paid Capital is the difference between capital contribution received from Van Oord Dredging and Marice Contractor, BV (shareholders of PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, a subsidiary of PT PMS) and the par value of the issued share capital above.

35.Dividen

- Berdasarkan salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. 14- tanggal 17 Mei 2016 dari Notaris Emi Susilowati dengan agenda :
 - Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2015 sebesar Rp702.533.323 sebagai berikut :
 - Sebesar 28% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2015 atau sebesar Rp196.709.330 ditetapkan sebagai dividen.
 - Sebesar 72% dari laba bersih konsolidasian tahun buku 2015 atau sebesar Rp505.823.993 ditetapkan sebagai cadangan.

35. Dividend

- Based on the deed copy of Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. 14- dated May 14, 2016 by Notary Emi Susilowati with the agenda:
 - Establish consolidated the net profit year 2015 amounting to Rp702,533,323 as follows:
 - 28% of consolidated net profit in 2015 year, or Rp196,709,330 allocated as dividends.
 - 72% of consolidated net profit in 2015 year, or Rp505,823,993 designated as reserves.

	<i>Jumlah/Amount</i>	
	Rp	
Dividen	196,709,330	Dividend
Cadangan	505,823,993	Reserve
Total	702,533,323	Total

35. Dividen (Lanjutan)

2. Menetapkan alokasi sumber dana program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 4% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2015, yang sumber dananya dari beban perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya sedangkan Program kemitraan menggunakan sisa saldo dana dari rangkaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diantaranya ketentuan pasal 8 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan / atau
- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tersebut diatas, Direktur Keuangan menerbitkan Nota Dinas melalui surat No: ND.14/DITKEU/II-2017 tanggal 9 Februari 2017, diantaranya perihal melakukan koreksi atas Keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun Buku 2015,

yang sebelumnya menetapkan alokasi sumber dana program Bina Lingkungan tahun 2016 sebesar 4% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2015, yang sumber dananya dari beban perseroan serta sisa saldo dana Program Bina Lingkungan dari rangkaian tahun sebelumnya, menjadi sumber dananya dari penyisihan laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas.

- b. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04/24.1/P.III-2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014, Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

35. Dividend (Continued)

2. Establish the allocation of resources within the Community Development Program in 2016 amounting to 4% of consolidated net profit in 2015 fiscal year, for which the funds from the burden of the company and the remaining balance of the funds the Community Development Program of the circuit the previous year while the partnership program to use the remaining fund balance from the previous year series

Based on Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 12/2016 dated December 19, 2016 on amendments to the Regulation of the Minister for State Owned Enterprises numbers per-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, including the provisions of article 8, paragraph 1 amended to read as follows:

- a. Allowance majority net income for State Owned Enterprises (SOEs) and / or
- b. Budgets are calculated as cost in SOEs

Further follow up on Regulation No. PER-03 / MBU / 12/2016 dated December 19, 2016 on the above, the Director of the Department of Finance issued Memorandum by letter No: ND.14 / DITKEU / II-2017 dated February 9, 2017, among about doing corrections on the decisions of Shareholders Annual Report PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for Fiscal year 2015,

which previously set the allocation of resources within the Community Development program in 2016 amounted to 4% of net consolidated income for the fiscal year 2015, for which the funds from the burden of the company and the remaining balance of the funds the Community Development program of the circuit the previous year, became the funding of the allowance for retained earnings in the statement of changes in equity.

- b. Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04 / 24.1 / P.III-2015 dated May 12, 2015 regarding the approval of the Annual Report for Fiscal Year 2014, the General Meeting of Shareholders (AGM) resolved the following:

35. Dividen (Lanjutan)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2014 termasuk laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Laporan Program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar kententuan dan prosedur Hukum yang berlaku.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2014 sebesar Rp1.194.015.767 terinci sebagai berikut :

	Jumlah/Amount	
	Rp	
Dividen	238,803,153	Dividend
Cadangan	955,212,614	Reserve
Total	1,194,015,767	Total

- c. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04/15/P.III-2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menyetujui laporan tahunan 2013 serta mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun buku 2013 serta memberikan pelunasan dan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan PKBL tahun buku 2013.
 3. Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun buku 2013 yang berasal dari laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.189.597.317, dengan komposisi sebagai berikut :

	Jumlah/Amount	
	Rp	
Dividen	416,359,000	Dividend
Cadangan	773,238,317	Reserve
Total	1,189,597,317	Total

35. Dividend (Continued)

1. Approval of the Annual Report 2014 including the report Implementation of the Supervisory Board of Commissioners and Ratification The financial statements for the year ended December 31, 2014 as well as the endorsement Reports partnership program and Community Development for the year 2014, while providing a release and discharge full responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners on management and supervision have been implemented during the fiscal year 2014. all such action is not a criminal offense or violate the Terms and procedures applicable law.
2. Deciding the use of the 2014 net profit for amounting to Rp1,194,015,767 with the details as follows:

- c. Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KU.04/15/P.III-2014 dated March 19, 2014 regarding the approval of Annual Report and Certification of Financial Statements Financial Year 2013, the General Meeting of shareholders revolved the following:
 1. Approved and certified the Company's annual report and financial statements for the year 2013 and provides full release and responsibilities (*Volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners.
 2. Approved and ratified the PKBL annual report for the fiscal year 2013.
 3. Approved appropriation of the Company's net income for the fiscal year 2013, which derived from the profit attributable to the parent entity amounted to Rp1,189,597,317, with composition as follow:

35. Dividen (Lanjutan)

Sesuai surat No S-790/MBU/2014 tanggal 23 Desember 2014 mengenai Tambahan Setoran Dividen BUMN Tahun Buku 2013 dan berdasarkan keputusan RUPS PT Pelabuhan Indonesia III bahwa pemegang saham mengubah keputusan RUPS mengenai Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, khususnya mengenai pembagian dividen yang telah ditetapkan sebesar Rp416.359.000 menjadi sebesar Rp475.839.000. Pembayaran dividen tambahan sebesar Rp59.480.000 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 kepada Bendahara Umum Negara.

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2014, pada tahun 2014, pembukuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dananya bersumber dari anggaran Perusahaan diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.

Berdasarkan surat no: S-09/D4.MBU/07/2015 tanggal 24 Juli 2015, perihal : Perubahan Keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun Buku 2014, menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang dialokasikan antara lain untuk Dana Program Kemitraan sebesar 1% dari laba bersih atau Rp11.940.157.670 dan untuk Dana Program Bina Lingkungan sebesar 1% dari laba bersih atau Rp11.940.157.670. Perusahaan mencatat sebagai mutasi laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas.

35. Dividend (Continued)

Based on letter No. S-790/MBU/2014 dated December 23, 2014 regarding Additional Deposit as BUMN Dividends for the Fiscal Year 2013 and the decision during the AGM of PT Pelabuhan Indonesia III that the decision to change the shareholders' General Meeting on Financial Statements for Fiscal Year 2013, particularly regarding the distribution of dividend set at Rp416,359,000 changes to Rp475,839,000. Additional dividend payment amounting Rp59,480,000 was made on December 29, 2014 to the State Treasurer.

- d. Based on Ministry of State Owned Enterprises Regulation No. PER-08/MBU/2013, on 2014, the recording of Partnership and Community Development Fund Program where the allocation of the fund comes from the Company budget is considered as current year expense.

Based on the letter no: S-09/D4.MBU/07/2015 dated July 24, 2015, subject : Amendment of General Meeting Annual Report PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for The Year 2014, the appropriation of net income is allocated among others for Partnership Program Fund amounted 1% or Rp11.940.157.670 from the net income and Community Development Fund Program amounted 1% or Rp11.940.157.670 from the net income. The Company recorded a mutation in retained earnings in the statement of changes in equity.

36.Kerugian Atas Kerusakan Aset

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

Pada tanggal 11 Februari 2014 telah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan container crane nomor 5 dan nomor 6 mengalami kerusakan. TPS telah mengasuransikan aset tersebut terhadap resiko kerugian. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, nilai kerugian yang telah terjadi dan masih dalam proses klaim asuransi adalah sebesar US\$2,009,547. Oleh karena belum ada konfirmasi mengenai jumlah kerugian dan pihak asuransi, TPS mencatat jumlah tersebut sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2014 dan belum mencatat piutang serta pendapatan klaim asuransi terkait. Pada tanggal 23 April 2015, pihak asuransi sudah menyetujui klaim terkait hal tersebut sebesar US\$2,302,980. Dengan demikian TPS mencatat pendapatan klaim asuransi sebesar US\$2,302,980 pada tahun 2015 (Lihat Catatan 41).

36. Loss From Damaged Assets

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

On February 11, 2014, there had been an accident that caused damages to the container cranes number 5 and number 6. TPS has insured those assets for such damage. As of December 31, 2014, the loss insured amounting to US\$2,009,547 and is in the process of insurance claim. Since there has not been any confirmation about the amount of loss from the insurance company, TPS recorded such loss as expenses in the 2104 statement of profit or loss and other comprehensive income and has not yet recorded the related insurance claim receivable and income On April 23, 2015, the insurance company has already approved this insurance claim which amount to US\$2,302,980. Therefore, TPS recorded insurance claim income amounting to US\$2,302,980 in 2015 (See Note 41).

37. Kepentingan Non Pengendali

37. Non Controlling Interest

a. Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak

Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia				PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
Nilai tercatat - awal	48,275,885	43,947,510	38,257,048	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	4,091,928	5,674,653	6,566,390	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	1,512,658	(1,647)	(16,640)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Modal	-	-	-	<i>Paid up Capital</i>
Saldo Laba Dicadangkan	-	-	-	<i>Appropriated Retain Earnings</i>
Dividen	(1,142,443)	(1,344,631)	(859,288)	<i>Dividends</i>
Sub Total	52,738,028	48,275,885	43,947,510	<i>Sub Total</i>

Entitas Anak BJTI :

PT Berlian Manyar Sejahtera				
PT Pelindo Properti Indonesia				
PT Berkah Industri Mesin Angkat				
PT Berkah Multi Cargo				
PT Berlian Manyar Stevedore				
PT Terminal Curah Semarang				
Nilai tercatat - awal	376,124,141	372,055,558	206,629,681	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	(1,493,459)	3,058,583	10,175,877	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
Tambahan Modal Disetor				<i>Additional Paid In-Capital</i>
Modal	29,630,000	1,010,000	155,250,000	<i>Paid up Capital</i>
Sub Total	404,260,682	376,124,141	372,055,558	<i>Sub Total</i>
PT Terminal Petikemas Surabaya				PT Terminal Petikemas Surabaya
Nilai tercatat - awal	623,673,917	495,523,467	455,039,275	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	469,639,570	463,159,036	374,339,105	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	6,058,650	1,558,086	(3,665,662)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Dividen	(416,843,133)	(336,566,672)	(330,189,251)	<i>Dividends</i>
Dividen Interim	(99,000,000)	-	-	<i>Interim Dividends</i>
Sub Total	583,529,004	623,673,917	495,523,467	<i>Sub Total</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Kepentingan Non Pengendali (Lanjutan)

37. Non Controlling Interest (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
PT Pelindo				<i>PT Pelindo</i>
Husada Citra				<i>Husada Citra</i>
Nilai tercatat - awal	3,401,107	3,311,502	3,215,268	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	70,954	101,099	104,114	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan				
Komprehensif Lain	(25,138)	(11,494)	(834)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Dividen	(20,285)	-	(7,046)	<i>Dividends</i>
Dividen Interim	(14,206)			<i>Interim Dividends</i>
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	<i>Additional Paid In-Capital</i>
Modal Sumbangan	-	-	-	<i>Capital Contribution</i>
Koreksi	-	-	-	<i>Correction</i>
Sub Total	<u>3,412,432</u>	<u>3,401,107</u>	<u>3,311,502</u>	<i>Sub Total</i>
PT Pelindo Marine Service				<i>PT Pelindo Marine Service</i>
Nilai tercatat - awal	6,963,487	6,984,945	6,771,931	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	802,730	(23,517)	310,293	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan				
Komprehensif Lain	249,045	2,059	(5,911)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Dividen	-	-	(91,368)	<i>Dividends</i>
Saldo Laba Dicadangkan	-	-	-	<i>Appropriated Retained Earnings</i>
Modal	-	-	-	<i>Paid up Capital</i>
Sub Total	<u>8,015,262</u>	<u>6,963,487</u>	<u>6,984,945</u>	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak PMS :				<i>Subsidiary of PMS :</i>
PT Alur Pelabuhan				<i>PT Alur Pelabuhan</i>
Barat Surabaya				<i>Barat Surabaya</i>
PT Pelindo Energi Logistik				<i>PT Pelindo Energi Logistik</i>
Nilai tercatat - awal	81,088,046	92,770,349	-	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	2,446,104	(11,682,959)	1,770,349	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan				
Komprehensif Lain	(6,408)	656	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
Tambahan Modal Disetor	-	-	91,000,000	<i>Additional Paid In-Capital</i>
Sub Total	<u>83,527,742</u>	<u>81,088,046</u>	<u>92,770,349</u>	<i>Sub Total</i>
PT Terminal Teluk Lamong				<i>PT Terminal Teluk Lamong</i>
Nilai tercatat - awal	128,486	536,989	-	<i>Carrying amount - beginning</i>
Bagian laba bersih periode berjalan	74,682	(408,503)	(138,011)	<i>Net income for current period</i>
Penghasilan				
Komprehensif Lain	587	-	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
Tambahan Modal Disetor	-	-	675,000	<i>Additional Paid In-Capital</i>
Sub Total	<u>203,755</u>	<u>128,486</u>	<u>536,989</u>	<i>Sub Total</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Kepentingan Non Pengendali (Lanjutan)

37. Non Controlling Interest (Continued)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Entitas Anak PT Terminal				Subsidiary of PT Terminal
Teluk Lamong :				Teluk Lamong :
PT Lamong Energi Indonesia				PT Lamong Energi Indonesia
Nilai tercatat - awal	4,461,148			Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	(1,643,350)	2,148		Net income for current period
Tambahan Modal Disetor	-	4,459,000		Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>2,817,798</u>	<u>4,461,148</u>		Sub Total
PT Pelindo Daya Sejahtera				PT Pelindo Daya Sejahtera
Nilai tercatat - awal	2,348,103	1,899,432	46,967	Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	986,839	448,671	102,465	Net income for current period
Penghasilan Komprehensif Lain	8,493	-		Other Comprehensive Income
Dividen	(89,734)			Dividends
Dividen Interim	(110,000)			Interim Dividends
Tambahan Modal Disetor	-	-	1,750,000	Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>3,143,700</u>	<u>2,348,103</u>	<u>1,899,432</u>	Sub Total
Entitas Anak PDS :				Subsidiary of PDS :
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera				PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
Nilai tercatat - awal	25,334	5,503		Carrying amount - beginning
Bagian laba bersih periode berjalan	10,486	5,331	3	Net income for current period
Tambahan Modal Disetor	-	14,500	5,500	Additional Paid In-Capital
Sub Total	<u>35,820</u>	<u>25,334</u>	<u>5,503</u>	Sub Total
Total	<u>1,141,684,224</u>	<u>1,146,489,654</u>	<u>1,017,035,255</u>	Total

b. Kepentingan non pengendali atas laba komprehensif entitas anak

b. Non controlling interests in comprehensive income of subsidiaries

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas Anak	4,111,127	8,731,589	16,725,627	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiary
PT Terminal Petikemas Surabaya	475,698,220	464,717,122	370,673,442	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Rumah Sakit Primasaty Husada Citra	45,816	89,605	103,280	PT Rumah Sakit Primasaty Husada Citra
PT Pelindo Marine Service dan Entitas Anak	3,491,471	(11,703,761)	2,074,731	PT Pelindo Marine Service and Subsidiary
PT Terminal Teluk Lamong	(1,568,081)	(406,355)	(138,011)	PT Terminal Teluk Lamong
PT Pelindo Daya Sejahtera	<u>1,005,817</u>	<u>454,002</u>	<u>102,468</u>	PT Pelindo Daya Sejahtera
Total	<u>482,784,370</u>	<u>461,882,202</u>	<u>389,541,537</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

38. Pendapatan Operasi

38. Operating Revenues

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	Gross Revenues : Container Terminal Services Conventional Container Loading and Unloading Services
Pendapatan Usaha Bruto :				
Terminal Peti Kemas	3,415,951,337	3,095,980,044	2,735,891,609	Container Terminal Services
Pelayanan Bongkar Muat				Conventional Container Loading and Unloading Services
Petikemas Konvensional	997,479,277	910,858,289	891,645,987	Ship Services
Pelayanan Kapal	759,932,710	709,023,400	669,934,679	Goods Services
Pelayanan Barang	306,050,214	351,918,128	282,451,926	Loading and Unloading Services
Pelayanan Usaha				Medical Services
Bongkar Muat	286,025,971	305,635,362	277,200,460	Equipment Rental Services
Pelayanan Kesehatan	223,932,131	226,159,681	171,880,031	Land, Building, Water, and Electricity
Pengusahaan Alat-alat	196,634,388	163,531,669	190,803,785	Private Ports Services
Pengusahaan Tanah,				Dry Bulk Terminal Services
Bangunan, Listrik dan Air	207,745,203	162,674,582	175,384,643	Cargo Consolidation Services
Dermaga/tambatan Khusus	88,797,175	129,956,942	130,751,654	Joint Operation
Terminal Curah Kering	145,436,335	119,613,050	130,488,832	Liquid Bulk Terminal Services
Pelayanan Konsolidasi				Forwarding
Muatan	91,181,748	96,840,179	97,231,067	Miscellaneous
Kerjasama Usaha	73,843,412	67,393,059	65,447,133	Sub Total
Terminal Curah Air	52,041,635	23,108,069	21,349,611	
Forwarding	4,908,325	16,971,726	8,582,341	
Pendapatan Usaha Lainnya	737,403,534	118,384,801	109,450,264	
Sub Total	7,587,363,395	6,498,048,981	5,958,494,022	
Reduksi Pendapatan :				Revenues Reduction : Loading and Unloading Services
Pelayanan Usaha				Roll On - Roll Off (RORO) Revenue Reduction
Bongkar Muat	20,560,146	16,159,892	9,674,696	Stevedoring
Roll On - Roll Off (RORO)	1,557,638	1,291,281	989,133	Medical Services
Reduksi Pendapatan				Ship Services
Stevedoring	4,155,795	884,872	123,069	Goods Service
Pelayanan Rumah Sakit	519,832	149,081	150,971	Revenues Forwarding
Pelayanan Kapal	74,775,194	101,279	119,141	Total Revenues Reduction
Pelayanan Barang	326,797	18,617	194,497	Net Operating Revenues
Pendapatan Forwarding	-	-	328,258	
Total Reduksi Pendapatan	101,895,402	18,605,022	11,579,765	
Pendapatan Usaha Bersih	7,485,467,993	6,479,443,959	5,946,914,257	

39. Pendapatan Dan Beban Konstruksi

39. Construction Revenues And Expenses

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Multipurpose Teluk Lamong dan APBS. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for constructing Multipurpose Teluk Lamong Terminal and APBS. Construction revenue is measured using cost method, which all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pendapatan Konstruksi	1,299,565,577	1,785,768,720	2,028,177,779	Construction Revenues
Beban Konstruksi	(1,299,565,577)	(1,785,768,720)	(2,028,177,779)	Construction Expenses

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

40. Beban Operasi

40. Operating Expenses

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Biaya Sumber Daya				<i>Third Parties</i>
Pihak Ketiga	1,644,462,554	1,131,315,174	1,122,352,629	Resources Cost
Biaya Umum	1,011,814,167	745,338,702	601,033,425	General Cost
Biaya Pegawai	908,552,034	711,235,878	605,451,792	Employees Cost
Biaya Pemeliharaan	626,651,221	559,393,847	342,519,781	Maintenance Cost
Biaya Bahan	500,474,954	501,287,696	512,595,636	Cost of Materials
Biaya Penyusutan (Catatan 15 dan 17)	535,231,808	392,007,206	318,909,176	Depreciation Cost (Note 15 and 17)
Biaya Asuransi	101,475,037	151,182,546	115,268,301	Insurance Cost
Biaya Administrasi Kantor	71,105,398	58,355,936	59,898,501	Office Administrative Cost
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	1,293,718	-	16,000,592	Cost of Receivables Impairment
Total	5,401,060,891	4,250,116,985	3,694,029,833	Total

41. Pendapatan (Beban) Lainnya

41. Other Income (Expenses)

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Pendapatan Lainnya				<i>Other Income</i>
Pendapatan Denda dan Klaim	18,434,383	43,036,275	22,601,157	Fines and Claims
Meterai	1,692,162	1,452,214	1,020,661	Meterai
Blanko Pelayanan	768,804	750,642	662,378	Service Form
Laba Penurunan Penyisihan Piutang	-	3,964,725	-	Decrease in Receivable Allowance
Hasil Penjualan Sisa Material Proyek	-	-	5,365,273	Sale Material Waste Project
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	80,684,847	39,964,694	52,272,886	Other income
Sub Total	101,580,196	89,168,550	81,922,355	Sub Total
Beban Lainnya				<i>Other Expenses</i>
Kerugian Penurunan Nilai Bangunan dan Alat - Alat				Impairment Loss Building and tools
Fasilitas Pelabuhan (Catatan 15)	120,064,714	-	-	Port Facilities (Note 15)
Beban Jasa dan Provisi Bank	22,174,467	13,110,839	16,109,744	Bank and Provision Charges
Biaya Denda Pajak	91,317,238	3,720,292	3,447,071	Tax Penalty Cost
Beban Denda dan Klaim	3,328,021	1,296,264	1,620,145	Fines and Claims
Cadangan Penurunan Nilai Bangunan dan Alat - Alat				Allowance for Impairment Building and tools
Fasilitas Pelabuhan (Catatan 15)	937,153	6,372,189	5,696,963	Port Facilities (Note 15)
Rugi Penghapusan Aset Tetap	2,250	2,964,367	1,096,504	Loss on Fixed Assets Disposal
Beban Diluar Usaha Lainnya	48,114,455	26,399,558	35,821,325	Other Non-Operating Expenses
Sub Total	285,938,298	53,863,509	63,791,752	Sub Total
Total	(184,358,102)	35,305,041	18,130,603	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Penghasilan Bunga

42. Interest Income

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Bunga Deposito	72,809,318	80,485,551	67,037,771	Interest on Time Deposits
Jasa Giro	10,538,076	14,090,156	16,892,500	Interest on Current Accounts
Bunga Pinjaman	16,101,317	5,928,989	40,818,588	Interest on Loans
Total	99,448,711	100,504,696	124,748,859	Total

43. Beban Bunga Pinjaman

43. Interest Expenses

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Perusahaan :				<i>The Company:</i>
Bunga Pinjaman :				<i>Interest:</i>
Bunga Obligasi	407,016,516	395,115,542	55,906,955	Bonds
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	22,682,757	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,682,757	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,068,748	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	7,488,978	2,831,058	26,516,873	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank of Tokyo Mitsubishi	7,645,828	-	15,949,030	PT Bank of Tokyo Mitsubishi
Deutsche Bank	-	-	1,922,999	Deutsche Bank
Keuangan Lainnya	398,124	388,767	-	Other Financial Institution
Entitas Anak				<i>Subsidiaries:</i>
Bunga Pinjaman :				<i>Interest:</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	-	45,421,754	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Total	476,983,708	398,335,367	145,717,611	Total

44. Informasi Segmen

44. Segment Information

Segmen Usaha

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional Grup, dalam mengambil keputusan strategis Segmen dikelompokkan menjadi tiga kegiatan

Usaha utama meliputi jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa perkapalan, logistik, distribusi, terminal energi, dan lain-lain, yang merupakan laporan segmen Grup. Divisi-divisi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Grup.

Transaksi antar segmen dilakukan dengan mengacu pada syarat yang disetujui di antara perusahaan.

Business segment

Management has determined the operating segments based on the reports reviewed by the Board of Directors, which has been identified as the Group strategic decisions maker, segments are grouped into three principal business activities

The main segments consisting of port services, shipping services, logistics, distribution, energy terminal, and others, representing the Group's reportable segments. These divisions are the basis on which the Group reports their primary segment information.

Transaction between segments are carried out at agreed terms between companies.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

44. Informasi Segmen (Lanjutan)

44. Segment Information (Continued)

2016							
	Jasa	Pelayanan Jasa	Logistik, distribusi dan Terminal Energi/ Logistics, Distribution, Logistics, and Energy Terminal	Lainnya / Other	Eliminasi / Elimination	Konsolidasi / Consolidation	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	REVENUE
PENDAPATAN							
Penjualan Pada Pihak ketiga dan berelasi	8,927,626,362	347,885,674	546,496,124	484,938,377	(1,521,912,968)	8,785,033,570	Sales to third parties and related parties
Total Pendapatan	8,927,626,362	347,885,674	546,496,125	484,938,377	(1,521,912,968)	8,785,033,570	Total revenue
LABA USAHA							OPERATING INCOME
Hasil Segmen	1,996,238,140	10,928,436	43,171,368	6,961,287	27,107,871	2,084,407,102	Segment result
Laba Penjualan Aset Tetap	926,913	-	-	-	(140,024)	786,889	Gains on Fixed Assets Disposal
Penghasilan Bunga	194,523,995	2,815,394	-	1,628,736	(99,519,414)	99,448,711	Interest Income
Beban Bunga Pinjaman	(571,132,351)	(5,370,771)	-	-	99,519,414	(476,983,708)	Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Asing	(159,814,418)	(2,842,279)	1,323,496	3,893,991	(26,918,892)	(184,358,102)	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Pendapatan (Beban) Lain-lain	215,375,754	(48,963)	-	(8,352)	-	215,318,438	Other Income (Expenses) - Net
Bagian atas laba Bersih Entitas Assosiasi	44,608,948	-	-	-	-	44,608,948	Equity In Net Gain (Loss) of Associates
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	1,720,726,981	5,481,817	44,494,864	12,475,662	48,955	1,783,228,279	Income before income tax
Pajak Penghasilan	(255,117,595)	(2,523,111)	(8,348,435)	(4,922,209)	-	(270,911,349)	Income tax
Laba Periode Berjalan	1,465,609,386	2,958,706	36,146,429	7,553,453	48,955	1,512,316,930	
Laba yang dapat diatribusikan kepada :							PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk						1,037,329,721	Owners of the Parent
Kepentingan nonpengendali						474,987,209	Non - Controlling Interests
Total laba periode berjalan						1,512,316,930	Total
LAPORAN POSISI KEUANGAN :							STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset Segmen	21,875,108,995	336,982,157	184,143,492	394,108,547	(1,710,520,103)	21,079,823,087	Segment assets
Investasi pada entitas assosiasi	3,920,227,923	-	-	-	(2,818,498,746)	1,101,729,177	Investments in associates
Total Aset	25,795,336,918	336,982,157	184,143,492	394,108,547	(4,529,018,849)	22,181,552,264	Total Assets
Liabilitas Segmen	13,860,185,255	158,157,339	141,635,275	87,758,202	(1,711,663,405)	12,536,072,666	Segment Liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran Modal							Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	544,530,370	11,874,856	1,953,234	15,301,600	-	573,660,060	Depreciation and amortization expense

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

44. Informasi Segmen (Lanjutan)

44. Segment Information (Continued)

2015						
	Jasa Kepelabuhanan/ Port Services	Pelayanan Jasa Perkapalan / Shipping Services	Logistik, distribusi dan Terminal Energi/ Logistics, Distribution, Logistics, and Energy Terminal	Lainnya / Other	Eliminasi / Elimination	Konsolidasi / Consolidation
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN			Logistik, distribusi dan Terminal Energi/ Logistics, Distribution, Logistics, and Energy Terminal			
Penjualan Pada Pihak ketiga dan berelasi	8,619,600,788	280,356,246	73,850	332,396,653	(967,214,859)	8,265,212,678
Total Pendapatan	8,619,600,788	280,356,246	73,850	332,396,653	(967,214,859)	8,265,212,678
						REVENUE
						Sales to third parties and related parties
						Total revenue
LABA USAHA						OPERATING INCOME
Hasil Segmen	2,090,463,870	22,504,414	(9,124,567)	13,626,009	111,857,247	2,229,326,973
Laba Penjualan Aset Tetap	9,513,780	850,796	-	36,600	-	10,401,176
Pendapatan Bunga	163,454,282	2,405,806	-	2,433,102	(67,788,493)	100,504,696
Beban Bunga Pinjaman	(465,735,093)	(388,767)	-	-	67,788,493	(398,335,367)
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Asing	161,425,077	(14,309,992)	353,967	(306,764)	(111,857,247)	35,305,041
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(466,652,387)	14,134,421	-	(37,277)	-	(452,555,242)
bagian atas laba Bersih Entitas Assosiasi	18,189,505	-	-	-	-	18,189,505
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	1,510,659,034	25,196,678	(8,770,600)	15,751,670	-	1,542,836,783
Pajak Penghasilan	(373,982,389)	(3,026,794)	969,614	(3,929,348)	-	(379,968,918)
Laba Periode Berjalan	1,136,676,645	22,169,884	(7,800,986)	11,822,322	-	1,162,867,865
						Net Income for the year
Laba yang dapat diatribusikan kepada :						PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk					702,533,323	Owners of the Parent
Kepentingan nonpengendali					460,334,542	Non - Controlling Interests
Total laba periode berjalan					1,162,867,865	Total
LAPORAN POSISI KEUANGAN :						STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset Segmen	18,701,594,681	273,157,164	52,894,608	337,160,227	(1,420,154,811)	17,944,651,869
Investasi pada entitas assosiasi	3,572,578,660	-	-	-	(2,546,623,092)	1,025,955,568
Total Aset yang Dikonsolidasi	22,274,173,341	273,157,164	52,894,608	337,160,227	(3,966,777,903)	18,970,607,437
Liabilitas Segmen	12,508,398,370	113,891,207	1,841,929	62,403,960	(1,421,298,113)	11,265,237,352
						Segment Liabilities
INFORMASI LAINNYA						OTHER INFORMATION
Pengeluaran Modal						Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	393,421,395	10,088,654	-	13,828,434	-	417,338,483
						Depreciation and amortization expense

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

44. Informasi Segmen (Lanjutan)

44. Segment Information (Continued)

2014						
	Logistik, distribusi dan Terminal Energi/ Logistics, Distribution, Logistics, and Energy Terminal					
	Jasa Kepelabuhanan/ Port Services	Pelayanan Jasa Perkapalan / Shipping Services	Rp	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN						
Penjualan Pada Phak ketiga dan berelasi	8,216,267,999	275,231,017	-	224,107,852	(740,514,832)	7,975,092,036
Total Pendapatan	8,216,267,999	275,231,017	-	224,107,852	(740,514,832)	7,975,092,036
						REVENUE
						Sales to third parties and related parties
						Total revenue
LABA USAHA						OPERATING INCOME
Hasil Segmen	2,225,871,375	7,970,408	(570,679)	12,478,163	7,135,158	Segment result
Laba Penjualan Aset Tetap	7,939,717	-	-	-	(12,000)	Gains on Fixed Assets Disposal
Pendapatan Bunga	122,200,241	1,792,702	-	2,880,917	(2,125,000)	Interest Income
Beban Bunga Pinjaman	(147,842,611)	-	-	-	2,125,000	Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Asing	28,696,327	(62,443)	-	(3,386,634)	(7,116,648)	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(135,758,389)	10,224,195	-	(2,330)	(6,510)	Other Income (Expenses)- Net
bagian atas laba Bersih Entitas Assosiasi	(14,108,051)	-	-	-	-	Equity In Net Gain (Loss)of Associates
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	2,086,998,609	19,924,862	(570,679)	11,970,116	-	Income before income tax
Pajak Penghasilan	(527,431,447)	(2,887,239)	-	(2,732,024)	-	Income tax
Laba Periode Berjalan	1,559,567,162	17,037,623	(570,679)	9,238,092	-	Net Income for the year
Laba yang dapat diatribusikan kepada :						PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk					1,192,041,611	Owners of the Parent
Kepentingan nonpengendali					393,230,585	Non - Controlling Interests
Total laba periode berjalan					1,585,272,196	Total
LAPORAN POSISI KEUANGAN :						STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset Segmen	16,101,471,059	463,614,276	9,714,215	260,245,317	(798,170,187)	Segment assets
Investasi pada entitas assosiasi	2,939,379,268	-	-	-	(2,354,745,587)	Investments in associates
Total Aset yang Dikonsolidasi	19,040,850,327	463,614,276	9,714,215	260,245,317	(3,152,915,774)	Total Assets
Liabilitas Segmen	10,177,566,988	55,318,992	153,579	51,423,277	(799,313,489)	Segment Liabilities
INFORMASI LAINNYA						OTHER INFORMATION
Pengeluaran Modal						Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	244,225,034	6,970,581	-	8,062,083	-	Depreciation and amortization expense

44. Informasi Segmen (Lanjutan)

Segmen Geografis

Tabel berikut menunjukkan distribusi dari aset konsolidasian, pengeluaran modal dan pendapatan Grup berdasarkan segmen geografis:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp
Aset:			
Jawa	18,246,940,832	15,642,132,866	14,330,067,076
Kalimantan	1,850,247,413	1,581,136,173	1,113,949,712
Bali	341,285,694	174,947,354	153,326,893
Nusa Tenggara Timur	477,269,748	354,079,112	375,188,872
Nusa Tenggara Barat	164,079,400	192,356,364	64,342,126
Total	21,079,823,087	17,944,651,869	16,036,874,679
Investasi pada Entitas Assosiasi	1,101,729,177	1,025,955,568	584,633,681
Total	<u>22,181,552,264</u>	<u>18,970,607,437</u>	<u>16,621,508,360</u>
Pendapatan:			
Jawa	8,722,954,876	8,247,327,181	7,726,178,954
Kalimantan	618,894,966	668,342,326	739,298,656
Bali	761,422,883	93,731,898	75,926,538
Nusa Tenggara Timur	157,471,824	167,085,836	137,622,469
Nusa Tenggara Barat	44,612,329	55,940,294	36,580,250
Sumatra	1,589,659	-	-
Total	10,306,946,537	9,232,427,535	8,715,606,867
Eliminasi	(1,521,912,968)	(967,214,858)	(740,514,832)
Total	<u>8,785,033,569</u>	<u>8,265,212,677</u>	<u>7,975,092,035</u>

44. Segment Information (Continued)

Geographical segments

The following table shows the distribution of consolidated assets, capital expenditures and the Group's revenues by geographical segment:

	Assets:	Investments in associates	Revenue:
Jawa	Jawa		
Kalimantan	Kalimantan		
Bali	Bali		
Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur		
Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat		
Total	Total		
Investasi pada Entitas Assosiasi			
Total	Total		
Revenue:			
Jawa	Jawa		
Kalimantan	Kalimantan		
Bali	Bali		
Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur		
Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat		
Sumatra	Sumatra		
Total	Total		
Elimination			
Total	Total		

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

Perusahaan :

- a. Kontrak pekerjaan untuk penggerukan kolam turning basin dan dermaga selatan Pelabuhan Cabang Benoa Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No: HK.0502/05.1/P.III-2014 tanggal 21 Januari 2014, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan untuk penggerukan kolam turning basin dan dermaga selatan Pelabuhan Cabang Benoa dengan JO. INRESSAS.

Perjanjian tersebut telah diperbarui beberapa kali terakhir dengan Adendum V Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/490.17/P.III-2015 tanggal 24 November 2015, para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian pada harga borongan karena adanya pekerjaan tambah kurang dan waktu pelaksanaan Pekerjaan sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B X-5/9/PP 2017 tanggal 9 Oktober 2015, maka pekerjaan akan dilanjutkan kembali, bahwa pekerjaan penggerukan diijinkan hingga kedalaman -10mLWS, sedangkan desain awal akan dilakukan sampai dengan -12 mLWS,

45. Agreements and Commitments

The Company :

- a. Employment contract for dredging the turning basin and south jetty of Pelabuhan Cabang Benoa Based on Chartering Agreement No: HK.0502 / 05.1 /P.III-2014 dated January 21, 2014, the Company doing contract work for dredging the turning basin and the south pier Benoa Harbour Branch with JO. INRESSAS.

The agreement has been renewed several times by Addendum V agreement Works No. HK.0502 / 490.17 / P.III-2015 dated 24 November 2015, the parties agreed to make adjustments in the wholesale price for their additional work less and work in connection with the implementation time has Dredging Work Permit Issuance (SIKK) in accordance with the Decree of the Director General of Sea Transportation No. B X-5/9/PP 2017 dated October 9, 2015, then the job will be resumed, that dredging is permitted to a depth -10mLWS, while the initial design will done up to -12 mLWS,

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

sehingga volume pengeringan perlu disesuaikan lagi. Harga borongan yang semula pada "addendum II" sebesar Rp27.494.767 menjadi sebesar Rp11.001.236 sudah termasuk PPN 10%. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan selama 435 hari kalender mengalami penambahan 75 hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangan kapal dan siap kerja dituangkan dalam Berita Acara Mulai Kerja. Sedangkan jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari harga borongan akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai / berakhir dengan dilampiri BAST-2.

Pelaksanaan Pekerjaan Pengeringan Kolam Turning Basin dan Dermaga Selatan Pelabuhan Cabang Benoa telah mencapai fisik 48,48% sesuai dengan Berita Acara Nomor : BA.128.1/HK.0502/BNA-2016 tanggal 6 Juni 2016 dan telah dilakukan pemutusan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemutusan Pekerjaan Nomor : BA.676.1/HK.0502/P.III-2016 tanggal 14 Juni 2016. Pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Pemutusan Pekerjaan adalah sebesar Rp7.006.599.

- b. Perjanjian Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)
Berdasarkan Perjanjian kerjasama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pihak Kedua), tanggal 8 Mei 2014 No: HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No: HK.0501/75/P.III-2014, Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Hak Konsesi :

- Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dan Pihak Kedua dengan ini menerima pemberian hak tersebut disertai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai, merencanakan/ merancang, membangun mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

so the volume of dredging needs to be adjusted again. Original wholesale price on "addendum II" Rp27,494,767 amounting to Rp11,001,236 including VAT 10%. The term of execution of work was assigned during the 435 calendar days have additional 75 calendar days from the date of arrival of the vessel and ready to work stated in the Minutes of Proceed. Whereas a performance bond fixed at 5% of the contract price will be paid after the maintenance is completed / ended by enclosing BAST-2.

Extents of dredging the turning basin and south jetty of port of Benoa branch has reached 48.48% according to the physical Minutes No. BA.128.1 / HK.0502 / BNA-2016 dated June 6, 2016 and the termination of the work has been cancelled in accordance to the Termination Agreement Letter No. BA.676.1 /HK.0502/P.III-2016 dated June 14, 2016. The payment in accordance with the Termination Agreement was Rp7,006,599.

- b. Surabaya West Access Channel (APBS) Concession Rights
According to the agreement on Preparation and Services Provision of APBS between the Ministry of Communications of Indonesia (First Party) with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Second Party), dated May 8, 2014 No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No: HK.0501/75/P.III-2014, the Company has obtained the Concession Rights for Surabaya West Access Channel (APBS) from the Ministry of Communications of Indonesia, with the following conditions:

1. Grants of Concession Rights:

- The First Party hereby grants rights to the second party to perform activities of preparation and service provision and use of APBS Services. Subsequently, the Second Party hereby receives the rights together with obligations and responsibilities to finance, planning / design, build, operate and maintain APBS including the installation of navigation supporting tool and collection for APBS services in accordance to the agreement and the applicable regulation.
- The concession rights cannot be transferred to another party.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS untuk membiayai, merencanakan / merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS, dengan hasil keluaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Panjang alur Pengeringan (*Capital Dredging*) dan pemeliharaan Alur (*maintenance Dredging*) 18,87 nautical miles atau 34.947,24 meter.
- b. Lebar minimal alur 150 meter untuk 5 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pelebaran sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan 200 meter.
- c. Kedalaman alur minimal -13 meter LWS untuk 3 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan -14 meter LWS.
- d. Pengadaan dan pemasangan peralatan Sarana Bantu Navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 20 unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Periode Perjanjian Kerjasama untuk jangka waktu selama 25 tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Masa Pra-Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender.
- b. Masa Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 (dua belas) bulan kalender.
- c. Masa Operasi selama 23 tahun terhitung dimulai sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran sampai dengan berakhirnya Perjanjian kerjasama.

4. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Pihak kedua wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan proyek Pengeringan APBS (*Capital Dredging APBS*) dalam bentuk Aurat Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diakui oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20.000.000 yang diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan perjanjian Kerjasama ini. Dengan masa berlaku minimal 744 hari dan dapat diperpanjang sampai selesainya masa konstruksi.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

2. Scope of Agreement

Activities related to preparation and service provision of APBS for financing, planning / designing, building, operating and maintaining APBS including the installation of navigation supporting tools and collection for APBS services, with outcome as follows:

- a. Capital Dredging and Maintenance Dredging are 18.87 nautical miles or 34,947.24 meters.
- b. The minimum width is 150 meters for first 5 years and will be widen afterwards as necessary with limit of 200 meters maximum.
- c. The minimum depth is -13 meters LWS for first 3 years and will be deepen afterwards as necessary with limit of -14 meters LWS maximum.
- d. Procurement and installation of cruise navigation supporting tools (SBNP) of 20 units, according to the applicable terms.

3. Scope of Agreement

The term for this agreement is 25 years with the following details:

- a. Pre-Construction period no later than 12 calendar months.
- b. Construction period no later than 12 calendar months.
- c. Operational period of 23 years commenced from the first collection for cruise service till the termination of agreement.

4. Scope of Agreement

The second party shall submit implementation collateral for the Capital Dredging APBS project in the form of Bank Guarantee Letter issued by commercial banks which are recognized by the Ministry of Finance of Rp20,000,000 to be submitted no later than 30 (thirty) days after the signing of this agreement with a minimum validity period of 744 days and can be extended until the completion of the construction period.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

5. Status APBS

APBS merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) diwilayah perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik yang berada di daerah kekuasaan/kewenangan pihak kedua, sedangkan pengoperasian APBS selama Periode Kerjasama dilaksanakan oleh pihak kedua.

6. Status APBS

Pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan aset pengoperasian APBS kepada Pihak pertama setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Aset pengoperasian APBS dalam kondisi sesuai ruang lingkup pekerjaan.

7. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Pekerjaan : Pihak kedua akan melaksanaan pengeringan Alur (*Capital Dredging*) sesuai dengan jadwal pengeringan Alur selama 12 bulan sejak *Detail Engineering Design* (DED) disetujui serta diterbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

8. Pernyataan Siap Operasi

Setelah pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka dilakukan uji coba Sispro Pelayanan Penggunaan APBS terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji coba,pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka Pihak Pertama mengeluarkan Pernyataan Siap Operasi.

9. Hasil Konsesi dan Tata Cara Pembayaran

- Hasil konsesi (*concession fee*) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompensasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS.
- Hasil konsesi adalah sebesar 3,5% dari pendapatan kotor Pengoperasian APBS.
- Hasil konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

5. APBS Status

APBS is a part of the Regional Working Environment (DLKr) and Regional Interest Environment (DLKp) in the area of Tanjung Perak and Gresik Port which are located in the area of authority of the second party, whereas during the period of operation of APBS carried out by the second party.

6. APBS Status

The Second Party is obliged to return the APBS operational assets to First Party after the agreement is terminated and stated in the minutes of APBS operational asset recovery in proper condition in accordance with the scope of work.

7. Work Implementation

Work Implementation : The Second Party will carry out the Capital Dredging according to the dredging schedule for 12 months commenced since the approval of Detail Engineering Design (DED) and the publication of Dredging Work Permit (SIKK) and Foreign Ship Usage Permit (IPKA).

8. Statement of Ready for Operation

After the construction of APBS is declared completed, a trial on APBS Services Usage system and procedure will be tested first. After testing, the construction of APBS is declared completed, then the First Party will issue the Statement of Ready for Operations.

9. Concession Rights and Payment Procedures

- Concession fees acquired by the First Party are compensation from the Second Party, in relation to the grant of concession for preparation and APBS services usage.
- Concession fees are 3.5% from the gross income of APBS operational.
- Concession fees are then remitted to the State Treasury as a non-tax revenue on behalf of First Party every month, not later than 15 (fifteen) days on the following months.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Nomor: PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, tentang Pernyataan Siap Operasi APBS, dengan memperhatikan Berita Acara Pembahasan Lanjutan Hasil Survey Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Penggerukan APBS tanggal 15 Mei 2015 dan hasil uji coba Sispro Pelayaran Penggunaan APBS yang telah dilakukan mulai tanggal 1 Juni s/d 31 Agustus 2015, maka alur baru APBS dinyatakan siap operasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah pelaksanaan sosialisasi kepada para pengguna APBS.

- c. Sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.HK.0502/675/P.III-2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum V No.HK.0502/263.1/P.III-2016, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan Design and Build Pembangunan Dermaga Curah Kering di Terminal Teluk Lamong dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan harga borongan awal sebesar Rp145.000.000 sudah termasuk PPN 10% selanjutnya harga borongan berubah menjadi Rp136.795.620 sudah termasuk PPN 10%.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangi oleh kedua belah pihak dengan adanya addendum ini dilakukan penambahan waktu selama 150 hari kalender sejak jangka waktu addendum berakhir. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Perkerjaan pertama (BAST-1). Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp7.275.000 dan yang semula berakhir 24 Januari 2016 masa berlakunya minimal ditambah 150 hari.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai Berita Acara Nomor BA.28.1/PTL/VI-2016.

- d. Sesuai Kontrak No. HK.0502/67/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum V Nomor HK.0502/497.1/P.III-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 10 (Sepuluh) unit Ship To Shore (STS) Crane Baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan Konecranes Finland Corporation (Pihak Kedua).

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

Based on the letter from the Main Port Authority Office of Tanjung Perak Surabaya No. PP.204 / 01/17 / OP.TPr-15 dated 5 November 2015, regarding this Statement of Operations Prepared APBS, having regarded the Minutes of Discussion Continued Examination Survey Results and Testing Works Dredging APBS dated May 15, 2015 and the results of trials Sispro Shipping Use APBS which was conducted from June 1 s / d August 31, 2015, the new access APBS declared ready for operations. Harvesting tariffs budgets users to do two (2) days after the implementation of socialization to the APBS.

- c. In accordance with Chartering Agreements No.HK.0502 / 675 / P.III-2014 dated November 21, 2014 has been updated with Addendum V No.HK.0502 /263.1 / P.III-2016, the Company made an work contract Design and Build Construction of a Jetty Dry Bulk Terminal Teluk Lamong with PT Hutama Karya (Persero) at the beginning of Rp145,000,000 wholesale prices including VAT 10% subsequently turned into Rp136,795,620 wholesale prices including VAT 10%.*

The exercise period of work that originally applied for 12 (twelve) months commencing from the calendar Minutes From The work is signed by both parties in the presence of this addendum, the addition time during 150 calendar days since the period ended addendum. Maintenance period was set for 6 (six) months commencing from the calendar Handover The work of the first (BAST-1). Performance Guarantee amounting Rp7,275,000 which originally ended January 24, 2016 plus a minimum validity period of 150 days.

The working had reached stage of completion of 100% at June 28, 2016 based on the minutes of hand over Number BA.28.1/PTL/VI-2016.

- d. According to the contract No. HK.0502/67/P.III-2013 dated on March 1, 2013, has been updated with Addendum V No.HK.0502 /497.1 / P.III-2016, dated August 18, 2016, the Company (First party) entered into a purchase contract of 10 (ten) units of Ship To Shore (STS) New Cranes for Terminal Teluk Lamong Surabaya, with Konecranes Finland Corporation (Second Party).*

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Perusahaan di Negara Republik Firlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pekerjaan perakitan dan pendirian STS Crane, Pengetesan dan pengujian Peralatan. Harga untuk ruang lingkup (Phase 1,2 dan suku cadang) adalah sebesar USD77,476,499 (Angka Penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan Bea Impor. Harga untuk phase I merupakan harga tetap (fixed price). Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang - barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan Pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit STS Crane adalah 365 hari kalender sejak PHO dari masing- masing STS Crane.

- e. Sesuai Kontrak No. HK.0502/68/P.III-2013 tanggal 1 Maret 2013 yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum III Nomor HK.0502/333.1/P.III-2016 tanggal 30 Maret 2016, Perusahaan (Pihak kesatu) melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan 20 Automated Stacking Crane (ASC) Baru dan 5 (lima) Straddle Carries (SC) baru untuk Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan Konecranes Finland Corporation (Pihak Kedua) Perusahaan di Negara Republik Firlandia dengan ruang lingkup pengadaan alat, pemasangan dan Instalasi, Pengetesan dan pengujian Peralatan dan masa garansi dengan harga ruang lingkup (Phase 1 dan 2) sebesar USD65,998,100 (Angka Penuh) tidak termasuk PPN Impor, PPh Impor dan bea masuk Impor.

Untuk menjamin dilaksanakannya Perjanjian ini maka pihak kedua wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Perusahaan senilai USD3,299,905 (Angka Penuh). Selain itu pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang - barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan Pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian

- f. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/201/P.III-2013 tanggal 13 Juni 2013 yang telah diperbaharui dengan Addendum VII HK.0502/139.1/P.III-2016 tanggal 28 Januari 2016, Perusahaan melakukan kontrak tentang Pekerjaan pengeringan Kolam Dermaga Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak awal sebesar Rp71.638.370 (sudah termasuk PPN) selanjutnya harga borongan berubah menjadi Rp115,885,829 (sudah termasuk PPN).

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

The Company's scope of work covers the work of procurement, assembling work and the establishment of STS Crane, testing and equipment test. The cost of the scope (Phase 1,2 and spare parts) amounted to USD77,476,499 (Full Amount) excluding Import VAT, Import Tax and Import Duty. The cost for phase I is a fixed price (fixed price). The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the Acquisition date of the Minutes of Settlement. The warranty period for each unit of STS Crane extends within working calendar 365 days from the PHO for each STS Crane.

- e. According to the statement of work No. HK.0502/68/P.III-2013 dated March 1, 2013, has been updated with Addendum III No.HK.0502 /333.1 / P.III-2016 dated March 30,2016, the Company (First party) entered into a purchase contract of 20 New Automated Stacking Cranes (ASC) and five (5) new Straddle Carries (SC) for Terminal Teluk Lamong Bay Surabaya, with Konecranes Finland Corporation (Second Party), a company in Republic of Firlandia with business scope of procurement tools, mounting and Installation, Testing and equipment test and warranty period at a price scope (Phase 1 and 2) amounting to USD65,998,100 (Full Amount) exclusive of import VAT, income tax and import duties.

To ensure the implementation of this Agreement, the second party has to provide performance bonds amounting to USD3,299,905 (Full Amount). In addition, second party has to provide insurance coverage for any damages arising from the goods of the Company and other parties during the implementation of procurement until the date of the Minutes of Completion.

- f. According to Chartering Agreement No. HK.0502/201/P.III-2013 dated June 13, 2013 which was amended by Addendum VII HK.0502 / 139.1 / P.III-2016 dated January 28, 2016, the Company made a contract concerning the dredging Works of Terminal Multipurpose Teluk Lamong with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, with an initial contract value Rp71,638,370 (including VAT) is then transformed into Rp115,885,829 wholesale prices (including VAT).

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan awal 240 hari kalender dan selanjutnya jangka waktu pelaksanaan berubah menjadi 881 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Lapangan yang ditandatangani oleh para pihak. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan keseluruhan menjadi minimal sebesar Rp3.930.523 dengan masa berlaku tambahan minimal 60 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan pelaksanaan sebelumnya.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 29 Januari 2016 sesuai Berita Acara Nomor BA.29.1/PTL/I-2016.

- g. Sesuai Kontrak Nomor:HK.0502/405/P.III-2015 tanggal 11 September 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Tunda 2 x 1500 HP Dan 2 x 2400 HP Milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Paket 1 dengan PT Daya Radar Utama (pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan 6 (enam) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1500 HP dan 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 2400 HP. Harga pekerjaan tersebut sebesar Rp350.670.392 belum termasuk PPN 10% dengan kontrak harga satuan yang tetap.

Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang –barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 55% dan 4%.

- h. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/221/P.III-2015 tanggal 27 Mei 2015, yang telah diperbaharui dengan Addendum IV HK.0502/428.1/P.III-2016 tanggal 13 September 2016, perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit Harbour Portal Crane dan 1 (satu) unit Harbour Mobile Crane dengan Italgru S.r.l (pihak kedua) dengan nilai kontrak sebesar EUR16,886,000 (angka penuh) dengan metode CIF. Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi all risk dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak secara PRO RATA selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit alat adalah selama 2 tahun sejak PHO dari masing-masing alat.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

The exercise period of 240 calendar days of the preliminary work and the subsequent implementation period turned into 881 calendar days from the date of handover Fields signed by the parties. Overall Job Performance Security be a minimum of Rp3,930,523 with additional validity period of at least 60 days after the end of the warranty period the previous implementation.

The working had reached stage of completion of 100% at January 29, 2016 based on the minutes of hand over Number BA.29.1/PTL/I-2016.

- g. According to the contract No. HK.0502/405/P.III-2015 dated on September 11, 2015, the Company (First party) entered into contract work Procurement Tug Boat 2 x 1500 HP and Tug Boat 2 x 2400 HP owned PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Package 1 with PT. Daya Radar Utama (Second party). the scope of the work is procurement of 6 (six) Tug Boat 2 x 1500 HP and 2 (two) Tug Boat 2 x 2400 HP. The cost for scope of work amounted Rp350,670,392 excluding VAT 10% at the contract unit price.

The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement. Maintenance period is 12 (twelve) months from minutes of hand over.

As of December 31, 2016 dan 2015, the Work Progress reached 55% and 4% level of completion, respectively.

- h. According to the contract No. HK.0502/221/P.III-2015 on May 27, 2015, which was amended by Addendum IV HK.0502 /428.1/ P.III-2016 dated September 13, 2016 ,the Company (First Party) signed a procurement contract of 4 (four) units of Harbour Portal Crane and 1 (one) unit of Harbour Mobile Crane with Italgru S.r.l (Second Party) with the contract value of EUR16,886,000 (full amount) adopting method of CIF (Cost, Insurance and Freight). The Second Party shall provide an all risk insurance protection with coverage value of 110% of contract price with PRO RATA basis during the procurement until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for each crane is 2 (two) years since PHO of each crane.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 19 Desember 2016.

- i. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/09/P.III-2015 tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak Pekerjaan Pengadaan Sistem Conveyor Bongkar Untuk Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan PT. PP (Persero) Tbk (pihak kedua) dengan nilai kontrak sebesar Rp159.223.500. Perjanjian tersebut telah diperbarui dengan Addendum IV Nomor:HK.0502/528.1/P.III-2016 tanggal 31 Agustus 2016 dimana terdapat penambahan ruang lingkup pekerjaan yaitu perubahan Fixed Speed Conveyor System menjadi Variable Speed Conveyor System, penambahan backup motor dengan sistem plug and play, pembuatan sistem conveyor telescopic dan perubahan fabric cord belt menjadi steel cord belt yang mengakibatkan biaya pengadaan berubah menjadi sebesar Rp201.394.500 dan waktu pelaksanaan berakhir pada 24 Maret 2017.

Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi construction all risk dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak sebelum PPN 10% selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk conveyor sistem adalah selama 365 hari kalender sejak PHO.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,03% dan 65,06%.

- j. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/230/P.III-2014 tanggal 6 Juni 2014, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan pengadaan 11 (sebelas) Unit Automated Rubber Tyred Gantry Crane (A-RTG) TPKS dengan Konecranes Finland (pihak kedua) dengan nilai kontrak sebesar USD24,280,000 (angka penuh) dengan metode DDU (Delivery Duty Unpaid). Perjanjian tersebut telah diperbarui terakhir dengan Perjanjian Tambahan dengan No. HK.0502/340.1/P.III-2015 yang mengakibatkan penambahan biaya sebesar USD1,107,573 (angka penuh). pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi all risk dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit alat adalah selama 365 hari sejak PHO dari masing-masing alat.

Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian 100% pada tanggal 29 Juli 2016.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

The working had reached stage of completion of 100% at 19 Desember 2016.

- i. According to contract Number: HK.0502/09/P.III2015 dated on January 7, 2015, the Company (first party) signed a procurement contract of Conveyor System for Unloading for Terminal Multipurpose Teluk Lamong with PT. PP (Persero) Tbk (second party) with the contract value of Rp159,223,500. The agreement has been renewed with Addendum IV Number: HK.0502/528.1/P.III-2016 dated on August 31, 2016 which is added an additional scope of work that changes Fixed Speed Conveyor System into Variable Speed Conveyor System, additional backup motor with plug and play system, constructing telescopic conveyor system and changes fabric cord belt into steel cord belt resulted the change of procurement cost become Rp201,394,500 and additional time no later than March 24, 2017 .

The Second Party shall provide an all risk insurance protection with coverage value of 110% of contract price (exclude VAT 10%) during the procurement until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for conveyor system is 365 calendar days since PHO of each crane.

As of 31 December, 2016 and 2015, the procurement progress reached a completion rate of 98,03% and 65,06%.

- j. According to contract No: HK.0502/230/P.III-2014 dated on June 6, 2014, the Company (first party) signed a procurement contract of 11 (Eleven) Units of Automated Rubber Tyred Gantry Crane for Terminal Petikemas Semarang (TPKS) with Konecranes Finland (second party) with contract value of USD24,280,000 (full amount) adopting method of DDU (Delivery Duty Unpaid). The agreement has been renewed ended with second addendum No. HK.0502/340.1/P.III-2015. This addendum incurred an additional cost of USD1,107,573 (full amount). The second party shall provide an all risk insurance protection for each phase with coverage value of 110% of contract price until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for each crane is 365 calendar days since PHO of each crane.

The working had reached stage of completion of 100% at July 29, 2016.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- k. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/268/P.III-2015 tanggal 30 Juni 2015, yang telah diperbarui dengan kontrak Addendum I Nomor HK.0502/338.1/P.III-2016 tanggal 22 Juli 2016, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan pengadaan 9 (sembilan) Unit New Automated Rubber Tyred Gantry Crane (A-RTG) TPKS dengan Konecranes Finland (pihak kedua) dengan nilai kontrak awal sebesar USD19,647,350.50 (angka penuh) dengan metode DDU (*Delivery Duty Unpaid*), dengan addendum perjanjian ini berubah menjadi USD 20,450,244.50 (angka penuh). Pihak kedua harus menyediakan perlindungan asuransi all risk dengan nilai pertanggungan sebesar 110% dari harga kontrak selama berlangsungnya pelaksanaan pengadaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa garansi untuk setiap unit alat adalah selama 365 hari kalender sejak PHO dari masing-masing alat.

Pada 31 Desember 2016, kemajuan pekerjaan tersebut masih mencapai tingkat penyelesaian sebesar 33%.

- l. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/445/P.III-2015 tanggal 5 Oktober 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Tunda 2 x 1000 HP Dan 2 x 1800 HP Milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Paket 2 dengan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards (pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1000 HP dan 4 (empat) unit Kapal Tunda dengan daya 2 x 1800 HP. Harga pekerjaan tersebut sebesar Rp306,573.748 belum termasuk PPN 10% dengan kontrak harga lumpsum. Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi untuk kerusakan yang timbul terhadap barang-barang milik Perusahaan dan pihak lain selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 62.06% dan 4%.

- m. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/19/P.III-2015 tanggal 15 Januari 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Konsep Desain, Preliminary Desain & Kontrak Desain (Gambar Klas Approval) untuk 15 unit Kapal Tunda Type SRP dengan Robert Allan Ltd. (pihak kedua) Perusahaan di Kanada dengan ruang lingkup Konsep Desain, Preliminary Desain & Kontrak Desain serta Class Approval.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- k. According to contract No: HK.0502/268/P.III-2015 dated on June 30, 2015, has been amandmend with addendum I Number HK.0502/338.1/P.III-2016 dated July 22, 2016, the Company (first party) signed a procurement contract of 9 (Nine) Units of Rubber Tyred Gantry (Automated) Crane for Terminal Petikemas Semarang (TPKS) with Konecranes Finland (second party) with initial contract value of USD19,647,350.50 (full amount) adopting method of DDU (*Delivery Duty Unpaid*) then transformed in to USD20,450,244.50 (full amount). The Second Party shall provide an all risk insurance protection for each phase with coverage value of 110% of contract price until the date of Provisional Hand Over. Warranty period for each crane is 365 calendar days since PHO of each crane.

As of December 31, 2016, the procurement progress reached 33% stage completion.

- l. According to the contract No. HK.0502/445/P.III2015 dated on October 5, 2015, the Company (first party) entered into contract Work Procurement Tug Boat 2 x 1000 HP and Tug Boat 2 x 1800 HP owned PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Package 2 with PT. Dumas Tanjung Perak Shipyards (second party). the scope of the work is procurement of 3 three) Tug Boat 2 x 1000 HP and 4 (four) Tug Boat 2 x 1800 HP. The cost for scope of work amounted Rp306,573,748 excluding VAT 10% at the contract lumpsum price. The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement. Maintenance period is 12 (twelve) months from minutes of hand over.

As of December 31, 2016 and 2015, the work progress reached a completion rate of 62.06% and 4%.

- m. According to the contract No. HK.0502/19/P.III-2015 dated on January 15, 2015, the Company (first party) entered into contract work Procurement of Concept Design, Preliminary Design And Contract Design (Class Approval Drawing) For 15 Units of Harbour Tug Type SRP with Robert Allan Ltd (second party). the scope of the work is Concept Design, Preliminary Design And Contract Design.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Harga pekerjaan tersebut sebesar USD1,200,000 (angka penuh) termasuk pajak-pajak yang berlaku di negara Kanada dengan kontrak harga lumpsum dan untuk Class Approval akan ditagihkan secara at cost. Pihak Kedua harus menyediakan tenaga engineer dalam rangka memberikan konsultasi dan kunjungan ke Indonesia selama masa pembangunan kapal.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 99,48% dan 38,17%.

- n. Sesuai Kontrak Nomor: HK.0502/211/P.III-2015 tanggal 22 Mei 2015, Perusahaan (pihak kesatu) melakukan kontrak pekerjaan Pengadaan Mesin Induk dan Sistem Propulsi Kapal Tunda dengan PT Tesco Indomaritim (pihak kedua) dengan ruang lingkup pengadaan mesin induk dan sistem propulsi dan perlengkapannya, pengadaan suku cadang utama dan suku cadang standar pemakaian 2000 jam, pengujian, supervisi pemasangan dan sertifikasi Class Lloyd Register. Harga pekerjaan tersebut sebesar USD27,570,000 (angka penuh) tidak termasuk PPN 10% Import, PPh Import, Bea Masuk Import serta pajak-pajak lainnya terkait dengan kondisi Delivery at Place dengan kontrak harga satuan. Pihak Kedua harus menyediakan perlindungan asuransi all risk untuk pengangkutan / pengapalan Mesin Induk dan Sistem Propulsi sampai ke lokasi tujuan. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan kalender untuk pemasangan dan 12 (dua belas) bulan untuk masa garansi sejak Berita Acara Serah Terima Pertama.

Pada 31 Desember 2016 dan 2015 kemajuan pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 85% dan 20%.

- o. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/64/P.III-2015 tanggal 10 Februari 2015, yang telah diperbaharui dengan Addendum III No. HK.0502/574.1/P.III-2016 tanggal 6 Desember 2016 antara Perusahaan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Celukan Bawang, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp103.188.348 (termasuk PPN 10%) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 300 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-I).

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

The cost for scope of work amounted USD1,200,000 (full amount) including tax that is applicable in the Canada at the contract lumpsum price and for the Class Approval would be at cost. The second party is obliged to provide engineer to give consultation and visit to Indonesia during vessel construction.

As of December 31, 2016 and 2015 the work progress reached a completion rate of 99,48% and 38,17%.

- n. According to the contract No. HK.0502/211/P.III2015 dated on May 22, 2015, the Company (first party) entered into contract work Supply Main Engine and Propulsion System for Tug Boat with PT Tesco Indomaritim (second party). the scope of the work is procurement of Main engines and propulsion systems and equipment, procurement of major spare parts and spare parts 2000 hours of usage standards, testing, installation supervision and certification of Class Lloyds Register. The cost for scope of work amounted USD27,570,000 (full amount) excluding VAT 10% Import, Import Tax, Import Duties and taxes - other taxes associated with the condition Delivery at Place at the contract unit price. The second party would provide insurance coverage for the possible damages of the goods during the implementation of the acquisition date of the minutes of settlement. Maintenance period is 6 (six) months and warranty period is 12 (twelve) months from minutes of hand over.*

As of December 31, 2016 and 2015 the work progress reached a completion rate of 85% and 20%.

- o. According with Chartering Agreement No. HK.0502 / 64 / P.III-2015 dated February 10, 2015 and has been renewed by addendum III No.HK.0502/574.1/P.III-2016 dated December 6, 2016, between the Company and PT Adhi Karya (Persero) Tbk for Development Works Bulk Liquid Jetty at Port Celukan Bawang, at wholesale prices throughout the work amounted Rp108,188,348 (including VAT 10%) with a term of execution of work 300 calendar days from the date of the Minutes Start Works. Maintenance period of 180 calendar days from the Handover of Works First (BAST-I).*

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Tambahan Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan ini telah diserahkan pada tanggal 19 Desember 2016 Nomor MBG666055884116N dengan nilai sebesar Rp5.159.417 dengan masa berlaku sampai tanggal 14 Februari 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90,2% dan 22,95%.

- p. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/352/P.III-2015 tanggal 13 Agustus 2015, antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan Pembangunan Container Yard (CY) Tahap 2 di Terminal Teluk Lamong, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp358.027.658 (termasuk PPN 10%) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 18 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 12 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I).. Perjanjian ini telah diperbarui dengan Addendum I Nomor HK.0502/557.1/P.III-2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan merubah harga kontrak menjadi sebesar Rp387.555.899 (termasuk PPN 10%)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Progress Pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 92,80% dan 27,6%.

- q. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/548.1/P.III-2015 tanggal 2 Desember 2015, yang diperbarui dengan addendum I Nomor HK.0502/27/P.III-2016 tanggal 10 Februari 2016 antara Perusahaan dengan Gaussin SA untuk pekerjaan Pengadaan 11 Unit Automatic Docking Station pada Lapangan Penumpukan ASC di Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar USD8,030,000 (nilai penuh) belum termasuk biaya kepabeanan, pajak-pajak dan biaya lain dengan kondisi pengangkutan *Delivery Duty Unpaid (DDU)* dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 24 bulan kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai PHO. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 1 tahun kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I) untuk setiap Automatic Docking Station.

Pada tanggal 31 Desember 2016 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 80%.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

Additional Guarantee the implementation of this work has been submitted on December 19, 2016 Number MBG666055884116N with a value of Rp5,159,417 with a validity period until the date of February 14, 2017.

On December 31, 2016 and 2015, the Works Progress has reached a completion rate of 90.02% and 22.95%.

- p. According with Chartering Agreement No. HK.0502/352/P.III-2015 dated August 13, 2015, between the Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for construction work Container Yard (CY) Phase 2 in Terminal Teluk Lamong, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp358,027,658 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 18 calendar months commencing from the Minutes Start Works. Maintenance period was set for 12 calendar months starting from the handover of Works I (BAST I). This contract has been renewed by addendum I Number HK.0502/557.1/P.III-2016 dated December 21, 2016 with amount of contract transformed to Rp387,555,899 (including VAT 10)

On December 31, 2016 and 2015 the Works Progress had reached a completion rate of 92.80% and 27.6%.

- q. According to the contract No.HK.0502/548.1/P.III-2015 dated on December 2, 2015, has been updated with Addendum I No. HK.0502/27/P.III-2016, dated February 10, 2016, the Company (First party) entered into a purchase contract of 11 Automatic Docking Station for Terminal Teluk Lamong Surabaya, with Gaussin SA (Second Party). The cost of the scope amounted to USD8,030,000 (Full Amount) adopting method of *DDU (Delivery Duty Unpaid)* excluding Tax, Import Duty and other expense with a term of execution of work specified for 24 calendar months commencing from the date of contract. The warranty period for each unit of STS Crane extends within working calendar 1 year from the PHO for each ADS.

On December 31, 2016 the works progress had reached a completion rate of 80%.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- r. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/329/P.III-2016 tanggal 31 Agustus 2016 antara Perusahaan dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan pembangunan perpanjangan dermaga multipurpose dan revitalisasi dermaga IV di Pelabuhan Tanjung Intan, dengan harga borongan seluruh pekerjaan adalah sebesar Rp48.318.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 365 hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa pemeliharaan ditetapkan 365 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I).

Pada tanggal 31 Desember 2016 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 50.18%

- s. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/372/P.III-2016 tanggal 23 September 2016 antara Perusahaan dengan PT SAC Nusantara – PT Bentang Alam Nusantara Jo untuk pekerjaan pembuatan *retaining wall* di Marina Boom Banyuwangi, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp33.700.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 9 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 9 bulan kalender sejak Berita Acara Serah Terima I (BAST I).

Pada tanggal 31 Desember 2016 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 22.01%

- t. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/66.1/P.III-2016 tanggal 2 Maret 2016 yang telah diperbarui dengan addendum I No. 0502/403/P.III-2016 tanggal 3 Oktober 2016 antara Perusahaan dengan PT Konsulindo Informatika Perdana untuk pekerjaan pengadaan Implementor *Enterprise Resource Planning (ERP)* dan Hardware Pendukung, dengan harga borongan awal seluruh pekerjaan Rp74.341.586 (termasuk PPN) berubah menjadi Rp81.695.144 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 bulan kalender terhitung sejak *Kick off meeting* yang dilakukan oleh para pihak. Masa Pemeliharaan ditetapkan 12 bulan kalender sejak Go Live sistem ERPSAP.

Pada tanggal 31 Desember 2016 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 63.05%

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- r. According with Chartering Agreement No. HK.0502 / 329 / P.III-2016 dated August 31, 2016, between the Company and PT Nindya Karya (Persero) Tbk for construction work extension and revitalization jetty port of Tanjung Intan, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp48,318,000 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 365 calendar days commencing from the Minutes Start Works. Maintenance period was set for 365 calendar days starting from the handover of Works I (BAST I).

On December 31, 2016 the works progress had reached a completion rate of 50.18%.

- s. According with Chartering Agreement No. HK.0502 / 372 / P.III-2016 dated September 23, 2016, between the Company and PT SAC Nusantara – PT Bentang Alam Nusantara for construction work retaining wall at Marina Boom Banyuwangi, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp33,700,000 (including VAT 10%) with a term of execution of work specified for 9 calendar months commencing from the Minutes Start Works. Maintenance period was set for 9 calendar months starting from the handover of Works I (BAST I).

On December 31, 2016 the works progress had reached a completion rate of 22.01%.

- t. According with Chartering Agreement No. HK.0502/66.1/P.III-2016 dated March 2, 2016, has been update with addendum I No. 0502/403/P.III-2016 dated October 3, 2016 between the Company and PT Kondulindo Informatika Perdana for implementor work of ERPs and Supporting hardware, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp74,341,568 (including VAT) and then transformed to Rp81,695,144 (Including VAT) with a term of execution of work specified for 10 calendar months commencing from Kickoff meeting. Maintenance period was set for 10 calendar months starting from Go live of ERPSAP System.

On December 31, 2016 the works progress had reached a completion rate of 63.05%.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

- u. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/35/P.III-2016 tanggal 19 Februari 2016 yang telah diperbarui dengan addendum I No. HK.0502/367.1/P.III-2016 tanggal 12 Agustus 2016 antara Perusahaan dengan PT Tesco Indomaritim untuk pekerjaan pengadaan mesin bantu generator dan eksternal fire fighting system kapal tunda, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp94.886.000 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 12 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan. Masa Pemeliharaan ditetapkan 1 tahun kalender sejak Berita Acara SerahTerima I (BAST I).

Pada tanggal 31 Desember 2016 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 78.07%

- v. Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya.

Berdasarkan Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (pihak pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (pihak kedua), tentang Pengusahaan terminal Multipurpose Teluk Lamong tanggal 19 Mei 2015 No: HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No:HK.0501/95/P.III-2015, Perusahaan telah memperoleh Hak konsesi dari Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayaran Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagai berikut :

1. Hak Konsesi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :
 - a. Pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan luas sebesar 386,12 Ha, terdiri dari :
 - Lini I seluas 140 Ha sebagai Zona Operasi langsung terminal; dan
 - Lini II seluas 246,12 Ha sebagai Zona pendukung operasi terminal Lini I yang terbagi menjadi :

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

- u. According with Chartering Agreement No. HK.0502 / 35 / P.III-2016 dated February 19, 2016 has been updated addendum I No. HK.0502/367.1/P.III-2016, dated August 12, 2016 between the Company and PT Tesco Indomaritim for purchasing of generator auxiliary engine and external fire fighting for tug boat system, at wholesale prices throughout the work amounted to Rp94,886,000 (including VAT) with a term of execution of work specified for 12 calendar months commencing from the Minutes Start Works. Maintenance period was set for 1 year starting from the handover of Works I (BAST I).

On December 31, 2016 the works progress had reached a completion rate of 78.07%.

- v. The Concession Agreement Between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) about the Terminal Multipurpose Teluk Lamong Concession in Surabaya.

Based on the Concession Agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia (first party) with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (second party), on the Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong dated May 19, 2015 No: HK.107 / 01/06 / OP.TPr-15 and No: HK.0501/ 95/ P.III-2015, the Company obtained the concession right from the First Party to carry out activities in the provision and / or shipping Concession Ports Services in Terminal Multipurpose Teluk Lamong accordance with the provisions of this agreement, as follows:

1. The Concession Rights are not transferable to another party.
2. The Scope of the Agreement include:
 - a. Concessions to conduct activities in the Area Exploitation The Koncession Terminal Multipurpose Teluk Lamong with an area of 386.12 hectares, consists of:
 - Line I of 140 hectares as Operation Zone directly terminal; and
 - Line II Zone covering an area of 246.12 hectares as operations support terminal Lini I, which is divided into:

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- Zona Logistik (depo dan sentra distribusi dan konsolidasi barang) seluas ± 145,2 Ha;
 - Zona Industri (Prosessing curah kering) seluas ± 50,23 Ha; dan
 - Zona Industri (Packaging dan supporting facilities terminal petikemas) seluas ± 50,69 Ha.
- b. Penggunaan tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong dilakukan oleh PT Pelindo III (Persero) selaku Pihak kedua.
 - c. Pembayaran pendapatan Konsesi dari PT Pelindo III (Persero) kepada Pihak Pertama atas pemberian konsesi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - d. Penyerahan Aset di akhir Jangka Waktu Konsesi dari PT Pelindo III (Persero) kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
3. Jangka waktu Konsesi adalah selama 72 (tujuh puluh dua) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong yaitu pada tanggal 11 November 2014.
 4. Pelaksanaan konsesi, Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong oleh PT Pelindo III (Persero) meliputi :
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas pelabuhan di Area Konsesi;
 - b. Kegiatan pemeliharaan meliputi :
 - Pengaturan dan Penataan Wilayah pada Area Konsesi ; dan
 - Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan Aset di Area Konsesi.
 - c. Kegiatan pengoperasian meliputi :
 - Penyediaan Jasa kepelabuhanan di Area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong;

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- Logistic Zone (depots and distribution centers and consolidation items) covering an area of ± 145.2 Ha;
 - Industrial Zone (Prosessing dry bulk) covering an area of ± 50.23 Ha; and
 - Industrial Zone (Packaging container terminal and supporting facilities) covering an area of ± 50.69 Ha.
- b. Usage rates of Multipurpose Terminal Services Ports in the Gulf Lamong conducted by PT Pelindo III (Persero) as the second party.
 - c. The concession revenue payments from PT Pelindo III (Persero) to the First Party on the granting of concessions which are Non Tax Revenue.
 - d. Submission of Assets at the End of the Period of The Concession of PT Pelindo III (Persero) to the First Party under this Agreement.
3. Period of The concession is for 72 (seventy-two) years, commencing from the date of issuance of the Director General of Sea Transportation Number: PP.001 / 3/20 / DPPL-14 concerning Trial Operations at Terminal Lamong Bay is on November 11, 2014.
 4. Implementation of concessions, exploitation activities in the concession area in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong by PT Pelindo III (Persero) include:
 - a. Building Activities and Development of port facilities in the The Concession Area;
 - b. Maintenance activities include:
 - Settings and Regional Planning at the Concession Area; and
 - Implementation of maintenance activities Assets Concession Area.
 - c. Operating activities include:
 - The provision of port services in the Concession Area which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong;

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- Penyediaan Jasa pendukung pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelayanan konsolidasi dan distribusi;
 - Memberikan masukan terhadap penyusunan standar kinerja dan sistem pelayanan kepelabuhanan di area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang ditetapkan oleh pihak pertama;
 - Penyusunan, penetapan dan pemungutan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Area Konsesi untuk keperluan operasional Terminal Multipurpose teluk Lamong;
 - Penyediaan dan pengusahaan tanah di Area Konsesi.
5. Pendapatan Konsesi;

Pihak Kedua membayar kepada pihak pertama Pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk lamong sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

Besaran Pendapatan Konsesi Pengoperasian Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebesar 2,5% per tahun dari prosentase pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan kegiatan konsesi pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pendapatan konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.

6. Kerjasama Dengan Pihak Lain

PT Pelindo III (Persero) diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan Pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau Anak Perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian Kegiatan pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamomg dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak pertama, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pihak Kedua atas pelaksanaan dari Perjanjian ini.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- Provision of services to support the implementation of port activities in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong, including but not limited to activities service consolidation and distribution;
- Provide input to the development of performance standards and service systems in the area of port Concession which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong set by the first party;
- Preparation, determination and collection services rates of port services in accordance with peratruran legislation;
- The utilization of the waters around the Concession Area for operational purposes Terminal Teluk Lamong Multipurpose;
- Provision and exploitation of land in the Concession Area.

5. The Concessions Revenue;

Second parties pay to the first party concession revenues derived from activities Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong as Non Tax Revenue (non-tax) paid to the State Treasury.

Magnitude of the operation of the concession revenue Terminal Multipurpose Teluk Lamong at 2.5% per year in the percentage of gross revenue / gross of concession activities implementation Terminal Multipurpose Teluk Lamong in accordance with the provisions of this agreement.

Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly

6. Partnership With Other Parties

PT Pelindo III (Persero) is given the right to carry out cooperation with other Parties and / or partnering or assigning business entities or subsidiaries that have the ability and competence to carry out a part or parts of the activities of commercially managing Terminal Multipurpose Teluk Lamong with notice written to the first party, without prejudice to the responsibility and obligation of PT Pelindo III (Persero) for the implementation of this Agreement.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

7. Pelaporan

- a. PT Pelindo III (Persero) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Pihak Pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi/ concession fee.
- b. Laporan penerimaan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh PT Pelindo III (Persero) kepada pihak pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya Triwulan pertama ditahun berikutnya.

8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Dalam jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi para pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses pengusahaan terminal dari pihak kedua kepada pihak pertama.

Pengalihan aset dan pengalihan pengusahaan Terminal pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi dibuat dalam Berita Acara pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Para Pihak.

9. Kerjasama pemanfaatan di Akhir Konsesi

Pada akhir Jangka waktu Konsesi pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan dilakukan Kerjasama Pemanfaatan selama 30 tahun dengan besaran nilai kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- w. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otorisasi Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

7. Reporting

- a. *PT Pelindo III (Persero) has an obligation to report to the First Party report covers operational performance and earnings reports on the implementation of the Terminal Multipurpose Teluk Lamong exploitation activities in the Concession Area is used to perform calculations concession revenue / concession fee.*
- b. *The revenue report referred to in paragraph 1 reception given by PT Pelindo III (Persero) to the first party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an Independent Auditor and submitted no later than the first quarter of next year.*

8. The termination of Cooperation Agreement

In a period of 360 days before the expiration of Concession The parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes terminal concession of PT Pelindo III (Persero) to the first party.

The transfer of assets and the diversion concession upon expiry Terminal Concession Arrangements were made in the Minutes of the termination of the Cooperation Agreement signed by the Parties.

9. Joint use of them in Final Concession

At the end of the Concession period Terminal Multipurpose Teluk Lamong Utilization Partnership will be conducted for 30 years with the amount of the value of cooperation agreed upon by the Parties in accordance with the provisions of law.

- w. *The Concession Agreement Between Main Port Authority Office of Tanjung Perak with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the activities in the Port Exploitation Services Ports managed by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).*

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pihak Kedua), tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 9 November 2015 No: HK.107/01/12/OP.TPr-15 dan No: HK.0501/700/P.III-2015, Pihak Pertama memberikan hak konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah atau lokasi dimana terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan eksisting milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang telah diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tentang Pendirian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Pendapatan Konsesi:
 - a. Pihak Kedua membayar kepada Pihak pertama atas Pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Pihak Pertama.
 - b. Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Terhadap pembayaran pendapatan konsesi yang dilakukan oleh Pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak kedua tidak dikenakan lagi pungutan-pungutan lainnya terkait kegiatan pengusahaan di area konsesi.
 - d. Pendapatan Konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

Based on the Concession Agreement between the Port Authority Office Main Tanjung Perak (First Party) with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Second Party), on the activities of Exploitation Services Ports in the port managed by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dated November 9, 2015 No: HK.107 / 01/12 / OP.TPr-15 and No: HK.0501 / 700 / P.III-2015, the First Party grants concession rights to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to conduct utilization of port services in the region or places where there is existing terminal and port facilities owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which has been cultivated by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for the exploitation activity ports Services, with the following conditions:

1. *Term of the Agreement is for 30 (thirty) years, commencing from the date of signature of this agreement and extended for Concession Areas used as the Port Facility and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) is still conducting business activities referred to in the regulation on the establishment of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and other laws and regulations.*
2. *The concessions revenue;*
 - a. *Both parties pay to the first party on concession revenues derived from activities performed in the Concession Area on each port as Non Tax Revenue (non-tax) paid to the State Treasury through the Treasurer Admission First Party.*
 - b. *Magnitude Revenue Concession Area Concession in accordance with paragraph (1) of 2.5% per year of gross revenue / gross of implementation activities Concession Area Concession in accordance with the provisions of this Agreement.*
 - c. *Toward payment of revenue concessions by second parties as referred to in paragraph (1), the second party no longer subject to other levies related to activities performed in the concession area.*
 - d. *Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly.*

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- e. Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat-lambatnya tanggal 14 April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- f. Para pihak akan melaksanakan rekonsiliasi atas pendapatan konsesi setiap 3 bulan, dan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran Pendapatan Konsesi maka akan diperhitungkan pada pembayaran pendapatan konsesi 3 bulan berikutnya.
- 3. Kegiatan Pengembangan Terminal
Pelaksanaan Kegiatan pengembangan pada Perjanjian Konsesi ini dalam rangka pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi, dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan rencana Induk Pelabuhan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Pertama.
- 4. Pelaporan
 - a. PT Pelindo III (Persero) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi/ concession fee.
 - b. Laporan pendapatan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh PT Pelindo III (Persero) kepada Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya Triwulan pertama di tahun berikutnya.
- 5. Sanksi
 - a. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi standar kinerja operasional yang ditetapkan oleh Pihak Pertama pada tahun berjalan, maka Pihak Kedua tidak dapat menyesuaikan tarif pada pelabuhan setempat dan/atau mengembangkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, sampai adanya perbaikan kinerja sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- e. *Conducting Audit of Annual Financial Statements as a whole no later than April 14th next year with the independent auditor appointed by the Second Party.*
- f. *The parties shall undertake the reconciliation of revenue concession every 3 months, and in case of excess or shortage of Concession revenue payments will be calculated on the payment of concession revenues next 3 months.*
- 3. *Terminal Development Activities*
Implementation of development activities in this Concession Agreement for the development of terminals and port facilities in the Concession Area, can are conducted by the Second Party in accordance with the Port Master plan and the recommendation of the First Party.
- 4. *Reporting*
 - a. *PT Pelindo III (Persero) has an obligation to report to the first party report covers operational performance and earnings reports on the implementation of the Multipurpose terminal Teluk Lamong exploitation activities in the Concession Area is used to perform calculations concession revenue / concession fee.*
 - b. *The revenue report referred to in clausul 1 given by PT Pelindo III (Persero) to the First Party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an independent auditor and submitted no later than the first quarter of next year.*
- 5. *Sanctions*
 - a. *In the event that the Second Party can not meet the standard of operational performance established by the First Party in the current year, then the second party can not adjust rates on the local port and / or develop terminals and other port facilities, to the improvement of performance in accordance with the operational standards set at -Lack of 2 years.*

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- b. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Pendapatan Konsesi, maka Pihak Pertama melakukan Pengenaan denda keterlambatan kepada Pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Dalam terjadi penyimpangan pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi tanpa sepenuhnya dan persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melarang melakukan kegiatan di area pengembangan.
- 6. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
Dalam Jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses pengusahaan Terminal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- x. Sesuai Perjanjian Pemberongan No. HK.0502/607/P.III-2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Pegawai dan Pensiunan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)tahun 2016, Perusahaan telah memberikan pekerjaan kepada PT Pelindo Husada Citra (Entitas anak) untuk memberikan pelayanan Kesehatan Pegawai dan pensiunan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2016, dengan total biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp78.471.133 dengan jumlah peserta sebanyak 8.882 orang dengan sistem kontrak harga satuan. Pembayaran biaya dilakukan secara bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Termin I : sebesar Rp23.541.340 atau 30% dibayarkan paling lambat pada tanggal 29 Februari 2016.
 - b) Termin II : sebesar Rp23.541.340 atau 30% dibayarkan paling lambat pada 30 Juni 2016.
 - c) Termin III : sebesar Rp15.694.226 atau 20% dibayarkan paling lambat pada 31 Agustus 2016
 - d) Termin IV sebesar Rp15.694.226 atau 20% dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 November 2016.

Jangka waktu Perjanjian selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Manajemen Perusahaan berkeyakinan PT Prima Husada Citra akan dapat memenuhi kewajiban sehubungan dengan hal tersebut pada saat jatuh tempo.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- b. In the event of late payment of Concession revenues, then the First Party did Imposition of penalty for delay to the second party in accordance with the provisions of the legislation in the field of Non-Tax Revenues.
- c. In case of deviation development of terminal and port facilities in the Concession Area without the knowledge and consent of the First Party, the first party is entitled to prohibit activities diarea development.
- 6. The termination of Cooperation Agreement
In a period of 360 days before the expiration of Concession The Parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes Terminal concession of PT Pelindo III (Persero) to the First Party.
- x. According to Chartering Agreement No. HK.0502 /607/P.III-2015 dated December 31, 2015 on Health Services for Employees and Pensioners in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2016, the Company has provided jobs to PT Pelindo Husada Citra (Subsidiary) to provide health services for Employees and retirees of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2016, with a total cost of health care for Rp78,471,133 with the number of participants as many as 8,882 people with a unit price contract system. Payment of fees is done in stages, with details as follows:
 - a) Term I : Rp23,541,340 or 30% payable not later than February 29, 2016.
 - b) Term II : Rp23,541,340 or 30% payable not later than June 30, 2016
 - c) Term III : Rp15,694,226 or 20% payable not later than August 31, 2016.
 - d) Term IV: Rp15,694,226 or 20% payable not later than Novemeber 30, 2016.

The term of the Agreement was for the twelve (12) months from the date of January 1, 2016 to December 31, 2016. The Company's management believes PT Prima Husada Citra will be able to meet the obligations on maturity date.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- y. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/178/P.III-2016 tanggal 31 Mei 2016, antara Perusahaan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), untuk Pekerjaan pengadaan asuransi asset dan operasional dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk tahun 2016-2017, dengan harga borongan (premi asuransi) pada Perjanjian Pemborongan ini adalah sebesar Rp19.340.521 belum termasuk PPN 10%. Jangka waktu penutupan Asuransi dan periode perjanjian Tahap I dimulai dari tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2017, Tahap II yang dihitung prorata hari sesuai dengan tanggal beroperasinya dan / atau serah terima asset dilaporkan kepada pihak kedua dalam kurun waktu pelaksanaan pekerjaan. Nilai Pertanggungan atas Obyek yang dipertanggungkan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pertanggungan tahap I : Rp17.062.931
2. Nilai Pertanggungan tahap II : Rp2.277.590

- z. Sesuai Perjanjian Fasilitas Treasury line Nomer : HK.0501/96/P.III-2016 tanggal 25 Mei 2016, Perusahaan juga memperoleh Fasilitas Treasury Line dari Bank Mandiri dengan maksimum ekuivalen sebesar USD40,000,000 (angka penuh) berupa pemberian plafon transaksi jual beli Valuta Asing terhadap Rupiah maupun antara valuta asing dengan jumlah maksimum tertentu yang diberikan oleh Bank kepada Perusahaan dan dapat digunakan Perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan Bank.

Pemberian Fasitas Treasury Line oleh Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini bersifat advised/ dan uncommitted, sehingga Bank sebelumnya menyepakati Surat Konfirmasi atas pertimbangannya berhak untuk menerima atau menolak permohonan Transaksi Treasury yang diajukan.

Tujuan pemberian Fasilitas Treasury Line adalah untuk pelaksanaan strategi lindung nilai (hedging) melalui transaksi Treasury berupa TOM, SPOT, FORWARD, SWAP dan OPTION.

Jangka waktu Fasilitas adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 24 Mei 2017.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- y. According to Chartering Agreement No. HK.0502 /178/P.III-2016 dated May 31, 2016, between the Company and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), for Procurement of Insurance in the Environment PT Pelindo III (Persero) for the year 2016-2017, with contract value (insurance premiums) amounted Rp19,340,521 excluding VAT 10%. The period of closure, insurance and Phase I agreement period starting from the date of May 31, 2016 until May 31, 2017, Phase II is prorated in accordance with the date of the operation and / or handover of assets reported to the second party in the period of implementation of the work. The value of coverage on the insured object are as follows:

1. The Insurance Coverage phase I was Rp17,062,931
2. The Insurance Coverage phase II was Rp2,277,590

- z. Treasury line according Facility Agreement Number: HK.0501 / 96 / P.III 2016 dated May 25, 2016, the Company obtained Treasury Facility Line of Bank Mandiri with a maximum of the equivalent of USD40,000,000 (full amount) for the provision of a ceiling of buying and selling foreign currency to Rupiah and between foreign currency with a certain maximum amount granted by the Bank to the Company and may be used by the Company to do the transaction of sale and purchase of foreign exchange by the Bank.

Treasury Facility Line Award by the Bank as specified in this Agreement are advised / and uncommitted, so before agreeing Bank Confirmation Letter discretion, reserves the right to accept or reject the application filed Treasury Transactions.

The purpose of the Treasury Facility Line is for the implementation of hedging strategies (hedging) through treasury transactions such as TOM, SPOT, FORWARD, SWAP and OPTION.

The facility is a time period from the date of signing the agreement until the date of May 24, 2017.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

aa. Sesuai Perjanjian Fasilitas Forex/Derivative line Nomer : HK.0501/70/P.III-2016 tanggal 12 April 2016, Perusahaan memperoleh Fasilitas Forex/Derivative Line dari Bank Negara Indonesia dengan maksimum national sebesar USD37,500,000 (angka penuh) untuk keperluan limit transaksi forex dengan Divisi Tresuri BANK dalam rangka lindung nilai {hedging} yang tidak untuk tujuan spekulasi dengan tenor maksimal 12 (dua belas) bulan.

Transaksi Derivative, terdiri dari, ISDA Master Agreement, schedule ISDA, dan konfirmasi. Transaksi Derivative adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen (namun tidak termasuk transaksi derivative kredit) dan yang dapat dikategorikan transaksi derivative sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia dari waktu ke waktu, disepakati dan dapat dilakukan oleh NASABAH dan BANK.

Transaksi Forex, terdiri dari, Transaksi Perjanjian Penjualan dan atau pembelian Valuta Asing dan Surat Konfirmasi.

Pemberian Forex/Derivative Line berdasarkan Perjanjian ini berbentuk Plafond/Revolving dan bersifat Uncommitted Facility, sehingga BANK atas pertimbangannya sendiri, setiap saat dapat menerima atau menolak permintaan Transaksi Forex/Transaksi Derivative yang diajukan oleh NASABAH.

Forex/DerivativeLine diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Ini atau terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2017.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Entitas Anak

a. TPS memiliki perjanjian dengan PT Kuda Inti Samudera mengenai pemeliharaan head truck, chassis dan sistem dolly. Berdasarkan perjanjian tanggal 1 November 2006, biaya pemeliharaan sebesar Rp1.630.754 dan diubah menjadi Rp1.724.479 terhitung mulai 1 November 2008. Perjanjian ini diperbarui terakhir kali dengan Perjanjian tanggal 12 April 2010 dengan perpanjangan sampai dengan 31 Januari 2013, dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp2.657.817. Perjanjian dengan PT Kuda Inti Samudera telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

aa. In accordance Facility Agreement Forex / Dereivative line Number: HK.0501 / 70 / P.III 2016 dated April 12, 2016, the Company obtained Forex Facilities / Dereivative Line of Bank Negara Indonesia with national maximum limit of USD37,500,000 (full amount) for the purposes of forex transactions with Division BANK Treasury in order to hedge {hedging} are not for speculative purposes with a maximum tenor of 12 (twelve) months.

Derivative transactions, consisting of, ISDA Master Agreement, ISDA schedule, and confirm. Transaction Derivative are transactions based on a contract or payment agreement whose value is derived from the exchange rate, interest rate and / or a combination of exchange rate and interest rates, followed either by movement or without movement of funds or instruments (but not including derivative transactions credit) and which can be categorized as derivative transactions as stipulated in the regulations of Bank Indonesia from time to time, agreed and can be done by the CUSTOMER and the BANK.

Forex transactions, consisting of, the Transaction Agreement and the Sale or purchase of Foreign Exchange and the Letter of Confirmation.

Giving Forex / Derivative Line pursuant to this Agreement in the form of ceiling / Uncommitted Revolving Facility and is, thus BANK at its sole discretion, at any time can accept or reject the request Forex Transactions / Derivative Transactions submitted by the CUSTOMER.

Forex / DerivativeLine given for twelve (12) months from the signing of this Agreement or after the date of April 12, 2016 until the date of April 11, 2017.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Subsidiary

a. TPS has an agreement with PT Kuda Inti Samudera regarding the maintenance of head trucks, chassis and dolly system. Based on the agreement dated November 1, 2006, annual maintenance cost of Rp1,630,754 was changed to Rp1,724,479 starting November 1, 2008. The agreement was last renewed on April 12, 2010 and will expire on January 31, 2013, with maintenance cost of Rp2,657,817. Agreement with PT Kuda Inti Samudera has been extended until January 31, 2016.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Pada tanggal 14 Mei 2014, perjanjian ini diakhiri lebih awal dan dibuat perjanjian baru yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dengan perubahan komponen perjanjian dimana beban pemeliharaan mencakup spare parts dan bahan lainnya.

Nilai kontrak pada periode pertama (1 Juni 2014-31 Mei 2015), periode kedua (1 Juni 2015-31 Mei 2016) dan periode ketiga (1 Juni 2016-31 Mei 2017) masing-masing adalah Rp47.000.259, Rp48.880.295 dan Rp50.760.237 dengan asumsi volume produksi masing-masing sebesar 1.000.000 box, 1.040.000 box, dan 1.080.000 box.

Perjanjian ini mengalami perubahan ketiga dengan adanya penyesuaian tarif harga borongan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017.

Nilai kontrak perjanjian ini disesuaikan menjadi Tahun II (kedua) terhitung sejak 1 Januari 2016 – 31 Mei 2016 dan Tahun III (ketiga) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 – 31 Mei 2017 dengan total nilai kontrak menjadi Rp53.309.605 dengan asumsi volume produksi adalah 1.000.000 box/tahun.

- b. Pada tanggal 3 Februari 2004, Perusahaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan perwakilan peserta program pensiun iuran pasti menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan program pensiun iuran pasti.

Jasa program pensiun yang dikelola oleh DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi penghimpunan iuran peserta, pengelolaan dana dan penyelenggaraan administrasi kepesertaan. Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan akan mengkoordinasikan dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar/menyerahkan seluruh iuran untuk dan atas nama peserta baik secara tunai atau dengan cara pembayaran yang lazim lainnya kepada dana pensiun. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan mengelola dana berdasarkan jenis investasi yang dipilih oleh peserta. Perjanjian ini diperpanjang otomatis setiap tahun.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

On May 14, 2014, this agreement was ended earlier and the Company made a new agreement, which is effective from June 1, 2014 until May 31, 2017 with the changes in the component of the agreement where the maintenance expense include spare parts and other materials.

The contract value in the first period (June 1, 2014-May 31, 2015), second period (June 1, 2015-May 31, 2016) and third period (June 1, 2016-May 31, 2017), are Rp47,000,259, Rp48,880,295, Rp50,760,237, respectively with assumption that the production volume are 1,000,000 boxes, 1,040,000 boxes and 1,080,000 boxes, respectively.

This Contract has been amended three times for adjusting rates which are effective from January 1, 2016 until May 31, 2017.

The contract value has been adjusted to second period effective from Januari 1, 2016 until May 31, 2016 and third period effective from June 1, 2016 until May 31, 2017, with contract value of Rp53,309,605 with assumption that the production volume are 1,000,000 boxes/year.

- b. On February 3, 2004, the Company, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero, Tbk, and representatives of the participants to the defined contribution pension program signed an agreement relating to the defined contribution pension program.

The pension program services to be administered by DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk include collection of contribution, management of fund and administration of participatory coordination. With respect to the agreement, the Company will coordinate and perform its obligation to pay/deliver all contribution for and on behalf of participants either in cash or any other generally accepted manner of payment to the pension fund. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk will manage the fund based on the investment types determined by the participants. The agreement shall be extended automatically every year.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- c. TPS memiliki perjanjian dengan Konecranes Finland Corporation mengenai pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit container crane. Berdasarkan perjanjian pada tanggal 26 September 2016, nilai perjanjian pengadaan 3 (tiga) unit container crane ini sebesar US\$29.850.000 (Angkah Penuh). Perjanjian ini akan berakhir selambatnya pada tanggal 9 Mei 2017.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Entitas Asosiasi) sesuai dengan perjanjian fasilitas pinjaman nomor: KKS.602-00/XII/BJTI-2015 pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp80.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Pemberian pinjaman tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor KU.04/39/P.III-2015 dan 033/KPIII/RUPSLB_BJTI/XII-2015 tanggal 14 Desember 2015. Realisasi atas pinjaman tersebut dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016 (Catatan 36).

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

- a. Sehubungan dengan rencana pembangunan pelabuhan di kecamatan Manyar kabupaten Gresik oleh Perusahaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) mengajukan ijin pembangunan sesuai dengan surat No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 September 2013 mengenai permohonan ijin pembangunan pelabuhan di wilayah Pelabuhan Gresik.

Pada tanggal 8 November 2013, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan izin pengembangan dermaga Pelabuhan Gresik kepada penyelenggara Pelabuhan Gresik sesuai dengan surat No.B.XI-675/PP.08.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, KSOP mengirimkan surat No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tanggal 12 Desember 2013 tentang pengembangan Pelabuhan Gresik Kali Mireng, untuk diminta mengambil langkah-langkah persiapan guna pelaksanaan pengembangan pelabuhan tersebut.

Pada tanggal 29 April 2014, KSOP mengirimkan surat No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal permohonan penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana pembangunan pengembangan Pelabuhan Gresik.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- c. *TPS has an agreement with Konecrans Finland Corporation regarding the procurement of 3 (three) units container cranes. Based on the agreement dated September 26, 2016, the value of the agreement is US\$29,850,000 (Full Amount). This agreement will be effective until May 9, 2017.*

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI agreed to provide a loan facility to PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Associate Entity) in accordance with the credit facility agreement number: KKS.602-00 / XII / BJTI-2015 on December 30, 2015 amounted to Rp80,000,000 with a period of 12 months and can not be extended. The loan was approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) No. KU.04 / 39 / P.III-2015 and 033 / KPIII / RUPSLB_BJTI / XII-2015 dated December 14, 2015. Realization of the loan was made on January 4, 2016 (Note 36).

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

- a. In relation with the port construction plan in Manyar district, Gresik by the Company, Kesyahbandaran Office and Port Authority Class II Gresik (KSOP) submitted a construction permit in accordance with the letter No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 to General Director of Marine Transportation dated September 2, 2013 regarding to the port construction permit in Gresik Port area.*

On November 8, 2013, the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation granted the permission of Port management to develop docks at Gresik Port in accordance with the letter No.B.XI-675/PP.08.

Based on the letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation, KSOP sent a letter No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dated December 12, 2013 regarding to the development of Kali Mireng Gresik Port, which was asked to make preparations for the implementation of the port development.

On April 29, 2014, KSOP sent a letter No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 to the General Director of Marine Transportation regarding to the appointment request of the Company as executive development of Gresik Port.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, Perusahaan menerima surat pemberitahuan No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) bahwa KSOP telah berkirim surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat melimpahkan pembangunan Pelabuhan Kali Mireng kepada Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, KSOP Gresik mengirimkan surat kepada Perusahaan No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 perihal pengoperasian Terminal Manyar Pelabuhan Gresik untuk sementara sambil menunggu terbitnya surat penunjukan/ penugasan konsesi dari Kementerian Perhubungan Laut.

Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Perusahaan melakukan Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik yang dituangkan dalam Berita Acara. Berdasarkan Berita Acara, diperoleh kesepakatan jangka waktu konsesi selama 76 tahun dan fee konsesi sebesar 2,75% per tahun dari pendapatan kotor atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

- b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 27.1/SP-KS/BMS-BMST/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, Perusahaan melakukan Kerjasama Penanganan Kegiatan Bongkar Muat di Terminal Pelabuhan Manyar dengan PT Berlian Manyar Stevedoring. Jangka waktu kerjasama sejak 12 Pebruari 2016 hingga 31 Desember 2016.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

On April 30, 2014, the Company received a notification letter No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 from KSOP that KSOP has sent the letter to the General Director of Marine Transportation to delegate the development of Kali Mireng Port to the Company.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting consesision agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

On December 31, 2015, KSOP Gresik sent letter to the Company No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 regarding temporary operation of Manyar Terminal Gresik Port while waiting for issuance of a concession assignment from Ministry of Marine Transportation.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting consesision agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

On December 30, 2016, the Company's had Discussion Regarding Concession Agreement with Kesyahbandaran Office and Port Authority Class II Gresik as outlined in Minutes. Based on Minutes, there was an agreement term concession for 76 years and a concession fee of 2.75% per year of income gross exploitation of port services for the activities in the concession area.

- b. Based on Contract Agreement No. 27.1/SP-KS/BMS-BMST/II/2016 dated February 12, 2016, the Company undertakes Cooperation Activities and Unloading in Manyar Port Terminal with PT Berlian Manyar Stevedoring. These agreement since February 12, 2016 until December 31, 2016.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

- c. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 09.00/SP-2/BMS/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, BMS melakukan kontrak pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.1) dengan PT Van Oord Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp399.986.400 termasuk PPN 10%.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BAST-1). Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 97,36% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 December 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2015, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik No.33.3340-008 tanggal 19 Maret 2015.

- d. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 05.00/SP-2/BMS/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, BMS melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket A.2) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp78.200.000 termasuk PPN 10%.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

Berdasarkan Addendum I No. 05.01/SP-2.ADD-1/BMS/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi 390 hari kalender.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 44,47% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

- c. Based on Chartering Agreement No. 09.00/SP-2/BMS/III/2014 dated March 14, 2014, BMS signed a contract concerning reclamation work for the construction of Manyar Gresik Port Terminal (Package A.1) with PT Van Oord Indonesia with the amount of Rp399,986,400 including 10% VAT.

The work performance period was scheduled 270 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical work substantially completed and stated in Minutes of First Handover (BAST-1). Maintenance guarantee was 5%.

On December 31, 2014, working progress has reached 97.36% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

On December 31, 2015, working progress had reached 100% based on Minutes of Physical Progress No. 33.3340-008 dated March 19, 2015.

- d. Based on Chartering Agreement No. 05.00/SP-2/BMS/I/2014 dated January 9, 2014, BMS signed a construction contract of development work retaining wall of Manyar Gresik Port Terminal (Package A.2) with PT Hutama Karya (Persero) with the amount of to Rp78,200,000 including 10% VAT.

The work performance period was scheduled 300 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physica of work. Maintenance guarantee was 5%.

Based on addendum I No. 05.01/SP-2.ADD-1/BMS/VIII/2014 dated August 22, 2014, the work performance period was changed into 390 calendar days.

On December 31, 2014, working progress had reached 44.47% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2015, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik No.006/BA.Phisik.A2/BMS/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.

- e. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 04.00/SP-2/BMS/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, BMS melakukan kontrak pekerjaan pembangunan dermaga dan *trestle* Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket B) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp153.850.400 termasuk PPN 10%.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

Berdasarkan Addendum II No. 04.02/SP-2.ADD-2/BMS/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 terdapat tambahan lingkup pekerjaan sehingga nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp156.487.100, dan jangka waktu diperpanjang menjadi 450 hari kalender terhitung sejak 6 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90,28% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31Desember 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2015, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik No.09/BA-PAKET.B/BMS-ASR/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.

- f. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 02.00/SP-2/BMS/XI/2013 tanggal 15 November 2013, BMS melakukan kontrak pekerjaan pembangunan *trestle* penghubung area industri dengan area Terminal Pelabuhan Manyar Gresik (Paket C) dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak sebesar Rp47.500.000 termasuk PPN 10%.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% fisik pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5%.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

On December 31, 2015, working progress has reached 100% based on Minutes of Physical Progress No.006/BA.Phisik.A2/BMS/III/2015, dated March 31, 2015.

- e. Based on Chartering Agreement No. 04.00/SP-2/BMS/XII/2013 dated December 6, 2013, BMS signed a contract concerning construction piers and *trestle* of Manyar Gresik Port Terminal (Package B) with PT Adhi Karya (Persero) Tbk with the amount of Rp153,850,400 including 10% VAT.

The work performance period was scheduled for 300 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical work. Maintenance guarantee was 5%.

Based on addendum II No.04.02/SP-2.ADD-2/BMS/XI/2014 dated November 20, 2014, there was addition to the scope of work so that the contract value was changed into Rp156,487,100, and the work performance period was extended into 450 calendar days counted since December 6, 2013 until February 28, 2015.

On December 31, 2014, working progress had reached 90.28% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014

On December 31, 2015, working progress has reached 100% based on Minutes of Physical Progress No.09/BA-PAKET.B/BMS-ASR/III/2015 dated march 28,2015.

- f. Based on Chartering Agreement No. 02.00/SP-2/BMS/XI/2013 dated November 15, 2013, BMS signed a contract concerning construction work *trestle* connecting industrial areas with Manyar Gresik Port Terminal (Package C) with PT Hutama Karya (Persero) with the amount of Rp47,500,000 including 10% VAT.

The work performance period was scheduled for 300 calendar days. The work maintenance period was 180 calendar days and shall be effective as from the work performance was declared 100% physical work. Maintenance guarantee was 5%.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

Berdasarkan addendum III No. 02.03/SP-2.ADD-3/BMS/VIII/2014 tanggal 24 Nopember 2014 terdapat tambahan lingkup pekerjaan sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp60.012.206 dan jangka waktu diperpanjang menjadi 464 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan 21 Februari 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2014, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 87,078% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 31 Desember 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2015, progress pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik No.61.1/ASR-MN/SK/HK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

- g. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 07.00/SP-2/BMS/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, yang telah diperbarui dengan Adendum I No. 07.01/SP2.ADD-1/BMS/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014. BMS melakukan kontrak pengadaan material pasir laut dari lokasi depan area Lantamal V untuk pekerjaan reklamasi pembangunan Terminal Pelabuhan Manyar Gresik dengan PT Putra Bangsa Gema Namaskara dengan volume material sebesar 5.909.453 m³ dan nilai kontrak sebesar Rp65.003.983 tidak termasuk PPN 10%.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC telah menyetujui perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 atau No. HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 pada tanggal 31 Maret 2015.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan yang telah disepakati yaitu meliputi:

1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjut (RTJL).
2. Pelayanan rawat inap lanjutan (RITL).
3. Pelayanan persalinan.
4. Pelayanan gawat darurat.
5. Pelayanan obat.
6. Pelayanan alat kesehatan.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

Based on addendum III No. 02.03/SP-2.ADD-3/BMS/VIII/2014 dated November 24, 2014, there was addition to the scope of work so the contract value was changed to Rp60,012,206 and the work performance period was extended into 464 calendar days from the date November 15, 2013 to February 21, 2015

On December 31, 2014, working progress had reached 87.078% based on Minutes of Physical Progress dated December 31, 2014

On December 31, 2015, working progress has reached 100% based on Minutes of Physical Progress No.61.1/ASR-MN/SK/HK/III/2015 dated March 27, 2015.

- g. Based on Contract Agreement No. 07.00/SP-2/BMS/II/2014 dated February 26, 2014, updated with Addendum I No. 07.01/SP2.ADD-1/BMS/VI/2014 dated June 9, 2014. BMS signed a material procurement contract form sand sea from Lantamal V location for the construction of reclamation work Manyar Gresik Port Terminal with PT Putra Bangsa Gema Namaskara with material volume 5,909,453 m³. With the amount of Rp65,003,983 excluding 10% VAT.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC has agreed to a cooperation agreement advanced level referral health services for participants of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 or No.HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 on March 31, 2015.

In accordance with the agreement, PHC provides health care services to participants in accordance with the scope BPJS agreed health services which include:

1. Outpatient treatment of advanced (RTJL).
2. Continued inpatient services (RITL).
3. Service delivery.
4. Emergency services.
5. Drug services.
6. Services medical devices.

45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting (Lanjutan)

- 7. Pelayanan alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis.
- 8. Pelayanan rujukan parsial.
- 9. Pelayanan ambulans.
- 10. Pelayanan rujuk balik.
- 11. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

Tarif pelayanan yang diberikan bagi peserta sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan untuk Rumah Sakit (DRG/INA CBG's) berdasarkan kesepakatan pihak BPJS dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Perjanjian ini berlaku 9 Bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2015 hingga 31 Desember 2015.

b. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

PHC telah menyetujui perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan khusus rawat inap bagi pegawai dan pensiunan beserta dengan keluarga PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur No. 0196.AMD-1/041/DIST-JATIM/2014 atau No. HH.3.06.Yankes.Add/I/5a/RSPS-2014 pada tanggal 24 Desember 2014.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan pelayanan kesehatan kepada pegawai PT PLN (Persero) yang terbagi dalam wilayah-wilayah unit dan dikordinir oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Perjanjian ini berlaku selama 14 bulan terhitung sejak 1 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Biaya perawatan kesehatan rawat inap sesuai dengan kesepakatan tarif antara kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

c. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PHC telah menyetujui perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia No.HH.3.06.Yankes/1/20c/RSPS-2014 pada tanggal 18 Desember 2014.

45. Significant Agreements and Commitments (Continued)

- 7. Services other medical devices in accordance with the needs and medical indications.
- 8. Partial referral service.
- 9. Ambulance services.
- 10. Services refer turning
- 11. A health service is not guaranteed.

Rates of services provided to participants are in accordance with the rates established using the payment pattern of BPJS Health Hospital (DRG / INA CBG's) based on the agreement with the Association of Health Care Facilities BPJS with reference to a standard rate set by the Minister of Health.

This agreement is valid 9 month from the date of April 1, 2015 until December 31, 2015.

b. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

PHC has agreed to a special agreement in patient health care for employees and retirees and the families of PT PLN (Persero) Distribution of East Java No.0196.AMD-1/041/DIST-JATIM/2014 or No.HH.3.06.Yankes.Add/I/5a/RSPS-2014 dated December 24, 2014.

In accordance with the agreement, PHC provides health care services to employees of PT. PLN (Persero) which is divided into unit areas and coordinated by PT PLN (Persero) Distribution of East Java. This agreement is valid for 14 month starting from November 1, 2014 until December 31, 2015 and may be extended in accordance with the collective agreement.

In patient health care costs in accordance with the agreement rate between the two sides. The agreement is valid for 12 months, starting from January 1, 2015 through December 31, 2015 and maybe extended in accordance with the agreement.

c. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PHC has agreed to provides health care services for participants In health PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia No.HH.3.06.Yankes/1/20c/RSPS-2014 dated December 18, 2014.

**45. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Sesuai dengan kesepakatan, Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Asuransi Jiwa Generali yang meliputi:

1. Rawat Inap.
2. Persalinan.
3. Rawat Jalan Dokter Umum dan Dokter Spesialis.
4. Rawat Jalan Dokter Gigi.

Penggantian biaya layanan kesehatan mengacu pada tarif yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 25 Mei 2014 sampai dengan 24 Mei 2016 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. 4824/KTR/1214 atau No. HH.3.06.Yanke/1/20c/RSPS-2014 pada tanggal 18 Desember 2014.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Inhealth yang meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan kesehatan lainnya.

Biaya atas pelayanan kesehatan diterima oleh PHC dengan system *Fee For Service* dengan tarif yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.

e. PT Administrasi Medika

PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta PT Administrasi Medika No. FA.0.40.SPK/2/2b/PT.PHC-2015 tanggal 7 Oktober 2015.

Sesuai dengan perjanjian, PT Administrasi Medika melaksanakan pekerjaan pengelolaan layanan kesehatan *claim management service* PT Pelindo Husada Citra yang terdiri dari *claim management service*, cetak kartu dan personalisasi (*reguler*) dan penambahan layanan *claim management service* serta cetak kartu dan personalisasi (*reguler*) disesuaikan dengan penambahan jumlah peserta PHC Health Care.

Harga kontrak dan cara pembayaran mengacu pada harga kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku selama 365 hari kalender.

**45. Significant Agreements and Commitments
(Continued)**

In accordance with the agreement, the Company provides health care services to patients who use the Generali Life Insurance include:

1. Patient.
2. Delivery.
3. Outpatient General Practitioners and Physician Specialist.
4. Outpatient Dentist.

Replacement cost refers health services mutually agreed rates. This agreement is valid for three years starting from May 25, 2014 until May 24, 2016 and may be extended in accordance with the collective agreement.

d. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

PHC has agreed to provides health care services for participants PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No.4824/KTR/1214 or No.HH.3.06.Yanke/1/20c/RSPS-2014 dated December 18, 2014.

In accordance with the agreement, PHC provides health care services to Participants Inhealth which includes medical consultation, examination, treatment, and other health-care measures.

The cost of health services received by PHC with the Fee For Service system with the agreed rates. This agreement valid from January 1, 2015 through December 31, 2016.

e. PT Administrasi Medika

PHC has agreed to provides health care services for participants In health PT Administrasi Medika No.FA.0.40.SPK/2/2b/PT.PHC-2015 dated October 7, 2015.

In accordance with the agreement, PT Administrasi Medika carry out the job of managing healthcare claims management services to PT Pelindo Husada Citra consisting of claim management service, card printing and personalization (regular) and the extension of services, claims management services as well as business card printing and personalization (regular) adjusted by the addition of the number of participants PHC Health Care.

The contract value and payment terms referring to the contract value agreed upon by both parties. The agreement is valid for 365 calendar days.

46. Kontinjensi

Perusahaan

1. Sengketa Penggunaan Tanah dan Bangunan oleh PT Timur Nusantara Secara Melawan Hukum.

Bawa pada tanggal 18 Desember 2002, PT Pelindo III (Persero) dan PT Timur Nusantara bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 18 Januari 2004 ("Perjanjian Kerjasama").

Objek yang dikerjasamakan dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama lapangan penumpukan seluas 10.000 m², gudang A seluas 1.000 m² dan Ruang Kantor seluas 60 m² yang kesemuanya itu merupakan aset milik PT Pelindo III (Persero). Berdasarkan perjanjian, PT Timur Nusantara diberikan hak untuk menguasai dan mengelola objek yang dikerjasamakan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian yakni tanggal 18 Januari 2004.

Ditentukan pula dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian kerjasama telah berakhir, maka PT Timur Nusantara berkewajiban untuk mengembalikan objek perjanjian dimaksud kepada PT Pelindo III (Persero).

Akan tetapi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek ex perjanjian kerjasama. PT Pelindo III pun telah menyampaikan 3 kali surat peringatan secara sah untuk meninggalkan dan mengembalikan objek ex perjanjian kerjasama.

PT Timur Nusantara beranggapan, bahwa perjanjian kerjasama telah diperpanjang berdasarkan side letter (surat sepihak) yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT Pelindo III (Persero). Sementara PT Pelindo III (Persero) beranggapan surat sepihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak pernah disampaikan sama sekali kepada PT Timur Nusantara.

Pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2009, PT Pelindo III (Persero) mengajukan gugatan kepada PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan tuntutan antara lain pengembalian objek ex perjanjian kerjasama dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.287.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan dan memenangkan gugatan PT Pelindo III (Persero).

46. Contingencies

The Company

1. A Dispute on Land and Building Occupation by PT Timur Nusantara is against the Law.

On December 18, 2002, PT Pelindo III (Persero) and PT Timur Nusantara agreed to hold an agreement for managing the container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi, the agreement was due on January 18, 2004 ("Cooperation Agreement").

The objects cooperated in the agreement include the spaces for stacking the stuffs or goods which are 10,000 sqm wide, Warehouse A which is 1,000 sqm wide, and office area which is 60 sqm wide. All of these assets are owned by PT Pelindo III (Persero). According to the agreement, PT Timur Nusantara is given the right to control and manage the cooperating objects until the expiration date of the agreement which is on January 18, 2004.

It is also specified in the agreement, that if the agreement expired, PT Timur Nusantara will be obligated to return the objects as mentioned in the agreement referred to PT Pelindo III (Persero).

However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara does not have any intention to return and still retain all the objects mentioned in the ex cooperation agreement. PT Pelindo III sent legal warning letters to remind the Company three times to leave and return the objects of the ex cooperation agreement.

PT Timur Nusantara assumed that the agreement was extended under the side letter (one-sided letters) issued by the President Director of PT Pelindo III (Persero). While PT Pelindo III (Persero) assumed that the side letter has no legal force because it was never delivered to PT Timur Nusantara.

On March 20, 2009, PT Pelindo III (Persero) filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court. The lawsuit states that PT Timur Nusantara should return the object of the ex agreement and pay compensation amounting to Rp1,855,287.

Surabaya District Court Judge ruled on the lawsuit which was granted and won by PT Pelindo III (Persero).

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relasas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang pada intinya memenangkan PT Pelindo III (Persero) dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PT Timur Nusantara).

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan PT Pelindo III (Persero) berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara (berdasarkan putusan pengadilan). Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI, maka terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No. HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

Perusahaan akan selalu melakukan upaya penagihan untuk dapat merealisasikan keputusan tersebut, namun Perusahaan tidak membukukan piutang dan pendapatan atas potensi pendapatan dari putusan tersebut karena saat ini belum ada kejelasan dan kesanggupan bayar dari PT Timur Nusantara. Direksi melakukan upaya pengajuan pelaksanaan putusan pengadilan (*aanmaning*) melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang ditandatangani oleh Biro Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.KP.0403/300/P.III-2014 tanggal 18 Nopember 2014, namun sampai dengan Tanggal Laporan Ini belum mendapat tanggapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Sengketa Sewa Tanah HPL Dengan PT Wahana Artha Luhur.

Pada tanggal 29 April 1997, PT Pelindo III (Persero) dan PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") membuat perjanjian sewa HPL Cabang tanjung Perak seluas 27.393 m² untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair (*refinery*) dan gudang penimbunan dengan jangka waktu 20 tahun.

46. Contingencies (Continued)

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through its decision letter No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which sentenced that PT Pelindo III (Persero) won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara.

With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and PT Pelindo III (Persero) had a potential gain in the form of return on assets and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara. Through the decision of the Indonesia Supreme Court, then the case has been legally binding.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to seek clarification on the verdict of Cassation by the Supreme Court sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with letter of Directors No.HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 as well as letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

The Company keeps reminding the District Court in order to realize the decision, however the Company did not record receivables and sent income earning from this decision because as to date there is no certainty of capability by PT Timur Nusantara to pay. Director has filed execution of court decision (*aanmaning*) through Surabaya District Court, signed by the Legal Bureau as Special Letter of Authority No.KP.0403/300/P.III-2014 dated November 18, 2014. However, up to the date of this report, there is no response from Surabaya District Court.

2. HPL Land Rental Dispute With PT Wahana Artha Luhur.

On April 29, 1997, PT Pelindo III (Persero) and PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") made HPL Tanjung Perak Branch lease agreement covering 27,393 sqm width for the benefit of PT WAL to build liquid vegetable oil plant (*refinery*) and stockpiling warehouses for 20 years.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian, pembangunan tersebut adalah kewajiban PT WAL. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, atau selama 14 tahun (sejak ditandatanganinya perjanjian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012), PT WAL tidak melakukan pembangunan pabrik minyak nabati cair (refinery) dan gudang penimbunan yang dibangun hanya tembok pembatas saja.

Setelah disampaikan 3 kali somasi dan ternyata pembangunan tidak juga dilaksanakan, PT Pelindo III (Persero) pada tanggal 24 Juli 2009 pada akhirnya memutuskan perjanjian dengan PT WAL. Merasa tidak terima, PT WAL kemudian mengajukan gugatan kepada PT Pelindo III (Persero) melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tuntutan perpanjangan masa sewa HPL hingga 20 tahun kedepan.

Terhadap kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada intinya gugatan PT WAL tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. Atas putusan tersebut maka PT Pelindo III (Persero) adalah pihak yang dimenangkan. Namun ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut (Pelindo III kalah).

Selanjutnya pada tingkat Kasasi sesuai surat putusan Mahkamah Agung RI No. 2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 28 April 2011 menjatuhkan putusan yang pada intinya memenangkan PT Pelindo III (Persero). Namun terhadap putusan tersebut PT WAL telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali.

PT Pelindo III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2012. Sebagaimana informasi perkara dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PK dengan register No.470/PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 mengabulkan PK yang diajukan oleh PT WAL, namun sampai dengan tanggal pemeriksaan Perusahaan belum memperoleh salinan tersebut.

Potensi nilai liabilitas butir 1 sampai dengan butir 3 yang kemungkinan timbul dari hal-hal di atas (jika ada) belum dicatat dalam laporan keuangan.

46. Contingencies (Continued)

Based on the agreement, such development is the obligation of PT WAL. However, in the implementation or during the 14 years (since the signing of the agreement in 1997 until the 2012), PT WAL did not build liquid vegetable oil plant (refinery) and warehouses stockpiling, it only built the barrier.

After the subpoena was delivered 3 times and turns out that the construction was not implemented, on July 24, 2009 PT Pelindo III (Persero) decided to discontinue the agreement with PT WAL. PT WAL did not agree with the subpoena, then it filed a lawsuit against PT Pelindo III (Persero) through Surabaya District Court, with the demands of the HPL lease extension up to 20 years.

Surabaya District Court Judge decided that PT WAL lawsuit was unproven and was wholly rejected. Based on the decision, PT Pelindo III (Persero) won. But at the appeal level, the East Java High Court cancelled the decision of the District Court of Surabaya (Pelindo III lost).

Later on, the Cassation level according to the decision letter of Indonesian Supreme Court No.2455K/Pdt/2010, Jo No. 183/Pdt/2010/PT.Sby, Jo No. 662/Pdt.G/2009/PN.Sby dated April 28, 2011 passed a decision that PT Pelindo III won. However, PT WAL filed a Reconsideration on the case.

PT Pelindo III filed a counter reconsideration on February 13, 2012. As the information matter in the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia PK Verdict with register No.470/PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which granted the PK proposed by PT WAL, but as of to date of audit, the Company has not yet obtained a copy of the inspection decision of the Court.

Potential value of liabilities which might be arise as a consequence of point 1 to 3 (if any) were not recorded in the financial statements.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

3. Terdapat beberapa tanah milik Perusahaan masih dalam proses pengadilan:
 - a) Perkara perdata No.99/Pdt.G/2008/PN.Sby dengan Warga Perak Barat atas perbuatan melawan hukum mengalihkan hak atas tanah eks HPL Perusahaan kepada Pemkot Surabaya. Saat ini dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah ada putusan banding No. 664/PDT/2010/PT.Sby yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Atas putusan tersebut Warga Perak Barat mengajukan kasasi dan telah menyampaikan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat tanda terima kontra memori kasasi No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011.
4. Penguasaan hak atas tanah yang tumpang tindih sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No.31/S/VIIIXV.2/02/2005 tanggal 14 Februari 2005 sebagai berikut :
 - a) Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang yang juga dicatat sebagai aset PT Pertamina UPPDN IV Semarang dengan nilai kurang lebih Rp40.200.000.
 - b) Sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang dikuasai oleh penduduk dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kodya Semarang dengan nilai kurang lebih Rp9.953.600.
5. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam risalah rapat No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII-2002 tanggal 2 Desember 2002 yang menyatakan Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam pemilikan PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Aspek legal dari keputusan tersebut belum dilaksanakan dan Perusahaan masih dalam proses menentukan nilai kompensasi atas penyertaan tersebut.

46. Contingencies (Continued)

3. There are some lands owned by the Company which are still in civil court process:
 - a) A civil case No.99/Pdt.G/2008/PN. against the resident of Perak Barat for committing to break the law yielded from the action made for converting the rights of the land utility owned by ex HPL to Surabaya City Government. Currently, the case is under the process of appeal in the High Court of East Java. There was a verdict, No. 664/PDT/2010/PT.Sby. Which enforced the verdict by District Court No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby. Of that verdict, the residents of Perak Barat had made an appeal and submitted the cassation to the Supreme Court of Surabaya, through the District Court. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has also filed a counter cassation as per counter cassation appeal No. 99/Pdt.G/2008/PN.Sby dated October 27, 2011.
4. The overlapped in committing the occupation towards the rights for the land utility as mentioned in the report No.31/S/VIIIXV.2/02.2005 dated February 14, 2005 of Supreme Auditor Agency described as follows:
 - a) Parts of land management right (HPL) of the Company at Tanjung Emas Port of Semarang was recorded and noted as the assets of PT Pertamina Regional Marketing Unit IV (UPPDN IV) of Semarang with value approximately Rp40,200,000.
 - b) Parts of land management right (HPL) at Tanjung Emas of Semarang was occupied and claimed by residents with certificates of ownership released by District Land Office (BPN) of Semarang City with value approximately Rp9,593,600.
5. Based on decision of extra ordinary shareholders' meeting as mentioned in minute of meeting No.HM.0705/11/P.III-2002, 027.A/LAT.01.KOM/XII-2002 dated December 2, 2002 it was stated that the Company withdraw from the ownership of PT Lamin Aspalindotiga (LAMIN). Legal aspects of the decision have not been executed and the Company is currently in the process of determining the value of compensation on this withdrawal.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

6. PT Pelindo III sebagai Penggugat melawan PT Adaro, PT Adi Guna Putra, PT Aneka Kargo Katulistiwa, PT Bahana Inti Barito, PT Handil Bakti Persada, PT Lambang Jaya Barito, PBM Adaro, PT Mitra Eka Sejati, PT Mas Logistics, PT Caral Dwiguna Sejati, PT Mitra Bahtera Segara. Putusan PN Banjarmasin No. 17/Pdt.G/2013/PN.Bjm menolak gugatan Penggugat (PT Pelindo III).

Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Pelindo III mengajukan Banding atas putusan PN Banjarmasin. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa memberikan Putusan Banding No.53/PDT/2013/PT.BJM tanggal 1 November 2013 yang menyatakan gugatan PT Pelindo III (Persero) tidak dapat diterima.

Selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan Kasasi ke MA.

7. Saudara Yusuf Efendi sebagai Penggugat melawan Saudari Widji sebagai Tergugat dan PT Pelindo III sebagai Turut Tergugat, gugatan Saudara Yusuf Efendi terhadap Saudari Widji dan PT Pelindo III sebagai turut tergugat dengan No. perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013.

Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan Jl. Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas HPL Pelabuhan, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menempati obyek sengketa tanpa ijin penggugat, selanjutnya penggugat meminta kepada turut tergugat untuk mengubah ijin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Pdt.G 13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013 yang menerima sebagian tuntutan penggugat. Saat ini PT Pelindo III (Persero) selaku turut tergugat telah mengajukan banding atas putusan PN tersebut.

8. Permasalahan dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK).
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) selaku Penggugat melawan PT Pelindo III (Persero) selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

46. Contingencies (Continued)

6. *PT Pelindo III as Plaintiff against PT Adaro, PT Adi Guna Putra, PT Aneka Kargo Katulistiwa, PT Bahana Inti Barito, PT Handil Bakti Persada, PT Lambang Jaya Barito, PBM Adaro, PT Mitra Eka Sejati, PT Mas Logistics, PT Caral Dwiguna Sejati and PT Mitra Bahtera Segara. The decision from Banjarmasin District Court No. 17/Pdt.G/2013/PN.Bjm rejected the plaintiff's lawsuit (PT Pelindo III).*

The Public Attorney representing Pelindo III had filed an appeal against the decision of the Banjarmasin District Court. Furthermore, the judge in charge gave appeal decision No.53/PDT/2013/PT.BJM November 1, 2013, which stated that the lawsuit Pelindo III (Persero) was not accepted.

Subsequently, the Public Attorney of Banjarmasin has filed a cassation to the Supreme Court.

7. *Mr. Yusuf Efendi, a Plaintiff against Mrs. Widji, a Defendant and PT Pelindo III as Co-defendant, Mr.Yusuf Efendi filed lawsuit against Mrs. Widji and PT Pelindo III as a co-defendant with case No.13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated January 22, 2013.*

Plaintiff claimed to be the legitimate heir of the building in Jl. Teluk Nibung East 8/25A Surabaya port standing on HPL, the plaintiff claimed that the defendant had occupied the disputed without permission of the plaintiff, then the plaintiff requested the defendant helped to change the land use permit previously on behalf of the defendant to be on behalf of the Plaintiff and no decision has been made by Surabaya District Court No. Pdt.G 13/PN.Sby dated August 28, 2013 the plaintiff received a partial claim. Currently PT Pelindo III (Persero) as co-defendant appealed to the decision of the District Court.

8. *Problems with the Consumer protection Foundation (YPLK). Consumer Protection Foundation (YLPK) as plaintiff against PT Pelindo III (Persero) as Defendant in Civil Case No. 807 / Pdt.G / 2014 / PN.Sby.*

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Penggugat mendalilkan PT Pelindo III (Persero) selaku Tergugat telah melakukan kebohongan dengan mencantumkan lingkup bisnis sebagai penyedia jasa air kapal pada Annual Report Tahun 2011 padahal secara nyata Tergugat tidak bergerak di bidang bisnis tersebut, sedemikian menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 7 huruf b, jis. Pasal 8-10 UU Perlindungan Konsumen.

Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim PN Surabaya dengan nomor putusan 807/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 3 Maret 2015 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00.

Atas putusan tersebut, YLPK mengajukan memori banding yang diterima PT Pelindo III (Persero) pada tanggal 26 Mei 2015 dan PT Pelindo III (Persero) telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2015.

Atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/5301/HK.02/7/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

9. Permasalahan Penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya, terdiri atas :
 - a) Abdullah/ Dewi Nasiroh, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan PT Pelindo III (Persero) selaku Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;
 - b) Kadarwati alias Ibu Baginda selaku Penggugat melawan PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;
 - c) Maslichah dan Soeselo, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

46. Contingencies (Continued)

Plaintiff argued that PT Pelindo III (Persero) as Defendant has to lie by stating the scope of the business as a provider of water vessels on the Annual Report of 2011 when real Defendants are not engaged in the business, so according to the Plaintiff, the Defendant has done Torts (PMH) for violating Article 7 letter b, jis. Article 8-10 Consumer Protection Act.

This case was decided by the judges PN Surabaya with decision number 807/Pdt.G/2014/PN.Sby dated March 3, 2015 with the ruling rejecting the claim in its entirety and punish the Plaintiff to pay court costs Rp426,000.00.

received PT Pelindo III (Persero) on May 26, 2015 and PT Pelindo III (Persero) has submitted a counter memorandum of appeal on June 26, 2015.

Of that decision, a memorandum of appeal filed YLPK On the appeal Surabaya High Court Judge has ruled as a letter Surabaya High Court No. W14-U/5301/HK.02/7/2016 dated July 28, 2016 regarding Shipping Back Case file No.807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

9. Problems evictions carried out by PT KAI (Persero) Daops VIII around Station Kalimas Surabaya, Surabaya, consisting of:
 - a) Abdullah / Dewi Nasiroh, et al as the Plaintiff against PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya as Defendant I and PT Pelindo III (Persero) as the second defendant in the civil case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;
 - b) Kadarwati aka Mrs. King as plaintiff against PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as the second defendant in the civil case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;
 - c) Maslichah and Soeselo, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as the second defendant in the civil case No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Para Penggugat dalam Nomor register perkara 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby merupakan korban penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) Daops VIII Surabaya di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya. Lokasi penggusuran tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka kerjasama usaha pengangkutan petikemas melalui sarana kereta api antara PT KA (Persero) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar uang ganti rugi yang jumlahnya bervariasi.

Perkara saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby pada tanggal 17 Juni 2015 dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan PT Pelindo III. Perkara saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan PT Pelindo III.

Penggugat telah menyampaikan pernyataan banding pada tanggal 25 Juni 2015, namun belum ada memori banding yang diberikan Penggugat.

Bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat register perkara nomor 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 902/Pdt.G/2014/PN.Sby sebagaimana relaas nomor 62/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 13 Juli 2016.

10. Sengketa rumah dinas operasional (RDO) Alm. Hamonangan Ritonga di Cabang Benoa.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Penggugat melawan Delila Harahap (janda/ ahli waris Alm. Hamonangan Ritonga, pensiunan pegawai) selaku Tergugat, dalam perkara perdata dengan Nomor register 69/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Pada awalnya Alm. Hamonangan Ritonga menempati rumah dinas operasional (RDO) yang terletak di Jalan Pulau Ambon Nomor 13, Denpasar saat bertugas sebagai Kepala Dinas Kependidikan Cabang Benoa. Akan tetapi hingga Almarhum mutasi ke cabang Tanjung Wangi hingga pensiun dan meninggal, Almarhum beserta ahli warisnya tidak mengosongkan rumah dinas dimaksud walaupun telah berulang kali diperingatkan.

46. Contingencies (Continued)

The plaintiff in the case register number 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby is evictees conducted by PT KAI (Persero) Daops VIII around Station Kalimas Surabaya, Surabaya. Location eviction is planned to be used in the framework of cooperation by means of hauling container trains between PT KA (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). The plaintiffs are suing Defendant I and Defendant II pay compensation of varying amounts.

The case has been decided by the District Court of Surabaya No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby on June 17, 2015 with the ruling basically won PT Pelindo III. The case has now been decided by the District Court of Surabaya with the ruling basically won PT Pelindo III.

Plaintiff has submitted a statement of appeal on June 25, 2015, but there is no appeal for a given plaintiff.

That on an appeal from Plaintiffs register case number 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Surabaya High Court Judge has ruled with the verdict substantially strengthen the Surabaya District Court decision No.902/Pdt.G/2014/PN.Sby as relaas number 62/Pdt/2016/PT.Sby dated July 13, 2016.

10. Dispute the official residence of the operational (RDO) alm. Hamonangan Ritonga in Benoa Branch.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as plaintiff against Delila Harahap (widow / heirs Alm. Hamonangan Ritonga, Retired Employee) as Defendant in a civil case with register number 69/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Initially Alm. Hamonangan Ritonga in housing operations (RDO) located in Ambon Island Road No. 13, Denpasar is currently serving as Head Scout Branch Benoa. But until He moved to the branch Tanjung Wangi until retirement and died, their heirs and their late vacate official residence in question despite repeated warnings.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2014, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa.

Atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Tergugat mengajukan banding, dimana Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 21 April 2015 mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan PN Denpasar dan atas putusan banding tersebut Pembanding/ Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. PT Pelindo III telah menyampaikan kontra memori kasasi.

Telah dikeluarkan putusan Kasasi Nomor 3266 K/PDT/2015 tanggal 15 Maret 2016, yang amar putusannya menolak kasasi Pemohonan (Delila Harahap). Salinan putusan atas perkara tersebut telah diterima PT Pelindo III (Persero) pada tanggal 9 Desember 2016.

11. Sengketa terkait tanah HPL di Cabang Banjarmasin
H. Hartani Bin Achmad, dkk., selaku Penggugat melawan PT Pelindo III (Persero) selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Bjm.

Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas tanah seluas ± 1.890 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 89 tahun 1965 yang terletak di Jalan Barito Hilir/ Pangeran H.M. Noor, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Penggugat mendalilkan bahwa PT Pelindo III (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara diam-diam memasukkan tanah sengketa ke dalam sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 27 Februari 2001 atas nama PT Pelindo III (Persero).

Atas hal tersebut, Penggugat menuntut PT Pelindo III (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp15.225.000 [lima belas miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah].

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan Nomor.32/Pdt.G/2015/PN.Bjm dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan Pelindo III.

Atas putusan tersebut, Penggugat menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengeluarkan putusan banding Nomor22/PDT/2016/PT.BJM tanggal 21 Maret 2016, dengan putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

46. Contingencies (Continued)

The case has been decided by the Denpasar District Court on October 23, 2014, the verdict in principle in favor of the Plaintiff partially and stated that the Plaintiff is the rightful owner of the disputed object.

On the Denpasar District Court, Defendant filed an appeal, which the Denpasar High Court on 21 April 2015 issued a ruling that essentially upheld the ruling Denpasar District Court and on appeal the decision of the Appellant / Defendant appealed to the Supreme Court. PT Pelindo III has submitted a counter against the cassation.

Telah dikeluarkan putusan Kasasi Nomor 3266 K/PDT/2015 tanggal 15 Maret 2016, yang amar putusannya menolak kasasi Pemohonan (Delila Harahap). A copy of the ruling on the case has been accepted by PT Pelindo III (Persero) on December 9, 2016.

11. *HPL Land Disputes in Banjarmasin Branch*
Hartani Bin Ahmad H., et al., As the Plaintiff against PT Pelindo III (Persero) as Defendant in a civil case No.32/Pdt.G/2015/PN.Bjm.

Plaintiffs claiming to be the rightful owner of the land area of ± 1.890 m² as Certificate Properties No. 89 of 1965 which is located at Jalan Barito Hilir / Prince H.M. Noor, Village of Blue Lake, District of West Banjarmasin, Banjarmasin. Plaintiff argues that PT Pelindo III (Persero) has committed an unlawful act (PMH) by secretly entering into the disputed land management right certificate No. 5 of 2001 dated February 27, 2001 in the name PT Pelindo III (Persero).

On this, the plaintiffs are suing PT Pelindo III (Persero) to pay compensation amounting to Rp15.225 million [fifteen billion two hundred and twenty five million Rupiah].

This case was decided by the District Court of Banjarmasin by decision No. 32 / Pdt.G / 2015 / PN.Bjm with the ruling basically won Pelindo III.

Of that decision, the Plaintiff appealed and the High Court has issued a ruling Banjarmasin appeal No. 22/PDT/2016/PT.BJM dated March 21, 2016, with the decision in principle Banjarmasin District Court upheld the verdict.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

12. Sengketa terkait revitalisasi Kalimas.

PT Upaya Export, dkk. Suanthie John, Sugihan Suliandjo, dll, selaku Penggugat melawan PT Pelindo III (Persero) selaku Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 49-57/G/2015/PTUN.SBY.

Para Penggugat merupakan pelaku usaha, pengguna tanah HPL Pelabuhan, yang melakukan usaha di Kalimas, Surabaya yang akan dilakukan revitalisasi. Cabang Tanjung Perak meminta para Penggugat untuk mengosongkan gudang-gudang dan tanah HPL Pelabuhan sehubungan dengan akan dilakukannya revitalisasi Kalimas.

Perkara tersebut saat ini telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2015, dengan amar putusan pada pokoknya memenangkan PT Pelindo III (Persero) dan atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke PT TUN Surabaya.

Atas perkara ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan telah dikeluarkan putusan banding Nomor 221-226/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Kemudian Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan memori kasasi tanggal 23 Februari 2016. Atas memori kasasi ini telah diberikan kontra memori kasasi dari PT Pelindo III (Persero) tanggal 17 Maret 2016. Hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi.

Atas pengajuan Kasasi tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya menerbitkan penetapan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara ini merupakan perkata Tata Usaha Negara dalam lingkup local dan hanya berlaku di antara para pihak yang berperkara sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku terhadap perkara ini tidak dapat diajukan Kasasi sehingga perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam memori Peninjauan Kembali Nomor 49-57/G/2015/PTUN.Sby.

46. Contingencies (Continued)

12. Disputes relating to the revitalization of Kalimas.

PT Upaya Export, et al. Suanthie John, Sugihan Suliandjo, etc., as the Plaintiff against PT Pelindo III (Persero) as Defendant in the case of the State Administration No. 49-57/G/2015/PTUN.SBY.

The Plaintiff is a business, HPL Port land users, who do business in Kalimas, Surabaya, which will be conducted revitalization. Tanjung Perak branch asked the plaintiff to empty warehouses and land in connection with the Port HPL will do Kalimas revitalization.

Now that cas has decided Surabaya State Administrative Court on July 29, 2015, with the ruling basically won PT Pelindo III (Persero) and the verdict Plaintiff appealed to PT TUN Surabaya.

On this case, the Plaintiff appealed to the High Administrative Court of Surabaya and has issued an appeal decision No. 221-226/B/2015/PT.TUN.SBY dated January 12, 2016, which essentially upheld the ruling Surabaya State Administrative Court.

Then the claimant appealed to the Supreme Court by cassation dated February 23, 2016. Top of cassation has given counter against the cassation of PT Pelindo III (Persero) dated March 17, 2016. Until now still in the process of examination of the appeal.

On the submission of Cassation, the Chairman of the Administrative Court of Surabaya issue a determination which principally states that this case is perkata State Administration within the scope of local and only apply between the litigants so under the provisions of the Criminal Procedure Administrative applicable to this case do not Appeals can be filed so that the case is declared binding.

On the determination of the Chairman of the State Administrative Court Surabaya The Plaintiffs filed a judicial review to the Supreme Court through the State Administrative Court as contained in the memory Reconsideration No. 49-57/G/2015/PTUN.Sby.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Atas adanya gugatan tersebut Perusahaan menunjuk konsultan hukum eksternal dari Pramono & Partners Lawfirm guna menangani dan mewakili perusahaan. Saat ini perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Perusahaan saat ini sedang menunggu Salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung.

13. Sengketa perdata terkait revitalisasi Kalimas

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam kedudukannya selaku Tergugat telah digugat dalam lingkup perdata oleh PT Upaya Export dan Ang Suanthie John selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Pelindo III telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara sewenangwenang melakukan perencanaan pengosongan gudang miliknya di Jalan Kalimas Baru Nomor 128 dan 140, Surabaya.

Dalam gugatannya para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa gudang tersebut adalah miliknya dan menyatakan bahwa Pelindo III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan PT Upaya Export dan Ang Suanthie John untuk seluruhnya.

Atas putusan tersebut, Pelindo III melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Akta Permohonan Banding No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016. Posisi perkara saat ini pada tahap pengajuan memori kasasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

14. Gugatan PT Dakai Impex atas Kerusakan Buah Jeruk Impor

Pada tanggal 26 April 2013 PT Dakai Impex (Penggugat) mengimpor buah jeruk dari China sebanyak 5 petikemas dan tanggal 5 Mei 2013 juga mengimpor buah jeruk sebanyak 8 petikemas, sehingga total sebanyak 13 petikemas. Dalam perjalanan dari China ke Indonesia memakai petikemas reefer (kontainer pendingin).

46. Contingencies (Continued)

The lawsuit over the company appointed an external legal consultant of Pramono & Partners Lawfirm to address and represent the company. Currently the case has been decided by the judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to the ruling rejecting a judicial review of the Petitioners Reconsideration. The Company is currently awaiting an official copy of the decision of the Supreme Court.

13. HPL land disputes in Kalimas revitalization

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in his capacity as Defendant has been sued in the civil sphere by PT Upaya Export and Ang Suanthie John as the plaintiff in Surabaya District Court with register number 507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

In the lawsuit the plaintiffs argued that Pelindo III has committed an unlawful act (PMH) with arbitrary conduct discharge planning his warehouse in Jalan Baru Kalimas No. 128 and 140, Surabaya.

In the lawsuit the plaintiff pleaded Surabaya District Court acknowledged that the charter is his warehouse and declared that Pelindo III has committed an unlawful act

The lawsuit over the Surabaya District Court Judge ruled that verdict in principle in favor of PT Upaya Export and Ang Suanthie John entirety.

Of that decision, Pelindo III through his attorney of Pramono & Partners filed an appeal to the High Court of Appeal Surabaya based on the Deed No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby position on 6 December 2016. The case is currently at the stage of filing an appeal to the memory Surabaya High court.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

14. Lawsuit PT Dakai Impex for Damages of Imported Orange Fruits

On April 26, 2013, PT Dakai Impex (the Plaintiff) imported oranges from China using 5 container and on May 5, 2013 also imported oranges using 8 containers, for a total of 13 containers. On the way from China to Indonesia used refrigerated containers.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Pada bulan Mei 2013, barang tersebut telah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Penggugat menggunakan jasa Tergugat I (PT Perak Wharehouse), Tergugat II (PT Buana Amanah Karya - Jakarta), Tergugat III (PT Buana Amanah Karya - Surabaya), dan Tergugat IV (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia), yaitu fasilitas bongkar muat, depo/gudang penyimpanan sementara, fasilitas plug listrik.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Penggugat mengeluarkan salah satu petikemas dari gudang milik Tergugat III dengan kondisi buah jeruk dalam keadaan rusak dan busuk. Dari kejadian tersebut 12 petikemas yang lain dibuka di Depo Tergugat III dan ditemukan adanya kesengajaan petikemas milik Penggugat tidak terpasang arus listrik yang mengakibatkan buah jeruk menjadi rusak dan busuk.

Pada tanggal 8 Juli 2013, Penggugat mengirim somasi kepada Tergugat III No. 206/DI-DN/VII-13. Dari somasi tersebut, Penggugat menerima Surat Tanggapan dari Tergugat I dengan No. SK.210-10/XII/BJTI-2013 tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Perjanjian antara BJTI dengan PT Perak Wharehouse No. KKS.42-02/VII/BJTI-2013 tanggal 19 Juli 2013 disepakati bahwa PT Perak Wharehouse bertanggungjawab secara penuh atas kerusakan petikemas dan/atau mutu dan isinya milik pihak ketiga (pengguna jasa) yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan petugas PT Perak Wharehouse.
- ii. PT Perak Wharehouse telah mengetahui bahwa arus listrik petikemas reefer yang digunakan untuk petikemas Penggugat dalam kondisi tidak normal tetapi tidak segera melakukan pelaporan sehingga PT Perak Wharehouse tidak mencegah timbulnya beban klaim yang sangat besar.

Penggugat memperkarakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara tanggung renteng berupa ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.022.543 yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

46. Contingencies (Continued)

On May 2013, the goods arrived at the Port of Tanjung Perak Surabaya. The Plaintiff used the services from Defendant I (PT Perak Wharehouse), Defendant II (PT Buana Amanah Karya - Jakarta), Defendant III (PT Buana Amanah Karya - Surabaya), and Defendant IV (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia), that is loading and unloading facilities, warehouse as temporary storage, electrical plug facilities.

On May 30, 2013, the Plaintiff took out one container from the warehouse owned by the Defendant III with the condition that the oranges were damaged and decay. Of the incident, the other 12 containers in the warehouse were opened by the Defendant III and found out that the Plaintiff was deliberate disregarded to use the electricity resulting for the orange fruits to be damaged and rotten.

On July 8, 2013, the Plaintiff sent to the Defendant III a subpoena No.206/DI-DN/VII-13. Of the subpoena, the Plaintiff received response letter from the Defendant I No.SK.210-10/XII/BJTI-2013 dated December 11, 2013 as follows:

- i. Based on the agreement between BJTI and PT Perak Wharehouse No.KKS.42-02/VII/BJTI-2013 dated July 19, 2013, it was agreed that PT Perak Wharehouse has the full responsibility for damage containers and/or the quality and content of third parties (customers) are caused by the negligence or willful misconduct of the officer of PT Perak Wharehouse.*
- ii. PT Perak Wharehouse has learned that the electric current used for the container of the Plaintiff is under abnormal conditions, but not immediately reported by PT Perak Wharehouse in order to prevent a very large claim burden.*

The Plaintiff sued Defendant I, Defendant II, Defendant III and Defendant IV jointly and severally to pay restitution in the form of material and immaterial to the Plaintiff for Rp5,022,543 to be paid in cash and immediately after the verdict of the case becomes legally enforceable.

46. Kontinjensi (Lanjutan)

Sesuai dengan Perjanjian Pelayanan Jasa kontainer Yard Nilam antara BJTI dengan PT Buana Amanah Karya No. KKS.29-09/V/BJTI-2013 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi "membebaskan Pihak Pertama (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) dari tanggungjawab terhadap perubahan warna, bentuk dan komposisi barang/produk didalam petikemas karena adanya perubahan cuaca, reaksi kimia dan sebab-sebab lainnya selama berada di lokasi kegiatan.

15. Klaim PT Meratus ke BJTI atas Kecelakaan Kerja di PT Pelindo III Cabang Tenau Kupang.

Pada tanggal 15 Januari 2014 telah terjadi kecelakaan kerja dikarenakan salah penanganan dalam proses layanan delivery petikemas di Terminal Multi Guna Kupang, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya klaim dari pihak PT Meratus atas kerusakan kontainer TEGU2922572 yang terguling disamping telah menyebabkan kerusakan pada body RTG02 dan juga kerusakan pada chassishead truck nopol DH8560AC.

Terhadap beberapa item barang yang rusak sebenarnya telah dicover oleh pihak asuransi, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pengecekan di Pabrik. Pihak BJTI juga sudah mengantisipasi atas klaim dari Pihak Meratus terkait atas kerusakan yang dikecualikan oleh pihak asuransi atas kerusakan ini. Sampai dengan saat ini, belum ada gugatan tertulis yang dikirimkan oleh PT Meratus kepada BJTI.

46. Contingencies (Continued)

In accordance with the Services Agreement between BJTI and PT Buana Amanah Karya No.KKS.29-09/V/BJTI-2013 dated May 15, 2013 which contains the "liberating First Party (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) from the responsibility to change the color, shape and composition of the goods/products in the containers due to changing weather, chemical reactions and any other cause while in the location of activities.

15. Claims of PT Meratus to BJTI for accidents at PT Pelindo III Branch Tenau Kupang.

On January 15, 2014 a work accident occurred due to mishandling in the process of delivery service of containers in Multipurpose Terminals in Kupang, these events resulted for PT Meratus to claim for damages on Container TEGU2922572 is rolled in addition has caused damage to the body RTG 02 and also damage to the truck chassis head plate DH8560AC.

Some of the damaged goods were actually covered by insurance, but as of to date, the checking of the factory is still in progress. BJTI is also anticipating for the claims of the related parties of PT Meratus for damages which are excluded by insurers for such defects. As of to date, there is no written claims submitted by PT Meratus to BJTI.

47. Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Laba Bersih	1,037,329,721	702,533,323	1,192,041,611	Net Income
Total	1,037,329,721	702,533,323	1,192,041,611	Total

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah saham per 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sebanyak 1.018.953 saham.

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Laba Bersih Per Saham Dasar	1,018	689	1,170	Basic Earning per Share

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

47. Earning Per Share

Income from operations and net income for the calculation of basic earning per share is as follows:

The number of shares based on weighted average of outstanding shares was published for the purpose of calculation of basic earning per share as of December 31, 2016, 2015 and 2014 amounted to 1,018,953 shares.

At statement of financial position date, the Company has no dilutive potential ordinary shares.

48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

48. Financial Instrument and Financial Risks Management

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Harga
6. Risiko Investasi

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Perusahaan difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk meringankan risiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa /pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Perusahaan lebih mudah memantau pendapatannya. Selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

a. Risk Management Policy

In normal transaction, the Group is generally exposed to financial risks as follows:

1. Credit Risk
2. Foreign Exchange Rate Risk
3. Interest Rate Risk
4. Liquidity Risk
5. Price Risk
6. Investment Risk

This Note describes the exposure of the Group to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

The Group's directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Group's financial performance.

The Group's policy on financial risk mangagement are as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable and investments. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

To minimize this risk, the Group established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users / customers to pay deposit's before entering transaction and hence allow the Company to monitor their income easier. In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables.

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar. Tergantung pada penilaian Perusahaan, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/Impairment	Total	December 31, 2016
Pinjaman yang diberikan dan piutang:					
Kas dan Setara Kas	1,820,904,461	-	-	1,820,904,461	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	33,213,107	-	-	33,213,107	Restricted Cash
Piutang Usaha	167,170,834	337,310,973	(68,269,936)	436,211,871	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	189,952,416	71,146,896	(27,734,534)	233,364,778	Other Receivables
Pendapatan yang Masih akan Diterima	91,097,663	-	-	91,097,663	Accrued Revenue
Total	2,302,338,481	408,457,869	(96,004,470)	2,614,791,880	Total

31 Desember 2015	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/Impairment	Total	December 31, 2015
Pinjaman yang diberikan dan piutang:					
Kas dan Setara Kas	2,618,040,351	-	-	2,618,040,351	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	42,244,106	-	-	42,244,106	Restricted Cash
Piutang Usaha	226,287,163	240,043,319	(76,776,368)	389,554,114	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	41,474,975	30,267,150	(22,149,354)	49,592,771	Other Receivables
Pendapatan yang Masih akan Diterima	73,235,154	-	-	73,235,154	Accrued Revenue
Total	3,001,281,749	270,310,469	(98,925,722)	3,172,666,496	Total

When a customer is unable to make payments within the specified time, the Group will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Company will discontinue services to customers as a result of the default. Depending on the assessment of the Company, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) **48. Financial Instrument and Financial Risks Management (Continued)**

31 Desember 2014	Belum jatuh tempo/Neither past due	Telah jatuh tempo/Past due	Penurunan nilai/ Impairment	Total	December 31, 2014
Pinjaman yang diberikan dan piutang:					
Kas dan Setara Kas	4,247,026,898	-	-	4,247,026,898	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	20,523,000	-	-	20,523,000	Restricted Cash
Piutang Usaha	149,003,445	327,916,115	(88,764,852)	388,154,708	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	299,508,043	30,267,150	(16,782,976)	312,992,217	Other Receivables
Pendapatan yang Masih akan Diterima	89,515,997	-	-	89,515,997	Accrued Revenue
Total	4,805,577,383	358,183,265	(105,547,828)	5,058,212,820	Total

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perusahaan.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Perusahaan terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan. Pinjaman dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didominasikan dalam mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan. Beberapa liabilitas dan belanja modal Perusahaan diperkirakan akan terus didominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

2. Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure.

Exposure of currency exchange risk of Company is mainly from cash and cash equivalents, temporary deposits, trade accounts receivables, bank loans and security issued. Bank loans is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents dominated in the same foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Company. Several liabilities and capital expenditures Entity are expected to continue dominated in United States Dollar.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

Dalam mengelola risiko mata uang, Perusahaan tidak melakukan *hedging*, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.
- Melakukan pembelian valas secara spot atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka USD.
- Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terutama berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016		31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014		Assets
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah / (Angka Penuh)/ <i>Equivalent Rupiah</i>	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah / (Angka Penuh)/ <i>Equivalent Rupiah</i>	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah / (Angka Penuh)/ <i>Equivalent Rupiah</i>	
	Foreign Currency (Full Amount)		Foreign Currency (Full Amount)		Foreign Currency (Full Amount)		
Aset							
Kas dan Setara Kas	USD	24,248,444	325,802,099	81,311,889	1,121,699,633	239,504,196	2,979,432,199
	EUR	1,663	23,550	1,693	25,512	2,191	33,158
	SGD	10,000	92,989				
Piutang Usaha	USD	1,305,932	<u>17,617,515</u>	1,808,048	<u>24,942,138</u>	13,254,436	<u>164,885,186</u>
Total Aset			<u>343,536,153</u>		<u>1,146,667,283</u>		<u>3,144,350,543</u>
Liabilitas							
Utang Usaha	USD	878,055	12,151,993	30,629,568	422,420,014	10,336,883	128,590,819
	EUR	1,866,188	26,428,949	-	-	-	-
Beban Akrual	USD	6,460,010	86,796,700	6,348,188	87,573,257	6,821,074	84,854,159
Utang Bank Jangka Pendek	USD	50,000,000	671,800,000	50,000,000	943,792,959	40,000,000	497,600,000
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang :							
Utang Bank	USD	24,248,374	325,801,155	18,415,582	254,042,959	12,582,791	156,529,915
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang Bank	USD	50,396,804	677,131,456	51,781,538	714,356,404	36,251,423	450,967,703
Utang Obligasi	USD	494,636,180	<u>6,645,931,711</u>	500,000,000	<u>6,897,500,000</u>	500,000,000	<u>6,220,000,000</u>
Total Liabilitas			<u>8,446,041,964</u>		<u>9,319,685,593</u>		<u>7,538,542,596</u>
Aset (Liabilitas) Bersih			<u>(8,102,505,811)</u>		<u>(8,173,018,310)</u>		<u>(4,394,192,053)</u>
							Net - Assets (Liabilities)

The Company manages the foreign exchange rate risk without hedging, because transactions have short term period. The Company believes that there are no significant risk of foreign exchange fluctuations on its transactions.

In addressing the risk of fluctuations in foreign currency the Management considers the following:

- Obtains part of working capital in foreign currency
- Purchases foreign currency at spot or gradually to be placed in the form of time deposito in USD
- Obtains revenues in foreign currency which are expected to compensate liabilities on foreign currency

The following table presents the Company's financial assets and liabilities denominated in foreign currency, mainly in United States Dollar:

48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Perusahaan:

	Perubahan Nilai Tukar <i>Change in Exchange Rates</i>	Basis Poin/ <i>Basis Point</i>	Sensitivitas/Sensitivity	
			Ekuitas/ Equity Rp	Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Rp
31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	Meningkat/Appreciates	100	(33,878,327)	(33,878,327)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	33,878,327	33,878,327
31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	Meningkat/Appreciates	100	(196,550,711)	(196,550,711)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	196,550,711	196,550,711
31 Desember 2014/ <i>December 31, 2014</i>	Meningkat/Appreciates	100	(40,978,855)	(40,978,855)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	40,978,855	40,978,855

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Perusahaan yang dipengaruhi bunga adalah:

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negative terhadap Perusahaan

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisa pada profil jatuh tempo aset dan kewajiban berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar at year end that could increase (decrease) the equity or profit or loss amount are presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that were considered to happen on the reporting date with all other variables are held constant.

The following table shows the sensitivity of the United States Dollar exchange rate changes on net income and stockholder's equity:

	Perubahan Nilai Tukar <i>Change in Exchange Rates</i>	Basis Poin/ <i>Basis Point</i>	Sensitivitas/Sensitivity	
			Ekuitas/ Equity Rp	Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Rp
31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	Meningkat/Appreciates	100	(33,878,327)	(33,878,327)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	33,878,327	33,878,327
31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	Meningkat/Appreciates	100	(196,550,711)	(196,550,711)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	196,550,711	196,550,711
31 Desember 2014/ <i>December 31, 2014</i>	Meningkat/Appreciates	100	(40,978,855)	(40,978,855)
	Terdepresiasi/Depreciates	100	40,978,855	40,978,855

On the statement of financial position, the Company's profile of financial instruments that are affected by the interest are as follows:

3. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

The Group monitors the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Company.

To measure market risk on interest rate movement, the Company analyzed the interest rate movement margin and maturity profile of asset and liabilities based on interest rate change schedule.

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**48. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Aset Keuangan	1,848,690,379	2,653,298,762	4,260,651,859	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	<u>(9,820,664,322)</u>	<u>(8,487,719,301)</u>	<u>(7,249,873,601)</u>	<i>Financial Liabilities</i>
Total Aset (Liabilitas)				Total Assets (Liabilities)
- bersih	<u>(7,971,973,943)</u>	<u>(5,834,420,539)</u>	<u>(2,989,221,742)</u>	<i>- net</i>
Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga				<i>Sensitivity analysis on interest rate risk</i>
	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Tingkat bunga tetap				<i>Fixed rate</i>
Aset Keuangan	1,848,690,379	2,653,298,762	4,260,651,859	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	<u>(9,820,664,322)</u>	<u>(8,487,719,301)</u>	<u>(7,249,873,601)</u>	<i>Financial Liabilities</i>
Total	<u>(7,971,973,943)</u>	<u>(5,834,420,539)</u>	<u>(2,989,221,742)</u>	Total
Tingkat bunga mengambang				<i>Variable rate</i>
Aset Keuangan	1,885,664,187	2,706,364,738	4,345,864,896	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	<u>(10,017,077,608)</u>	<u>(8,657,473,687)</u>	<u>(7,394,871,073)</u>	<i>Financial Liabilities</i>
Total Aset (Liabilitas)				Total Assets (Liabilities)
- bersih	<u>(8,131,413,421)</u>	<u>(5,951,108,949)</u>	<u>(3,049,006,177)</u>	<i>- net</i>

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing sebesar (Rp159.439.763), (Rp116.688.411) dan (Rp59.784.435) Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2016, 2015 and 2014 by (Rp159,439,763), (Rp116,688,411, and (Rp59,784,435) respectively. A 2% decrease in interest rates for the periods ended December 31, 2016 and 2015 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatkan sumber pendanaan yang optimasi.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk in the arising when the cash flow position of the Group are not enough to cover the liabilities which become due.

In the managing liquidity risk, the Management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and Subsidiaries operations and to mitigate the affects of fluctuation in cash flows. The Management also regularly evaluates the projected and markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) **48. Financial Instrument and Financial Risks Management (Continued)**

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

31 Desember 2016	3 bulan sampai			Total	December 31, 2016
	Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 years		
Utang Usaha	883,289,693	-	-	883,289,693	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	2,265,071	-	-	2,265,071	Other Current Liabilities
Beban Akrual	833,461,821	-	-	833,461,821	Accrued Expenses
Utang Bank	3,174,732,610	-	-	3,174,732,610	Bank Loans
Uang Persekot/Panjar	48,180,532	-	-	48,180,532	Deposit Received
Uang Titipan	80,309,518	-	-	80,309,518	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	-	6,645,931,711	6,645,931,711	Securities Issued
Total	5,022,239,245	-	6,645,931,711	11,668,170,956	Total

31 Desember 2015	3 bulan sampai			Total	December 31, 2015
	Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 years		
Utang Usaha	1,067,426,848	-	-	1,067,426,848	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	4,267,956	-	-	4,267,956	Other Current Liabilities
Beban Akrual	713,178,003	-	-	713,178,003	Accrued Expenses
Utang Bank	1,658,149,363	-	-	1,658,149,363	Bank Loans
Uang Persekot/Panjar	33,236,816	-	-	33,236,816	Deposit Received
Uang Titipan	92,227,491	-	-	92,227,491	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	-	6,829,569,938	6,829,569,938	Securities Issued
Total	3,568,486,477	-	6,829,569,938	10,398,056,415	Total

31 Desember 2014	3 bulan sampai			Total	December 31, 2014
	Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 years		
Utang Usaha	508,001,057	74,168,512	92,124,633	674,294,202	Trade Accounts Payable
Utang Lancar Lain-lain	10,092,878	-	-	10,092,878	Other Current Liabilities
Beban Akrual	419,243,843	207,302,747	401,863	626,948,453	Accrued Expenses
Utang Bank	212,656,518	892,452,986	-	1,105,109,504	Bank Loans
Uang Persekot/Panjar	29,586,964	-	-	29,586,964	Deposit Received
Uang Titipan	70,214,140	-	-	70,214,140	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	-	6,144,306,480	6,144,306,480	Securities Issued
Total	1,249,795,400	1,173,924,245	6,236,832,976	8,660,552,621	Total

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

**48. Financial Instrument and Financial Risks
Management (Continued)**

5. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

6. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan pemodal.

Perusahaan dan entitas anak terkena dampak risiko investasi yang terutama diakibatkan oleh fasilitas utang obligasi. Pada bulan September 2014 perusahaan melakukan penawaran Global Bond. Perusahaan menargetkan untuk meraih USD500,000,000 (angka penuh) yang digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan dan issued pada tanggal 1 Oktober 2014. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Tingkat bunga sebesar 4,875% per tahun dan dibayar setiap 6 bulanan, dimulai 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2022.

The Bank of New York Mellon bertindak sebagai wali amanat. Per tanggal 8 September 2014 obligasi tersebut mendapatkan peringkat BBB- dari Fitch dan BB+ dari Standard & Poor.

5. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

Company and subsidiaries are affected by price risk that are primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs. Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Company and subsidiaries are unable to transfer these price increases directly to its customers.

Company and subsidiaries set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Company and subsidiaries to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Investment Risk

Level of investment risk is the potential loss arising from the acquisition of the expected investment returns are not achieved as planned. The level of risk that is included in the valuation of investment will affect the expected results financiers.

The Company and its subsidiaries are affected by the investment risk is mainly due to the bond debt facilities. In September 2014 the company made an offer Global Bonds. The company targets to achieve USD500,000,000 (full amount) used for financing the development of port facilities and issued on October 1, 2014. The bonds made in full at maturity. An interest rate of 4.875% per annum and payable every 6 months, starting October 1, 2014 until September 30, 2022.

The Bank of New York Mellon acts as trustee. As of the date of 8 September 2014 bonds get BBB- from BB + from Fitch and Standard & Poor's.

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

Kebijakan Perusahaan dan entitas anak untuk meminimalkan risiko investasi adalah antara lain dengan melakukan penempatan sisa utang obligasi yang belum digunakan pada rekening untuk pembayaran proyek perusahaan dan entitas anak yang akan jatuh tempo.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- c. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

48. Financial Instrument and Financial Risks Management (Continued)

The Company and its subsidiaries policy to minimize investment risks are, among others, with the placement of the rest of the bonds that have not been used to account for the payment of the project company and its subsidiaries maturing.

b. Fair Value of Financial Instruments

Fair value estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- a. *quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- b. *inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2); and*
- c. *inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).*

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

**48.Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan (Lanjutan)**

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

	2016		2015		2014		Financial assets:
	Nilai tercatat/ <u>Carrying amount</u>	Nilai wajar/ <u>Fair Value</u>	Nilai tercatat/ <u>Carrying amount</u>	Nilai wajar/ <u>Fair Value</u>	Nilai tercatat/ <u>Carrying amount</u>	Nilai wajar/ <u>Fair Value</u>	
Aset keuangan:							
Kas dan Setara Kas	1,820,904,461	1,820,904,461	2,618,040,351	2,618,040,351	4,247,026,898	4,247,026,898	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	33,213,107	33,213,107	42,244,106	42,244,106	20,523,000	20,523,000	Restricted Cash
Piutang Usaha	436,211,871	436,211,871	389,554,114	389,554,114	388,154,708	388,154,708	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	226,364,778	226,364,778	39,092,771	39,092,771	298,992,217	298,992,217	Other Receivables
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	91,097,663	91,097,663	73,235,154	73,235,154	89,515,997	89,515,997	Accrued Revenues
Total	2,607,791,880	2,607,791,880	3,162,166,496	3,162,166,496	5,044,212,820	5,044,212,820	Total
Liabilitas keuangan:							
Utang Usaha	883,289,693	883,289,693	1,067,426,848	1,067,426,848	674,294,202	674,294,202	Trade Accounts Payable
Utang Bank	3,174,732,610	3,174,732,610	1,658,149,363	1,658,149,363	1,105,109,504	1,105,109,504	Bank Loans
Utang Lancar Lain-lain	2,265,071	2,265,071	4,267,956	4,267,956	10,092,878	10,092,878	Other Current Liabilities
Beban Akrual	833,461,821	833,461,821	713,178,003	713,178,003	626,948,452	626,948,452	Accrued Expenses
Uang Persekutuan/Panjar	48,180,532	48,180,532	33,236,816	33,236,816	29,586,964	29,586,964	Deposit Received
Uang Titipan	80,309,518	80,309,518	92,227,491	92,227,491	70,214,140	70,214,140	Fund Retained
Surat Berharga Yang Diterbitkan	6,645,931,711	6,645,931,711	6,829,569,938	6,829,569,938	6,144,306,480	6,144,306,480	Securities Issued
Total	11,668,170,956	11,668,170,956	10,398,056,415	10,398,056,415	8,660,552,620	8,660,552,620	Total

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang, utang dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2016 and 2015:

Fair value of cash and cash equivalents, receivables, payables and accruals expenses approximate their carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

It is and has been the Company and subsidiaries' policy that no trading in financial instruments shall be undertaken.

49. Pengelolaan Modal

Grup mengelola risiko permodalan untuk memastikan Grup mampu melanjutkan kelangsungan usaha sehingga memaksimalkan imbal hasil pada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memelihara optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur permodalan Grup seluruhnya berasal dari ekuitas dan pinjaman bank, obligasi dan pemasok.

Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian review, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait.

50. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud – Hak Konsesi Pengusahaan TTL, APBS dan BMS

Grup Melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan hak konsesi pengusahaan berdasarkan faktor – faktor seperti kondisi teknis perkembangan teknologi di masa depan dan masa konsesi. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara meterial atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aseet tetap dan aset tidak berwujud disajikan di catatan 16 dan 18.

49. Capital Management

The Group manage risk on capital to ensure the Group ability to continue as a going concern in order to maximize returns for shareholders, and stakeholders to maintain an optimal loan balance and equity.

The Group's capital structure entirely from equity and trade payables from bank, bonds and suppliers.

Directors regularly review the Group's capital structure. As part of the review, Directors consider cost of capital and its related risk.

50. Source of Uncertainty Estimation and Critica Accounting Judgment

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. Estimates and considerations used in the preparation of financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities disclosed in below.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

The main assumptions of the future and the main source of estimation uncertainty on another reporting date that have significant risk of material adjustment to the carrying value of an asset and a liability for the following year is disclosed below. The Group based its assumptions and estimation on parameters that are available at the time the financial statements drawn up. Assumptions and the situation regarding future developments may change due to changes in the market or the situation beyond the control of the company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Estimated of Useful Lives of Property, Equipment, and Intangible Asset – TTL, APBS and BMS Concession Rights

The Group periodically reviews the useful lives of the fixed assets and concession rights expectation based on technical specification and technology development in the future and the length of concession. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors. Carrying amount of Property, Equipment, and Intangible Asset are disclosed in note 16 and 18.

**50. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Estimasi Marjin Konstruksi

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku mensyaratkan pendapatan konstruksi diakui sebesar nilai wajarnya. Grup tidak menentukan profit atau margin konstruksi dalam menghitung nilai wajar pendapatan konstruksi tersebut berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu.

Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasi yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 48.

**50. Source of Uncertainty Estimation and
Critical Accounting Judgment
(Continued)**

Estimated of Construction Margin

The accepted interpretation of accounting standard required that the construction revenue recognized at their fair value. The Group does not determined the profit or construction margin in calculating the fair value of construction.

Employment Benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefits obligations.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are dominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximates the terms of the related obligation.

Other key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

ii. Significant Judgements in Determination of Accounting Policy

These following judgments were made by management in relation to the adoption of accounting policies of the Group which has the most significant impact on the recognized amount in the financial statement.

Classification Financial Asset and Liability

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 48.

**50. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Cadangan kerugian nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan,

kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Cadangan yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Bila Grup memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Grup menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Takberwujud Hak
Konsesi - TTL, APBS dan BMS

Grup mengakui aset takberwujud sejauh Grup memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas kerena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Grup akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

**50. Source of Uncertainty Estimation and
Critical Accounting Judgment
(Continued)**

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available acts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer,

quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Group determine that no objective evidence of impairment occurred for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

Recognition and Measurement of Intangible Asset –
TTL, APBS and BMS

The Group recognized intangible assets to the extent that the Group owner right (license) to charge the public. A right to charge users of the public service. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amount depends on the extent to which the public using the service.

The nature of the rewards given by the concession principal to the Group will be determined by reference to the terms of the contract and, if applicable, the relevant contract law.

50. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Provisi untuk Biaya Perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal

Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal pada akhir periode laporan.

Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya perbaikan Alat Fasilitas Pelabuhan dan Docking Kapal diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas alat fasilitas pelabuhan dan operasional kapal, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan.

50. Source of Uncertainty Estimation and Critical Accounting Judgment (Continued)

Provision for The cost of repair tool port facilities and ship docking

The Group assesses its provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking at end of reporting period.

Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of activity tools for port facility and vessel operations, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

51. Informasi Penting Lainnya

Perusahaan

1. Pada tahun 2012, Perusahaan memperoleh Hibah peralatan X-Ray & CCTV pada cabang Banjarmasin, Tanjung Emas - Semarang dan Tanjung Benoa - Bali dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang belum dapat dioperasikan (kecuali X-Ray di Benoa) karena saat ini belum ditetapkan /diserahterimakan kepada Perusahaan. Atas hal tersebut Perusahaan telah mengkonfirmasikan status peralatan tersebut melalui Surat Dirut PT Pelindo III (Persero) kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. 05.0203/09/PIII-2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan berdasarkan Surat tersebut juga telah diadakan rapat oleh Kementerian Perhubungan pada hari Kamis, 13 Desember 2012, dengan membahas status peralatan tersebut.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. UM.002/8/9/DJPL.13 tanggal 14 Februari 2013 perihal pemberitahuan Tindak lanjut For The project For Improvement of Port Security System diinformasikan bahwa pada saat ini sedang dalam pelaksanaan proses pembuatan Berita Acara Serah Terima Operasional (Bastro) di Kementerian Perhubungan yang selanjutnya akan di proses menjadi PMN (Penyertaan Modal Negara) dan selanjutnya akan diserahterimakan kepada perusahaan.

51. Other Important Information

Company

1. In 2012, the Company obtained X-Ray equipment and CCTV in Banjarmasin branch, Tanjung Emas - Semarang and Tanjung Benoa - Bali from General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, which are not yet put into operation because it has not been received by the Company (Except X-Ray at Benoa). The Company has confirmed the status of the equipments through PT Pelindo III's President letter to General Director of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. 05.0203/09/PIII-2012 dated August 31, 2012. Based on that letter, a meeting was also conducted by the Ministry of Transportation on Thursday , December 13, 2012, to discuss the status of the equipments.

Based on the letter from General Directorate of Sea Transport, Ministry of Transportation, No. UM.002/8/9/DJPL.13 dated February 14, 2013 regarding the notification on Follow-up For The Project Improvement of Port Security System informed that it is currently under process of making Operational Handover (Bastro) in the Ministry of Transportation which will be further processed into PMN (State Capital) and will be handed over to the company.

51.Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

2. Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh PT Jasamarga Bali Tol (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sbb :

Pemilik/landowners	Luas/land area	NJOP	Appraisal	Keterangan/Information
PT Pelindo III (darat /land)	522 m ²	1,227,744,000	2,589,120,000	Dalam proses P2T/ <i>In the process P2T</i>
PT Pelindo III (perairan/ waters)	41.490 m ²	-	-	

Kesimpulan Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah HPL, tanggal 31 Oktober 2013 :

- a. Ada persepsi berbeda terhadap mekanisme perhitungan nilai UGR terhadap penguasaan obyek tanah HPL.
- b. Untuk tanah perairan dangkal yang pengelolaannya adalah menjadi tanggung jawab PT Pelindo III Cabang Benoa, saat dipergunakan (ditimbun) tanah tersebut masih merupakan perairan sehingga luasan yang terpakai tidak diperhitungkan nilai UGR nya tetapi dilaporkan luas pemanfaatanya kepada atasan.
- c. Sepakat untuk kepastian dalam mengambil keputusan dan untuk menetapkan pemberian UGR terhadap tanah HPL yang dipakai jalan TPT dan P2T akan meminta petunjuk kepada BPKP.

Kesimpulan rapat pada point 3 tersebut di atas, telah diperoleh jawaban dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2013 No.SR-10/D1/03/2013, perihal Pendapat atas Permasalahan Pengadaan Tanah pada Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Jalan Tol Mandara), yang antara lain menyebutkan "Sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria, dimana pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hak pengelolaan lahan tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah. Pemberian ganti rugi yang dapat diberikan terkait hak pengelolaan lahan sesuai dengan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas pada pasal 43 ayat (2) dan (3) hanya pembayaran ganti rugi atas hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, dan ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan.

51. Other Important Information (Continued)

2. In connection with the Company's use of the HPL land used for the construction of highways Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa PT Jasamarga Bali Tol (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

HPL Land Acquisition Discussion Meeting, dated October 31, 2013 stated that:

- a. There are different perceptions on the UGR value calculation mechanism of the control of HPL ground objects.
- b. For the management of shallow water soil which is the responsibility of PT Pelindo III Branch Benoa decided that due to the condition of the soil that is still watery when used the UGR value has to be ignored.
- c. Agrees to certainty in decision making and establish the UGR granting HPL the use of the land, TPT and PLT to inquire directions from BPKP.

Conclusion of the meeting on point 3, resolution has been obtained from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) dated December 31, 2013 No. SR-10/D1/03/2013, regarding the above Opinion on Issues on Toll Road Land Acquisition Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Toll Road Mandara), which among other things states that "in accordance with the Law No. 5 of 1960 on the basis of the basic rules - Agrarian, of which Article 16 paragraph (1) states that rights are not included in land management rights ground. Compensation can be given related to land management rights in accordance with the regulations from the head of Badan Pertanahan Nasional above in Article 43 paragraph (2) and (3) payment of just compensation for the right to use or the right to build on land management rights, and compensation for buildings and or plants or objects and other objects relating to land in the land use rights or the right to build on land with granted management rights.

51.Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berkenaan dengan diterimanya surat dari BPKP tersebut, manajemen JBT akan segera menindaklanjuti pendapat BPKP tersebut dengan melakukan pembahasan dengan Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (TPT) dan hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham JBT.

3. Rencana Proyek reklamasi di Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali menimbulkan pendapat pro dan kontra karena berbagai pertimbangan serta dampaknya kedepan. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap Rencana Investasi pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan pelaksanaan investasi pengerukan kolam dan turning basin dan Dermaga Selatan – 12 M LWS sebagai bagian dari program pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai *Tourism Hub* dan pengembangan Zona Terminal Energi.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa

Keterlambatan tersebut dikarenakan belum terbitnya perijinan, yang disebabkan oleh :

- a. Rencana Induk Pelabuhan Benoa belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan karena masih menunggu rekomendasi Walikota Denpasar;
- b. Studi Lingkungan (Amdal Kawasan) masih belum dapat diproses lebih lanjut karena masih belum adanya penetapan Rencana Induk Pelabuhan Benoa;
- c. Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) dan Ijin Pembangunan Dermaga belum dapat diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan karena masih menunggu adanya studi lingkungan dari RIP yang telah ditetapkan.

Keterlambatan tersebut menyebabkan potensi :

- a. Tidak tercapainya rencana untuk melayani kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang (LOA 300 m) yang selama ini dilayani dengan berlabuh dan ditransfer menggunakan tender boat karena keterbatasan kedalaman kolam dan *turning basin* (kolam putar);

51. Other Important Information (Continued)

With regards to the letter from the BPK, the JBT's management immediately follow the opinion of BPKP during the discussion over the issue of the Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) and the results were submitted to the Board and Shareholders of the JBT.

3. *The reclamation project plan at Teluk Benoa, Badung District, Bali, brought pros and cons due to various considerations and the future impacts. The situation and condition indirectly have impacts on the Plan of Benoa Port Investment Development carried out by the company, among others;*
 - a. *The delay of the investment for pool dredging and turning basin and South Dermaga – 12 M LWS as part of the Benoa Port Development Program as the Tourism Hub and the development of energy terminal zone.*
 - b. *The development of Curah Cair Dock and Benoa Gas Port*

The delay is due the fact that the permit has not been issued yet which is caused by:

- a. *The Master Plan of Benoa has not been settled by Minister of Transportation because the ministry is waiting for the recommendation of the Mayor of Denpasar.*
- b. *The environmental studies cannot be processed further because Master Plan of Benoa has not been settled yet.*
- c. *The permit letter of dredging work and the permit of dock building have not been issued by the Ministry of Transportation because the ministry is still waiting for the environmental study from the Master Plan of Development which has been settled.*

The delay has caused the following potentials:

- a. *The plan to serve the excursion ships with the capacity of 3,000 passengers (LOA 300 m) is not realized and accomplished.*

51.Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

- b. Terlambatnya program penyediaan fasilitas Terminal Energi sebagai bagian dari Program Nasional untuk konversi energi untuk pembangkit listrik yang sebelumnya menggunakan solar (HSD) menjadi menggunakan gas alam (*natural gas*) yang lebih murah.

Atas kondisi tersebut Manajemen Perusahaan telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi intensif dengan KSOP Benoa dalam pengurusannya rekomendasi Walikota Denpasar terhadap Rencana Induk Pelabuhan Benoa;
- b. Menyusun dokumen studi AMDAL Kawasan yang saat ini sudah dilakukan sidang Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) serta akan menyusun UKL-UPL di BLH Kota Denpasar sebagai percepatan pemenuhan persyaratan lingkungan terhadap pekerjaan pengeringan Turning Basin dan Dermaga Selatan serta pembangunan dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa.
- c. Melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk Surat Ijin Kerja Keruk sesuai Permenhub Nomor: PM 74 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permenhub nomor: PM 52 Tahun 2011 tentang pengeringan dan reklamasi serta untuk perijinan pembangunan Dermaga Curah Cair dan Gas Pelabuhan Benoa.
- d. Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan KLH Nomor: PP.40/1/17/Dp-15 tanggal 28 Januari 2015 perihal Rencana Pengembangan Pelabuhan Benoa, yang menyatakan bahwa sehubungan dengan RIP Benoa yang masih dalam proses penetapan Menhub, dokumen RIP Benoa dapat dijadikan pedoman dalam Studi Lingkungan Hidup (AMDAL) pengembangan Pelabuhan Benoa, sehingga kegiatan pengembangan Pelabuhan Benoa dapat berjalan secara paralel.

Dengan telah dikeluarkannya surat dari Dirjen Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut, pelaksanaan sidang Amdal kawasan yang sebelumnya terhenti dapat dilanjutkan dan direncanakan sidang komisi penilai Amdal pada bulan Februari 2015, sehingga ijin-ijin yang memerlukan dokumen lingkungan dapat pula diupayakan pemenuhannya.

51. Other Important Information (Continued)

- b. The facilities acquisition program of Energy Terminal as part of National Program for Energy Conversion for electrical power plant from HSD /gasoline into cheaper natural gas is delayed.

Considering those conditions, the management of the Company has taken the following steps:

- a. Coordinate intensively with "KSOP" Benoa to deal with the process of the recommendation regarding Master Plan of Benoa from Denpasar Mayor.
- b. Arrange the document of area environmental study which at present is trial and will refer to the Outline of environmental impact analysis reference (KA-ANDAL) and arrange the UKL –UPL at the law firm Denpasar in order to accelerate the environment requirement for the dredging work and turning Basin and South Quay, and the development of Curah Cair and Benoa Gas Energy.
- c. Complete the necessary requirements for the permit letter of dredging work in accordance with the regulations of the ministry of transportation No. PM 74 Year 2014 regarding the change of the regulations of the ministry of transportation No. 52 Year 2011 regarding dredging and reclamation and permit for Curah Cair Dock development and Benoa Post Gas.
- d. There has been an issue of the Letter of Directorate General of Marine Transportation and addressed to the Minister of Life Environment specifically Directorate of Environment Structure No.PP.40/1/17/Dp-15 dated January 28, 2015 regarding Benoa Port Development Plan, which stated that since the master plan of Benoa is still in process in the ministry of transportation, the document of Benoa Master Plan can be used as the guideline in the life environment study (AMDAL) for Benoa Port development so that the development activity of Benoa Port can be carried out simultaneously.

Because of the issue of the letter from the Directorate General of Marine Transportation mentioned above, the trial of AMDAL/ environment impact analysis which was stopped, can be continued and the trial of the AMDAL examiner commission, is scheduled for February 2015 and therefore, all the permits/ licenses requiring environment document can be accomplished.

51.Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan saham dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar 4.461 lembar saham kepada Perusahaan. Transaksi jual beli saham LEI antara PT ADHI dengan Perusahaan, atas penjualan seluruh kepemilikan saham PT ADHI di LEI, yaitu prosentase kepemilikan sebesar 49% kepada Perusahaan.

Perusahaan menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham LEI.

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

Perubahan kedua atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum tanggal 9 Mei 2016. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2016.

Beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. "Tanggal Operasi Komersial Terjadwal" berarti sehubungan dengan Kapasitas Pertama adalah tanggal 1 Februari 2017 dan sehubungan dengan Kapasitas Kedua adalah tanggal 1 Desember 2017.
- b. Perubahan ketentuan yang berkait dengan definisi yang berlaku pada periode BOT dan O&M.
- c. BOT akan berlaku pada saat Jangka Waktu BOT (yaitu sejak Tanggal Siap Untuk Komisioning Unit Pembangkit pertama dan berakhir pada tanggal dimana masing-masing Unit Pembangkit sudah mencapai Tanggal Pengalihan dan sebelum Jangka Waktu O&M).
- d. Jangka Waktu O&M setelah berakhirnya Jangka Waktu BOT dan Jasa O&M akan berlaku pada saat Jangka Waktu O&M yaitu setelah Unit Pembangkit pertama melewati Tanggal Pengalihan dan akan berakhir pada saat Unit Pembangkit mencapai 119.999 jam operasi, untuk masing-masing Unit Pembangkit.
- e. Mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tarif O&M dan Jaminan Pembayaran.
- f. Mengubah jadwal tanggal operasi komersial, untuk Engine No.1 dan No. 2 pada 1 Februari 2017, Engine No.3 dan No. 4 pada 1 Desember 2017.

51. Other Important Information (Continued)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

Based on the Deed of Extraordinary Shareholders PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya, Shareholders decided on the approval of transfers of shares from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,461 shares to the Company. Sale and purchase transaction shares of LEI between PT ADHI and the Company, on the sale of the entire shareholding PT ADHI in LEI, that is the percentage of ownership by 49% to the Company.

The Company received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification behalf changes of the LEI's shareholders.

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

Second amendment of these agreement based on Amendment dated May 9, 2016. Those changes effective on June 1, 2016.

Those changes as follows:

- a. *"Scheduled Commercial Operation Date" means with respect to the First Capacity is February 1, 2017 and with respect to the Second Capacity is December 1, 2017.*
- b. *Amend provisions related to the applicable definitions for the BOT and O&M period.*
- c. *BOT shall be valid during the BOT Period (which is the period commencing from the Ready for Commissioning Date of the first Generating Unit and concluding on the date when each Generating Unit has reached Transfer Date and prior to the O&M Period).*
- d. *The O&M Period upon the expiry of BOT Period and the O&M Service shall commence on the O&M Period, which is when the first Generating Unit passed the Transfer Date and shall end when 119,999 operating hours is reached, for the each of Generating Unit.*
- e. *Amend all provisions related to O&M Tariff and Security of Payment.*
- f. *Changes of scheduled commercial date, of Engine No.1 and No.2 on February 1, 2017, and Engine No.3 and No.4 on December 1, 2017.*

52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Melalui Surat Nomor PJ.01/01/P.III.2017 tanggal 24 Januari 2017 Direktur Komersial dan Operasional telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak perihal penyampaian Biaya penugasan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera, dan disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan mandat penugasan penyingkiran kerangka KMP Wihan Sejahtera dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung perak Surabaya;
 - b) Penugasan pada butir a tersebut diatas menimbulkan konsekuensi timbulnya biaya untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.58.678.059138 sudah termasuk pajak yang dibayarkan sehingga sebagai sebuah entitas BUMN PT Pelindo III (Persero) wajib mempertanggungjawabkan atas biaya yang telah dikeluarkan;
 - c) Berkaitan dengan biaya yang timbul sebagaimana butir b di atas kiranya dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh PT Pelindo III (Persero) sehingga biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan tidak menimbulkan implikasi hukum dimasa mendatang;
 - d) Terhadap pelaksanaan kompensasi atas konsesi sebagaimana butir c di atas akan dilaksanakan dengan Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- b. Sesuai dengan Nota Dinas Nomer: ND.13/DITKEU/II-2017 tanggal 2 februari 2017 dari Direktur Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Komersial dan Operasional perihal biaya penyingkiran kerangka kapal KM Wihan Sejahtera dan muatannya realisasi Biaya serta hasil penjualan sisa kerangka kapal termasuk biaya yang terjadi atas penjualan.
- c. Melalui Surat Tagihan Nomor : PJ.01/03/P.III-2017 tanggal 23 Februari 2017, PT Pelindo III (Persero) telah menyampaikan tagihan biaya penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp52.267.802 termasuk Pajak yang dibayarkan.
- d. PT Pelindo III (Persero) telah memperoleh Surat Konfirmasi Biaya Penugasan Penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai Surat Nomor: KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 Tanggal 27 Pebruari 2017 dimana disampaikan hal-hal sebagai berikut :

52. Events After The Reporting Period

- a. Through Letter No. PJ.01 / 01 / P.III.2017 dated January 24, 2017 Director of Commercial and Operations has sent a letter to the Head Office of the Main Kesyahbandaran Tanjung Perak regarding the delivery of the assignment fee exclusion of frame KMP Wihan Sejah ship, and delivered some of the following :
 - a) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been carrying out the mandate of the assignment exclusion Wihan Sejah KMP framework of the Head Office of the Main Kesyahbandaran silver Tanjung Surabaya;
 - b) Assignment in item a above consequences accrue costs for such work amounting to Rp58,678,059,138 has included Taxes paid so as an entity owned mining company PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) is obliged to account for costs that have been incurred;
 - c) Related to the costs incurred sebagaimana item d above would be compensated by concessions received by PT Pelindo III (Persero) so that the cost of implementation of the work can be accounted to the state and does not give rise to legal implications in the future;
 - d) On the implementation of compensation for concessions as item c above will be implemented by the Port Authority Main Tanjung Perak.
- b. In accordance with the Memorandum of the Department of Number: ND.13/DITKEU/II-2017 dated February 2, 2017 of the Director of Finance addressed to the Director of Commercial and Operations regarding exclusion of costs framework KM Wihan Sejahtera Ships and cargo fees realization and the sale.:
- c. Through a Collection Letter No. PJ.01 / 03 / P.III-2017 February 23, 2017, PT Pelindo III (Persero) has submitted a bill to the exclusion of assignment Ship frame KMP Wihan Sejahtera and cargo to the Head Office of the Main Kesyahbandaran Tanjung Perak Rp.52.267.802 including taxes paid.
- d. PT Pelindo III (Persero) has obtained the Confirmation Letter Assignment Removal Cost Frame ship KMP Wihan Prosperous and cargo from the Head Office of Tanjung Perak Surabaya Top Kesyahbandaran corresponding letter Number KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 February 27, 2017 which submitted the following matters:

**52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

1. Tagihan atas biaya yang telah dikeluarkan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terkait dengan penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera, yang ditagihkan kepada pemerintah akan menjadi utang pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Perhubungan laut kementerian Perhubungan;
2. Terhadap usulan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terkait dengan biaya penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera agar dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), akan disampaikan usulannya kepada kementerian Perhubungan.

Entitas Anak PT Teluk Lamong (TTL)

- a. LEI menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham.
- b. LEI menerima Surat No. PU.02/1/P.III-2017 tanggal 11 Januari 2017 dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) perihal Persetujuan Serah Kelola Kawasan Penyedia Tenaga Listrik guna Pelepasan Wilayah Usaha (PWU).

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Iaik Hygiene Sanitasi Jasa Boga kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan surat No. Um.5.02/1/7/PT.PCN-2017 tanggal 31 Januari 2017.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

BJTI melakukan pembaharuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman kepada PT BKMS dengan surat perjanjian No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 tanggal 3 Januari 2017. Perjanjian tersebut memperbarui jangka waktu perjanjian dari sebelumnya yang jatuh tempo pada 30 Desember 2016 menjadi 30 Desember 2017.

Entitas Anak BJT

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Consultant Dodik & Partners, yang bertindak dan atas nama Tergugat terkait sengketa tanah Labuan Bajo, telah melakukan upaya banding dengan Akta Permohonan Banding No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 9 Januari 2017. Dalam surat Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No: 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 24 Januari 2017, terbanding (Ir. Hugeng Syatriadi) diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 hari. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi, proses banding masih dalam proses.

**52. Events After The Reporting Period
(Continued)**

1. The bill for costs already incurred by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) associated with the removal of the ship frame (Salvage) KMP Wihan Sejahtera, which will be billed to the government and the government debt will be coordinated by the Directorate of Sea Transportation Ministry of Transportation;
2. On the proposal of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) related to the removal cost of ship frame (Salvage) KMP Wihan Sejahtera to be compensated by concessions received by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), will be submitted proposals to the Ministry of Transportation.

Subsidiary PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

- a. LEI received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification behalf changes of the Company's shareholders.
- b. LEI received Letter No. PU.02/1/P.III-2017 dated January 11, 2017 from PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) regarding of Approval of Manage and Transfer Region of Power Provider to Release Business Area.

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN applying for a Certificate of Eligible Sanitation Hygiene Catering to Public Health Service of Surabaya by the letter No. Um.5.02/1/7/PT.PCN-2017 dated January 31, 2017

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

BJTI renewed Loan Facility Agreement with PT BKMS with the letter agreement No. KKS.01-02/I/BJTI-2017 dated January 3, 2017. The agreement was renewed period of the previous agreement, which matures on December 30, 2016 become December 30, 2017.

Subsidiary BJT

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Dodik & Partners Consultant, who act on behalf of the Defendant related to land disputes Labuan Bajo, has made an appeal to the Appeal Act No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 9, 2017. In a letter Relaas Checking Case Files Notification No. 14 /PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 24, 2017, compare (Ir. Hugeng Syatriadi) given the opportunity to study the case files within 14 days. As of the date of the financial statements is authorized, the appeals process is still in progress.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

**52. Events After The Reporting Period
(Continued)**

PT Pelindo Marine Service

Pada tanggal 21 Februari 2017, telah terjadi Rapat Umum sebagaimana tertera dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Para Pemagang Saham) No.13/RUPSLB/KP.III/II-2017. Rapat Sirkuler Pemegang Saham tersebut menyatakan bahwa terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMS, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PMS adalah sebagai berikut:

PT Pelindo Marine Service

In February 21, 2017 there has been a general meeting as stated in Circularly Decission of The Shareholders outside The General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the Shareholders) No.13/RUPDSLB/KP.III/II-2017. The Circular Decision of The Sharholders stated that there has been changes in the composition of Boards of Commisioners and Bords of Directores, so the composition of Boards of Commisioners and Boards of Directores are as follows:

2017

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Mohammad Iqbal
Y. Teguh Pratikno, MM
Mohammad Rokib

Boards of Commissioners:

President Commisioner
Commissioner
Commissioner

Dewan Direksi :

Direktur Operasi
Direktur Komersial,
Keuangan dan SDM
Direktur Teknik dan Umum

Wahyu Agung Prihartanto
Denny Hermanto
Harry Poerwanto

Board of Directors :

Director of Operation
Director of Commercial,
Finance, and Human Resource
Director of Engineering and Public

Entitas Anak PMS

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS)

1. Pada tanggal 29 November 2016, PT APBS melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana tertera dalam Akta No.15 tanggal 28 Desember 2016 dibuat oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH, notaris di Surabaya. RUPSLB tersebut menyetujui perubahan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perubahan kepemilikan pemegang saham di PT APBS.

Berdasarkan akta tersebut, disebutkan bahwa Direksi PT APBS akan dipimpin oleh 3 anggota yang sebelumnya berjumlah 2 anggota sedangkan Dewan Komisaris akan di pimpin oleh 4 anggota yang sebelumnya berjumlah 3 anggota, dengan komposisi sebagai berikut:

Subsidiary PMS

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (PT APBS)

1. The General Meeting Extraordinary Shareholders (EGMS) already held on November 29, 2016, as stated in Notarial Deed No. 15 dated December 28, 2016 made by Stephanus R. Agus Purwanto, SH, notary in Surabaya. The Extraordinary General Meeting approved the changes of Board of Commissioners and Directors as well as the change of ownership of shares in PT APBS.

Based on the deed, the Board of Directors of PT APBS will be led by 3 members who previously led by 2 members and the Board of Commisioners will be led by 4 members who previously led by 3, and the compositions are as follows:

2016

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

Hendiek Eko Suntoro
Marinus Pieter Meijers
-
Arief Sugiarto
Hari Setyobudi

2015

Board of Commissioners

President Commisioner
Commissioners
Commisioners
Commisioners
Independent Commisioners

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Bambang Suharto
Petrus Johannes Gerardus Van Der Hulst
Rio Rahmat Bramantio

Directors

President Director
Director
Director

**52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

**52. Events After The Reporting Period
(Continued)**

Kepemilikan saham berubah karena terdapat kesepakatan penjualan saham Van Oord DMC BV kepada PT Gerbang Samudera Utama sebesar 50%, dengan susunan pemegang saham PT APBS menjadi:

Nama Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham/ <i>Shares</i>	Prosentase Kepemilikan/ <i>Shareholders Procentage</i>	Jumlah Nominal/ <i>Amount</i>
PT Pelindo Marine Service	112,500,000	60%	Rp 112,500,000
Van Oord Dredging And Marine Contractor bv	37,500,000	20%	Rp 37,500,000
PT Gerbang Samudera Utama	37,500,000	20%	Rp 37,500,000
Jumlah/ Total	187,500,000	100%	Rp 187,500,000

Pada tanggal 25 Januari 2017, PT APBS menerima surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03-0032100 yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

2. Pada tanggal 1 Februari 2017, PT APBS menerima surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DPJ Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan No SP2DK-453/WPJ.11./KP.03/2017 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.

Pada tanggal 13 Februari 2017, PT APBS mengirimkan surat No KU.05/03/APBS-2017 perihal Klarifikasi Permintaan penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan kepada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan.

Pada tanggal 14 Februari 2017, PT APBS menerima surat No. KU.05/01/PMS.2017 perihal rencana penerapan PPh Badan Tahun 2016 dari PT Pelindo Marine Service, pemegang saham. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT Pelindo Marine Service meminta agar Perusahaan menyampaikan tanggapan kepada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan bahwa dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2016 tetap menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Share of ownership will be changed because theres an agreement to sale 50% of Van Oord DMC BV shares to PT Gerbang Samudera Utama, and PT APBS shares composition become:

Nama Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham/ <i>Shares</i>	Prosentase Kepemilikan/ <i>Shareholders Procentage</i>	Jumlah Nominal/ <i>Amount</i>
PT Pelindo Marine Service	112,500,000	60%	Rp 112,500,000
Van Oord Dredging And Marine Contractor bv	37,500,000	20%	Rp 37,500,000
PT Gerbang Samudera Utama	37,500,000	20%	Rp 37,500,000
Jumlah/ Total	187,500,000	100%	Rp 187,500,000

On January 25, 2017, PT APBS received a letter from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032100 stated that the changes of Article Association has been received and recorded in the Legal Entity Administration System.

2. On February 1, 2017, PT APBS received a letter from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Directorate General of Taxes Office DPJ Region I East Java Surabaya Tax Service Office Pabean Cantikan Pratama No.SP2DK-453/WPJ.11./KP.03/2017 concerning Demand Explanation on Data and / or Description.

On February 13, 2017, PT APBS sent a letter No.KU.05/03/APBS-2017 about Clarification Requests explanation of Data and / or Description to the KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. In the letter, the Company submitted the following matters:

On February 14, 2017, PT APBS received a letter No. KU.05/01/PMS.2017 regarding the implementation plan for 2016 corporate income tax from PT Pelindo Marine Service, the shareholders. The letter stated that PT Pelindo Marine Service requested that the Company submit responses to KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan that in the calculation of income tax 2016, the Company keep using the general rate of article 17 of Income Tax Law No. 36 of 2008.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

3. Pada tanggal 8 Februari 2017, PT APBS menerima surat dari PT Pelabuhan Indonesia III No. KU.0102/02/P.III-2017 tentang Konfirmasi Mekanisme Pembebanan Maintenance Dredging disebutkan bahwa Pembebanan nilai pemeliharaan alur yang tertuang dalam berita acara penyelesaian pekerjaan agar tetap sesuai dengan perjanjian kerjasama pengoperasian alur pelayaran barat surabaya antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Alur Barat Pelayaran Surabaya dan sesuai dengan ISAK 22 tentang perjanjian konsesi jasa, pengungkapan dimana menyebutkan bahwa "Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan."

Sehingga mekanisme pembebanan pemeliharaan alur menjadi:

- a. Pemeliharaan alur tahap 1 selesai pada tanggal 29 Desember 2015, maka pembebanan dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2016;
- b. Pemeliharaan alur tahap 2 selesai pada 15 Desember 2016, pembebanan dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2017.
4. Berdasarkan akta No 07 tanggal 23 Pebruari 2017 dari Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH, notaris di Surabaya, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi, disebutkan bahwa susunan Direksi adalah sebagai berikut:

**52. Events After The Reporting Period
(Continued)**

3. On February 8, 2017, PT APBS received letter from PT Pelabuhan Indonesia III No KU.0102/02/P.III-2017 about Confirmation of maintenance Dredging Recognition Mechanism stated that the costing of maintenance dredging value shoud be distributed gradually according to the completion of maintenance dredging work which stated in the completion certificate to comply with the cooperation agreement for operating the Surabaya West Acces Channel between PT Pelaabuhan Indonesia III (Persero) and PT Alur Barat Palayaran Surabaya and ISAK 22 abouut whiich stated "Amortization is charge from the moment the concession asset is ready to used".

Therefore the mechanism of maintenance dredging costing should be done as follows:

- a. Maintenance dredging phase 1 completed on December 29, 2015 and the costing is determine from January 2016;
- b. Maintenance dredging phase 2 completed on December 15 2016, and the costing is determine from January 2017.
4. Based on the deed dated No. 07 dated on Pebruari 23, 2017 from Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH, notary in Surabaya, about the dismissal and appointment the member of boards of Directors, stated that bord of Directores are as follows:

2017

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Bambang Suharto
Mark Van Der Hoeven
Rio Rakhmat Bramantio

Directors

President Director
Director
Director

Pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Pebruari 2017 No AHU-AH.01.03-0085613.

Notification in the change of composition on the Board of Directors has been accepted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on 24 February 2017 No. AHU-AH.01.03-0085613.

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL)

1. Berdasarkan Notulen Rapat tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 6 Januari 2017, PT Indonesia Power mengadakan rapat dengan PT PEL untuk membahas usulan Amandemen Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT PEL.
2. Pada tanggal 21 Pebruari 2017, PT PEL mengirimkan surat No. PU.03/02/PEL-2017 kepada PT Indonesia Power perihal Tanggungan Biaya Pemakaian BBM Kapal Triputra dan Pemakaian Listrik FRU.

PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL)

1. Based on the Minutes of Meeting dated January 5, 2017 until January 6, 2017, PT Indonesia Power held a meeting with PT PEL to discuss the proposed amendment of the letter of agreement between PT Indonesia Power and PT PEL.
2. On February 21, 2017, PT PEL sent a letter No. PU.03/02/PEL-2017 to PT Indonesia Power regarding the Dependents Usage Fee Ship Fuel and Electricity Consumption Triputra FRU.

**52. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

**52. Events After The Reporting Period
(Continued)**

PT Pelindo Daya Sejahtera

Pada tanggal 21 Februari 2017, telah terjadi Rapat Umum sebagaimana tertera dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham) No. 12/RUPSLB/KP.III/II-2017. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tersebut menyatakan bahwa terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

PT Pelindo Daya Sejahtera

In February 21, 2017 there has been a general meeting as stated in Circularly Decission of The Shareholders outside The General Meeting of Shareholders (Circular Decision of the Shareholders) No. 12/RUPSLB/KP.III/II-2017. The Circular Decision of The Sharholders stated that there has been changes in the composition of Boards of Commissioners, so the composition of Boards of Commissioners are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

2017

U. Saefudin Noer
Edi Priyanto

Boards of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Maret 2017.

Circular Decision of the Shareholders is effective as of March 1, 2017

53. Transaksi Nonkas

53. Non-Cash Transactions

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut :

As of the period ended December 31, 2016 and 2015, there are several accounts in the financial statement that are recognized but does not affect cash flows. The accounts are as follows :

	2016 Rp	2015 Rp	2014 Rp	
Tambahan Aset Tetap				<i>Additional Fixed Assets</i>
Melalui Utang	399,897,374	347,671,166	282,893,231	<i>by Loans</i>
Tambahan Aset Takberwujud				<i>Additional Intangible Assets</i>
Melalui Utang	156,579,613	196,426,419	179,945,911	<i>by Loans</i>
Tambahan Aset Tetap				<i>Additional Fixed Assets</i>
Melalui Uang Muka Kontraktor	141,224,199	93,333,526	-	<i>by Contractor Advances</i>
Tambahan Aset Takberwujud				<i>Additional Intangible Assets</i>
Melalui Uang Muka Kontraktor	-	750,181,251	315,387,650	<i>by Contractor Advances</i>
Total	697,701,186	1,387,612,362	778,226,792	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

54. Reklasifikasi

54. Reclassification

31 Desember 2015/ December 31, 2015			
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified
	Rp	Rp	Rp
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Bagian Lancar Atas			
Liabilitas Jangka Panjang :			
Utang Bank	-	254,042,959	254,042,959
Liabilitas Imbalan Kerja	-	44,883,597	44,883,597
Total Liabilitas Jangka Pendek	2,862,740,073	298,926,556	3,161,666,629
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank	968,399,363	(254,042,959)	714,356,404
Liabilitas Imbalan Kerja	241,989,449	(44,883,597)	197,105,853
Total Liabilitas Jangka Panjang	8,402,497,279	(298,926,555)	8,103,570,724
TOTAL LIABILITAS	11,265,237,352	-	11,265,237,353
Total Ekuitas	7,705,370,085	-	7,705,370,085
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,970,607,437	-	18,970,607,437
31 Desember 2014/ December 31, 2014			
	Sebelumnya Reklasifikasi/ Before Reclassified	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Reklasifikasi / As Reclassified
	Rp	Rp	Rp
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
ASET LANCAR			
Piutang Lain - Lain - Berelasi	286,823,241	3,500,000	290,323,241
Total Aset Lancar	6,495,477,894	3,500,000	6,498,977,894
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Lain - Lain - Berelasi	17,500,000	(3,500,000)	14,000,000
Total Aset Tidak Lancar	10,126,030,466	(3,500,000)	10,122,530,466
TOTAL ASET	16,621,508,360	-	16,621,508,360
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Bagian Lancar Atas			
Liabilitas Jangka Panjang :			
Utang Bank	-	156,529,915	156,529,915
Liabilitas Imbalan Kerja	-	52,007,912	52,007,912
Total Liabilitas Jangka Pendek	2,168,023,846	208,537,827	2,376,561,673
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank	607,509,504	(156,529,915)	450,979,589
Liabilitas Imbalan Kerja	267,197,233	(52,007,912)	215,189,320
Total Liabilitas Jangka Panjang	7,317,125,502	(208,537,827)	7,108,587,675
TOTAL LIABILITAS	9,485,149,348	-	9,485,149,348
Total Ekuitas	7,136,359,013	-	7,136,359,013
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,621,508,360	-	16,621,508,360

55. Standar Akuntansi Baru

Berikut ini adalah pengesahan amandemen dan penyesuaian atas ISAK dan PSAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) di tahun 2015 dan 2016, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

1. Amandemen, interpretasi dan standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
 - Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan;
 - ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13 :Properti Investasi;
 - PSAK No. 3 (Revisi 2016): Laporan Keuangan Interim;
 - PSAK No. 24 (Revisi 2016): Imbalan Kerja;
 - PSAK No. 58 (Revisi 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
 - PSAK No. 60 (Revisi 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
2. Amandemen dan standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:
 - Amandemen PSAK No. 16: Agrikultur Tanaman Produksi;
 - PSAK No. 69: Agrikultur;
 - Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas
 - Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dan penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

56.Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 28 Februari 2017.

55. New Accounting Standards

The following are ratification of amendments and improvements of ISAK and PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) in 2015 and 2016, but not yet effective for the year started on or after January 1, 2016, are as follows:

1. *Amendment, the following interpretations and standards effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with earlier application permitted, are as follows:*
 - *Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements;*
 - *ISAK No. 31: Interpretation of the Scope of PSAK No. 13: Investment Property;*
 - *PSAK No. 3 (Adjustment 2016): Interim Financial Reporting;*
 - *PSAK No. 24 (Adjustment 2016): Employee Benefits;*
 - *PSAK No. 58 (Adjustment 2016): Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
 - *PSAK No. 60 (Adjustment 2016): Financial Instruments: Disclosures.*
2. *Amendments and following standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with earlier application permitted, are as follows:*
 - *Amendments to PSAK No. 16: Agriculture Crop Production;*
 - *PSAK No. 69: Agriculture;*
 - *Amendments to PSAK No. 2: Statement of Cash Flows;*
 - *Amendments to PSAK 46: Income Taxes.*

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements.

56. Responsibility and Authorization for Issuance of the Financial Statements

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on February 28, 2017.